

ISBN : 979-3566-54-X

DIVERSIFIKASI USAHA RUMAH TANGGA DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

**Handewi P. Saliem
Sumaryanto
Gatoet S. Hardono
Henny Mayrowani
Tri Bastuti P
Yuni Marisa
Deri Hidayat**

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>



**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

2006

DIVERSIFIKASI USAHA RUMAH TANGGA DALAM Mendukung KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Handewi P. Saliem
Sumaryanto
Gatoet S. Hardono
Henny Mayrowani
Tri Bastuti P.
Yuni Marisa
Deri Hidayat

**PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
2006**

KATA PENGANTAR

Buku *Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia* disusun dari salah satu laporan hasil penelitian Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) TA. 2005 yang format dan sistematika penulisannya sudah disesuaikan sehingga memudahkan bagi pembaca untuk memahami substansi yang terkandung dalam buku ini. Laporan tersebut merupakan laporan penelitian terbaik pertama dari 13 laporan hasil penelitian PSEKP. Penilaian dilakukan oleh tim yang terdiri dari 3 orang staf pengajar jurusan Sosek, Faperta-IPB dan seorang peneliti senior PSEKP. Sebagai apresiasi dan untuk menyebarkanluaskannya kepada pihak pengguna, maka PSEKP pada TA. 2006 menerbitkannya dalam bentuk buku ini. Saya menyampaikan selamat untuk peneliti dan semoga lebih giat lagi meningkatkan prestasinya.

Di Indonesia, peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional berimplikasi bahwa pengkajian ketahanan pangan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan menjadi penting. Ketersediaan pangan di tingkat nasional yang cukup tidak menjamin adanya ketahanan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.

Ketahanan pangan dan masalah kemiskinan di suatu wilayah mempunyai sifat multidimensional yang ditentukan oleh berbagai faktor ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta melibatkan berbagai sektor. Mengacu pada karakteristik yang beragam tersebut, maka pemecahan masalah ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan wilayah harus bersifat holistik. Diversifikasi usaha rumah tangga diduga merupakan salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dewan Editor dan semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat dipakai sebagai salah satu rujukan bagi pengguna dalam memantapkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan kedepan.

Bogor, September 2006
Kepala Pusat,

Dr. Tahlim Sudaryanto
NIP. 080 035 289

KATA PENGANTAR DEWAN EDITOR

Kami menyambut baik inisiatif Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) memberikan apresiasi menerbitkan judul penelitian terbaiknya dalam bentuk buku ini. Langkah ini sangat baik karena disamping memacu peneliti untuk meningkatkan kualitas hasil penelitiannya, juga sekaligus sebagai salah satu untuk mempercepat penyampaian hasil penelitian yang telah dilakukan PSEKP kepada pengguna.

Sesuai Surat Keputusan Kelapa Badan Litbang Pertanian No. 27/Kpts/OT.160/J/2/2006, Dewan Editor dibentuk untuk membantu menerbitkan buku ini. Kontribusi Dewan Editor dalam penerbitan buku ini hanya sebatas dalam penyusunan sistematika penampilan dan bahasa sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hal substansi, Dewan Editor hanya memberi saran kepada penulis buku yang tidak mesti mereka terima dan laksanakan. Semua apresiasi yang mungkin patut diberikan dari buku ini sepenuhnya menjadi hak para penulisnya.

Dewan Editor mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian yang telah memberikan kepercayaan untuk mengedit buku ini. Dewan Editor sangat yakin tampilan akhir buku ini masih jauh dari sempurna, namun inilah hasil akhir optimal yang dapat dilakukan. Kepada para penulis Dewan Editor menyampaikan mohon maaf bila telah merepotkan atau mungkin terlalu lancang dalam melakukan editan atas naskah awal buku ini. Semua itu dilakukan dengan niat baik yang mungkin berguna bagi para penulis juga.

Demikian, semoga buku ini dapat memberi tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pengguna, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan strategi dan langkah operasional pembangunan pertanian ke depan.

Dewan Editor

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
KATA PENGANTAR DEWAN EDITOR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. PENGARUH PERUBAHAN LINGSTRAT TERHADAP STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH	4
2.1. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Nasional.....	4
2.1.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja.....	4
2.1.2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja.....	5
2.1.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi.....	8
2.2. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi di Provinsi.....	11
2.2.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja.....	11
2.2.2. Perkembangan Sektor Perekonomian.....	12
2.2.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi.....	18
2.3. Demografi Pertanian dan Industri Pedesaan.....	21
2.3.1. Penduduk dan Mata Pencaharian	22
2.3.2. Kinerja Pertanian	26
2.3.3. Sistem dan Perkembangan Tingkat Upah.....	29
2.3.4. Kinerja Industri Pedesaan.....	32
III. DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA	41
3.1. Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga	41
3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga	51
3.3. Diversifikasi Usaha Rumah Tangga.....	21
IV. DIVERSIFIKASI USAHA, KETAHANAN PANGAN, DAN KEMISKINAN	57
4.1. Indikasi Kemiskinan Rumah Tangga.....	57
4.2. Kinerja Ketahanan Pangan Rumah Tangga.....	61

4.3. Faktor Determinan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga	64
4.4. Peluang Tidak Miskin dan Ketergantungan Terhadap Sektor Pertanian.....	69
V. DIVERSIFIKASI USAHA PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN DI ENAM DESA CONTOH.....	72
5.1. Karakteristik Rumah Tangga	72
5.2. Struktur Pendapatan Rumah Tangga.....	75
5.3. Kinerja Pertanian dan Dinamika Pola Tanam	80
5.4. Faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Usaha Pertanian	87
5.5. Ragam Pendapatan dan Dinamika Diversifikasi Usaha	89
5.6. Pola Pengeluaran Pangan.....	94
5.7. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Desa-desa Contoh	102
VI. PROSPEK PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI DIVERSIFIKASI USAHA.....	106
VII. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	111
7.1. Rangkuman.....	111
7.2. Implikasi Kebijakan.....	115
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN METODE PENELITIAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, 1961-2000	4
2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi, 1980-2000.....	5
8. Perkembangan Distribusi Nilai Tambah Bruto Menurut Sektor Perekonomian, 1980-2000.....	6
9. Perkembangan Distribusi Total Gaji dan Upah Menurut Sektor Perekonomian, 1980-2000.....	7
5. Perkembangan Tingkat Gaji dan Upah Sektoral per Pekerja, 1980-2000.....	8
6. Perkembangan Diversitas Alokasi Output Pada Permintaan Antara (<i>intermediate input</i>) Tahun 1980, 1990 dan 2000...	9
7. Proporsi Alokasi Output dari Sektor Pertanian.....	10
8. Persentase Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 1995 - 2003.....	11
9. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Provinsi Penelitian Menurut Sumber Penghasilan Utama, Tahun 2003.....	12
10. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Contoh, 2003.....	12
11. Struktur PDRB Jawa Timur Tahun 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993.....	13
12. Struktur PDRB Sulawesi Selatan 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993.....	14
13. Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993.....	14
14. PDRB Kabupaten Kediri dan Malang Atas Harga Konstan 1993.....	15
15. PDRB Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang Atas Harga Konstan 1993.....	16

16.	PDRB Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur Atas Harga Konstan 1993	17
17.	Rumah Tangga Pertanian di Tiga Provinsi Contoh Menurut Sumber Penghasilan Utama, 2003.....	18
18.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, 2003	21
19.	Dinamika Kependudukan di Lokasi Penelitian Menurut Agroekosistem, Tahun 1999 dan 2003	22
20.	Keragaan Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Agroekosistem di Lokasi Penelitian, 2004	24
21.	Dinamika Distribusi Matapencaharian Utama Penduduk Menurut Agroekosistem di Lokasi Penelitian, 1999 dan 2003	25
22.	Kinerja Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Agroekosistem Sawah, 2003	27
23.	Perkembangan Sistem dan Nilai Upah Pertanian, di Desa Contoh Menurut Agroekosistem	30
24.	Kinerja Industri Pedesaan Menurut Skala Berdasarkan Tenaga Kerja di Desa Contoh, Tahun 2003	33
25.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia, 1996-2002	42
26.	Perubahan Struktur Pendapatan di Daerah Kota dan Desa Provinsi Contoh, 1996-2002	43
27.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Indonesia, 1996-2002	45
28.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Jawa Timur, 1996-2002.....	46
29.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002	47
30.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Mata-pencaharian Utama KK di Sulawesi Selatan, 1996-2002 ...	48
31.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas	

Pendapatan di Indonesia, 1996-2002.....	50
32. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Jawa Timur, 1996-2002	50
33. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002	51
34. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Sulawesi Selatan, 1996-2002.....	51
35. Indeks Gini Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Daerah, 1996 dan 2002	52
36. Indeks Gini Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Pekerjaan Utama KK, 1996 dan 2002	53
37. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	55
38. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK	56
39. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Indonesia Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002...	58
40. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	59
41. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	60
42. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002	60
43. Rataan Konsumsi Energi (Kkal) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Indonesia, 1996-2002	61
44. Konsumsi Energi (Kkal) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002	62
45. Rataan Konsumsi Protein (g/kapita/hari) Menurut	

Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Indonesia, 1996-2002	63
46. Rataan Konsumsi Protein (g/kapita/hari) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan, 1996-2002	64
47. Faktor yang Mempengaruhi Peluang Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Indonesia, 2002	65
48. Faktor yang Mempengaruhi Peluang Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Nusa Tenggara Barat, 2002	67
49. Determinan Faktor Peluang Rumah tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Indonesia, 2002	70
50. Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, 2002	71
51. Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, 2002	71
52. Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Sulawesi Selatan, 2002	71
53. Karakteristik Rumah Tangga Contoh, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, 2005	72
54. Rataan Pemilikan dan Penguasaan Lahan di Lokasi Contoh Menurut Agroekosistem, 2005.....	73
55. Keragaan Pemilikan Aset Ternak yang Diusahakan Responden Menurut Lokasi, 2005	74
56. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sektor di Lokasi Penelitian, 2005	75
57. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh, Nusa Tenggara Barat (Kota + Desa), 1996-2002	77
58. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) di Kabupaten Contoh, Sulawesi Selatan (Kota + Desa), 1996-2002	78
59. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) di Kabupaten Contoh, Jawa Timur (Kota + Desa),	

1996-2002	79
60. Keragaan Pola Tanam di Desa Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Lahan Kering Berbasis Tanaman Hortikultura) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir	81
61. Keragaan Pola Tanam di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (Lahan Kering Berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir	83
62. Keragaan Pola Tanam di Desa Pincara, Pinrang, Sulawesi Selatan (Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan Kakao) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir	84
63. Keragaan Pola Tanam di Desa Dua Limpoe, Wajo, Sulawesi Selatan (Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahannya Sepuluh Tahun Terakhir	85
64. Keragaan Pola Tanam di Desa Pujon, Malang, Jawa Timur (Paternakan Sapi Perah) dan Perubahan Selama Sepuluh Tahun Terakhir	86
65. Keragaan Pola Tanam di Desa Pare, Kediri, Jawa Timur (Lahan Sawah berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahan Selama Sepuluh Tahun Terakhir	87
66. Alasan Petani Melakukan Diversifikasi Usaha Pertanian (%)	88
67. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) ..	90
68. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002) ..	91
69. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)	92
70. Keragaan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dan Alasan Responden, Tahun 2005	93
71. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK	

(1996-2002)	94
72. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)	96
73. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)	98
74. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)	99
75. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)	100
76. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perubahan Indeks Diversitas Kesempatan Kerja, Gaji dan Upah serta Nilai Tambah Bruto dalam Sistem Perekonomian Nasional	10
2. Struktur Rumah tangga Pertanian Menurut Kelompok Pendapatan.....	20
3. Struktur Rumah tangga Pertanian Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Contoh	21

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel Lampiran	Halaman
1. Sebaran Lokasi Penelitian, Agroekosistem (AES), dan Jumlah Responden	138
2. Daftar Nama Desa-desa Penelitian Menurut Provinsi, Kabupaten dan Tipe Agroekosistem, Tahun 2005	138
3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Menurut Tujuan Analisis, 2005	145
4. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota Provinsi Contoh, 1996-2000	146
5. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa Provinsi Contoh, 1996-2000	146
6. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Contoh, 2002	147
7. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Indonesia, 1996-2002	158
8. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Indonesia, 1996-2002	158
9. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2002	149
10. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2002	149
11. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di NTB, 1996-2002	150
12. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di NTB, 1996-2002	150
13. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002	151

14.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002	151
15.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Indonesia, 1996-2002	152
16.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Indonesia, 1996-2002	152
17.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2000	152
18.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2000	153
19.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002	153
20.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002	153
21.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002	154
22.	Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002	154
23.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002	155
24.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002	156
25.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002	156
26.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002	157
27.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002	157

28.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2002	158
29.	Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2002.....	158
30.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002	159
31.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002	159
32.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002	160
33.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002	160
34.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002	161
35.	Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002	161
36.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	162
37.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	162
38.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	163
39.	Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di	

Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	163
40. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	164
41. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	164
42. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	165
43. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	165
44. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	166
45. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	166
46. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	167
47. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002.....	167

I. PENDAHULUAN

Peningkatan ketahanan pangan merupakan salah satu program utama nasional sejak satu dasawarsa yang lalu. Hal ini terkait dengan komitmen negara sebagai salah satu penanda tangan kesepakatan dalam MDGs (*Millennium Development Goals*) yang sejalan dengan Deklarasi Roma dalam *World Food Summit* tahun 1996 yang menegaskan bahwa dari 800 juta penduduk dunia yang kelaparan separuhnya diharapkan dapat dikurangi pada tahun 2015. Terkait dengan masalah itu, isu penanggulangan kemiskinan yang telah diluncurkan sejak awal 1990-an juga masih menjadi agenda penting dalam pembangunan nasional.

Kebijakan peningkatan ketahanan pangan yang ditetapkan dalam kerangka pembangunan nasional tersebut berimplikasi bahwa pengkajian ketahanan pangan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan menjadi penting (Soetrisno, 1995). Ketersediaan pangan yang cukup di tingkat nasional tidak menjamin ketahanan pangan di tingkat wilayah dan tingkat rumah tangga/individu. Studi Saliem, dkk. (2001) menunjukkan walaupun ketahanan pangan di tingkat regional (provinsi) tergolong terjamin namun di provinsi yang bersangkutan masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi tinggi. Di Provinsi D.I. Yogyakarta, Lampung, Kalbar dan Sulut proporsi rumah tangga rawan pangan tahun 1999 berkisar antara 21-31% dari total rumah tangga di keempat provinsi tersebut.

Ketahanan pangan dan masalah kemiskinan di suatu wilayah mempunyai sifat multidimensional, yang ditentukan oleh berbagai faktor ekologis, sosial ekonomi dan budaya serta melibatkan berbagai sektor. Mengacu pada karakteristik yang beragam tersebut maka pemecahan masalah ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan wilayah harus bersifat holistik. Diversifikasi usaha rumah tangga merupakan salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam sistem perekonomian global, perubahan lingkungan strategis (lingstrat) internasional dan domestik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan suatu negara. Lingstrat internasional, utamanya yang terkait dengan reformasi perdagangan dunia yang mengarah pada sistem perdagangan bebas dan perubahan makroekonomi akan mempengaruhi struktur perekonomian suatu negara; khususnya negara yang turut meratifikasi perubahan tersebut seperti Indonesia. Perubahan struktur perekonomian negara selanjutnya akan mempengaruhi struktur perekonomian di tingkat wilayah (provinsi, kabupaten sampai desa) yang akan berpengaruh terhadap perubahan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di tingkat rumah tangga. Dalam hal demikian secara tidak langsung perubahan lingstrat internasional akan berpengaruh terhadap performa keanekaragaman sumber pendapatan (diversifikasi usaha) rumah tangga

sebagai konsekuensi adanya perubahan struktur perekonomian di tingkat wilayah. Bagaimana pengaruh diversifikasi usaha rumah tangga terhadap kinerja ketahanan pangan dan penurunan kemiskinan merupakan aspek yang menarik untuk dikaji.

Lingstrat domestik yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap diversifikasi usaha rumah tangga, ketahanan pangan, dan kemiskinan adalah adanya reformasi sektor pertanian dan pedesaan. Dalam hal ini perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi melalui otonomi daerah memiliki konsekuensi pada perubahan paradigma pembangunan termasuk pembangunan pertanian. Beberapa perubahan di sektor pertanian seperti promosi diversifikasi tanaman, pengembangan komoditas yang bernilai tinggi, dan pengembangan agroindustri akan berpengaruh terhadap struktur perekonomian wilayah, dan pada gilirannya hal tersebut akan berdampak pada perubahan kinerja diversifikasi usaha di tingkat rumah tangga, ketahanan pangan, dan kemiskinan.

Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional dihadapkan kepada berbagai kendala, baik teknis, alamiah, sumber daya, maupun sosial-budaya. Salah satu kendala utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan yang sebagian besar tergantung pada sektor pertanian adalah kecilnya tingkat penguasaan lahan pertanian. Mengingat kecilnya kemungkinan untuk melakukan perluasan lahan pertanian, diversifikasi usaha merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Diversifikasi usaha rumah tangga adalah suatu proses semakin beragam dan banyaknya jenis usaha rumah tangga yang menjadi sumber pendapatan. Tingkat keragaman diversifikasi usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan rumah tangga tidak terlepas dari keragaman dan struktur perekonomian di tingkat wilayah (provinsi, kabupaten, kecamatan/desa.). Melalui diversifikasi usaha, pendapatan rumah tangga diharapkan meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan, akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan meningkat sehingga tingkat ketahanan pangan rumah tangga meningkat, dan tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang.

Berpijak dari kerangka pikir seperti itu maka studi tentang analisis diversifikasi usaha rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan penting dilakukan. Untuk itu perlu kajian tentang perubahan keragaman atau struktur perekonomian di tingkat wilayah; struktur, besaran, distribusi, dan keragaman sumber pendapatan di tingkat rumah tangga dan kaitannya dengan ketahanan pangan, dan kemiskinan. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan di sektor pertanian dan pedesaan.

Secara umum penelitian bertujuan untuk menganalisis diversifikasi usaha di tingkat wilayah dan rumah tangga dikaitkan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan. Secara rinci penelitian bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis dan review tentang perubahan diversifikasi usaha dan struktur perekonomian di tingkat wilayah (nasional, provinsi, kabupaten, desa).
2. Menganalisis struktur, distribusi, dan ragam sumber pendapatan (diversifikasi usaha) di tingkat rumah tangga
3. Menganalisis keterkaitan antara diversifikasi usaha rumah tangga, ketahanan pangan, dan tingkat pendapatan/kemiskinan
4. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat diversifikasi pertanian dan usaha rumah tangga
5. Merumuskan saran kebijakan pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga di pedesaan dikaitkan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

II. PENGARUH PERUBAHAN LINGSTRAT TERHADAP STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH

2.1. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi Nasional

2.1.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja

Bagian terbesar dari penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Perkembangan yang terjadi adalah bahwa proporsi penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan cenderung turun dari tahun ke tahun. Ini terjadi akibat perluasan cakupan wilayah perkotaan (urbanisasi) dan pertumbuhan jumlah migran dari desa ke kota yang jauh lebih besar daripada dari kota ke desa. Ilustrasi kuantitatif adalah sebagai berikut. Pada awal dasawarsa 60-an jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 98 juta jiwa. Dari jumlah itu sekitar 83 juta (85%) berada di pedesaan. Empat puluh tahun kemudian (tahun 2000), total jumlah penduduk adalah sekitar 217 juta jiwa, 57 % diantaranya tinggal di pedesaan.

Tabel 1 menunjukkan bagaimana pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja selama 40 tahun (1961 – 2000). Dalam periode tersebut, pertumbuhan penduduk yang termasuk dalam kategori pedesaan adalah 0,97 %/tahun, sedangkan perkotaan 4,65 %/tahun. Dengan mencermati tingkat pertumbuhan dalam segmen-segmen waktu yang lebih pendek (10 tahunan), tampak bahwa laju pertumbuhan penduduk kategori pedesaan adalah negatif, sedangkan perkotaan positif.

Tabel 1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja, 1961-2000

Periode	Penduduk		Angkatan kerja	
	Pedesaan	Perkotaan	Pertanian	Nonpertanian
1961-1970	1,98	3,88	0,80	4,99
1971-1980	1,61	4,99	1,37	5,10
1981-1990	0,79	5,27	2,41	3,53
1991-2000	-0,12	4,53	1,13	3,93
1961-2000	0,97	4,65	1,41	4,32

Kesimpulan umum yang selama ini berlaku bahwa pertumbuhan angkatan kerja pertanian cenderung berimpit dengan pertumbuhan penduduk pedesaan, dan demikian pula halnya dengan angkatan kerja nonpertanian dengan penduduk perkotaan, ternyata harus dikoreksi. Sebagaimana tampak pada Tabel 1, pola pertumbuhan penduduk pedesaan maupun penduduk perkotaan adalah cenderung konsisten. Ini berbeda dengan kecenderungan dari laju pertumbuhan angkatan kerja yang ternyata lebih bervariasi. Perhatikan bahwa pada penggal waktu 1961-1990 laju pertumbuhan angkatan kerja pertanian cenderung positif (rata-rata %tase perubahan semakin besar). Selanjutnya terjadi penurunan yang tajam pada penggal waktu 1991-2000.

2.1.2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja

Data yang digunakan untuk mengkaji aspek ini adalah Tabel Input-Output Indonesia 1980, 1990, dan 2000. Butir-butir pokok kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis terhadap data tersebut adalah sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Perkembangan Distribusi dan Kesempatan Kerja Menurut Sektor Ekonomi, 1980-2000

Sektor perekonomian	1980		1990		2000	
	Ribu orang	%	Ribu orang	%	Ribu orang	%
Pertanian	35 839	53,92	39 043	44,74	38 990	41,78
Kehutanan	389	0,59	712	0,82	642	0,69
Perikanan	1 033	1,55	1 286	1,47	1 341	1,44
Pertambangan	437	0,66	831	0,95	826	0,89
Agroindustri(27_34)	1 481	2,23	3 764	4,31	3 013	3,23
Industri lainnya	3 972	5,98	7 388	8,47	8 293	8,89
Listrik, gas, air minum	99	0,15	187	0,21	226	0,24
Bangunan	2 196	3,30	3 768	4,32	4 183	4,48
Perdagangan	8 991	13,53	13 131	15,05	15 314	16,41
Restoran dan hotel	355	0,53	752	0,86	2 256	2,42
Pengangkutan dan komunikasi	2 099	3,16	3 774	4,32	4 871	5,22
Lembaga keuangan	160	0,24	796	0,91	1 448	1,55
Pemerintahan dan pertahanan	2 418	3,64	2 958	3,39	3 946	4,23
Jasa-jasa	7 001	10,53	8 629	9,89	7 821	8,38
Kegiatan lain	0	0,00	253	0,29	155	0,17
Total	66 467	100,00	87 271	100,00	93 321	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Diolah dari data I-O Indonesia tahun yang bersangkutan

1. Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan kerja terbesar. Dari sektor ini, yang paling dominan adalah subsektor padi, dan subsektor sayuran dan buah-buahan.
2. Kemampuan sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja semakin menurun. Ini terlihat dari proporsi penyerapan tenaga kerja yang menurun dari 54 % pada tahun 1980, menjadi 42 % pada tahun 2000.
3. Kemampuan sektor ekonomi yang merupakan industri hilir dari sektor pertanian (agroindustri), dalam menyerap lapangan kerja masih relatif rendah (di bawah 5 %).
4. Di luar sektor pertanian, sektor ekonomi yang paling menonjol dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan sektor jasa.

Meskipun sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar dalam penyediaan lapangan kerja, tetapi dalam penciptaan nilai tambah bruto

maupun dalam gaji dan upah tidak demikian. Sebagaimana tampak pada Tabel 3, kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah pada tahun 1980, 1990, dan 2000 (berdasarkan harga berlaku) hanya 10, 9, dan 6,5%. Jika diasumsikan bahwa nilai tambah per pekerja dapat digunakan sebagai proksi dari produktivitas kerja, maka fenomena tersebut merupakan indikasi bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian tergolong sangat rendah. Bandingkan dengan sektor pertambangan yang kontribusinya kurang dari 1% dalam penyediaan lapangan kerja, ternyata dalam penciptaan nilai tambah memberikan kontribusi sekitar 6% (bahkan 13,5% pada tahun 1980).

Tabel 3. Perkembangan Distribusi Nilai Tambah Bruto Menurut Sektor Perekonomian, 1980-2000

Sektor perekonomian	1980		1990		2000	
	Rp milyar	%	Rp milyar	%	Rp milyar	%
Pertanian	9 816,4	10,35	36 525,4	9,02	186 854,1	6,54
Kehutanan	1 434,1	1,51	3 001,8	0,74	16 552,6	0,58
Perikanan	806,7	0,85	3 587,4	0,89	31 317,8	1,10
Pertambangan	12 835,9	13,53	25 956,3	6,41	173 317,8	6,06
Agroindustri	2 041,0	2,15	12 681,5	3,13	120 473,9	4,21
Industri lainnya	6 486,8	6,84	46 676,0	11,53	424 142,5	14,83
Listrik, gas, air minum	287,0	0,30	1 747,4	0,43	10 632,5	0,37
Bangunan	3 519,7	3,71	16 352,9	4,04	116 474,0	4,07
Perdagangan	5 814,8	6,13	26 328,3	6,50	203 199,0	7,11
Restoran dan hotel	1 084,0	1,14	7 091,6	1,75	42 060,3	1,47
Pengangkutan dan komunikasi	2 731,2	2,88	14 529,6	3,59	91 600,9	3,20
Lembaga keuangan	2 371,7	2,50	17 202,8	4,25	122 624,3	4,29
Pemerintahan dan pertahanan	2 468,1	2,60	10 175,0	2,51	49 407,1	1,73
Jasa	2 720,3	2,87	13 209,1	3,26	67 254,1	2,35
Kegiatan lain	0,0	0,00	77,4	0,02	501,9	0,02
Total	94 852,9	100,00	404 922,5	100,00	2859 231,2	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Kondisi demikian itu mengakibatkan kesejahteraan tenaga kerja yang bergelut di sektor pertanian tertinggal jauh dari sektor industri dan jasa. Dalam Tabel 4 dapat disimak bagaimana distribusi sektoral dari nilai tambah yang dialokasikan untuk gaji dan upah. Ternyata, proporsi sektor ini hanya 17, 12, dan 11% masing-masing pada tahun 1980, 1990, dan tahun 2000.

Tabel 4. Perkembangan Distribusi Total Gaji dan Upah Menurut Sektor Perekonomian, 1980-2000

Sektor perekonomian	1980		1990		2000	
	Rp milyar	%	Rp milyar	%	Rp milyar	%
Pertanian	2 025,5	17,36	6 820,4	11,97	44 585,7	10,92
Kehutanan	242,5	2,08	510,9	0,90	3 143,2	0,77
Perikanan	126,1	1,08	621,9	1,09	5 828,8	1,43
Pertambangan	333,7	2,86	2 155,4	3,78	25 590,7	6,27
Agroindustri	449,5	3,85	2 526,9	4,43	27 497,9	6,74
Industri lainnya	933,7	8,00	8 088,4	14,20	77 775,8	19,05
Listrik, gas, air minum	85,3	0,73	409,3	0,72	2 279,4	0,56
Bangunan	1 347,4	11,55	6 438,6	11,30	37 132,5	9,10
Perdagangan	909,9	7,80	4 556,1	8,00	47 091,2	11,54
Restoran dan hotel	275,6	2,36	1 676,2	2,94	13 993,6	3,43
Pengangkutan dan komunikasi	720,4	6,17	3 307,3	5,80	16 877,6	4,13
Lembaga keuangan	360,2	3,09	4 176,9	7,33	21 352,6	5,23
Pemerintahan dan pertahanan	2 344,7	20,10	9 690,5	17,01	42 351,9	10,38
Jasa	1 515,1	12,99	5 977,1	10,49	42 548,3	10,42
Kegiatan lain	0,0	0,00	23,9	0,04	134,5	0,03
Total	11 667,4	100,00	56 977,8	100,00	408 181,9	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Ketimpangan kompensasi terhadap tenaga kerja antar sektor dapat dilihat dengan cara membagi total gaji dan upah pada masing-masing sektor dengan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut (Tabel 5). Jika diasumsikan bahwa rata-rata agregat tahun 1980 dijadikan sebagai basis (indeks = 1), maka beberapa kesimpulan dapat ditarik dari kajian ini:

1. Pada tahun 1980, rata-rata gaji dan upah tenaga kerja di sektor pertanian hanya sepertiga dari rata-rata agregat. Rataan tertinggi adalah di sektor lembaga keuangan dan perbankan yang besarnya sekitar lebih dari 12 kali lipat rata-rata agregat.
2. Sepuluh tahun kemudian, rata-rata agregat gaji dan upah (berdasarkan harga berlaku) meningkat menjadi 3,7 kali lipat, dan dua puluh tahun kemudian (tahun 2000) menjadi sekitar 25 kali lipat. Dengan urutan yang sama, di sektor pertanian terjadi peningkatan dari 0,3 menjadi 1 (naik 3 kali lipat) pada tahun 1990 dan naik menjadi 6,5 kali lipat sepuluh tahun kemudian. Kesemuanya itu merupakan bukti bahwa kompensasi tenaga kerja di sektor pertanian bukan hanya terkecil, tetapi peningkatannya pun lebih rendah dari sektor lain maupun rata-rata agregat.

Tabel 5. Perkembangan Tingkat Gaji dan Upah Sektoral per Pekerja, 1980-2000

Sektor pertanian	1980		1990		2000	
	(Rp 000/ orang)	Indeks	(Rp 000/ orang)	Indeks	(Rp 000/ orang)	Indeks
Pertanian	56,5	0,32	174,7	1,00	1 143,5	6,51
Kehutanan	623,6	3,55	717,7	4,09	4 893,4	27,88
Perikanan	122,0	0,69	483,5	2,75	4 346,9	24,76
Pertambangan	763,4	4,35	2 592,8	14,77	30 983,6	176,51
Agroindustri	303,6	1,73	671,3	3,82	9 127,7	52,00
Industri lainnya	235,1	1,34	1 094,8	6,24	9 378,9	53,43
Listrik, gas, air minum	862,7	4,91	2 192,7	12,49	10 100,8	57,54
Bangunan	613,6	3,50	1 708,7	9,73	8 876,5	50,57
Perdagangan	101,2	0,58	347,0	1,98	3 075,1	17,52
Restoran dan hotel	776,8	4,43	2 227,7	12,69	6 203,2	35,34
Pengangkutan dan komunikasi	343,3	1,96	876,4	4,99	3 465,0	19,74
Lembaga keuangan	2 250,7	12,82	5 246,6	29,89	14 745,9	84,01
Pemerintahan dan pertahanan	969,8	5,52	3 275,9	18,66	10 733,5	61,15
Jasa	216,4	1,23	692,7	3,95	5 440,5	30,99
Kegiatan lain			94,3	0,54	867,4	4,94
Total	175,5	1,00	652,9	3,72	4 374,0	24,92

Sumber: BPS, diolah.

Kondisi demikian itu merupakan refleksi dari struktur kemiskinan di Indonesia. Sangat banyak hasil penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bagian terbesar dari penduduk miskin di Indonesia adalah penduduk yang menggantungkan nafkahnya dari sektor pertanian. Secara teoritis, strategi yang harus ditempuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat haruslah melalui penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang mampu menciptakan nilai tambah maupun kompensasi tenaga kerja yang lebih tinggi, misalnya industri dan jasa. Akan tetapi secara empiris ternyata sangat sulit diwujudkan karena kinerja sektor-sektor tersebut sangat rapuh. Ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi dan beberapa tahun sesudah krisis ekonomi, sektor industri dan jasa sangat banyak yang bangkrut dan sulit untuk bangkit kembali. Akibatnya sektor pertanian yang sejak semula telah keberatan beban untuk menampung tenaga kerja, terpaksa harus menampung lebih banyak lagi. Pada akhirnya, pemulihan untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu yang pendek sulit diwujudkan.

2.1.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Dalam lingkup global, sosok dari kemajuan ekonomi umumnya ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Faktor utama yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi, akumulasi kapital,

perkembangan teknologi, aksesibilitas, perkembangan kelembagaan, dan perkembangan lingkungan strategis. Secara empiris, akumulasi kapital dan perkembangan teknologi pada sektor-sektor ekonomi yang mempunyai kaitan ke depan dan ke belakang yang lebih tinggi (industri dan jasa) tumbuh dan berkembang lebih cepat. Dengan demikian arah perubahan diversifikasi kegiatan ekonomi juga mempengaruhi sosok perubahan struktur perekonomian wilayah. Jadi, sosok diversifikasi ekonomi juga dapat digunakan sebagai indikator dari tahapan yang dicapai dalam transformasi perekonomian (World Bank, 1988).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi maka ragam kegiatan ekonomi dalam masyarakat juga berkembang. Perkembangan tersebut terjadi di sektor formal maupun nonformal. Secara teoritis maka kegiatan ekonomi di sektor-sektor perekonomian yang memiliki kaitan ke depan dan ke belakang yang lebih tinggi juga akan lebih tinggi keragamannya. Dalam Tabel I-O hal ini tercermin dari ragam penggunaan nilai output dalam permintaan antara. Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mencerminkan tingkat diversifikasi adalah Indeks Entrophy (E) (Theil dan Finke, 1983). Semakin tinggi nilai E, semakin berdiversifikasi kondisi perekonomian.

Hasil analisis menunjukkan bahwa ragam kegiatan ekonomi semakin meningkat. Ini terlihat dari nilai E yang semakin tinggi dari 3.441 pada tahun 1980, meningkat menjadi 3.600 pada tahun 1990, dan 3.629 pada tahun 2000 (Tabel 6). Tabel ini juga memperlihatkan bahwa perkembangan diversifikasi itu terjadi di sektor pertanian maupun nonpertanian. Meskipun demikian, tingkat diversifikasi di sektor pertanian relatif lebih rendah karena kaitan ke depan dan ke belakang dari sektor nonpertanian (terutama industri pengolahan dan manufaktur) pada umumnya memang lebih tinggi.

Tabel 6. Perkembangan Diversitas Alokasi Output Pada Permintaan Antara (*intermediate input*) Tahun 1980, 1990 dan 2000

Tahun	Pertanian	Nonpertanian	Total
1980	2.297	3.213	3.441
1990	2.387	3.303	3.600
2000	2.441	3.471	3.629

Sumber: BPS, diolah.

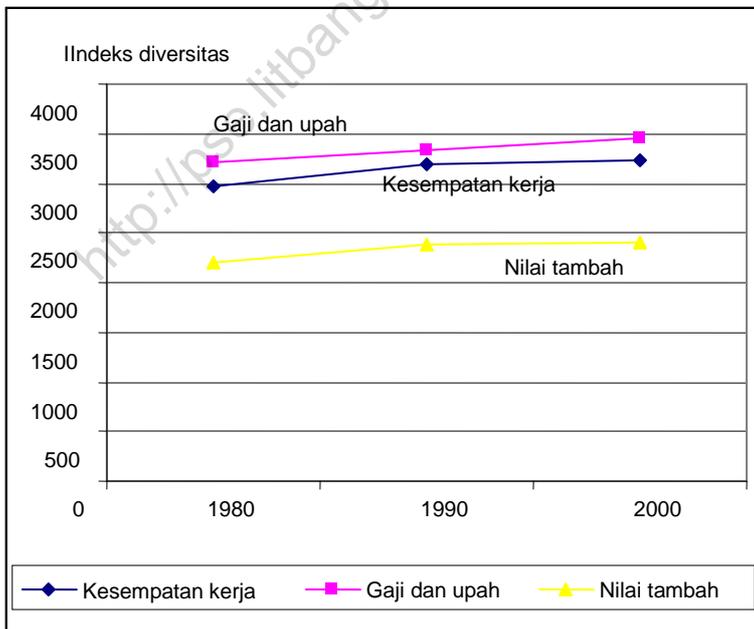
Diversifikasi kegiatan ekonomi di sektor pertanian terutama terjadi pada dasawarsa 90-an. Proporsi output yang teralokasikan untuk permintaan antara pada tahun 1990 dan tahun 2000 ternyata relatif ajeg yakni sekitar 57%. Ini berbeda dengan kondisi yang terjadi antara tahun 1980–1990 dimana proporsinya meningkat cukup besar dari 48.6% menjadi 57% (Tabel 7).

Tabel 7. Proporsi Alokasi Output dari Sektor Pertanian

Uraian	1980	1990	2000
Total permintaan antara	48,55	57,24	57,21
Pengeluaran konsumsi privat	40,65	39,62	40,02
Pengeluaran konsumsi pemerintah	0,07	0,05	0,00
Formasi kapital tetap bruto	0,00	0,00	0,08
Perubahan stok	1,88	0,68	0,57
Ekspor barang	8,86	2,41	2,12
Ekspor jasa	0,00	0,00	0,00
Total output	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Secara agregat, perkembangan diversifikasi ekonomi Indonesia pada periode 1980–1990 memang lebih cepat daripada periode 1990–2000, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja dan nilai tambah (Gambar 1).



Gambar 1. Perubahan Indeks Diversitas Kesempatan Kerja, Gaji dan Upah serta Nilai Tambah Bruto dalam Sistem Perekonomian Nasional

Dari Gambar 1 dapat disimak bahwa pada periode 1980 – 1990 peningkatan E untuk aspek kesempatan kerja dan nilai tambah jauh lebih besar daripada periode 1990 – 2000 (slope lebih tajam). Ini agak berbeda dengan perkembangan E pada aspek gaji dan upah yang menunjukkan perubahan yang relatif ajeg.

2.2. Demografi dan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi di Provinsi

2.2.1. Perkembangan Penduduk dan Angkatan Kerja

Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di masing-masing provinsi lokasi penelitian tertera pada Tabel 8. Dalam periode 1995 – 2003, rata-rata pertumbuhan penduduk Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing adalah 1,02, 1,76 dan 1,97 % per tahun. Mengingat bahwa tingkat kemajuan ekonomi Jawa Timur lebih tinggi dari Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat, maka fenomena tersebut mengukuhkan temuan selama ini bahwa semakin maju tingkat perkembangan ekonomi suatu wilayah, semakin rendah tingkat pertumbuhan penduduknya.

Tabel 8. Persentase Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja 1995 – 2003

Provinsi	Penduduk	Angkatan kerja	
		Pertanian	Nonpertanian
Jawa Timur	1,02	1,24	3,84
Sulawesi Selatan	1,76	1,74	3,22
Nusa Tenggara Barat	1,97	1,98	2,98

Sumber: BPS, diolah.

Secara umum, rata-rata pertumbuhan angkatan kerja pertanian terendah terdapat di Jawa Timur, sedangkan yang tertinggi di Nusa Tenggara Barat. Sebaliknya, dalam angkatan kerja nonpertanian, pertumbuhan tertinggi ditemukan di Jawa Timur sedangkan yang terendah di Nusa Tenggara Barat. Secara umum, pertumbuhan angkatan kerja pertanian dipengaruhi oleh jumlah rumah tangga pertanian dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga pertanian. Pada tahun 2003, diperkirakan jumlah rumah tangga pertanian di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat masing-masing sekitar 4,84, 1,14 dan 0,55 juta rumah tangga (Tabel 9).

Berbagai studi empiris yang selama ini dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga pertanian memperoleh pendapatan dari berbagai sumber. Bahkan, tidak sedikit rumah tangga pertanian yang mempunyai sumber pendapatan utama justru berasal dari aktivitas ekonomi di sektor nonpertanian. Sebagai ilustrasi, pada Tabel 9 tampak bahwa rumah tangga pertanian yang mempunyai sumber pendapatan utama berasal dari sektor nonpertanian cukup besar. Di Jawa Timur kelompok ini mencapai 30%, sedangkan di

Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat masing-masing adalah 17 dan 24%.

Tabel 9. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Provinsi Penelitian Menurut Sumber Penghasilan Utama, 2003

Provinsi	Sumber pendapatan utama		Total rumah tangga pertanian
	Pertanian	Nonpertanian	
Jawa Timur	3 394 711 (70,2)	1 441 060 (29,8)	4 835 771
Sulawesi Selatan	944 708 (83,0)	193 494 (17,0)	1 138 202
Nusa Tenggara Barat	417 214 (76,1)	131 030 (23,9)	548 244

Sumber: BPS, diolah.

Keterangan: (..) Persentase terhadap total rumah tangga pertanian di provinsi bersangkutan.

Jumlah rumah tangga pertanian di kabupaten contoh tertera pada Tabel 10. Data yang memuat rincian lebih lanjut tentang sumber penghasilan utama dari rumah tangga pertanian di level kabupaten tidak memadai untuk dianalisis secara kuantitatif. Akan tetapi berdasarkan informasi dari lembaga terkait diketahui bahwa secara umum gambarnya tidak berbeda jauh dari fenomena yang terjadi pada level agregat provinsi. Sebagian besar rumah tangga pertanian di kabupaten contoh memang mempunyai penghasilan utama dari kegiatan ekonomi di sektor pertanian tetapi jumlahnya diperkirakan tidak lebih dari 85%.

Tabel 10. Jumlah Rumah Tangga Pertanian di Kabupaten Contoh, 2003

Provinsi Contoh	Kabupaten Contoh	Jumlah	%
Jawa Timur	Kediri	173 496	3,59
	Malang	308 606	6,38
Sulawesi Selatan	Wajo	58 362	5,13
	Pinrang	48 355	4,25
Nusa Tenggara Barat	Lombok Barat	88 581	16,16
	Lombok Timur	129 004	23,53

Sumber: BPS provinsi setempat, diolah.

Keterangan: * %tase terhadap jumlah rumah tangga pertanian di provinsi bersangkutan.

2.2.2. Perkembangan Sektor Perekonomian

Di level nasional perkembangan distribusi dan kesempatan kerja menurut sektor perekonomian dapat dianalisis secara langsung karena data tentang penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor tersedia dengan baik. Pada level provinsi, data tersebut tidak memadai. Oleh karena itu analisis tentang perkembangan kesempatan kerja antar sektor dilakukan secara tidak langsung. Ini dapat dilakukan dengan mengamati struktur perekonomian wilayah yang tercermin dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi yang bersangkutan.

Data yang dianalisis adalah tahun 2000 dan 2001 dengan alasan: (1) berada pada pertengahan periode 1998–2004 sehingga pengaruh gejolak ekonomi sudah teradaptasi, (2) untuk melihat perubahan yang terjadi, data sudah stabil, (3) jarak antar tahun tidak jauh sehingga perubahan marginalnya dapat dilihat. Hasil analisis tertera pada Tabel 11–13. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tabel ini adalah :

1. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB semakin menurun yang terjadi di semua provinsi contoh. Di Jawa Timur, dari tahun 2000 ke 2001 kontribusinya turun dari 17,81 menjadi 17,65% karena berdasarkan harga konstan 1993 hanya meningkat dari 10.126 menjadi 10.371 milyar rupiah. Padahal total PDRB meningkat dari 56.851 menjadi 58.758 milyar rupiah. Di Sulawesi Selatan kontribusi sektor pertanian menurun dari 34,8 menjadi 33,6% karena atas harga konstan 1993 kontribusinya hanya meningkat dari 3.519 menjadi 3.559 milyar rupiah, sementara PDRB naik dari 1.275 menjadi 1.324 milyar rupiah. Di Nusa Tenggara Barat, kontribusi kontribusi sektor pertanian turun dari 27,7 menjadi 26,1% karena atas harga konstan 1993 kontribusinya hanya naik dari 1.211 menjadi 1.398 milyar rupiah sedangkan PDRB total provinsi tersebut naik dari 4.377 menjadi 5.350 milyar rupiah.
2. Semakin besar kontribusi sektor pertanian di suatu wilayah, semakin besar pula kecenderungan penurunannya. Ini dapat disimak dengan cara membandingkan angka-angka dan penurunannya dari ketiga provinsi tersebut di atas.
3. Secara umum, sektor nonpertanian yang paling berkembang adalah perdagangan dan jasa. Ini merupakan perubahan tipikal yang terjadi di negara-negara berkembang.

Tabel 11. Struktur PDRB Jawa Timur Tahun 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993

Lapangan usaha	2000		2001	
	Rp milyar	(%)*	Rp milyar	(%)*
Pertanian	10 126	17,81	10 371	17,65
Nonpertanian	46 724	82,19	48 387	82,35
1. Pertambangan dan penggalian	1 138	2,00	1 136	1,93
2. Industri pengolahan	15 358	27,01	15 538	26,44
3. Listrik, gas, dan air bersih	1 483	2,61	1 594	2,71
4. Bangunan/konstruksi	2 608	4,59	2 608	4,44
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	11 902	20,94	12 838	21,85
6. Pengangkutan dan komunikasi	4 746	8,35	4 793	8,16
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	3 194	5,62	3 379	5,75
8. Jasa	6 296	11,07	6 501	11,06
Seluruh Sektor (total)	56 851	100,00	58 758	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah.

Tabel 12. Struktur PDRB Sulawesi Selatan Tahun 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993

Lapangan usaha	2000		2001	
	Rp milyar	(%)*	Rp milyar	(%)*
Pertanian	3 519	34,84	3 559	33,56
Nonpertanian	6 581	65,16	7 045	66,44
1. Pertambangan dan penggalian	486	4,82	494	4,66
2. Industri pengolahan	1 307	12,94	1 356	12,79
3. Listrik, gas, dan air bersih	137	1,36	157	1,48
4. Bangunan/konstruksi	442	4,37	482	4,54
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	1 698	16,81	1 914	18,05
6. Pengangkutan dan komunikasi	802	7,94	896	8,45
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	434	4,30	423	3,99
8. Jasa	1 275	12,62	1 324	12,48
Seluruh Sektor (total)	10 100	100,00	10 604	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, diolah.

Tabel 13. Struktur PDRB Nusa Tenggara Barat Tahun 2000 dan 2001 Atas Harga Konstan 1993

Lapangan usaha	2000		2001	
	Rp milyar	(%)*	Rp milyar	(%)*
Pertanian	1 211	27,67	1 398	26,13
Nonpertanian	3 166	72,33	3 952	73,87
1. Pertambangan dan penggalian	1 085	24,78	1 633	30,53
2. Industri pengolahan	174	3,97	210	3,93
3. Listrik, gas, dan air bersih	19	0,44	14	0,26
4. Bangunan/konstruksi	272	6,20	340	6,35
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	549	12,54	688	12,86
6. Pengangkutan dan komunikasi	424	9,68	399	7,45
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	78	1,79	76	1,42
8. Jasa	566	12,93	592	11,07
Seluruh Sektor (total)	4 377	100,00	5 350	100,00

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, diolah.

Mengingat bahwa pada waktu yang sama pertumbuhan angkatan kerja pertanian lebih tinggi daripada pertumbuhan PDRB maka rata-rata nilai produktivitas tenaga kerja sektor pertanian semakin menurun. Dengan kata lain, kesejahteraan tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian turun. Ini terjadi di semua provinsi contoh yang diteliti, konsisten dengan gambaran di tingkat makro.

Fenomena yang terjadi di level kabupaten pada umumnya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di level nasional dan provinsi. Ini dapat disimak dari Tabel 14 – 16. Sebelum membahas satu per satu kondisi di masing-masing kabupaten, perlu diketahui bahwa dua dari enam kabupaten yang diteliti, secara riil berdasarkan harga konstan 1993, mengalami penurunan PDRB. Kedua kabupaten itu adalah Malang dan Lombok Timur. Ini menunjukkan bahwa di kedua kabupaten itu kenaikan PDRB dari tahun 2000 ke tahun 2001 lebih rendah dari pada kenaikan inflasi umum pada tahun tersebut sehingga secara riil pendapatan regional justru turun. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Malang merupakan salah satu bukti bahwa ketika terjadi kontraksi ekonomi maka yang paling tahan guncangan adalah sektor pertanian.

Sebagaimana tampak pada Tabel 14, karena PDRB sektor pertanian di Kabupaten Kediri hanya naik dari 482 menjadi 484 milyar rupiah maka secara relatif kontribusinya turun dari 34 menjadi 33% karena secara keseluruhan PDRB kabupaten itu naik dari 1.419 menjadi 1.461 milyar rupiah.

Tabel 14. PDRB Kabupaten Kediri dan Malang Atas Harga Konstan 1993

Lapangan usaha	2000		2001	
	Rp milyar	(%)*	Rp milyar	(%)*
Kabupaten Kediri:				
Pertanian	482	33,95	484	33,09
Nonpertanian	937	66,05	978	66,91
1. Pertambangan dan penggalian	65	4,58	66	4,54
2. Industri pengolahan	190	13,39	194	13,29
3. Listrik, gas, dan air bersih	6	0,39	6	0,38
4. Bangunan/konstruksi	37	2,62	38	2,58
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	282	19,90	300	20,51
6. Pengangkutan dan komunikasi	64	4,50	66	4,52
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	68	4,79	72	4,96
8. Jasa	225	15,89	236	16,13
Seluruh sektor (total)	1 419	100,00	1 461	100,00
Kabupaten Malang:				
Pertanian	702	29,28	695	29,98
Nonpertanian	1 696	70,72	1 622	70,02
1. Pertambangan dan penggalian	22	0,91	23	0,97
2. Industri pengolahan	208	8,67	198	8,56
3. Listrik, gas, dan air bersih	54	2,25	56	2,43
4. Bangunan/konstruksi	142	5,93	135	5,81
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	492	20,51	452	19,49
6. Pengangkutan dan komunikasi	256	10,65	244	10,51
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	152	6,34	149	6,44
8. Jasa	371	15,46	366	15,81
Seluruh sektor (total)	2 398	100,00	2 316	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Kediri & Malang, diolah.

Pada tahun yang sama, PDRB riil sektor pertanian di Kabupaten Malang turun dari 702 menjadi 695 milyar rupiah. Meskipun demikian karena secara keseluruhan PDRB kabupaten ini turun dari 2.398 menjadi 2.316 milyar rupiah, maka secara relatif kontribusi sektor pertanian justru meningkat dari 29% menjadi 30%.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Wajo berbeda dengan kecenderungan umum karena sektor pertanian tumbuh cukup nyata sehingga kontribusinya terhadap PDRB meningkat (Tabel 15). Berbeda dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Malang dimana peningkatan kontribusi relatif sektor pertanian terjadi ketika ekonomi mengalami kontraksi, peningkatan kontribusi relatif di Kabupaten Wajo terjadi pada saat pertumbuhan ekonomi regional adalah positif.

Tabel 15. PDRB Kabupaten Wajo dan Kabupaten Pinrang atas Harga Konstan 1993

Lapangan usaha	2000		2001	
	Rp milyar	(%)*	Rp milyar	(%)*
Kabupaten Wajo:				
Pertanian	276	48,63	301	49,62
Nonpertanian	292	51,37	305	50,38
1. Pertambangan dan penggalian	39	6,77	41	6,74
2. Industri pengolahan	34	5,95	33	5,49
3. Listrik, gas, dan air bersih	3	0,57	4	0,62
4. Bangunan/konstruksi	17	2,93	17	2,79
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	113	19,82	120	19,84
6. Pengangkutan dan komunikasi	29	5,08	30	4,89
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	19	3,36	20	3,27
8. Jasa	39	6,88	41	6,75
Seluruh sektor (total)	568	100,00	606	100,00
Kabupaten Pinrang:				
Pertanian	247,57	59,19	258,02	59,04
Nonpertanian	170,68	40,81	178,98	40,96
1. Pertambangan dan penggalian	2,25	0,54	2,36	0,54
2. Industri pengolahan	26,68	6,38	27,23	6,23
3. Listrik, gas, dan air bersih	3,78	0,90	3,90	0,89
4. Bangunan/konstruksi	17,09	4,08	17,85	4,08
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	42,39	10,14	44,49	10,18
6. Pengangkutan dan komunikasi	14,77	3,53	15,73	3,60
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	15,26	3,65	16,22	3,71
8. Jasa	48,47	11,59	51,21	11,72
Seluruh sektor (total)	418,25	100,00	437,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Wajo & Pinrang, diolah.

Tabel 16. PDRB Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur Atas Harga Konstan 1993

Lapangan usaha	2000		2001	
	Rp milyar	(%)*	Rp milyar	(%)*
Kabupaten Lombok Barat:				
Pertanian	192	34,38	195	32,46
Nonpertanian	366	65,62	405	67,54
1. Pertambangan dan penggalian	21	3,73	22	3,71
2. Industri pengolahan	2	0,36	22	3,61
3. Listrik, gas, dan air bersih	4	0,62	4	0,59
4. Bangunan/konstruksi	54	9,68	58	9,61
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	115	20,69	124	20,67
6. Pengangkutan dan komunikasi	68	12,27	72	12,06
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	13	2,37	14	2,39
8. Jasa	89	15,89	89	14,89
Seluruh sektor (total)	558	100,00	600	100,00
Kabupaten Lombok Timur:				
Pertanian	283	40,30	284	39,47
Nonpertanian	419	59,70	436	60,53
1. Pertambangan dan penggalian	28	3,95	29	4,03
2. Industri pengolahan	44	6,29	47	6,46
3. Listrik, gas, dan air bersih	3	0,39	3	0,40
4. Bangunan/konstruksi	48	6,78	50	7,00
5. Perdagangan, hotel, dan restoran	103	14,69	107	14,85
6. Pengangkutan dan komunikasi	54	7,63	57	7,92
7. Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	13	1,88	15	2,01
8. Jasa	127	18,10	129	17,86
Seluruh sektor (total)	703	100,00	720	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lombok Barat & Lombok Timur, diolah.

Perubahan yang terjadi di Kabupaten Pinrang maupun di dua kabupaten contoh di Nusa Tenggara Barat (Tabel 16) senada dengan apa yang terjadi di Kediri, hanya besarnya yang berbeda. Pola yang terjadi merupakan kecenderungan umum dari perubahan struktur perekonomian pada umumnya yaitu, kenaikan PDRB total yang diikuti dengan turunnya kontribusi sektor pertanian.

Secara umum pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja. Jika tidak terjadi perubahan teknologi ke arah padat modal secara dramatik maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin tinggi pula kesempatan kerja yang tercipta. Terkait dengan itu maka laju pertumbuhan sektor nonpertanian yang lambat menyebabkan penyerapan tenaga kerja oleh sektor tersebut berdampak negatif terhadap sektor pertanian karena selama ini sebenarnya pasar tenaga di sektor pertanian dalam kondisi kelebihan penawaran.

2.2.3. Perkembangan Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Berbeda dengan analisis di lingkup nasional dimana perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi dilakukan untuk seluruh sektor perekonomian, analisis di level provinsi dan kabupaten difokuskan pada diversifikasi yang terjadi pada rumah tangga pertanian. Hal ini disebabkan: (1) data Input-Output dari dua titik waktu yang jaraknya *significant* di level provinsi dan kabupaten tidak tersedia, (2) secara empiris mobilitas tenaga kerja antar provinsi maupun antar kabupaten cukup tinggi sehingga perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pada level nasional telah memadai untuk mengambil kesimpulan tentang substansi permasalahan ini.

Dengan asumsi bahwa diversifikasi sumber pendapatan utama mencerminkan diversifikasi kegiatan ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rumah tangga pertanian di Jawa Timur relatif lebih berdiversifikasi daripada di Sulawesi Selatan maupun Nusa Tenggara Barat (Tabel 17). Dikaitkan dengan struktur perekonomian wilayah sebagaimana disebutkan di atas, fenomena ini konsisten. Di sektor pertanian, secara umum terlihat bahwa usaha pertanian tanaman pangan merupakan kegiatan ekonomi dominan.

Tabel 17. Rumah Tangga Pertanian di Tiga Provinsi Contoh Menurut Sumber Penghasilan Utama, 2003

Sumber penghasilan utama	Jawa Timur		Sulawesi Selatan		Nusa Tenggara Barat	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
Pertanian	3 394 711	70,2	944 708	83,0	417 214	76,1
1. Tanaman pangan	1 460 403	30,2	369 916	32,5	199 561	36,4
2. Hortikultura	236 953	4,9	30 731	2,7	29 605	5,4
3. Perkebunan	411 041	8,5	343 737	30,2	43 311	7,9
4. Kehutanan	101 551	2,1	4 553	0,4	3 838	0,7
5. Ternak/unggas	430 384	8,9	79 674	7,0	49 890	9,1
6. Perikanan	111 223	2,3	75 121	6,6	22 478	4,1
7. Pertanian lainnya	87 044	1,8	17 073	1,5	22 478	4,1
8. Buruh pertanian.	556 114	11,5	23 902	2,1	46 052	8,4
Nonpertanian	1 441 060	29,8	193 494	17,0	131 030	23,9
Total	4 835 771	100,0	1 138 202	100,0	548 244	100,0

Sumber: BPS Provinsi setempat, diolah.

Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, subsektor perkebunan memegang peranan yang sangat penting di Sulawesi Selatan. Proporsi rumah tangga pertanian yang mengandalkan subsektor ini sebagai sumber pendapatan utama mencapai 30%. Komoditas perkebunan yang paling menonjol di provinsi ini adalah kakao. Ketika krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997–1998 petani kakao di Sulawesi Selatan justru mengalami peningkatan kesejahteraan yang dramatik. Depresiasi rupiah yang sangat tajam pada saat itu menyebabkan harga kakao menjadi berlipat ganda jika dibandingkan dengan tahun-

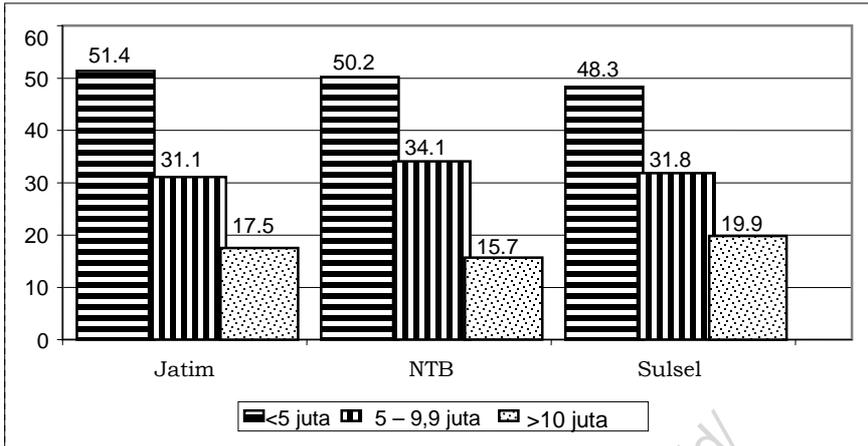
tahun sebelumnya. Jika ditelaah lebih lanjut, ada dua aspek penting yang dapat dibaca dari angka-angka yang tertera pada Tabel 17 tersebut di atas: (1) secara umum, jumlah rumah tangga pertanian yang mengandalkan sumber pendapatan utama dari pertanian yang tertinggi adalah di Sulawesi Selatan; dan (2) proporsi rumah tangga pertanian yang menggantungkan nafkah utamanya dari berburuh tani yang terendah adalah di Sulawesi Selatan, sedangkan yang tertinggi di Jawa Timur.

Fenomena itu terkait dengan rata-rata penguasaan lahan di masing-masing provinsi bersangkutan. Rata-rata penguasaan lahan garapan usahatani yang terkecil adalah di Jawa Timur, sedangkan yang terbesar adalah di Sulawesi Selatan. Selain itu, di Jawa Timur proporsi rumah tangga pertanian yang memiliki lahan garapan sendiri juga terendah, sedangkan di Sulawesi Selatan adalah yang tertinggi. Dengan kondisi seperti itu maka cukup banyak rumah tangga pertanian di Jawa Timur yang tidak dapat mengandalkan sumber pendapatan utamanya dari usaha pertanian. Kondisi sebaliknya terjadi di Sulawesi Selatan, sedangkan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat berada diantara kedua provinsi tersebut.

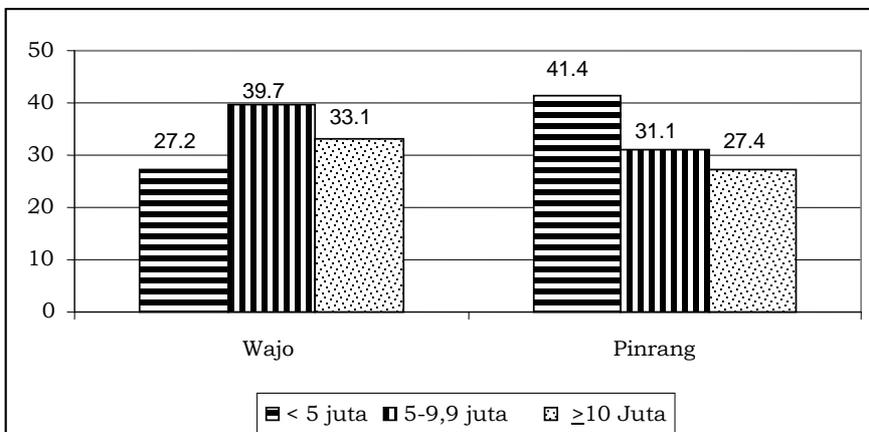
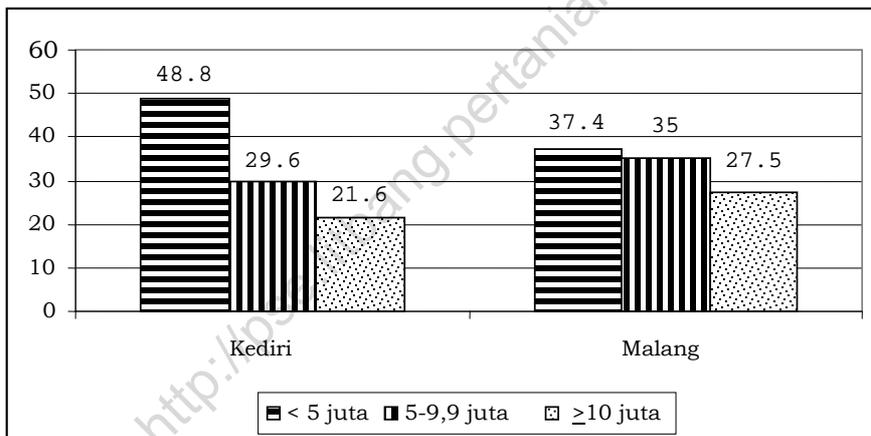
Kesimpulan umum yang dapat ditarik adalah bahwa peranan kegiatan buruh tani sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga semakin menonjol jika rata-rata penguasaan lahan pertanian semakin sempit dan jumlah rumah tangga pertanian yang tidak memiliki lahan garapan usahatani semakin banyak. Dalam kondisi seperti ini, jika upah buruh tani tidak meningkat dan kesempatan kerja nonpertanian juga kurang berkembang, maka proporsi petani miskin di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat akan semakin banyak karena secara riil produktivitas tenaga kerja pertanian cenderung menurun dari tahun ke tahun.

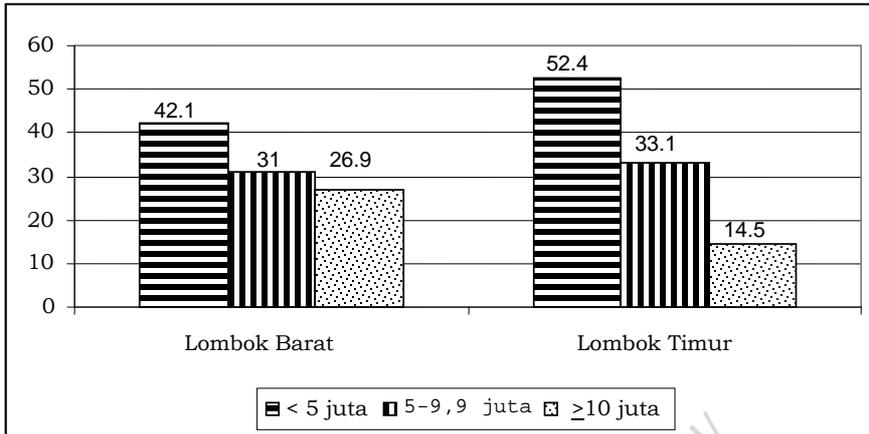
Gambaran mengenai tingkat kemiskinan rumah tangga pertanian di ketiga provinsi contoh adalah sebagai berikut. Secara umum separuh dari rumah tangga pertanian berpendapatan di bawah 5 juta rupiah per tahun. Sekitar 32% berpendapatan antara 5 – 9,9 juta, dan sisanya (kurang dari 20% berpendapatan 10 juta rupiah ke atas per tahun. Secara umum, distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan relatif lebih merata daripada di Jawa Timur ataupun Nusa Tenggara Barat (Gambar 2).

Struktur rumah tangga pertanian di masing-masing kabupaten contoh berdasarkan golongan pendapatan pada umumnya senada dengan gambaran di tingkat provinsi, kecuali di Kabupaten Wajo (Gambar 3). Berbeda dengan fenomena di level provinsi maupun fenomena di 5 kabupaten contoh lainnya, di Kabupaten Wajo proporsi tertinggi adalah rumah tangga pertanian pada selang pendapatan antara 5 – 9,9 juta rupiah/tahun. Gambaran tentang peranan sektor pertanian dalam ekonomi rumah tangga petani di level provinsi menunjukkan bahwa di Jawa Timur kontribusi pendapatan rumah tangga dari pertanian hanya sekitar 48% lebih rendah dari pada angka di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan (Tabel 18).



Gambar 2. Struktur Rumah Tangga Pertanian Menurut Kelompok Pendapatan





Gambar 3. Struktur Rumah Tangga Pertanian Menurut Kelompok Pendapatan di Kabupaten Contoh

Kesimpulan umum yang dapat ditarik dari analisis data tingkat provinsi dan kabupaten adalah: (1) di wilayah yang sektor nonpertaniannya lebih berkembang, kegiatan ekonominya cenderung lebih berdiversifikasi, (2) belum ada bukti yang meyakinkan bahwa diversifikasi kegiatan ekonomi secara nyata mampu meningkatkan pendapatan petani, (3) berdasarkan harga-harga tahun 1993, rumah tangga pertanian masih didominasi oleh golongan berpendapatan di bawah 5 juta rupiah per tahun.

Tabel 18. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani di Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, 2003

Sumber pendapatan	Jawa Timur		Nusa Tenggara Barat		Sulawesi Selatan	
	(Rp 000)	(%)	(Rp 000)	(%)	(Rp 000)	(%)
Pertanian	3 719	48,2	3 879	50,6	5 278	62,5
- Usahatani	2 993	38,8	3 386	44,2	4 981	59,0
- Buruh	726	9,4	493	6,4	297	3,5
Nonpertanian	2 727	35,3	2 337	30,5	2 173	25,7
- Usaha	1 375	17,8	1 250	16,3	1 064	12,6
- Buruh	1 352	17,5	1 087	14,2	1 109	13,1
Pendapatan lain	1 271	16,5	1 449	18,9	994	11,8
Total	7 717	100,0	7 665	100,0	8 445	100,0

Sumber: BPS Provinsi setempat, diolah.

2.3. Demografi Pertanian dan Industri di Pedesaan

Data tentang potensi dan monografi desa sangat bervariasi antar daerah sehingga menyulitkan penggabungan data dalam analisis. Akurasi

data sekunder desa relatif kurang memenuhi standar dapat dilihat dari konsistensi data atau variabel yang sama. Data series sulit diperoleh, selain itu variasi dan kelengkapan variabel menjadi pembatas dalam pembahasan ini. Data desa pemekaran sebagian belum tersedia, serta dijumpai di Desa Batu Putih, Kabupaten Lombok Barat. Desa ini merupakan pemekaran dari Desa Pelangan dan baru mandiri pada tahun 2002. Data tahun 2003 belum tersedia karena administrasi desa baru dibenahi, sedangkan data sebelumnya bergabung dengan desa Pelangan. Oleh karena itu pembahasan pada sub bab ini disesuaikan dengan ketersediaan dan kelengkapan data yang ada.

2.3.1. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia di mana kuantitas dan kualitas penduduk akan mempengaruhi kinerja pembangunan suatu wilayah. Tabel 19 menyajikan dinamika kependudukan di desa-desa penelitian menurut agroekosistem.

Tabel 19. Dinamika Kependudukan di Lokasi Penelitian Menurut Agroekosistem, 1999 dan 2003

Variabel kependudukan	Jawa		Luar Jawa			
	L. sawah tanaman pangan	L. kering peternakan	L. sawah tanaman pangan	L. kering tanaman pangan	L. kering horti-kultura	L. kering per-kebunan
Rataan JART (orang/KK)						
- 1999	4,2-5,8	4,6-6,0	3,8-5,5	tad	4,2-4,9	tad
- 2003	3,5-6,0	4,3-5,1	3,8-4,7	3,8-4,0	3,3-4,0	4,1-5,8
Angkatan kerja (% pdd usia 15-59 th/jml pdd)						
- 1999	70,8-79,0	72,3-80,8	66,2-87,2	72,1- 87,4	61,4-62,4	tad
- 2003	61,8-84,1	74,4-78,9	63,9-78,4	76,2-80,6	75,8-79,8	78,0-84,1
Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)						
- 1999	1124-1652	1344-1892	94 - 233	84 -197	263 -1570	tad
- 2003	1160-1901	1200-1892	91 - 219	99 - 160	297 -1681	229-476

Sumber : Monografi desa-desa penelitian dan Kecamatan dalam Angka (Data diolah)

Keterangan: tad = tidak ada data.

Rataan jumlah anggota rumah tangga (JART) bervariasi, tidak ada pola tertentu berdasarkan agroekosistem. Ada kecenderungan bahwa JART tahun 2003 menurun dibanding data tahun 1999. Umumnya desa-desa di Jawa lebih padat daripada desa di luar Jawa, tetapi tidak ada pola tertentu berdasarkan agroekosistem. Tingkat daya dukung lahan di luar

Jawa lebih besar, yang ditunjukkan oleh kisaran tingkat kepadatan penduduk desa-desa di Jawa jauh lebih padat dibanding luar Jawa (Tabel 19). Kasus di AES lahan kering hortikultura, kepadatan penduduk yang cukup tinggi ditemukan di desa perkotaan/pinggir jalan raya (Batuyang, Pohgading dan Apitaik), sedangkan desa di Jawa umumnya sangat padat (diatas 1000 jiwa/km², bahkan mendekati 2000 jiwa/km²).

Tingkat pendidikan penduduk umumnya semakin baik tercermin dari semakin tingginya tingkat pendidikan generasi muda. Data kuantitatif tidak lengkap tersedia, namun berdasarkan wawancara terhadap kelompok aparat masing-masing desa penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan generasi muda lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Tingkat pendidikan orang tua rata-rata SD atau SD tidak tamat, sedangkan generasi muda umumnya tamat SLTP atau SLTA, bahkan di beberapa lokasi sudah banyak yang mencapai perguruan tinggi. Di desa penelitian Kabupaten Kediri (AES sawah), sekitar 5-8% sudah mencapai perguruan tinggi. Selain kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, tingginya tingkat pendidikan ini juga disebabkan oleh relatif lebih baiknya aksesibilitas di desa-desa Jawa.

Tabel 20 menyajikan distribusi KK menurut tingkat kesejahteraan. Berdasarkan kriteria BKKBN, keluarga prasejahtera dan sejahtera I (terutama karena alasan ekonomi) merupakan keluarga atau rumah tangga miskin. Data terakhir (tahun 2003) menunjukkan bahwa persentase tertinggi keluarga miskin ditemui di agroekosisten lahan kering berbasis tanaman pangan dan hortikultura. Keduanya terdapat di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pada AES lahan kering tanaman pangan, persentase tersebut lebih dari 90%, bahkan di Sekotong Timur mencapai 100%. Perlu diketahui bahwa data KS I ini termasuk alasan non-ekonomi, padahal yang termasuk miskin terutama yang alasan ekonomi, namun demikian data tersebut dapat menggambarkan kemiskinan relatif di wilayah yang bersangkutan.

Tingkat kemiskinan paling rendah ditemukan di AES lahan kering perkebunan. Secara umum penduduknya lebih sejahtera, diindikasikan oleh rata-rata tingkat pendapatan penduduk yang relatif lebih tinggi dibanding AES lainnya. Sementara itu tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan Jawa lebih bervariasi. Rata-rata keluarga prasejahtera dan KS I berkisar antara 41-71% untuk AES lahan sawah dan 56-86% untuk AES lahan kering peternakan. Berbeda dengan daerah AES lahan kering perkebunan di luar Jawa, walaupun data primer di desa contoh utama menunjukkan bahwa tingkat pendapatan penduduk di AES lahan kering peternakan relatif tinggi, ternyata masih banyak keluarga miskin ditemukan di sekitarnya.

Sektor perekonomian utama di pedesaan umumnya masih bertumpu pada sektor pertanian, sebagaimana halnya di tingkat kabupaten. Lapangan kerja atau mata pencaharian penduduk dapat menggambarkan sektor perekonomian di wilayah tersebut. Tabel 21 menyajikan kinerja mata pencaharian utama penduduk.

Tabel 20. Keragaan Keluarga Menurut Tingkat Kesejahteraan Berdasarkan Agroekosistem di Lokasi Penelitian, 2004

AES/ desa penelitian	% KK menurut tingkat kesejahteraan					
	Pra KS	KS I	KS II	KS III	KS III +	Total KK
Lotim, AES lahan kering berbasis tanaman pangan						
Sekotong Tengah	63,0	28,9	7,4	0,5	0,3	2745
Sekotong Barat	56,3	38,5	2,9	1,1	1,1	1567
Sekotong Timur	46,6	53,4	0,0	0,0	0,0	2078
Pelangan	47,5	46,0	6,1	0,3	0,1	2924
Batu Putih	tad	tad	tad	tad	tad	Tad
Lobar, AES lahan kering berbasis tanaman hortikultura						
Pringgabaya	45,3	32,8	14,1	7,6	0,3	4990
Apitaik	48,6	38,9	11,6	0,9	0,0	4232
Pohgading	38,4	53,0	5,1	3,4	0,0	4484
Labuhan Lombok	47,7	39,0	11,2	1,6	0,6	5088
Batuyang	45,7	42,2	9,6	2,6	0,0	2612
Wajo, AES lahan sawah berbasis tanaman pangan						
Dualimpoe	tad	tad	tad	tad	tad	tad
Anabanua	7,7	41,9	1,5	48,3	0,6	949
Mattirowalie	tad	tad	tad	tad	tad	tad
Kalola						
Tangkoli	5,9	48,6	6,9	38,6	0,0	389
Pinrang, AES lahan kering berbasis tanaman perkebunan						
Pincara	tad	tad	tad	tad	tad	tad
Leppangang	23,4	8,1	12,1	4,0	52,4	476
Teppo	1,2	14,6	81,7	2,0	0,5	834
Tonyamang	0,1	15,7	82,5	1,0	0,7	1050
Mattiro Ade	0,7	12,1	79,8	6,2	1,2	903
Kediri, AES lahan sawah berbasis tanaman pangan						
Krecek	28,5	37,0	19,3	9,4	5,9	2199
Blaru	27,5	44,5	12,2	10,4	5,3	1515
Tunglur	11,6	30,3	23,4	30,3	4,4	1576
Bringin	24,7	17,1	8,3	47,4	2,6	1512
Canggu	20,8	22,4	14,8	40,3	1,7	2629
Malang, AES lahan kering berbasis peternakan						
	Pra KS dan KS I *)					
Pandesari	63,5		tad	tad	tad	1782
Pujon Lor	56,3		tad	tad	tad	1330
Pujon Kidul	86,2		tad	tad	tad	838
Ngroto	60,2		tad	tad	tad	1279
Wiyurejo	74,3		tad	tad	tad	934

Sumber: Monografi Desa Contoh, 2003.

Keterangan: tad = tidak ada data. *) Data yang tersedia terbatas pada Pra KS & KS I

Tabel 21. Dinamika Distribusi Matapencaharian Utama Penduduk Menurut Agroekosistem di Lokasi Penelitian, 1999 dan 2003 (%)

Sektor	Jawa		Luar Jawa			
	L. sawah tanaman pangan	L. kering peternakan	L. sawah tanaman pangan	L. kering tanaman pangan	L. kering horti-kultura	L. kering per-kebunan
Pertanian						
- 1999	65,9-94,1	78,2-93,2	46,7-70,4	56,9-80,7	70,7-92,3	tad
- 2003	78,0-92,2	70,0-95,07	48,7-72,6	54,2-70,5	73,8-87,9	68,1-93,7
Nonpertanian						
- 1999	5,9-34,1	6,8-30,0	27,4-51,3	29,5-45,8	12,1-26,2	6,3-31,9
- 2003	7,8-22,0	4,93-30,0	27,3-59,3	29,5-45,8	12,1-26,2	6,3-31,9

Sumber: Monografi Desa dan Kecamatan Dalam Angka masing-masing lokasi (Data diolah)

Dalam kurun waktu 1999-2003, pangsa penduduk yang bekerja di sektor pertanian tidak menunjukkan pola yang teratur. Di beberapa wilayah AES pangsa tersebut meningkat tetapi di beberapa AES yang lain terlihat menurun. Demikian pula halnya untuk beberapa desa di suatu AES. Sebagai ilustrasi, di Desa Pringgabaya dan Batuyang (AES lahan kering hortikultura), pangsa penduduk yang bekerja di pertanian menurun. Sebaliknya di desa lainnya di AES yang sama, penduduk yang bekerja di pertanian justru meningkat. Hal ini terkait dengan kesempatan kerja dan berkembangnya sektor nonpertanian di desa dan sekitarnya. Selain itu juga terjadi peningkatan migrasi keluar desa atau ke luar negeri. Fenomena yang sama ditemukan di AES lahan kering tanaman pangan (Kabupaten Lombok Barat).

Di seluruh desa contoh AES lahan sawah di luar Jawa (Kabupaten Wajo), dalam kurun waktu 1999-2003 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1996, di wilayah tersebut mulai dikembangkan irigasi teknis sehingga sawah lebih dominan dengan pola tanam mengarah ke monokultur. Sebagian penduduk melakukan ekspansi ke usahatani kebun, terutama kakao keluar desa bahkan ke luar kabupaten (sampai ke Kabupaten Mamuju). Sementara itu sektor nonpertanian yang eksis adalah usaha kerajinan tenun sutera. Secara tradisional, kaum wanita (terutama ibu rumah tangga) di pedesaan ini umumnya membuat tenun sutera untuk mengisi waktu luang walaupun pekerjaan ini memerlukan curahan kerja cukup besar.

Hal yang sama terjadi di AES lahan sawah di Jawa (Kabupaten Kediri). Pangsa penduduk yang bekerja di pertanian juga meningkat (untuk desa Krecek dan Blaru). Di beberapa wilayah AES tersebut telah berkembang usaha perikanan di lahan sawah atau di kolam yang didukung oleh air irigasi yang cukup tersedia sepanjang tahun. Tiga tahun terakhir mulai berkembang usaha ikan hias yang banyak diminati oleh

petani karena memberi keuntungan yang relatif tinggi walaupun risiko keberhasilan juga tinggi. Pemasaran ikan hias terutama ditujukan ke Surabaya dan Gresik.

Di AES lahan kering peternakan, keterlibatan penduduk yang bekerja di sektor pertanian sangat tinggi (lebih dari 90%), terutama dalam usaha peternakan sapi perah dan sayuran. Berdasarkan informasi dari Koperasi KOP-SAE, pada saat krisis banyak penduduk yang bekerja di nonpertanian terkena PHK dan sebagian besar dari mereka beralih ke usaha ternak sapi perah. Hasil penelitian Swastika *et al.* (2000) juga menunjukkan bahwa krisis ekonomi berdampak pada peningkatan jumlah peternak di wilayah koperasi tersebut, tetapi sebaliknya rata-rata pemilikan ternak cenderung menurun.

2.3.2. Kinerja Pertanian

Tata guna lahan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kinerja pertanian karena seberapa jauh lahan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha selanjutnya akan menggambarkan kinerja produksi suatu komoditas pertanian yang diusahakan. Tabel Lampiran menunjukkan dominasi jenis lahan pertanian sesuai dengan wilayah AES yang ada. Di wilayah AES lahan sawah umumnya diusahakan tanaman pangan dengan pola tanam yang disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi tanah. Secara umum pola tanam di lahan sawah di Jawa lebih beragam daripada di luar Jawa

Tabel 22 menyajikan kinerja luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah di desa contoh AES lahan sawah. Rata-rata produktivitas padi sawah di Jawa lebih tinggi daripada di luar Jawa. Di Kediri produktivitas padi berkisar antara 5,97-6,14 t/ha. Sementara itu di Wajo produktivitas padi hanya berkisar 3,61-4,61 t/ha. Menurut petani, dalam kondisi normal produktivitas padi di desa-desa contoh ini dapat mencapai rata-rata 5-6 t/ha bila pemupukan berimbang diterapkan. Selain karena kesuburan tanah, perbedaan produktivitas padi di Jawa dengan di luar Jawa (desa-desa contoh) terjadi karena teknologi pemupukan yang diterapkan berbeda. Di Wajo, rata-rata petani hanya menggunakan pupuk urea, sedangkan di Kediri petani cenderung menggunakan pupuk lain seperti SP 36 di samping urea.

Sebelum tahun 1996, lahan sawah di Kabupaten Wajo adalah sawah tadah hujan. Sejak berfungsinya bendungan Kalola dan Bilah, pola tanam di lahan sawah berubah secara drastis. Sebelum ada irigasi, pola tanam yang dijumpai adalah padi-palawija-bera. Sebagian petani yang menggunakan pompa air menerapkan pola tanam padi-palawija-palawija. Palawija dominan yang ditanam petani untuk tanaman kedua adalah kacang hijau, jagung, atau kacang tanah sedangkan tanaman ketiga adalah kacang hijau. Sejak adanya sarana irigasi, pola tanam di lahan sawah menjadi padi-padi-bera. Musim padi I jatuh pada bulan Mei-Juli dan musim padi II bulan Oktober-Maret. Pengusahaan padi yang relatif

tidak intensif mendorong tenaga kerja pertanian untuk melakukan ekspansi usaha ke pertanian perkebunan, dalam hal ini kakao. Sebagian petani di desa penelitian bermigrasi ke luar kabupaten untuk mengusahakan komoditas perkebunan dan kembali ke desa di saat panen padi tiba atau saat tanaman padi memerlukan pengolahan dan pemeliharaan. Selain kakao, sebagian petani Desa Mattirowalie juga mengusahakan jeruk nipis dengan memanfaatkan lahan tidur di sekitar desa, bahkan sampai ke luar kabupaten (Sidrap).

Tabel 22. Kinerja Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Agroekosistem Sawah, 2003

Lokasi desa contoh	Luas panen (ha)	Produksi (t)	Produktivitas (t/ha)
Jawa (Kab Kediri)			
- Krecek	1044	6243	5,98
- Blaru	714	4263	5,97
- Tunglur	406	2489	6,13
- Bringin	262	1571	6,00
- Canggu	461	2830	6,14
Luar Jawa (Kab Wajo)			
- Dualimpoe	1216	5281	4,34
- Anabanua	558	2015	3,61
- Mattirowalie	980	4100	4,18
- Kalola	2056	9476	4,61
- Tangkoli	1935	8774	4,53

Sumber : Kecamatan (Pare dan Patampanua) Dalam Angka (2003)

Sebagian petani padi sawah di Kabupaten Wajo telah menerapkan tanam benih langsung (Tabela) sejak sekitar 3 tahun yang lalu. Menurut petani, hasil panen Tabela relatif sama dengan sistem tanam pindah, tetapi gabah padi pada tanam pindah relatif lebih besar, sehingga harganya lebih tinggi sekitar Rp 25 per kg GKP. Namun dari segi umur, Tabela lebih pendek sekitar dua minggu.

Komoditas tanaman pangan di lahan kering (di Lombok Barat) yang banyak ditanam adalah padi gogo, jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan kacang hijau. Kasus yang ditemukan di desa Sekotong Tengah, selain padi monokultur, beberapa petani juga menerapkan tumpangsari dengan tanaman perkebunan seperti kelapa dan jambu mete, sedangkan kacang-kacangan banyak ditemukan di desa Sekotong Barat dan Pelangan. Usahatani tanaman pangan di lahan kering ini relatif tidak intensif dan teknologi yang digunakan juga masih sederhana sehingga produktivitasnya masih relatif rendah. Kendala produksi utama adalah keterbatasan air.

Keadaan yang berbeda ditemukan di lahan kering usahatani hortikultura di Lombok Timur yang umumnya lebih intensif karena adanya pengembangan pompa P2AT yang dapat meningkatkan IP menjadi 300%. Pada awal musim hujan, sebagian petani menanam padi dilanjutkan dengan jagung dan sayuran seperti bawang merah, cabe, tomat, dan kacang-kacangan pada musim berikutnya. Menurut aparat setempat, penggunaan pompa tidak dianjurkan untuk budi daya padi yang membutuhkan banyak air yang akan mengakibatkan air tanah semakin dalam. Namun sebagian besar petani tetap menanam padi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan pokok. Mengingat usahatani sayuran, terutama bawang merah memerlukan modal yang cukup besar dan risiko tinggi, maka sebagian petani bekerjasama dengan pemilik modal dengan cara bagi hasil. Sistem bagi hasil yang umum berlaku adalah pemilik lahan memperoleh sekitar 10-15% dari hasil/penerimaan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Petani yang tidak melakukan kerjasama dan tidak memiliki modal cukup, biasanya meminjam pada pemilik modal dengan bunga sekitar 15-20% selama satu musim (sekitar 3-4 bulan). Oleh karena itu petani sangat membutuhkan kredit lunak untuk mengembangkan usahatannya.

Sebagian besar petani di wilayah AES lahan kering perkebunan mengusahakan tanaman perkebunan, terutama kakao dan lahan sawah. Curahan waktu rata-rata petani di wilayah ini umumnya lebih banyak di lahan sawah karena usahatani yang lebih intensif dibanding dengan di perkebunan. Selain itu umumnya kakao di wilayah ini sudah tua, sehingga produktivitasnya relatif rendah, walaupun sebagian kecil petani sudah mulai melakukan peremajaan.

Pola tanam di lahan kebun sebagian besar adalah tumpang sari atau campuran yaitu kakao/kelapa/pisang dan kakao/kelapa, dimana tanaman utamanya adalah kakao. Hanya sebagian kecil petani yang menerapkan pola tanam monokultur. Tumpangsari dilakukan terutama untuk mengurangi risiko kegagalan panen. Selain itu kelapa umumnya sudah ada lebih dahulu sebelum lahan ditanami kakao.

Tanaman kakao mulai diusahakan di wilayah ini sekitar tahun 1984, sehingga umur tanaman rata-rata lebih dari 20 tahun. Padahal umur produktif tanaman kakao biasanya sampai 25-30 tahun. Pertanaman kakao tua biasanya sangat rentan terhadap serangan penggerek buah kakao (PBK). Sejak 5 tahun terakhir sebagian besar pertanaman kakao di desa penelitian terserang PBK dengan intensitas serangan beragam. Serangan hama ini menurunkan produksi hingga 70% dan untuk mengatasinya dinas terkait sudah memberikan bantuan berupa sarungisasi sejak dua tahun terakhir. Meski demikian sarungisasi dinilai kurang efektif untuk mengatasi hama tersebut. Akhir-akhir ini dilakukan teknik sambung samping (dengan entris yang unggul dan sehat) untuk mengatasinya. Akan tetapi bibit entris masih terbatas dan sulit diperoleh, walaupun teknologi tersebut sudah dikuasai oleh sebagian petani.

Untuk pemeliharaan tanaman, selain pemupukan, petani biasanya melakukan pemangkasan dua kali dalam 6 bulan tergantung kondisi tanaman. Tenaga pemeliharaan dan panen umumnya diserahkan kepada tenaga kerja keluarga. Panen raya kakao terjadi pada dua periode, yakni pada bulan Maret-April dan November-Desember yang memerlukan banyak tenaga kerja. Oleh karena itu, petani sering menggunakan tenaga kerja anak-anak, biasanya sepulang sekolah atau di saat libur sekolah.

Petani umumnya menjual kakao pada pedagang pengumpul lokal (desa atau kecamatan). Harga biji kakao di tingkat petani saat penelitian berkisar antara Rp 9.000–Rp 10.200/kg. Petani menjual biji tanpa fermentasi karena dari sisi harga relatif tidak memberikan keuntungan yang berarti. Di samping itu, pihak pedagang lebih memperhatikan kadar air daripada mutu biji kakao.

Di AES lahan kering berbasis peternakan (Kabupaten Malang), ternak sapi perah merupakan komoditas utama yang diusahakan peternak. Umumnya peternak hanya memelihara sapi perah, walaupun menurut data populasi ternak di desa-desa contoh terdapat beberapa jenis ternak lain. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ditemukan rumah tangga peternak sapi perah merangkap usaha ternak lainnya. Justru yang banyak ditemukan adalah diversifikasi pertanian lahan kering dengan komoditas sayuran, palawija dan atau rumput gajah untuk memenuhi kebutuhan pakan.

Di Lombok Timur dan Lombok Barat, usaha ternak umumnya merupakan usaha sampingan. Jenis ternak yang banyak diusahakan adalah ternak besar (sapi dan kuda) dan ternak kecil (kambing/domba). Ternak besar maupun kecil digunakan sebagai aset/tabungan, sedangkan kuda digunakan sebagai alat angkut untuk menarik cidomo, sejenis delman yang banyak dijumpai di Lombok Timur sebagai salah satu angkutan antardesa.

2.3.3. Sistem dan Perkembangan Tingkat Upah

Tingkat upah di beberapa wilayah agroekosistem di provinsi Jawa dan luar Jawa memiliki sistem dan besaran yang hampir sama. Perkembangan tingkat upah menurut kegiatan dan agroekosistem di masing-masing provinsi tersebut dapat di lihat pada Tabel 23. Upah tenaga kerja ternak dan traktor menempati urutan yang paling tinggi di antara aktivitas usahatani lainnya. Perbedaan tingkat upah itu tidak lepas dari kebiasaan sistem upah yang diberlakukan di suatu wilayah. Di desa lahan kering tanaman pangan Desa Batuyang (NTB) pada tahun 2005, untuk pengolahan tanah dilakukan dengan sistem borongan dengan traktor yang upahnya berkisar antara Rp 450.000–Rp 500.000 per hektar. Sedangkan upah harian untuk kegiatan pemeliharaan (penyiangan) berkisar antara Rp 15.000–Rp 20.000 dari jam 8.00–16.00 ditambah makan 2 kali dan kopi serta rokok yang jika dinilai secara total

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>

sekitar Rp 25 000/8 jam kerja. Apabila di dalam desa sudah tidak ada kegiatan pertanian, para buruh tani mencari upah pertanian ke desa lain. Upah tersebut sekitar Rp 10 000- Rp 12 500/hari pada tahun 1999 dan sekitar Rp 8 000- Rp 10 000/hari pada tahun 1996. Upah tenaga ternak untuk kegiatan pengolahan tanah yang umum berlaku adalah dengan sistem harian sebesar Rp 15 000 per setengah hari (jam 7.00 – 11.30). Satu hektar lahan umumnya memerlukan 5 hari kerja ternak. Sejak tahun 2000 pengolahan tanah dilakukan dengan traktor dengan upah Rp 400 000/ha. Di beberapa desa contoh seperti di Sekotong Barat tenaga ternak masih banyak digunakan karena topografi lahan yang berbukit.

Upah buruh bangunan di Desa Pelangan Sekotong Tengah dan sekitarnya saat ini sebesar Rp 25 000/hari (jam 8.00 – 16.00), sedangkan untuk buruh gali dan angkut pasir sekitar Rp 50 000/hari. Terbatasnya kesempatan kerja di desa Sekotong Tengah dan sekitarnya serta relatif lebih tingginya tingkat upah di wilayah atau negara lain mendorong penduduk Desa Sekotong Tengah untuk migrasi. Salah satu tujuan migrasi adalah Pulau Bali di mana mereka umumnya bekerja sebagai buruh. Sedangkan tujuan utama para tenaga migran ke luar negeri adalah ke Malaysia untuk tenaga pria dan wanita, dan ke Arab Saudi khusus untuk tenaga kerja wanita. Fenomena yang sama juga ditemukan di desa contoh lainnya yang selain dua negara tersebut, Taiwan dan Hongkong juga merupakan tujuan tenaga migrasi.

Di AES sawah di luar Jawa (Kabupaten Wajo) upah buruh tanam diatur melalui sistem borongan yang terdiri atas 2 cara pengerjaan yaitu (1) tanam benih langsung (Tabela) dan (2) tanam pindah (Tapin). Borongan dengan cara Tapin berkisar antara Rp 400.000–450.000 per hektar sedangkan dengan cara Tabela antara Rp 200.000–250.000 per hektar. Dari beberapa informasi yang diperoleh terungkap bahwa sekalipun upah borongan dengan cara tapin lebih tinggi karena penggunaan tenaga kerja buruh yang lebih besar, tetapi Tapin memiliki kelebihan antara lain: (1) penggunaan bibit lebih efisien, (2) jarak tanam lebih teratur, (3) tonase produksi relatif sama, namun gabah lebih besar, sehingga harganya relatif lebih tinggi.

Upah panen di Sulawesi Selatan dikenal dengan istilah *deros* yang besarnya 7 : 1 atau 8 : 1, di mana tenaga *penderos* (pemanen) menerima 1 karung dari 7 atau 8 karung hasil yang dipanen. Umumnya buruh tani, baik tanam maupun panen, berasal dari luar desa atau luar kabupaten, terutama migran dari Kabupaten Polmas dan sekitarnya.

Untuk pengelolaan kebun di perkebunan kakao, sebagian besar petani masih menggunakan tenaga kerja keluarga, kecuali panen. Namun, bagi petani kaya dengan kisaran lahan milik di atas 2 hektar, kegiatan pemupukan dan pembersihan kebun biasanya diupahkan. Sistem upah yang berlaku di sebagian lokasi penelitian adalah borongan, yang besarnya berkisar antara Rp 50.000–Rp 75.000 per hektar. Sementara itu

upah panen yang terdiri dari petik dan kupas, besarnya dihitung berdasarkan persentase hasil yang diperoleh, berkisar antara 10–20%. Seperti diuraikan sebelumnya, karena kekurangan tenaga kerja saat panen, maka petani sering menggunakan tenaga kerja anak.

Usaha ternak sapi perah di AES lahan kering peternakan, umumnya menggunakan tenaga kerja keluarga. Sebagian peternak yang mempunyai sapi perah di atas 5 ekor kadang-kadang menggunakan tenaga kerja luar keluarga dengan sistem upah bulanan. Mereka mengerjakan segala macam kegiatan dan bahkan bekerja juga untuk pertanian. Gaji atau upah bulanan tenaga kerja berkisar antara Rp 250.000–Rp 300.000 per bulan plus makan 3 kali sehari. Selain upah tetap, juga dikenal upah harian walaupun hal ini jarang terjadi. Sistem ini biasanya dilakukan untuk jenis kegiatan membersihkan kandang dan pemerah susu yang pada saat penelitian nilai upahnya berkisar antara Rp 15.000–Rp 20.000 per hari.

2.3.4. Kinerja Industri Pedesaan

Perekonomian wilayah kabupaten contoh umumnya masih didominasi oleh sektor pertanian, sedangkan sektor industri belum mampu mengiringinya. Menurut Deptan (2004) proses industrialisasi pedesaan sangat lambat yang tercermin antara lain dari semakin senjangnya ekonomi desa-kota. Industri yang pada umumnya berada di pedesaan atau pinggiran perkotaan adalah industri yang berbasis pertanian, yaitu industri pengolahan hasil-hasil pertanian. Selanjutnya dikatakan bahwa industri pedesaan merupakan usaha hasil pertanian dan usaha dalam penerapan teknologi.

Dalam bahasan ini, kategori industri pedesaan tidak hanya terbatas pada industri yang berbasis pertanian (agroindustri), tetapi industri yang berlokasi di pedesaan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat potensi dan peluang industri tersebut dalam penyerapan tenaga kerja pedesaan. Pada umumnya industri yang ditemukan di lokasi penelitian adalah industri kecil dan atau rumah tangga. Namun demikian tidak semua desa contoh memiliki industri tersebut. Selain itu data kuantitatif sekunder kurang tersedia sehingga informasi mengenai industri pedesaan di lokasi penelitian relatif terbatas.

Distribusi industri pedesaan di masing-masing desa contoh disajikan pada Tabel 24. Di lapang, ternyata kondisi industri tidak sepenuhnya seperti yang tercermin dalam tabel tersebut. Sebagian besar jenis industri desa contoh adalah industri rumah tangga dan atau pengrajin yang dominan menggunakan tenaga keluarga. Di Malang terdapat 1 unit industri sedang yang merupakan kegiatan pengolahan pakan (konsentrat) yang dilakukan oleh Koperasi Susu SAE.

Beberapa kasus industri contoh yang diteliti dapat diilustrasikan seperti di bawah ini :

Tabel 24. Kinerja Industri Pedesaan Menurut Skala Berdasarkan Tenaga Kerja di Desa Contoh, Tahun 2003

Agroekosistem dan desa contoh	Jumlah industri rumah tangga/kerajinan
Kabupaten Lobar, lahan kering berbasis tanaman pangan	
Sekotong Tengah	98
Sekotong Barat	116
Sekotong Timur	481
Pelangan	15
Batu Putih	tad
Kabupaten Lotim, lahan kering berbasis tanaman hortikultura	
Pringgabaya	32
Apitaik	96
Pohgading	74
Labuhan Lombok	51
Batuyang	118
Kabupaten Wajo, lahan sawah berbasis tanaman pangan	
Dualimpoe	58
Anabanua	3
Mattirowalie	2
Kalola	3
Tangkoli	
Kabupaten Pinrang, lahan kering berbasis tanaman perkebunan	
Pincara	tad
Leppangang	tad
Teppo	11
Tonyamang	12
Mt tiro Ade*	3
Kabupaten Kediri, lahan sawah berbasis tanaman pangan	
Krecek	8
Blaru*	9
Tunglur	22
Bringin*	2
Canggu*	10
Kabupaten Malang, lahan kering berbasis peternakan	
Pandesari	1
Pujon Lor	4
Pujon Kidul	2
Ngroto	14
Wiyurejo	3

Sumber : Monografi Desa Contoh dan Kecamatan Dalam Angka, Tahun 2003

Keterangan : tad= data tidak ada

* = terdapat 1 industri kecil.

Pabrik Pengolahan Batu di Desa Pringgabaya, Lombok Timur

Pabrik ini mulai beroperasi bulan Februari 2004 melalui dua jenis pengolahan yaitu (1) pemecahan batu dengan kapasitas 20–30 ton/jam, dan (2) pengolahan aspal dengan kapasitas 30 ton/jam. Pada tahun 2004, mesin pengolahan batu bekerja selama 10 bulan dengan hari kerja sebanyak 25 hari/bulan. Untuk pengolahan aspal, dalam satu tahun hanya bekerja 3–4 bulan dengan jumlah hari kerja antara 20–25 hari/bulan.

Areal pengolahan batu seluas 10 ha diperoleh melalui izin usaha tipe galian C. Dari luasan tersebut, sekitar 4 ha digunakan untuk bangunan pabrik dan sisanya 6 ha untuk penggalian batu meski sampai saat ini areal yang sudah digali baru sekitar 2 ha.

Tenaga kerja terdiri atas tenaga tetap, harian, borongan, dan tenaga lapangan. Tenaga tetap terdiri dari tenaga laboratorium 2 orang, sopir 4 orang, administrasi 2 orang, produksi 2 orang, unit pemecah batu 2 orang, unit paving 2 orang, dan unit AMP 2 orang. Upah tenaga tetap tersebut berkisar antara Rp 500 ribu sampai Rp 1,3 juta/bulan tergantung tingkat keahliannya ditambah uang makan Rp 15.000 per hari serta fasilitas tempat tinggal (mess).

Untuk tenaga harian, upah yang dibayar adalah Rp 20.000–Rp 25.000/hari dengan jumlah tenaga unit SC 8 orang dan AMP 5 orang, tenaga galian 9 orang, penjaga 6 orang dan pesuruh kantor 2 orang. Tenaga borongan umumnya hanya diperlukan di saat pengerjaan jalan raya dengan sistem upah Rp 1500/ton aspal atau Rp 3000/ton batu. Tenaga lapangan diupah dengan sistem harian Rp 20.000– Rp 25.000/hari dan apabila lembur ditambah uang lembur Rp 2500/jam untuk lembur malam jam 19.00–21.00 dan Rp 3000/jam bila lembur jam 21.00–24.00. Tenaga kerja yang berasal dari penduduk sekitar umumnya adalah tenaga harian, sedangkan tenaga terampil umumnya dari luar daerah.

Pabrik ini merupakan rekanan kantor atau dinas di wilayah NTB yang pada tahun 2004 lalu, 30% pekerjaan bersumber dari Dinas dengan dana APBN, 60% dari proyek-proyek yang dibiayai bank dunia (IBRD), dan swasta 10%. Masalah yang dihadapi dalam operasionalisasi kegiatan pabrik adalah faktor keamanan. Pencurian barang dan atau alat-alat masih sering dialami oleh pabrik, walaupun sudah diupayakan ada tenaga keamanan. Berdasar informasi dan pengalaman di tempat lain, areal galian seluas 6 ha yang diusahakan pabrik ini diperkirakan akan habis dalam 5 tahun. Sampai saat ini belum diperoleh informasi yang memadai tentang dampak lingkungan setelah usaha penggalian ini selesai.

Pabrik Kulit di Desa Apitaik, Lombok Timur

Pabrik ini mulai beroperasi sejak tahun 1990-an dengan bahan baku kulit sapi dan kerbau diperoleh dari jagal di desa setempat (50%) dan sisanya dari jagal di Sumbawa. Pemasok bahan baku ini sudah

langganan produsen dengan sistem pembelian bayar dimuka. Harga disepakati pada saat pembayaran, dan angkutan sampai tempat usaha ditanggung oleh pemasok. Biasanya harga kulit dari kedua pemasok tersebut relatif sama sekitar Rp 200.000 untuk satu lembar kulit sapi/kerbau.

Selain tenaga keluarga, pabrik ini juga memperkerjakan 4 orang, 2 diantaranya sebagai tenaga membersihkan dan menjemur kulit sampai kering, sedangkan 2 orang lainnya sebagai tenaga menggoreng. Upah kegiatan membersihkan dan mengeringkan kulit ini rata-rata Rp 30.000/lembar dengan sistem borongan. Dalam cuaca normal, pengeringan dilakukan dengan penjemuran (dengan panas matahari), sedangkan bila musim hujan pengeringan dilakukan dengan menggunakan oven. Pengoperasian oven dilakukan oleh pengusaha sendiri mengingat risiko dan tingkat kesulitan pengeringan.

Pemasaran krupuk kulit sebagian besar dalam bentuk mentah atau setengah matang sekitar 80%, sisanya dipasarkan dalam bentuk sudah digoreng. Untuk pemasaran krupuk matang ini produsen memiliki pedagang tetap sebanyak 4 orang yang beroperasi di Mataram. Menurut responden prospek industri ini cukup baik dan sejak dua tahun lalu berdiri pabrik kulit baru di desa ini.

Industri Penggergajian Kayu di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat

Industri penggergajian kayu di Sekotong Tengah ada 2 unit. Industri penggergajian ini sudah beroperasi sejak tahun 1990-an, sedangkan satu unit lagi baru beroperasi sekitar dua tahun lalu. Usaha penggergajian milik responden menggunakan bahan baku dari kayu (balok) dari hutan sekitar Kecamatan Sekotong Tengah dan diproses menjadi batangan kayu berbagai ukuran seperti untuk reng dan kaso (dengan ukuran yang bervariasi). Biasanya responden membeli bahan baku sekitar 10 – 15 m³ dari pemasok dan sebagian terima di tempat.

Tenaga yang terlibat dalam industri ini adalah 6 orang di luar tenaga keluarga. Sejak sekitar 5 tahun lalu responden menggunakan gergaji mesin yang memerlukan tenaga terampil untuk mengoperasikannya.

Pemasaran produk (reng dan kaso) sebagian besar (80%) dilakukan ke pedagang di pasar Gerung (ibu kota Kabupaten Lombok Barat) dan sisanya ke kecamatan Sekotong Tengah. Menurut responden kendala dan masalah dalam usaha ini adalah semakin sulitnya mendapatkan bahan baku karena banyaknya hutan gundul di sekitar Sekotong Tengah. Selain itu saingan dari industri penggergajian kayu juga semakin banyak.

Industri Pariwisata di Desa Sekotong Barat, Lombok Barat

Hotel Sekotong Indah dibangun sekitar tahun 1990-an dan telah beroperasi sekitar 10 tahun. Hotel kelas melati ini menyerap tenaga kerja

15 orang yang berasal dari dalam desa. Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002 menyebabkan sepi pengunjung dan akhirnya berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Saat penelitian berlangsung tinggal 4 orang lagi yang masih bekerja.

Melihat potensi keindahan pantai dan batu karangnya, maka daerah ini sebenarnya mempunyai prospek yang bagus untuk pengembangan pariwisata. Menurut aparat setempat sebenarnya sedang dibangun hotel berbintang yang dibiayai oleh investor dari Amerika. Namun pembangunan tersendat sejak terjadi bom Bali.

Kerajinan Tenun Sutera di Desa Dualimpoe, Wajo

Usaha kerajinan tenun sutera sudah merupakan budaya masyarakat Wajo. Produk kerajinan tenun ini dikenal dengan tenun sutera Sengkang. Di Desa Dualimpoe terdapat sekitar 20 pengrajin tenun. Secara tradisional, kaum wanita, terutama ibu rumah tangga, di pedesaan ini umumnya membuat tenun sutera untuk mengisi waktu luangnya walaupun pekerjaan ini memerlukan curahan kerja yang cukup besar. Pengrajin membeli bahan sutera (cocon) di Kota Sengkang, kemudian cocon dipintal secara tradisional menjadi benang. Setelah itu benang ditenun dengan menggunakan alat yang masih sederhana (ATBM = Alat Tenun Bukan Mesin). Kegiatan ini merupakan kegiatan turun temurun yang secara alami diturunkan kepada anak perempuan.

Untuk menyelesaikan satu sarung diperlukan waktu sekitar dua minggu, tergantung tingkat kesulitannya, sedangkan harga sarung saat penelitian berkisar antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Keuntungan yang diperoleh pengrajin antara Rp 40 ribu sampai Rp 100 ribu per sarung. Pengrajin terbanyak ditemukan di Desa Dualimpoe (desa contoh utama). Kendala dan masalah dalam industri ini adalah bahan baku semakin mahal dan pemasaran kurang lancar, sementara modal terbatas. Selama ini pembinaan dari dinas terkait masih kurang terutama dalam desain dan pemasaran. Pengrajin mengharapkan adanya bantuan modal lunak dan kemudahan dalam pemasaran produk.

Industri Penggilingan Padi (RMU), di Desa Dualimpoe, Wajo

Industri penggilingan padi yang berlokasi di Desa Dualimpoe sudah beroperasi sejak tahun 1990-an. Di desa ini terdapat sekitar 12 unit RMU, namun sejak krisis ekonomi, hanya 8 unit yang beroperasi.

Tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dua orang, satu orang untuk kegiatan menjemur dan pengangkutan dan satu orang lagi sebagai penggiling. Sebelum krisis, tenaga tersebut berjumlah empat orang. Selain tenaga di RMU, responden juga memperkerjakan supir dan kenek truk (milik responden) dalam pengiriman barang.

Biasanya pasokan bahan baku (gabah) yang diolah di penggilingan berasal dari petani dalam Desa Dualimpoe (80%) dan sisanya dari desa

sekitar (20%). Sebelum krisis, rata-rata dalam satu musim panen padi RMU ini dapat mengolah antara 100–150 ton, namun setelah krisis volume tersebut semakin menurun. Pada musim panen terakhir (MH 2004/05) RMU hanya bisa menggiling sekitar 25 ton GKP termasuk separuhnya milik sendiri. Menurut responden, penurunan omset tersebut antara lain disebabkan oleh terbatasnya modal. Sebelum krisis responden membeli gabah ke petani dengan sistem panjar, artinya sebagian (biasanya sekitar 25-50%) dibayar sewaktu mengambil gabah dan sisanya setelah hasil beras tersebut laku terjual, sekitar 20-40 hari setelah pengambilan barang. Sejak krisis, petani menginginkan pembayaran tunai sewaktu pengambilan gabah, sementara modal pemilik RMU terbatas. Karena itu responden sangat mengharapkan kredit modal tanpa bunga atau dengan bunga rendah seperti dana penguatan modal (DPM-LUEP). Menurut responden dana talangan LUEP dari pemerintah di Desa Dualimpoe justru dialokasikan pada RMU yang sudah memiliki modal cukup. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa RMU yang berkembang di desa ini adalah yang memiliki modal besar karena mampu membayar tunai gabah petani.

Responden biasanya menjual hasil berupa beras ke luar kabupaten, terutama Kabupaten Mamuju. Agar efisien, sepulang dari Mamuju truk tersebut memuat barang/hasil pertanian seperti kakao. Masalah dan kendala usaha RMU menurut responden antara lain adalah persaingan antar pengolah dan kesulitan bahan baku karena keterbatasan modal.

Industri Konveksi di Desa Toyamang, Pinrang

Industri ini sebenarnya sedang tidak memproduksi saat penelitian ini dilakukan, bahkan sudah sekitar satu tahun ini berhenti berusaha. Industri ini sempat beroperasi sekitar 3 tahun. Saat memproduksi tenaga yang terlibat berjumlah 4 orang di luar tenaga keluarga.

Kendala utama pengembangan industri ini adalah pemasaran. Selama ini produsen mengandalkan satu pedagang pakaian yang mendistribusikan produk tersebut di pasar kecamatan dan kabupaten. Karena pedagang berhenti membeli produknya, produsen kesulitan untuk memasarkan, sehingga untuk sementara tidak beroperasi. Industri ini sangat potensial untuk menyerap tenaga kerja, terutama wanita, selain pemasaran, masalah yang dihadapi adalah keterbatasan modal.

Pabrik Pengolahan Kelapa Terpadu, di Kelurahan Teppo, Pinrang

Pabrik pengolahan kelapa terpadu secara fisik sebenarnya sudah siap beroperasi, tetapi pada saat penelitian dilaksanakan belum operasional. Terkait dengan ini, telah ada permintaan tenaga kerja dari Kelurahan Teppo sekitar 100 orang sebagai tenaga pengupas dan tenaga panjat, akan tetapi upah yang ditawarkan masih belum disepakati.

Belum beroperasinya pabrik tersebut antara lain disebabkan oleh belum tersedianya bahan baku. Petani sebagai pemasok bahan baku belum sepakat dengan harga yang ditentukan oleh pabrik. Sebelumnya harga disepakati Rp 500 per butir kelapa dengan catatan terima di pabrik. Menurut petani harga tersebut masih rendah karena petani masih menanggung biaya transpor yang bervariasi antar petani, tergantung jauh dekatnya jarak dengan pabrik. Padahal kalau petani menjual kelapa kepada pedagang pengumpul dengan harga yang sama petani tidak menanggung biaya transpor. Oleh karena itu petani menuntut harga yang disepakati berlaku di lokasi petani/produsen. Dari pihak pabrik, harga tersebut dikaitkan dengan perhitungan kelayakan usaha sehingga masih diperlukan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Unit Usaha Industri Pakan Koperasi “SAE” Pujon, Malang

Sebenarnya usaha utama koperasi “SAE” Pujon adalah mengelola dan memasarkan susu anggotanya. Namun untuk menunjang usaha tersebut, koperasi ini juga melakukan beberapa unit usaha industri. Unit usaha industri yang dilakukan oleh koperasi “SAE” antara lain adalah mengusahakan pakan untuk anggotanya. Sebagai gambaran, pada tahun 2002 tercatat jumlah anggota 6721 peternak dengan jumlah populasi ternak sapi perah 20.031 ekor. Jenis konsentrat yang diproduksi adalah:

1. Konsentrat jadi “SAEPROFEED” untuk sapi laktasi. Konsentrat ini merupakan produk dominan yang diusahakan, sekitar 45 ton per hari., Bahan baku utama produk ini adalah bungkil kedelai dan polar yang keduanya merupakan komponen impor. Pabrik merekomendasikan penggunaan 1 kg konsentrat ini untuk menghasilkan 2 liter susu.
2. Konsentrat jadi “SAEPROFEED JUNIOR” untuk pedet.
3. Susu formula untuk anak sapi yang disebut *calf milk replacer* (CMR) yang bahan bakunya berasal dari susu kadaluarsa yang ada di pasaran. Produk ini relatif kurang berkembang karena bahan baku yang sulit dan permintaan yang relatif kecil.

Selain mengolah pakan ternak, koperasi juga mengolah susu pasteurisasi. Usaha ini baru berjalan sekitar 4 tahun terakhir dengan tenaga kerja yang terlibat berjumlah 4 orang. Sementara itu, jumlah produk yang dihasilkan masih relatif kecil, sekitar 100–150 liter per hari, meskipun pada hari-hari libur biasanya dapat lebih dari jumlah tersebut. Selama ini pemasaran masih terbatas di sekitar wilayah koperasi sehingga punya prospek untuk pengembangan yang lebih luas. Pesaing utama dari produk ini adalah industri susu pasteurisasi dari KUD Batu yang telah lama memproduksi jenis susu yang sama dengan pemasaran yang relatif luas.

Pabrik Tahu di Desa Pandesari, Malang

Pabrik tahu ini berdiri sejak tahun 1999, rata-rata beroperasi 24 hari per bulan. Bahan baku rata-rata 1,5 kuintal per hari, dibeli dari pasar Batu dengan harga sekitar Rp 3700/kg.

Tenaga kerja dominan 3 orang dari dalam keluarga dan 2 orang dari luar keluarga. Sistem upah yang digunakan adalah borongan berdasarkan bahan baku, yakni Rp 30.000/ku. Selain bahan baku, biaya yang dikeluarkan antara lain adalah kayu bakar Rp 60.000/kuintal bahan baku dan minyak goreng sebesar Rp 90.000/kuintal bahan baku.

Hasil produksi rata-rata 10 kotak, dalam satu kotak dijadikan 40 potong dengan harga rata-rata Rp 2000 per potong besar. Potongan tersebut bisa dipotong lagi lebih kecil tergantung kemauan pembeli/konsumen. Hasil samping produk ini adalah 3 sak ampas tahu (dari 1,5 ku kedelai) yang dijual seharga Rp 10.000. Sekitar 70% tahu dijual dalam bentuk mentah dan sisanya dijual dalam bentuk sudah digoreng.

Pemasaran dilakukan sendiri oleh produsen ke Pasar Batu-Malang. Setelah semua biaya diperhitungkan, hasil bersih yang diperoleh adalah sekitar Rp 100.000/hari. Pabrik ini agak sulit dikembangkan karena masalah pemasaran. Menurut produsen di pasaran banyak pesaing, sementara permintaan relatif tetap. Dari segi bahan baku tidak ada masalah, karena bahan baku tersebut mudah diperoleh di pasar. Pembuatan tahu ini mengutamakan hasil produksi kedelai lokal.

Usaha Jasa Pengolahan Tahu di Desa Krecek, Pare, Kediri

Usaha ini berdiri sejak tahun 1998 dengan investasi awal senilai Rp 20 juta untuk pembelian ketel yang berasal dari iuran jamaah sebuah ormas berbasis agama. Pada awal berdirinya, usaha ini bergerak pada kegiatan mengolah dan menjual tahu sendiri. Manajemen operasional diberikan kepada salah seorang warga yang diberi kepercayaan dengan pengawasan dari pengurus ormas tersebut. Jumlah karyawan saat itu sebanyak 5 orang bertugas di bagian produksi dan sekitar 20 orang “loper” yang bertugas sebagai penjual tahu di pasar terdekat atau berkeliling dari kampung ke kampung di wilayah desa sekitar.

Oleh karena dianggap kurang menguntungkan, sejak tiga tahun lalu, berdasarkan kesepakatan anggota ormas pola usaha dan manajemen industri tahu ini berubah. Perusahaan hanya melayani jasa pembuatan tahu dengan karyawan tetap 2 orang yang bekerja dari jam 08.00 hingga jam 16.00. Dengan demikian penerimaan usaha hanya berasal dari ongkos masak sebesar Rp 850 per bak (ukuran 0.5 x 0.5 m²). Penyediaan bahan baku dan pemasaran produksi dilakukan oleh “pihak pemesan”. Sedangkan bahan bakar yang menggunakan serbuk gergaji atau bonggol jagung, ditanggung oleh pengusaha. Para pemesan tersebut juga menjadi penentu ukuran tahu (berapa jumlah tahu per bak) yang akan dibuat.

Dari ongkos masak tersebut Rp 300 dibayarkan kepada kedua karyawan, sedangkan sisanya yang Rp 550 menjadi penerimaan perusahaan. Namun demikian, tidak jarang para pemesan juga ikut membantu dalam proses produksi tahu tersebut. Sejak perubahan pola usaha ini, keuntungan perusahaan cenderung meningkat. Dalam tiga

tahun terakhir, keuntungan bersih yang diperoleh mencapai Rp 500.000/bulan atau sekitar Rp 6 juta/tahun.

Industri Senapan Angin, di Desa Cangu, Kediri

Industri senapan angin di Desa Cangu dibangun tahun 1993 dan telah beroperasi sekitar 10 tahun. Awalnya industri ini merupakan industri rumah tangga yang hanya menggunakan 3 orang tenaga di luar keluarga. Dalam perkembangannya, industri ini dapat menyerap sekitar 15 tenaga kerja. Kapasitas produksi sekitar 100 unit per minggu, namun pada waktu krisis sempat tidak berproduksi selama sekitar satu tahun karena harga bahan baku mahal dan modal terbatas. Industri ini mulai beroperasi lagi sejak tiga tahun yang lalu walaupun masih berkapasitas kecil dan menggunakan tenaga kerja sekitar 5-10 orang.

Bahan baku pembuatan senapan angin diperoleh dari Surabaya. Produk ini sebagian besar dijual ke Surabaya (90 %) dan sisanya ke kota sekitar Kediri. Kendala dan masalah dalam industri ini antara lain adalah keterbatasan modal dan pemasaran sehingga sulit berkembang.

Tabel 23. Perkembangan Sistem dan Nilai Upah Pertanian (Rp 000), di Desa Contoh Menurut Agroekosistem

Kegiatan/tahun	Luar Jawa			Jawa		
	AES lahan kering hortikultura	AES lahan kering tan.pangan	AES lahan kering tan perkebunan	AES sawah tan pangan	AES lahan kering peternakan	AES sawah tan pangan
TAHUN 1996						
Buruh pertanian						
1. Borongan (olah lahan)						
- ternak*)	-	-	-	-	-	200-250
- traktor*)	150-200	-	-	-	200	200-250
2. Upah harian	6-7	5-7	-	-	-	-
3. Panen*)	150-200	150-200	-	-	-	-
TAHUN 1999						
Buruh pertanian						
1. Borongan (olah lahan)						
- tanam				200-350		
- ternak*)	-	10-15	-	-	-	300-400
- traktor*)	250-300	-	250-300	250-300	-	300-400
2. Upah harian	9-12	7-12	10-12	10-12	7-10	7-10
3. Panen*)	250	250	7 : 1	6 : 1	-	-
TAHUN 2004/05						
Buruh Pertanian						
1. Borongan (olah lahan)						
- tanam				200-250		
tabela & tapin			400-450	400-450		
- ternak*)		15-20			-	500-560
- traktor*)	400-450	-	450-500	400-450	-	500-560
2. Upah harian	15-20	15-20	15-20	20-25	8	12
3. Panen*)	300-350	250-300	7 : 1	6 : 1	300	250
Buruh nonpertanian						
- Buruh bangunan (harian)	30-35	25-30	30-35	30	20-25	20-25

Sumber : *Group interview* dengan kepala kelurahan/desa

Keterangan : *) Sistem borongan; di Sulsel buruh panen dikenal dengan istilah deros yang rasio upahnya berkisar antara 6:1 - 8:1

III. DIVERSIFIKASI USAHA DAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA

3.1. Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga

Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan suatu proses pembangunan antara lain tercermin dari adanya perubahan pendapatan masyarakat tersebut ke tingkat yang lebih baik. Meski pola perubahan antarsektor atau sumber pendapatan dapat berbeda, antarkelompok masyarakat dan antarwilayah, akan tetapi terjadinya peningkatan pendapatan secara umum mengindikasikan pencapaian tingkat kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Di tingkat mikro (rumah tangga), peningkatan pendapatan dapat dipandang sebagai hasil alokasi optimal atas pemilikan sumber daya internal.

Dalam konteks kesejahteraan, salah satu masalah pembangunan nasional yang belum dapat ditangani dengan baik adalah kesenjangan sosial antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Kesenjangan tidak hanya telah memisahkan yang kaya dari yang miskin, tetapi berbagai turunan masalah di bidang ekonomi, sosial dan bahkan politik kemudian ikut muncul karena penanganan masalah tersebut ternyata tidak mudah. Ketertinggalan masyarakat desa, khususnya di luar Jawa, tingginya arus migrasi yang mendorong kemiskinan kota, atau semakin gencarnya aksi protes yang menyuarakan keadilan hakekatnya merupakan kondisi yang muncul sebagai refleksi dampak kesenjangan sosial yang semakin sulit dikendalikan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara nasional telah terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga pada kurun waktu 1996-2002. Dalam nilai nominal, rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat lebih dari 300% dalam kurun waktu tersebut, yaitu dari Rp 1,03 juta pada tahun 1996 menjadi Rp 4,16 juta/kapita/tahun pada tahun 2002. Indikasi kesenjangan dapat diamati dari besarnya perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah. Hasil analisis menunjukkan pendapatan rumah tangga di kota dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di desa. Tahun 1996, rata-rata pendapatan rumah tangga di kota adalah sebesar Rp 1,43 juta sedangkan di desa hanya Rp 764,40 ribu/kapita/tahun. Pada tahun 2002, rata-rata pendapatan rumah tangga di kedua wilayah masing-masing mencapai Rp 6,10 juta dan Rp 2,57 juta/kapita/tahun (Tabel 25).

Peningkatan indeks harga umum secara dramatis yang dipicu krisis ekonomi tahun 1997/98 mengakibatkan peningkatan nominal pendapatan tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga. Hal ini terindikasi dari nilai pendapatan setara beras. Bila nilai pendapatan tersebut dikonversi dengan harga beras ternyata peningkatan pendapatan yang terjadi hanya sekitar 22,5%, yaitu dari setara 1058 kg menjadi setara 1296 kg/kapita/tahun di tingkat agregat nasional. Di wilayah kota, selama periode 1996-2002 rata-rata pendapatan rumah tangga meningkat dari 1414 kg menjadi 1804 kg/kapita/tahun, sedangkan di

desa dari 822 kg menjadi 878 kg/kapita/tahun (Tabel 25) atau masing-masing meningkat hanya 21,6% dan 6,8%.

Tabel 25. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Kota		Desa		Kota+Desa	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	50,65	59,56	27,80	31,02	40,40	49,88
2. Pendapatan usaha pertanian	4,30	2,72	39,08	34,19	19,87	13,39
- tanaman pangan & nonpangan	2,63	1,86	31,11	27,76	15,39	10,64
- lainnya (peternakan, dsb)	1,67	0,86	7,97	6,43	4,48	2,75
3. Pendapatan usaha nonpertanian	28,08	25,10	20,56	20,04	24,72	23,38
4. Pendapatan bukan upah/gaji	16,93	9,01	11,26	8,20	14,40	8,74
- perkiraan sewa rumah	12,08	8,28	6,69	4,88	9,67	7,13
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,85	0,73	4,57	3,32	4,73	1,61
5. Pendapatan lain	0,48	3,61	1,24	6,56	0,82	4,61
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	1429	6099	764	2569	1029	4160
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	1414	1804	822	878	1058	1296

Sumber: BPS, diolah.

Relatif rendahnya nilai nominal dan laju peningkatan pendapatan rumah tangga di desa mengisyaratkan “ketertinggalan” rumah tangga desa dan potensi kesenjangan kesejahteraan di antara rumah tangga desa dan kota. Sebagaimana ditunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1996 maupun 2002 proporsi penduduk miskin di desa relatif lebih banyak dibandingkan di kota (BPS, 1998 dan 2003). Apabila nilai pendapatan rumah tangga pada Tabel 25 dikonversi dalam nilai dolar AS, dengan asumsi pada tahun 1996 nilai 1 US\$ = Rp 2.342 dan tahun 2002 nilai 1 US\$ = Rp 9.523 maka pendapatan rumah tangga di desa hanya US\$ 326 dan US\$ 270. Pada tingkat pendapatan sebesar itu, berdasarkan kriteria Bank Dunia, seluruh rumah tangga di desa adalah rumah tangga miskin. Menurut Bank Dunia batas garis kemiskinan adalah bila pendapatan seseorang per harinya kurang dari satu dolar AS.

Di tingkat regional, berbeda dari dua provinsi contoh Jawa Timur dan NTB, kinerja pendapatan rumah tangga di Sulawesi Selatan dalam nilai riil bahkan telah menunjukkan peningkatan yang negatif dalam kurun 1996-2002. Artinya, dalam setara beras, pendapatan rumah tangga di provinsi tersebut pada tahun 2002 lebih rendah dibandingkan tahun 1996. Di Jawa Timur, pendapatan setara beras rumah tangga meningkat 10,8%, dari 816 kg menjadi 904 kg/kapita/tahun. Di NTB pendapatan rumah tangga meningkat 10,6%, dari 765 kg menjadi 846 kg/kapita/tahun. Adapun di Sulawesi Selatan, pendapatan setara beras berkurang 4,2%, dari 1128 kg menjadi 1081 kg/kapita/tahun (Tabel 26). Apabila ditelusuri lebih jauh, situasi penurunan pendapatan di Sulawesi Selatan tersebut ternyata dipicu kinerja pendapatan rumah tangga di wilayah desa yang mengalami penurunan, sedangkan untuk wilayah kota rataan pendapatan rumah tangga menunjukkan peningkatan, baik dalam nominal maupun nilai riil (Tabel Lampiran 4 dan 5).

Tabel 26. Perubahan Struktur Pendapatan di Daerah Kota dan Desa Provinsi Contoh, 1996-2002

Sumber pendapatan	Jatim		NTB		Sulsel	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	39,87	41,49	31,49	30,82	34,68	30,30
2. Pendapatan usaha pertanian	21,83	16,80	26,74	20,14	21,83	28,51
- tanaman pangan & nonpangan	17,28	12,87	22,18	16,44	16,83	24,72
- lainnya (peternakan, dsb)	4,55	3,92	4,56	3,71	5,00	3,79
3. Pendapatan usaha nonpertanian	24,18	22,70	22,13	25,22	22,94	22,54
4. Pendapatan bukan upah/gaji	13,27	8,01	10,90	9,97	14,71	9,24
- perkiraan sewa rumah	7,49	5,63	6,99	5,96	7,90	5,93
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,78	2,38	3,91	4,01	6,82	3,31
5. Pendapatan lain	0,79	11,01	8,74	13,85	5,50	9,41
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	786	2909	721	2429	876	4374
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	816	904	765	846	1128	1081

Sumber: BPS, diolah.

Dinamika struktur pendapatan rumah tangga secara agregat dicirikan oleh relatif dominannya proporsi pendapatan dari upah dan gaji, khususnya di kota dengan kecenderungan laju yang makin meningkat pada periode 1996-2002. Kontribusi pendapatan dari upah dan gaji dalam struktur pendapatan total rumah tangga mencapai 40,4% pada tahun 1996 dan meningkat menjadi 49,9% pada tahun 2002. Di perkotaan pangsa pendapatan dari upah dan gaji mencapai 50,6% dan meningkat menjadi 59,6% pada kedua tahun tersebut. Pendapatan terbesar kedua berasal dari usaha nonpertanian dengan pangsa cenderung menurun dari 24,7% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 2002. Dalam kategori usaha nonpertanian ini kegiatan perdagangan menjadi sumber usaha yang penting dengan kontribusi pada tahun 2002 sekitar 12,3% (Tabel Lampiran 6). Kontribusi usaha pertanian cenderung menurun dari 19,9% menjadi 13,4% pada periode 1996-2002. Usaha pertanian di kota hanya memberikan kontribusi 4,3% dan berkurang menjadi 2,7% pada tahun 2002.

Di pedesaan, meskipun kontribusi pendapatan dari upah dan gaji serta usaha nonpertanian (yang didominasi kegiatan perdagangan) masih cukup besar, tetapi pangsa pendapatan tertinggi berasal dari usaha pertanian yang mencapai 34,2% pada tahun 2000 (Tabel 25). Pangsa tersebut lebih rendah dibandingkan pangsa pada tahun 1996 yang mencapai 39,1%. Fakta ini menunjukkan bahwa bagi rumah tangga di pedesaan, sektor pertanian masih merupakan sektor strategis sehingga pembangunan wilayah pedesaan seharusnya tetap memprioritaskan penanganan sektor tersebut sehingga dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat lebih nyata. Kecenderungan dominasi peran sektor pertanian dalam pembentukan struktur

pendapatan rumah tangga pedesaan cenderung tinggi di daerah dengan potensi sumber daya pertanian yang masih besar dan usaha nonpertanian belum pesat berkembang. Pada Tabel 26 dapat disimak, kontribusi usaha pertanian di Sulawesi Selatan relatif lebih besar dibandingkan di Jawa Timur di mana usaha nonpertanian relatif lebih berkembang maupun di Nusa Tenggara Barat yang potensi sumber daya pertanian lebih terbatas.

Hal lain yang menarik disimak dalam perubahan struktur pendapatan rumah tangga di Indonesia adalah peran pendapatan bukan upah/gaji (*non wage income*) yang semakin turun pada periode 1996-2002, khususnya di kota. Kecenderungan penurunan pangsa pendapatan tersebut boleh jadi mengindikasikan semakin terbatasnya penguasaan aset produktif rumah tangga (seperti lahan, rumah, saham, dan tabungan) maupun penerimaan bukan usaha dari berbagai aktivitas ekonomi rumah tangga.

Di sisi lain, data struktur pendapatan rumah tangga tahun 1996 dan 2002 menunjukkan adanya peningkatan pangsa pendapatan dari sumber lain (pendapatan lain). Pendapatan lain dalam analisis ini merupakan penerimaan rumah tangga yang diperoleh dari transfer neto dan transaksi keuangan selama setahun. Peningkatan pangsa pendapatan yang berasal dari sumber tersebut diduga terjadi seiring dengan makin tingginya porsi penerimaan kiriman uang dari anggota rumah tangga yang bermigrasi. Sebagaimana dimaklumi, minat orang (tenaga kerja) bermigrasi ke daerah kota atau bahkan ke luar negeri untuk bekerja semakin tinggi karena kesempatan kerja dan berusaha di daerah asal, khususnya pedesaan, semakin terbatas.

Kesenjangan pendapatan juga terjadi antarsektor dalam perekonomian. Secara nasional (Tabel 27) maupun regional (Tabel 28 sampai dengan Tabel 30) tingkat pendapatan rumah tangga di mana kepala keluarga memiliki pekerjaan utama di sektor pertanian ternyata lebih rendah dibandingkan rumah tangga dimana kepala keluarga memiliki pekerjaan utama di sektor lain seperti industri, perdagangan maupun jasa. Selain karena faktor nilai tukar pertanian yang cenderung menurun (Departemen Pertanian, 2004) kondisi demikian diduga tidak terlepas dari pengaruh situasi struktur perekonomian secara makro. Dari data Produk Domestik Bruto (PDB) dan data ketenagakerjaan diketahui bahwa secara agregat nasional produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian relatif lebih rendah dibandingkan dengan ketiga sektor lain. Rendahnya produktivitas sektor pertanian tersebut terjadi sebagai akibat transformasi perekonomian nasional yang tidak sempurna, dimana penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan nilai PDB tidak secara langsung diikuti oleh penurunan pangsa penyerapan tenaga kerja pada tingkat laju yang seimbang (Rusastra dan Suryadi, 2004). Situasi kesenjangan pendapatan antarsektor seperti di atas mengisyaratkan perlunya upaya percepatan pengembangan kesempatan kerja di sektor nonpertanian (*labor intensif*) untuk mengurangi tekanan tenaga kerja di sektor pertanian di samping upaya revitalisasi pertanian yang telah dicanangkan.

Pada rumah tangga yang pekerjaan utama kepala keluarganya adalah petani, kontribusi pendapatan dari usaha pertanian secara agregat mencapai 61,5% pada tahun 1996, kemudian berkurang menjadi 41,4% pada tahun 2002. Di tingkat regional kontribusi ini bervariasi antarwilayah dan antartahun dimana kontribusi tertinggi terdapat provinsi Sulawesi Selatan. Namun demikian, berbeda dari pola nasional maupun provinsi contoh lainnya, di Sulawesi Selatan kontribusi pendapatan rumah tangga yang berasal dari usaha pertanian cenderung meningkat pada tahun 2002. Peningkatan tersebut terutama berasal dari usaha tanaman pangan dan nonpangan. Kontribusi usaha tanaman pangan dan nonpangan meningkat 8%, dari 49,8% menjadi 57,8% pada periode 1996-2002. Pada rumah tangga nonpertanian kontribusi usaha pertanian hanya berkisar antara 1,9-6,4%. Variasi kontribusi masing-masing sumber pendapatan pada rumah tangga kota dan desa di tingkat agregat nasional maupun regional dapat disimak pada Tabel Lampiran 7 sampai dengan Tabel Lampiran 14.

Disagregasi rumah tangga menurut kelas pendapatan memperlihatkan bahwa pangsa pendapatan pertanian semakin menurun dengan semakin tingginya pendapatan rumah tangga. Sebagai gambaran, secara agregat nasional pada rumah tangga kelas pendapatan rendah pangsa pendapatan dari pertanian mencapai 38,7% pada tahun 1996 dan 26,1% pada tahun 2002 (Tabel 31). Akan tetapi, pada rumah tangga kelas pendapatan sedang pangsa tersebut menurun menjadi 24,0% dan 12,1%, sedangkan pada kelas pendapatan tinggi hanya 8,2% dan 5,5% pada periode yang sama. Kecenderungan serupa juga terjadi pada tingkat regional provinsi (Tabel 32- sampai dengan Tabel 34). Kenyataan ini menegaskan kuatnya korelasi antara sektor pertanian dengan “pendapatan rendah” sehingga citra bahwa pertanian “identik” dengan kemiskinan masih sulit dihilangkan.

Di sisi lain, pangsa pendapatan dari upah dan gaji, usaha nonpertanian dan pendapatan bukan upah (*non wage income*) cenderung meningkat dengan semakin tingginya kelas pendapatan rumah tangga. Namun jika dibandingkan antarwaktu, pangsa pendapatan dari *non wage income* tahun 2002 pada masing-masing kelas pendapatan dan usaha nonpertanian di Jawa dan Luar Jawa pada kelas pendapatan rendah hingga sedang cenderung lebih rendah dibandingkan pada tahun 1996, khususnya di tingkat regional. Kecenderungan ini diduga terkait dengan situasi “recovery” yang belum sempurna dari kondisi makro ekonomi setelah mengalami krisis pada tahun 1997/98.

Apabila dibandingkan antarwilayah (desa vs kota) dapat disebutkan bahwa untuk masing-masing kelas pendapatan kontribusi dari usaha pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga di kota relatif kecil, terlebih untuk kelas pendapatan tinggi yang di tingkat agregat hanya 2,6% tahun 1996 dan kemudian berkurang menjadi 1,5% pada tahun 2002. Di pedesaan kontribusi usaha pertanian terhadap pendapatan rumah tangga sekitar 31%. Di tingkat regional, kecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat, kontribusi pendapatan dari usaha pertanian pada struktur pendapatan rumah tangga kota kurang dari 4% (Tabel Lampiran 15 sampai dengan Tabel Lampiran 22).

Tabel 31. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,02	34,38	39,64	58,39	51,33	49,83
2. Pendapatan usaha pertanian	38,72	26,14	24,04	12,13	8,15	5,51
- tanaman pangan & nonpangan	31,42	21,32	18,45	9,51	5,65	4,14
- lainnya (peternakan, dsb)	7,30	4,82	5,59	2,62	2,50	1,37
3. Pendapatan usaha nonpertanian	21,16	21,23	26,60	19,29	28,21	30,66
4. Pendapatan bukan upah/gaji	9,79	9,39	11,23	6,03	15,15	11,97
- perkiraan sewa rumah	6,49	6,08	8,03	4,93	12,34	10,94
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,31	3,31	3,19	1,10	2,82	1,03
5. Penerimaan lain	0,66	8,86	-1,18	4,15	-2,69	2,04
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	558,9	2504,1	968,9	4578,4	2097,5	6634,6
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	603	809	1014	1448	2065	1963

Sumber: BPS, diolah

Tabel 32. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Jawa Timur, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,84	30,25	39,30	42,62	51,07	47,16
2. Pendapatan usaha pertanian	36,06	29,00	26,48	17,46	13,59	8,94
- tanaman pangan & nonpangan	28,70	22,06	21,12	13,77	10,52	6,61
- lainnya (peternakan, dsb)	7,36	6,94	5,36	3,69	3,07	2,33
3. Pendapatan usaha nonpertanian	22,47	16,55	27,29	24,30	26,21	24,94
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,81	10,73	10,05	7,28	11,20	7,03
- perkiraan sewa rumah	5,76	5,93	6,51	5,22	8,47	5,82
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,05	4,80	3,54	2,06	2,73	1,22
5. Pendapatan lain	-0,24	13,47	-3,22	8,34	-2,07	11,93
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	412	1740	722	2607	1629	5849
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	447	546	772	802	1626	1824

Sumber: BPS diolah.

Tabel 33. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	23,35	28,97	25,52	31,09	46,56	31,88
2. Pendapatan usaha pertanian	36,95	25,13	35,10	24,18	16,94	13,11
- tanaman pangan & nonpangan	29,15	21,61	29,51	19,79	14,37	9,86
- lainnya (peternakan, dsb)	7,80	3,52	5,59	4,39	2,57	3,24
3. Pendapatan usaha nonpertanian	21,53	12,61	25,83	25,21	22,64	34,03
4. Pendapatan bukan upah/gaji	8,41	12,56	9,89	10,27	11,25	7,90
- perkiraan sewa rumah	6,12	7,03	6,87	5,89	7,61	5,27
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,29	5,53	3,01	4,38	3,63	2,62
5. Pendapatan lain	9,78	20,73	3,66	9,25	2,62	13,09
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	377,4	1646,4	668,3	2074,2	1523,0	4699,0
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	406	599	722	727	1584	1580

Sumber: BPS, diolah.

Tabel 34. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	14,42	11,79	35,33	31,50	56,17	41,39
2. Pendapatan usaha pertanian	52,12	47,20	25,07	37,07	9,37	8,61
- tanaman pangan & nonpangan	41,79	42,09	19,48	32,04	6,14	6,79
- lainnya (peternakan, dsb)	10,33	5,10	5,60	5,04	3,23	1,82
3. Pendapatan usaha nonpertanian	20,89	12,40	29,51	19,11	25,11	32,27
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,10	11,65	11,88	11,65	13,03	8,62
- perkiraan sewa rumah	6,41	7,00	7,14	5,81	8,93	5,33
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,70	4,66	4,74	2,34	4,11	3,28
5. Pendapatan lain	1,47	16,96	-2,04	4,18	-4,43	9,12
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	425,7	1785,7	810,2	2429,5	1858,2	5428,3
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	573	718	1062	953	2334	2062

Sumber: BPS, diolah

3.2. Distribusi Pendapatan Rumah Tangga

Salah satu tujuan akhir pembangunan nasional adalah meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah secara merata. Sebagaimana telah

diungkapkan, kondisi ideal yang tanpa senjang tersebut belum dapat diwujudkan. Data sebelumnya menunjukkan indikasi masih adanya kesenjangan pendapatan (kesejahteraan) rumah tangga antarwilayah maupun antarsektor (bidang pekerjaan). Dalam penelitian ini analisis indeks Gini dilakukan untuk mengevaluasi derajat ketimpangan atau ketidakmerataan distribusi pendapatan rumah tangga selama periode 1996-2002.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam periode 1996-2002 ketidakmerataan distribusi pendapatan cenderung meningkat (Tabel 35). Di tingkat agregat, sesuai kriteria Oshima (1976) ketidakmerataan distribusi pendapatan rumah tangga dalam tahun 1996 tergolong sedang ($G=0,40$). Akan tetapi pada tahun 2002, dengan rata-rata indeks Gini sebesar 0,51 berarti ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga tersebut termasuk kategori berat. Apabila dibedakan menurut wilayah, terlihat bahwa ketimpangan yang berat sebenarnya hanya terjadi di kota, sedangkan di desa ketimpangan distribusi pendapatan relatif masih ringan ($G=0,37$). Secara regional, pada tahun 2002 ketimpangan distribusi pendapatan di ketiga provinsi contoh juga relatif masih ringan ($G<0,40$).

Tabel 35. Indeks Gini Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Daerah, 1996 dan 2002

Provinsi	Kota		Desa		Kota+Desa	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
Jatim	0,34	0,37	0,28	0,33	0,33	0,37
NTB	0,34	0,38	0,28	0,30	0,33	0,34
Sulsel	0,34	0,36	0,32	0,33	0,35	0,37
Indonesia	0,41	0,54	0,33	0,37	0,40	0,51

Sumber: BPS, diolah

Dalam format yang lebih rinci, ketidakmerataan distribusi pendapatan dapat disimak pada Tabel 36. Secara agregat, ketidakmerataan semakin tinggi pada kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi. Bila dibandingkan antarjenis pekerjaan utama kepala rumah tangga ternyata ketimpangan yang tinggi terdapat pada rumah tangga pertanian dan industri ($G=0,47$). Namun demikian, laju peningkatan ketidakmerataan yang lebih tinggi adalah pada rumah tangga yang pekerjaan utama kepala keluarganya di sektor industri, kecuali di Sulawesi Selatan. Di provinsi tersebut peningkatan ketidakmerataan yang tinggi adalah pada rumah tangga dimana kepala keluarganya memiliki pekerjaan utama di sektor perdagangan. Menurut Santosa dan Hermanto (1983), dari studi di Jawa Timur diketahui adanya indikasi bahwa pada rumah tangga pertanian ketimpangan pendapatan dapat disebabkan oleh ketimpangan dalam pemilikan lahan pertanian.

Tabel 36. Indeks Gini Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Menurut Provinsi dan Pekerjaan Utama KK, 1996 dan 2002

Provinsi	Pekerjaan utama KK	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Jatim	Pertanian	0,12	0,20	0,09	0,21	0,18	0,44
	Industri	0,11	0,30	0,10	0,29	0,23	0,33
	Perdagangan	0,09	0,25	0,10	0,25	0,28	0,32
	Jasa	0,10	0,24	0,10	0,25	0,21	0,29
	Lainnya	0,11	0,19	0,09	0,23	0,28	0,34
NTB	Pertanian	0,11	0,22	0,09	0,20	0,21	0,32
	Industri	0,15	0,23	0,11	0,24	0,27	0,48
	Perdagangan	0,12	0,22	0,11	0,20	0,18	0,37
	Jasa	0,12	0,24	0,10	0,22	0,22	0,36
	Lainnya	0,13	0,22	0,10	0,25	0,18	0,35
Sulsel	Pertanian	0,14	0,25	0,10	0,23	0,24	0,31
	Industri	0,15	0,28	0,11	0,25	0,21	0,37
	Perdagangan	0,11	0,32	0,12	0,20	0,20	0,41
	Jasa	0,11	0,33	0,11	0,26	0,24	0,29
	Lainnya	0,11	0,26	0,10	0,27	0,24	0,28
Indonesia	Pertanian	0,22	0,35	0,20	0,33	0,32	0,47
	Industri	0,28	0,43	0,21	0,38	0,31	0,47
	Perdagangan	0,32	0,41	0,28	0,35	0,33	0,43
	Jasa	0,32	0,42	0,25	0,84	0,32	0,40
	Lainnya	0,26	0,40	0,24	0,34	0,33	0,39

Sumber: BPS, diolah.

3.3. Diversifikasi Usaha Rumah Tangga

Identifikasi sumber-sumber pendapatan rumah tangga dalam daftar pertanyaan SUSENAS 1996 tidak selengkap SUSENAS 2002. Namun demikian secara faktual hal itu tidak menjadi jaminan bahwa tingkat diversifikasi rumah tangga pada tahun 2002 akan lebih tinggi dibandingkan tahun 1996. Tingkat keragaman (diversifikasi) usaha yang menjadi sumber pendapatan rumah tangga diukur dengan Indeks Entropy (IE). Semakin besar IE menunjukkan semakin beragam sumber pendapatan rumah tangga. Hasil perhitungan IE disajikan pada Tabel 37 dan 38.

Secara nasional, terdapat kecenderungan peningkatan ragam usaha rumah tangga pada tahun 2002 dibandingkan tahun 1996. Dengan mengabaikan masalah format penggalan informasi pada kedua tahun tersebut, peningkatan itu dapat terkait dengan perbaikan perekonomian

nasional yang memberikan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Di sisi lain, kenaikan indeks Entropy itu juga dapat mengindikasikan semakin tidak memadainya kontribusi usaha dasar dalam rumah tangga sebagai andalan perolehan pendapatan sehingga rumah tangga perlu melakukan berbagai aktivitas usaha ekonomi produktif (berdiversifikasi) untuk menopang hidup.

Hasil analisis menunjukkan, ragam atau diversitas pendapatan rumah tangga di desa cenderung lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di kota. Pada Tabel 37 terlihat pula bahwa rumah tangga yang pekerjaan utama kepala keluarganya di bidang pertanian memiliki ragam usaha sumber pendapatan yang lebih tinggi dibanding rumah tangga yang kepala keluarganya bekerja di sektor industri, perdagangan, ataupun jasa. Bila dikaitkan dengan analisis sebelumnya bahwa rumah tangga di desa umumnya berpendapatan rendah dan memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap kegiatan di sektor pertanian, situasi di atas sekali lagi mengindikasikan bahwa usaha pertanian tampaknya “tidak lagi mampu memberikan jaminan” keamanan dan keberlanjutan pendapatan rumah tangga. Karena itu mereka yang pekerjaan utamanya di sektor tersebut cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang pekerjaan utamanya di sektor lain.

Pada Tabel 37 dapat disimak bahwa rumah tangga di desa, khususnya yang kepala keluarganya hidup dari bertani, memiliki indeks yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga di kota. Pola seperti itu tidak terjadi pada rumah tangga nonpertanian. Pada kelompok rumah tangga industri, misalnya, semakin tinggi pendapatan rumah tangga semakin tinggi pula diversitas usaha yang dilakukan rumah tangga. Menarik diamati bahwa untuk wilayah desa pada tahun 1996, indeks diversitas usaha rumah tangga semakin tinggi dengan meningkatnya kelas pendapatan. Tetapi pada tahun 2002 terjadi hal sebaliknya karena indeks diversitas usaha semakin turun dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga. Situasi demikian menyiratkan bahwa pada tahun 2002, dengan ketimpangan pendapatan yang besar, mereka yang termasuk kelompok berpendapatan rendah harus bekerja lebih variatif, tidak dapat lagi mengandalkan satu sumber pendapatan saja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Susilawati *et al.* (2002) berdasarkan hasil penelitian di pedesaan Jawa Barat menyimpulkan bahwa tidak ada pola yang jelas dari dampak diversifikasi terhadap tingkat pendapatan rumah tangga. Artinya, kenaikan derajat diversifikasi usaha tidak selalu berhubungan linear dengan kenaikan (nominal) pendapatan. Hasil studi tersebut menunjukkan di beberapa desa memang ada indikasi bahwa kenaikan derajat diversifikasi dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Tetapi di salah satu desa yang lain pendapatan rumah tangga masih saja rendah meskipun tingkat diversifikasi usaha rumah tangganya tergolong tinggi. Dalam hal ini kondisi dan potensi sumber daya lokal merupakan faktor penting yang

dapat berpengaruh pada *outcome* diversifikasi usaha yang dilakukan rumah tangga.

Tabel 37. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Indonesia Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Wilayah	Pekerjaan utama KK	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Kota	Pertanian	0,80	0,86	0,81	0,88	0,77	0,88
	Industri	0,44	0,29	0,57	0,74	0,62	0,86
	Perdagangan	0,42	0,62	0,44	0,67	0,48	0,72
	jasa	0,49	0,67	0,57	0,69	0,64	0,85
	Lainnya	0,57	0,68	0,54	0,71	0,55	0,84
	Total	0,53	0,59	0,55	0,72	0,59	0,82
Desa	Pertanian	0,91	0,99	0,92	0,93	0,95	0,88
	Industri	0,77	0,89	0,81	0,82	0,76	0,82
	Perdagangan	0,78	0,79	0,72	0,81	0,67	0,80
	Jasa	0,67	0,92	0,57	0,81	0,69	0,82
	Lainnya	0,79	0,82	0,81	0,76	0,84	0,80
	Total	0,87	0,94	0,83	0,88	0,82	0,85
Kota+Desa	Pertanian	0,91	0,96	0,91	0,91	0,92	0,89
	Industri	0,67	0,49	0,63	0,74	0,66	0,82
	Perdagangan	0,62	0,71	0,55	0,69	0,49	0,71
	Jasa	0,57	0,77	0,55	0,69	0,64	0,81
	Lainnya	0,73	0,76	0,68	0,70	0,61	0,82
	Total	0,80	0,83	0,70	0,78	0,65	0,81

Sumber: BPS, diolah.

Sementara itu di wilayah kota, secara umum indeks diversitas usaha makin besar ketika pendapatan rumah tangga semakin tinggi. Kondisi demikian mengisyaratkan bahwa pada rumah tangga kota diversifikasi usaha cenderung dilakukan tidak sekedar mempertahankan tingkat pendapatan tetapi lebih pada mengoptimalkan pemanfaatan atas sumber daya dalam rumah tangga sehingga dapat diperoleh nilai tambah yang lebih besar.

Pola IE di tingkat regional (provinsi) ternyata tidak selalu mengikuti atau sesuai dengan pola IE nasional. Sebagai contoh, diversitas usaha pada rumah tangga pertanian di Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat maupun Sulawesi Selatan cenderung meningkat pada rumah tangga berpendapatan sedang dan tinggi (Tabel 38). Perbedaan pola seperti ini diduga terkait dengan perbedaan lingkungan strategis antarwilayah, termasuk kemungkinan perbedaan kebijakan pendukung yang diberlaku-

kan di daerah. Perbedaan potensi sumber daya alam, tingkat perkembangan ekonomi dan sosial wilayah, kondisi infrastruktur serta respon kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor determinan yang membedakan pola diversifikasi usaha rumah tangga di atas.

Tabel 38. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK

Wilayah	Pekerjaan Utama KK	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Jatim	Pertanian	1,00	1,04	0,96	1,13	0,96	1,07
	Industri	0,65	0,52	0,59	0,70	0,67	0,95
	Perdagangan	0,70	0,60	0,65	0,73	0,65	0,84
	Jasa	0,64	0,73	0,56	0,69	0,57	0,81
	Lainnya	0,79	0,63	0,75	0,73	0,67	0,94
	Total	0,89	0,86	0,75	0,87	0,67	0,93
NTB	Pertanian	0,99	1,04	0,98	1,19	0,99	1,18
	Industri	0,91	0,80	0,82	0,74	0,79	0,94
	Perdagangan	0,84	0,69	0,76	0,74	0,64	0,81
	Jasa	0,80	0,62	0,74	0,87	0,70	0,77
	Lainnya	0,84	0,59	0,96	0,73	1,03	0,93
	Total	0,92	0,92	0,88	1,00	0,77	0,94
Sulsel	Pertanian	0,87	0,88	0,98	0,92	1,13	0,93
	Industri	0,72	0,66	0,84	0,76	0,86	0,90
	Perdagangan	0,65	0,60	0,53	0,64	0,63	0,69
	Jasa	0,47	0,81	0,51	0,57	0,61	0,85
	Lainnya	0,79	0,56	0,65	0,53	0,49	0,89
	Total	0,79	0,81	0,71	0,79	0,69	0,84

Sumber: BPS, diolah.

Pembedaan wilayah di tingkat regional (Tabel Lampiran 23) menunjukkan kecenderungan pola IE yang sama dengan di tingkat nasional. Diversitas pendapatan rumah tangga pedesaan di ketiga provinsi contoh lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Di samping itu, rumah tangga di mana kepala keluarganya bekerja di sektor pertanian juga memiliki indeks diversitas pendapatan yang lebih tinggi dibanding kelompok rumah tangga lain.

Tabel 27. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Matapencaharian Utama KK di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	15,90	29,13	57,95	48,34	24,30	33,46	65,28	79,96	64,14	56,83
2. Pendapatan usaha pertanian	61,45	41,36	5,39	6,24	6,38	4,79	3,98	1,88	5,45	6,34
- tanaman pangan & nonpangan	48,18	33,14	4,00	4,89	4,50	3,71	2,88	1,42	4,26	4,91
- lainnya (peternakan, dsb)	13,27	8,22	1,39	1,34	1,88	1,08	1,10	0,47	1,20	1,43
3. Pendapatan usaha nonpertanian	8,43	14,11	24,44	20,04	62,99	51,77	19,90	11,85	21,69	28,12
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,67	8,72	12,19	11,18	13,55	10,14	13,51	5,98	11,87	8,19
- perkiraan sewa rumah	6,72	5,28	9,71	9,62	11,21	8,97	10,42	5,54	9,48	7,07
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,95	3,44	2,48	1,56	2,34	1,17	3,09	0,44	2,39	1,12
5. Pendapatan lain	3,44	6,69	0,61	14,20	-5,85	-0,16	-2,87	0,33	-2,73	0,51
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	678	2474	11129	4748	1251	4467	1384	9789	1075	3890
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	729	851	1131	1311	1257	1353	1413	3046	1076	1236

Sumber: BPS, diolah

Tabel 28. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Matapencaharian Utama KK di Jawa Timur, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	22,72	26,25	61,21	44,32	21,17	24,28	68,36	68,67	59,48	66,54
2. Pendapatan usaha pertanian	57,26	45,49	5,06	3,06	8,10	5,17	5,51	3,89	5,74	3,59
- tanaman pangan & nonpangan	45,69	35,29	3,60	2,22	6,15	3,80	4,28	2,69	4,59	2,51
- lainnya (peternakan, dsb)	11,57	10,21	1,46	0,84	1,95	1,36	1,23	1,20	1,15	1,08
3. Pendapatan usaha nonpertanian	8,92	10,45	25,38	13,22	62,45	59,58	21,74	21,42	19,48	20,76
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,12	9,11	9,62	8,31	11,06	7,42	10,51	8,39	10,08	5,89
- perkiraan sewa rumah	5,96	4,70	7,82	6,42	8,60	5,96	7,17	6,97	7,23	5,01
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,16	4,42	1,80	1,89	2,46	1,46	3,34	1,42	2,85	0,88
5. Pendapatan lain	-0,12	8,70	-1,26	31,10	-2,91	3,56	-6,11	-2,37	5,22	3,22
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	577,4	2123,3	921,9	3468,6	907,2	3329,0	984,2	3967,2	754,1	3437,1
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	628	708	925	979	927	1030	1007	1210	791	1080

Sumber: BPS, diolah.

Tabel 29. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Matapencaharian Utama KK di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	10,96	26,35	17,20	17,31	15,13	12,99	63,91	59,80	50,90	52,17
2. Pendapatan usaha Pertanian	63,98	41,80	5,85	3,02	8,61	4,40	6,91	3,49	8,74	5,27
- tanaman pangan & nonpangan	53,91	34,23	3,78	2,46	6,38	3,16	5,32	2,40	6,73	4,67
- lainnya (peternakan, dsb)	10,07	7,57	2,07	0,56	2,23	1,25	1,59	1,09	2,01	0,61
3. Pendapatan usaha nonpertanian	8,71	6,94	52,65	34,05	63,58	67,40	17,10	14,94	21,83	32,83
4. Pendapatan bukan upah/gaji	9,48	12,28	8,01	9,36	9,54	7,36	11,42	8,98	9,11	7,58
- perkiraan sewa rumah	6,16	5,97	5,94	6,93	7,45	5,59	7,78	6,82	7,15	4,82
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,32	6,32	2,07	2,44	2,09	1,77	3,63	2,16	1,96	2,76
5. Pendapatan lain	6,87	12,63	16,30	36,26	3,14	7,85	0,67	12,79	9,43	2,15
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	566,2	1942,0	635,7	2804,8	737,4	2862,6	975,1	3632,2	609,0	2922,1
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	620	705	670	938	779	972	1013	1209	632	1000

Sumber: BPS, diolah

Tabel 30. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Matapencaharian Utama KK di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	7,42	7,41	45,30	21,38	13,57	26,48	73,06	80,15	64,11	1,00
2. Pendapatan usaha Pertanian	64,33	66,54	7,67	5,19	6,55	3,25	5,27	3,26	10,39	6,17
- tanaman pangan & nonpangan	49,78	57,78	5,50	4,76	5,22	2,75	3,76	2,70	8,43	5,08
- lainnya (peternakan, dsb)	14,55	8,76	2,16	0,43	1,34	0,50	1,50	0,57	1,96	1,09
3. Pendapatan usaha nonpertanian	8,93	8,33	33,64	14,44	69,25	60,53	17,89	9,35	28,93	24,56
4. Pendapatan bukan upah/gaji	12,44	10,27	12,34	10,20	12,65	9,64	11,64	7,80	13,36	6,43
- perkiraan sewa rumah	6,15	6,17	7,92	6,93	10,10	5,50	7,50	6,16	10,02	4,90
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	6,29	4,10	4,43	3,27	2,54	4,14	4,14	1,64	3,34	1,53
5. Penerimaan lain	6,89	7,45	1,06	48,79	-2,54	0,11	-7,86	-0,57	-16,80	-3,91
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	99,48	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	578,6	1966,8	833,2	3386,4	912,6	4250,9	1199,9	4178,4	864,1	3387,9
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	779	811	1059	1248	1182	1598	1523	1558	1069	1301

Sumber: BPS, diolah.

IV. DIVERSIFIKASI USAHA, KETAHANAN PANGAN, DAN KEMISKINAN

4.1. Indikasi Kemiskinan Rumah Tangga

Meskipun memiliki cakupan persoalan yang berbeda akan tetapi kemiskinan dan ketahanan pangan memiliki keterkaitan yang kuat. Menurut Maxwell dan Frankenberger (1992) kemiskinan merupakan salah satu faktor determinan terjadinya ketidaktahanan pangan akut (*chronic food insecurity*). Dalam konteks ketahanan pangan, faktor ketersediaan (*food availability*) dan aksesibilitas (*food accessibility*) pangan merupakan dua faktor penting dalam peningkatan ketahanan pangan rumah tangga (Sayogyo, 1991; Soehardjo, 1996). Oleh karena tidak seluruh rumah tangga menguasai sumber-sumber produksi pangan maka ketahanan pangan mereka lebih ditentukan oleh kemampuan akses terhadap pangan secara ekonomi. Dalam hal ini, faktor daya beli (*purchasing power*) menjadi penentu pencapaian derajat ketahanan pangan rumah tangga seseorang. Munculnya kasus rawan pangan hakekatnya mencerminkan ketidakmampuan rumah tangga menjaga sustainabilitas perolehan pangan sesuai kebutuhan karena faktor daya beli yang rendah (kemiskinan) di samping faktor nonekonomi.

Selain nilai nominal, faktor daya beli juga dipengaruhi oleh pola perolehan pendapatan seseorang (rumah tangga). Daya beli terhadap pangan yang tinggi mensyaratkan dukungan nilai nominal pendapatan yang tinggi dan pola perolehan yang kontinyu (stabil). Perolehan pendapatan yang kontinyu menjadi penting terutama bila rumah tangga memiliki nominal pendapatan yang tidak sebanding dengan kebutuhan pengeluaran antarwaktu. Stabilitas perolehan pendapatan hingga tingkat tertentu menjadi “penjamin” tercukupinya kebutuhan pokok pangan dan kesejahteraan. Terkait hal itu, penganeekaragaman (diversifikasi) usaha ekonomi yang dilakukan rumah tangga merupakan “strategi” mempertahankan diri (*coping strategy*) yang patut dikembangkan.

Dalam perspektif kesejahteraan, pembahasan dan evaluasi situasi kemiskinan dapat dilakukan melalui pendekatan pola pengeluaran. Menurut hukum Engel, semakin tinggi pendapatan (kesejahteraan) seseorang maka pangsa pengeluaran pangan, khususnya pangan pokok, akan semakin berkurang tetapi pangsa pengeluaran nonpangan semakin bertambah. Sesuai kaidah tersebut, secara sederhana dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang memiliki pangsa pengeluaran pangan relatif tinggi dapat disebut tergolong rumah tangga miskin. Sebaliknya, rumah tangga yang pangsa pengeluaran pangannya relatif rendah dapat disebut rumah tangga sejahtera (kaya).

Hasil analisis menunjukkan, di tingkat agregat nasional pangsa pengeluaran pangan pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah bervariasi antara 54,7–68,3%, sedangkan pada kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi pengeluaran tersebut bervariasi antara 35,9–57,2%

(Tabel 39). Menarik diperhatikan bahwa di seluruh kelompok rumah tangga pangsa pengeluaran pangan tahun 2002 lebih tinggi dibandingkan tahun 1996. Secara implisit hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara nominal pendapatan rumah tangga meningkat tetapi tingkat kesejahteraan rumah tangga pada tahun 2002 sebenarnya mengalami penurunan dibandingkan kondisi tahun 1996. Terlihat pula bahwa pangsa pengeluaran pangan rumah tangga yang pekerjaan utama kepala keluarganya di sektor pertanian relatif lebih besar dibandingkan rumah tangga yang bekerja di sektor lain. Disamping itu, lonjakan peningkatan pangsa pengeluaran pangan yang tertinggi dari periode 1996-2002 juga terdapat pada kelompok rumah tangga pertanian tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa secara relatif tingkat kesejahteraan rumah tangga pertanian lebih rendah dibandingkan rumah tangga lain dan mengalami penurunan yang lebih parah dibandingkan rumah tangga lain pada tahun 2002. Kondisi seperti itu dapat berarti pula bahwa dibandingkan dengan kelompok rumah tangga lain potensi kemiskinan pada kelompok rumah tangga pertanian hingga kini masih lebih besar.

Tabel 39. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Indonesia Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	64,53	68,30	59,88	66,21	41,20	57,20
	Nonpangan	35,47	31,71	40,12	33,79	58,80	42,80
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	58,29	58,63	50,41	53,66	36,07	40,34
	Nonpangan	41,71	41,37	49,59	46,35	63,93	59,66
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	54,72	58,74	48,73	54,63	36,09	41,74
	Nonpangan	45,28	41,26	51,27	45,37	63,91	58,26
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	54,93	56,51	49,90	52,13	35,90	39,96
	Nonpangan	45,07	43,49	50,10	47,87	64,10	60,04
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	59,24	62,20	53,17	57,36	38,42	46,48
	Nonpangan	40,76	37,80	46,83	42,64	61,58	53,53
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

BPS menetapkan bahwa garis kemiskinan untuk wilayah kota dan desa pada tahun 1996 masing-masing sebesar Rp 38.246 dan Rp 27.413/

kapita/bulan. Pada tahun 2002 garis kemiskinan tersebut mengalami penyesuaian yang untuk masing-masing wilayah menjadi sebesar Rp 138.803 dan Rp 105.888/kapita/bulan. Dengan penetapan garis kemiskinan tersebut proporsi penduduk miskin yang pada tahun 1996 sebesar 9,7 dan 15,0%, masing-masing untuk wilayah kota dan desa meningkat menjadi 13,6 dan 20,2% untuk masing-masing wilayah pada tahun 2002.

Kecenderungan pola pengeluaran pangan yang relatif besar pada rumah tangga pertanian juga terjadi di tingkat regional provinsi sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 41–43. Di dua provinsi contoh di luar Jawa pangsa pengeluaran pangan hampir mencapai 70% atau bahkan lebih tinggi. Akan tetapi, berbeda dari situasi di tingkat agregat (Tabel 40), di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan pangsa pengeluaran pangan yang sangat tinggi juga terdapat pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang kepala keluarganya bekerja di sektor nonpertanian.

Tabel 40. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	62,13	66,31	54,91	62,89	27,80	42,43
	Nonpangan	37,87	33,69	45,09	37,11	72,20	57,57
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	60,48	59,77	52,50	55,88	37,41	42,26
	Nonpangan	39,52	40,23	47,50	44,12	62,59	57,74
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	58,30	63,42	53,35	59,34	31,78	43,83
	Nonpangan	41,70	36,58	46,65	40,67	68,22	56,17
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	60,57	65,14	53,79	59,01	37,50	43,86
	Nonpangan	39,43	34,86	46,21	40,99	62,50	56,15
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	62,64	67,55	56,67	62,76	37,89	43,90
	Nonpangan	37,36	32,45	43,33	37,24	62,11	56,10
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

Tabel 41. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	68,42	72,63	62,56	72,40	45,92	55,60
	Nonpangan	31,58	27,37	37,44	27,60	54,08	44,40
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	66,39	69,55	66,86	68,15	54,18	51,49
	Nonpangan	33,61	30,45	33,14	31,86	45,82	48,51
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	67,99	73,65	58,16	71,23	48,46	54,37
	Nonpangan	32,01	26,35	41,84	28,77	51,54	45,64
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	64,74	67,34	57,24	65,07	42,80	52,16
	Nonpangan	35,26	32,66	42,76	34,93	57,20	47,84
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	69,95	74,98	60,14	68,52	45,72	62,58
	Nonpangan	30,05	25,02	39,86	31,48	54,28	37,42
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

Tabel 42. Pola Pengeluaran Rumah Tangga (%) di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	69,35	69,54	58,10	67,76	36,45	55,84
	Nonpangan	30,65	30,46	41,90	32,24	63,55	44,16
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	64,67	53,85	50,67	58,86	41,44	41,80
	Nonpangan	35,33	46,15	49,33	41,14	58,56	58,20
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	62,66	59,08	56,01	61,26	38,11	40,36
	Nonpangan	37,34	40,93	43,99	38,74	61,89	59,64
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	61,12	72,04	53,09	60,67	40,25	45,09
	Nonpangan	38,88	27,96	46,91	39,33	59,75	54,91
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	57,71	70,70	57,64	62,97	46,95	51,62
	Nonpangan	42,29	29,30	42,36	37,03	53,05	48,38
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

4.2. Kinerja Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Dari sisi *outcomes* (Maxwell dan Frankenberger, 1992), konsumsi pangan merupakan *entry point* untuk mengevaluasi kinerja ketahanan pangan rumah tangga seseorang. Konsumsi pangan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah yang telah terkonversi dalam bentuk energi dan protein. Derajat ketahanan pangan rumah tangga secara sederhana dapat ditentukan dengan mengevaluasi asupan energi dan protein. Data Tabel 43 dan Tabel 44 menunjukkan, secara agregat konsumsi energi dan protein semakin tinggi dengan meningkatnya kelas pendapatan rumah tangga. Hal ini logis karena tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penentu daya beli rumah tangga untuk akses terhadap pangan.

Tabel 43. Rataan Konsumsi Energi (Kkal) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Indonesia, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Kota	Pertanian	1806,2	2045,1	2066,7	2111,8	2194,1	2134,1
	Industri	1654,2	2059,7	1888,0	2094,3	2207,3	2154,6
	Perdagangan	1707,1	1969,5	1913,2	2032,9	2153,8	2166,5
	Jasa	1696,8	1987,0	1883,1	2039,2	2181,4	2151,3
	Lainnya	1682,5	1917,7	1922,3	2034,3	2202,6	2140,6
	TOTAL	1710,9	1998,6	1907,2	2056,0	2179,6	2152,9
Desa	Pertanian	1762,9	2088,2	2084,7	2121,8	2363,1	2188,3
	Industri	1698,6	2132,3	1946,0	2153,1	2186,1	2216,5
	Perdagangan	1735,8	2082,2	1917,0	2047,5	2257,9	2194,0
	jasa	1752,5	2139,8	1899,5	2080,2	2251,7	2248,6
	Lainnya	1649,0	2013,4	1892,2	2058,9	2225,4	2206,7
	TOTAL	1750,5	2088,5	2017,1	2109,5	2296,7	2199,2
Kota+Desa	Pertanian	1809,7	2089,1	2168,9	2136,6	2336,9	2175,8
	Industri	1691,5	2108,1	1902,0	2092,2	2121,5	2165,2
	Perdagangan	1722,6	2024,0	1888,4	2022,8	2142,4	2136,5
	jasa	1719,4	2059,3	1863,7	2016,2	2131,5	2151,4
	Lainnya	1656,6	1968,4	1910,0	2023,4	2152,9	2148,5
	TOTAL	1769,1	2069,9	1987,5	2075,5	2164,2	2154,3

Sumber: BPS, diolah.

Tabel 44. Konsumsi Energi (Kkal) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Jawa Timur	Pertanian	1608,7	1908,3	1953,4	2016,6	2203,6	2196,1
	Industri	1498,3	1959,0	1725,8	1991,0	1928,5	2120,1
	Perdagangan	1512,3	1944,7	1713,8	1934,8	2003,3	2027,9
	Jasa	1513,6	1912,4	1661,0	1913,1	1866,1	2041,2
	Lainnya	1518,3	1775,7	1744,8	1865,1	1961,1	2047,3
	Total	1572,8	1910,0	1799,3	1963,9	1968,6	2084,4
Nusa Tenggara Barat	Pertanian	1689,8	2137,8	2156,1	2167,2	2538,2	2395,5
	Industri	1653,4	2193,9	2278,4	2154,7	2230,2	2331,7
	Perdagangan	1581,4	1929,3	1862,6	2120,8	2355,4	2144,3
	Jasa	1522,2	2009,9	1836,7	1990,9	2220,3	2221,5
	Lainnya	1523,1	1999,8	1834,0	2024,1	2025,4	2306,0
	Total	1635,8	2118,0	2007,6	2128,7	2299,9	2282,2
Sulawesi Selatan	Pertanian	1825,5	2039,9	2297,7	2084,7	2907,2	2215,8
	Industri	1729,3	2257,3	2034,1	2099,0	2540,1	2233,2
	Perdagangan	1700,0	2154,2	1956,7	2035,7	2369,4	2258,0
	Jasa	1568,5	1864,6	1916,9	2131,0	2354,8	2286,8
	Lainnya	1657,1	1874,2	1983,9	2094,3	2554,8	2259,5
	Total	1773,9	2060,6	2069,9	2083,7	2434,3	2251,2

Sumber: BPS, diolah.

Variasi tingkat konsumsi energi tahun 1996 berkisar antara 1649-2363 Kkal/kapita/hari, sedangkan variasi tingkat konsumsi protein berkisar antara 38,2-59,5 gram/kapita/hari. Untuk tahun 2002, variasi tingkat konsumsi energi meningkat menjadi 1917-2249 Kkal sedangkan variasi konsumsi protein menjadi 53,5-65,7 gram/kapita/hari. Terdapat kecenderungan bahwa pada tahun 1996 rumah tangga pertanian memiliki tingkat asupan kedua jenis zat gizi tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok rumah tangga lain. Akan tetapi, prestasi itu tidak dapat dipertahankan pada tahun 2002. Di tingkat agregat maupun regional, asupan energi dan, terlebih, protein pada rumah tangga pertanian tidak lagi menempati posisi teratas pada tahun 2002. Bila dikaitkan dengan perubahan tingkat dan struktur pendapatan pada subbab terdahulu, kecenderungan penurunan asupan tersebut diduga lebih terkait dengan penurunan daya beli terhadap pangan. Keterbatasan penguasaan bahan pangan secara fisik (cadangan pangan) dan tekanan kenaikan harga-harga umum sesuai inflasi dalam situasi perekonomian yang sulit pasca krisis ekonomi membuat petani cenderung mengubah pola konsumsi mereka.

Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI tahun 1998 merekomendasikan angka kecukupan energi (AKE) dan protein (AKP) di tingkat konsumsi masing-masing sebesar 2200 Kkal/kapita/hari dan 48 g/kapita/hari. Apabila rekomendasi tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja ketahanan pangan dengan batasan bahwa rumah tangga seseorang memiliki ketahanan pangan bila rataan konsumsi energi dan protein lebih besar dari 70% rekomendasi maka dari Tabel 42 hingga Tabel 46 dapat disimpulkan bahwa meskipun cenderung mengalami kelebihan konsumsi protein tetapi masih banyak rumah tangga yang mengalami defisit energi, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu di samping upaya peningkatan pendapatan rumah tangga, kegiatan penyuluhan pangan dan gizi yang terkait dengan promosi makan dengan menu seimbang sesuai saran PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang) perlu ditingkatkan. Upaya tersebut terutama diprioritaskan untuk wilayah Jawa yang memiliki potensi prevalensi defisiensi energi-protein relatif tinggi.

Tabel 45. Rataan Konsumsi Protein (g/kapita/hari) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Indonesia, 1996-2002

Wilayah	Pekerjaan utama KK	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Kota	Pertanian	43,11	55,93	50,35	59,43	55,44	61,75
	Industri	38,76	58,64	46,56	60,95	59,00	65,70
	Perdagangan	41,37	55,81	48,42	58,57	58,08	65,74
	Jasa	41,01	56,64	47,49	59,64	59,51	65,74
	Lainnya	39,64	53,58	48,27	58,35	59,14	64,86
	Total	41,04	56,26	47,89	59,37	58,89	65,33
Desa	Pertanian	40,46	53,51	49,19	55,63	57,84	58,51
	Industri	39,34	57,57	46,01	58,35	53,36	61,63
	Perdagangan	41,00	55,70	46,01	55,66	56,25	61,44
	Jasa	41,62	57,83	46,10	57,27	57,02	63,94
	Lainnya	38,20	53,93	45,06	56,21	56,04	61,76
	Total	40,43	54,32	47,89	56,08	56,92	60,08
Kota+Desa	Pertanian	41,76	54,10	51,94	56,72	57,72	59,88
	Industri	39,31	58,33	45,52	59,06	54,56	64,46
	Perdagangan	41,01	55,78	46,19	56,91	56,27	63,57
	Jasa	41,18	57,40	45,91	57,57	56,16	64,69
	Lainnya	38,53	53,68	46,36	56,59	56,25	63,31
	Total	41,22	55,07	48,17	57,26	56,25	63,31

Sumber: BPS, diolah

Tabel 46. Rataan Konsumsi Protein (g/kapita/hari) Menurut Wilayah, Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK di Jawa Timur, NTB dan Sulawesi Selatan, 1996-2002

Wilayah	Pekerjaan utama KK	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Jawa Timur	Pertanian	35,08	50,97	43,60	54,42	50,69	61,72
	Industri	32,60	55,45	38,74	55,80	46,11	62,87
	Perdagangan	33,07	54,35	38,44	54,71	48,02	59,75
	Jasa	33,84	54,50	37,95	52,97	44,35	60,61
	Lainnya	33,10	48,95	39,74	52,45	48,46	60,79
	Total	34,40	52,03	40,48	54,34	46,73	61,21
Nusa Tenggara Barat	Pertanian	40,65	58,54	53,64	59,96	64,13	68,39
	Industri	39,41	63,05	55,39	59,32	58,22	67,90
	Perdagangan	37,30	53,53	45,76	61,04	62,04	61,32
	Jasa	35,92	54,57	44,82	57,16	59,12	65,68
	Lainnya	35,29	55,02	43,19	56,85	51,16	66,80
	Total	39,03	58,57	49,41	59,45	60,23	65,99
Sulawesi Selatan	Pertanian	46,84	55,00	61,16	56,50	79,58	62,72
	Industri	48,00	73,72	54,24	60,54	71,49	67,45
	Perdagangan	44,44	65,36	52,08	59,36	65,12	70,25
	Jasa	41,75	50,24	51,99	64,44	68,16	69,09
	Lainnya	43,04	55,42	52,46	59,08	66,86	68,09
	Total	45,92	58,13	55,38	58,13	68,71	67,64

Sumber: BPS, diolah

4.3. Faktor Determinan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga

Diversifikasi usaha dilakukan dengan tujuan berbeda-beda. Selain dapat menjadi alternatif mempertahankan diri dari kondisi ekonomi yang buruk melalui pengusahaan sumber-sumber pendapatan baru (*coping strategy*), diversifikasi juga dapat dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk memperoleh tambahan manfaat ekonomi. Kondisi internal dan lingkungan strategis rumah tangga sangat berperan dalam penentuan motif seseorang (rumah tangga) melakukan diversifikasi usaha.

Oleh karena tujuan awal yang berbeda, penggunaan data SUSENAS untuk analisis pendapatan dan diversifikasi usaha rumah tangga memiliki keterbatasan. Terlebih lagi bila perilaku kelompok rumah tangga tertentu ingin dievaluasi secara mendalam. Untuk SUSENAS tahun 2002, misalnya, beberapa kelemahan tersebut antara lain: (1) SUSENAS tidak memasukkan peubah karakteristik rumah tangga secara detail dalam daftar pertanyaannya (misalnya tidak ada keterangan mengenai pemilikan aset secara rinci), (2) pendekatan wilcah (wilayah pencacahan) dalam *sampling* SUSENAS tidak dapat menggambarkan karakteristik

wilayah yang lebih spesifik, misalnya agroekologi atau agroekosistem tertentu dari lokasi contoh, dengan data cukup valid dari disagregasi wilayah yang lebih rendah dari tingkat provinsi, dan (3) format penggalan informasi tentang usaha atau sumber pendapatan rumah tangga tidak dibuat rinci dan konsisten dengan survei sebelumnya.

Berdasarkan Tabel 47 dapat disebutkan bahwa pada tingkat agregat nasional, kecuali untuk peubah pendapatan rumah tangga, faktor-faktor yang mempengaruhi peluang rumah tangga melakukan diversifikasi usaha rumah tangga relatif sama antara di kota dengan di desa. Peluang rumah tangga berdiversifikasi usaha dipengaruhi oleh status pekerjaan utama KK, tingkat pendidikan KK, umur KK dan jumlah anggota rumah tangga (ukuran rumah tangga). Peluang melakukan diversifikasi usaha lebih tinggi pada rumah tangga yang pekerjaan utama KK-nya di sektor pertanian dan memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Akan tetapi, peluang diversifikasi usaha semakin rendah pada rumah tangga yang berukuran besar (memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih banyak) dan umur KK yang tua.

Tabel 47. Faktor yang Mempengaruhi Peluang Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Indonesia, 2002

Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-Square
Kota		
Intersep	0,08070	0.2711
Total pendapatan rumah tangga	0,00000	0.3800
Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,04850	0.0001
Pendidikan KK	0,02430	0.0001
Jml anggota RT	-0,15260	0.0001
Umur KK	-0,02240	0.0001
(-2 LOG L = 1070,190 with 5 DF (p=0,0001))		
Desa		
Intersep	-1,65210	0.0001
Total pendapatan rumah tangga	-0,00001	0.1361
Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,06590	0.0001
Pendidikan KK	0,03240	0.0001
Jml anggota RT	-0,08730	0.0001
Umur KK	-0,00944	0.0001
(-2 LOG L = 236,536 with 5 DF (p=0,0001))		

Sumber: BPS, diolah.

Pada penelitian lain di pedesaan Jawa Barat, Susilawati *et al.* (2002) menemukan bahwa tidak ada pola hubungan yang jelas antara diversifikasi usaha dengan pencapaian tingkat pendapatan rumah tangga. Dengan demikian, diversifikasi yang tinggi tidak selalu berdampak pada

tingginya tingkat pendapatan rumah tangga. Disebutkan pula bahwa peluang diversifikasi usaha lebih tinggi pada rumah tangga dengan pendidikan KK yang tinggi dan memiliki pangsa anggota rumah tangga bekerja yang besar. Analisis tersebut juga menyebutkan rumah tangga pemilik lahan luas berpotensi melakukan diversifikasi usaha lebih tinggi dibandingkan rumah tangga pemilik lahan sempit. Sebaliknya, peluang diversifikasi usaha akan lebih rendah pada rumah tangga yang anggotanya lebih banyak bekerja di sektor pertanian dan dengan umur KK yang lebih tua.

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya rumah tangga dengan KK yang pekerjaan utamanya di sektor pertanian memiliki pendapatan per kapita lebih rendah dibandingkan rumah tangga lain. Hasil pengolahan fungsi Logistik pada Tabel 47 tersebut mengindikasikan bahwa peluang diversifikasi usaha yang lebih tinggi pada rumah tangga pertanian diduga karena dorongan faktor keterbatasan pendapatan sehingga diversifikasi usaha tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari strategi *coping* dalam rangka mempertahankan kesejahteraan mereka.

Tingkat pendidikan merupakan peubah proksi yang dapat mengindikasikan kinerja kualitas (kecakapan) tenaga kerja atau sumber daya manusia dalam rumah tangga. Dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, seorang tenaga kerja akan memiliki kesempatan melakukan diversifikasi usaha lebih tinggi karena potensi kecakapan bekerja juga makin meningkat. Lebih dari itu mereka yang berpendidikan tinggi umumnya lebih dapat melihat dan meraih peluang bekerja atau berusaha secara lebih baik dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah.

Ukuran rumah tangga pada dasarnya dapat mencerminkan ketersediaan tenaga kerja dalam rumah tangga yang berpotensi mendatangkan pendapatan. Semakin besar ukuran rumah tangga (semakin banyak jumlah anggota rumah tangga) mengindikasikan semakin besarnya ketersediaan tenaga kerja dalam rumah tangga yang dapat dialokasikan pada berbagai aktivitas usaha produktif. Sehingga tanda yang diharapkan dari dimasukkannya peubah ini dalam model sebagai postulat awal adalah positif. Akan tetapi, hasil regresi menunjukkan bahwa di semua lokasi tanda peubah tersebut adalah negatif, yang berarti semakin besar ukuran rumah tangga semakin rendah peluang diversifikasi usaha. Hal ini mungkin terjadi bila anggota rumah tangga cenderung bekerja pada bidang yang sama. Kecenderungan seperti itu dapat disebabkan faktor terbatasnya kesempatan kerja, atau kebutuhan alokasi tenaga kerja pada pekerjaan utama yang cenderung besar, sementara di sisi lain tingkat upah relatif tinggi, sehingga rumah tangga cenderung mengoptimalkan sumber daya (tenaga kerja) yang tersedia dalam rumah tangga.

Sejalan dengan Susilowati *et al.* (2002), hasil analisis fungsi Logistik menunjukkan semakin tua umur KK semakin berkurang kecenderungan untuk melakukan diversifikasi usaha. Hal ini wajar saja

mengingat diversifikasi usaha juga membutuhkan dukungan kondisi jasmani yang sehat. Karena itu diversifikasi usaha pada rumah tangga yang KK-nya masih pada usia produktif cenderung akan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga dengan KK yang sudah tidak produktif.

Pola determinan faktor diversifikasi usaha seperti di atas juga terlihat di tingkat regional provinsi dengan sedikit variasi, baik pada tanda maupun derajat nyata (tingkat signifikansi) peubah dalam model (Tabel 48). Sebagai contoh, variasi tanda terdapat pada peubah pendidikan KK untuk kasus di wilayah desa di provinsi NTB. Di pedesaan provinsi NTB peubah tingkat pendidikan KK bertanda negatif yang mengindikasikan bahwa diversifikasi usaha cenderung lebih rendah pada rumah tangga yang pendidikan KK-nya tinggi. Tetapi, karena pengaruh tersebut tidak bersifat nyata dalam model sehingga interpretasi seperti itu dapat diabaikan. Variasi derajat nyata antara lain terlihat di provinsi NTB untuk wilayah kota di mana peubah *dummy* pekerjaan utama, pendidikan KK, dan umur KK bersifat tidak nyata dalam model, sedangkan untuk wilayah desa peubah yang tidak nyata adalah pendidikan dan umur KK. Di pedesaan Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, hanya peubah umur KK yang tidak nyata berpengaruh terhadap peluang diversifikasi usaha rumah tangga.

Tabel 48. Faktor yang Mempengaruhi Peluang Diversifikasi Usaha Rumah Tangga di Nusa Tenggara Barat, 2002

Provinsi	Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-Square
Jatim	Kota		
	Intersep	0,35730	0.1615
	Total pendapatan rumah tangga	-0,00004	0.0339
	Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,09280	0.0129
	Pendidikan KK	0,06390	0.0001
	Jml anggota RT	-0,44370	0.0001
	Umur KK	-0,02710	0.0001
	(-2 LOG L = 299,993 with 5 DF (p=0,0001))		
	Desa		
	Intersep	-2,11310	0.0001
Total pendapatan rumah tangga	-0,00002	0.5438	
Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,21080	0.0001	
Pendidikan KK	0,06520	0.0017	
Jml anggota RT	-0,35570	0.0001	
Umur KK	-0,00752	0.1546	
(-2 LOG L = 85,156 with 5 DF (p=0,0001))			

Tabel 48. (lanjutan)

Provinsi	Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-Square
NTB	Kota		
	Intersep	-1,39490	0.0084
	Total pendapatan rumah tangga	0,00004	0.0991
	Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,07000	0.3962
	Pendidikan KK	0,02580	0.3827
	Jml anggota RT	-0,09990	0.1562
	Umur KK	-0,01910	0.0431
		(-2 LOG L = 17,037 with 5 DF (p=0,0044))	
	Desa		
	Intersep	-1,90110	0.0021
	Total pendapatan rumah tangga	-0,00005	0.5552
	Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,43000	0.0001
	Pendidikan KK	-0,03280	0.3967
	Jml anggota RT	-0,35130	0.0003
Umur KK	-0,01150	0.2303	
	(-2 LOG L = 38,872 with 5 DF (p=0,0001))		
Sulsel	Kota		
	Intersep	0,99960	0.0341
	Total pendapatan rumah tangga	-0,00007	0.0623
	Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,14020	0.0623
	Pendidikan KK	0,05960	0.0243
	Jml anggota RT	-0,37590	0.0001
	Umur KK	-0,03180	0.0001
		(-2 LOG L = 103,303 with 5 DF(p=0,0001))	
	Desa		
	Intersep	-1,38530	0.0023
	Total pendapatan rumah tangga	-0,00013	0.0747
	Dummy pekj utama KK (1=pertanian)	0,10990	0.1001
	Pendidikan KK	0,03760	0.119
	Jml anggota RT	-0,15550	0.0041
Umur KK	-0,00677	0.3236	
	(-2 LOG L = 16,493 with 5 DF (p=0,0056))		

Peubah tingkat pendapatan rumah tangga dalam model fungsi Logistik yang digunakan pada analisis ini menunjukkan pengaruh yang berbeda antara wilayah kota dengan desa pada skala agregat nasional. Di desa, peubah tingkat pendapatan memiliki tanda negatif dan nyata pada

taraf $\alpha = 15\%$, sedangkan di kota peubah tersebut bertanda positif tetapi tidak nyata. Berdasarkan tanda dan tingkat signifikansi tersebut dapat disimpulkan bahwa di desa diversifikasi usaha yang lebih tinggi cenderung dilakukan oleh rumah tangga yang berpendapatan rendah. Sebaliknya di kota diversifikasi usaha yang lebih tinggi cenderung dilakukan oleh mereka yang berpendapatan tinggi.

Terkait peubah pendapatan, di tingkat regional, kecenderungan pola diversifikasi usaha rumah tangga yang berbeda antara kota dan desa hanya terjadi di Provinsi NTB meskipun dengan signifikansi yang bertentangan. Di provinsi tersebut, peubah tingkat pendapatan berpengaruh positif dan nyata terhadap peluang diversifikasi usaha rumah tangga di kota sedangkan di wilayah desa peubah tersebut berpengaruh negatif tetapi tidak nyata terhadap peluang diversifikasi usaha yang dilakukan rumah tangga. Di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, baik di desa maupun kota, tingkat pendapatan berpengaruh negatif dan nyata terhadap peluang diversifikasi usaha. Artinya, di kedua provinsi tersebut semakin rendah tingkat pendapatan rumah tangga semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan diversifikasi usaha.

4.4. Peluang Tidak Miskin dan Ketergantungan Terhadap Sektor Pertanian

Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan di Indonesia merupakan masalah laten. Meski pemerintah selalu berupaya mengkaitkan program pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan tetapi hingga kini kelompok masyarakat atau rumah tangga miskin belum dapat “dihilangkan”. Bahkan sebaliknya, sejak terjadi krisis ekonomi proporsi kelompok ini seakan cenderung makin besar. Keberhasilan penanggulangan akar masalah kemiskinan merupakan “modal” meningkatkan kinerja ketahanan pangan, khususnya di tingkat rumah tangga.

Hasil analisis fungsi Logistik mengindikasikan, kemiskinan di Indonesia hingga kini masih berasosiasi erat dengan kinerja sektor pertanian. Di tingkat agregat nasional, peluang rumah tangga untuk tidak miskin menjadi sulit dicapai ketika ketergantungan mereka terhadap aktivitas dan pendapatan dari sektor pertanian semakin besar, terlebih di pedesaan (Tabel 49). Secara makro, kondisi demikian dapat dimaklumi karena sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dalam struktur perekonomian nasional. Tetapi di sisi lain, kontribusi sektor ini terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun sehingga produktivitas pertanian menjadi sangat rendah dibandingkan sektor lain seperti industri, perdagangan, ataupun jasa yang terus berkembang.

Situasi di atas menunjukkan implikasi perlunya kebijakan “penguatan” (revitalisasi) sektor pertanian melalui pengembangan upaya investasi yang mendorong penciptaan nilai tambah produk pertanian dan

memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menampung “kelebihan” tenaga kerja di sektor pertanian, khususnya di pedesaan. Dengan demikian dalam jangka panjang produktivitas sektor dan kesejahteraan rumah tangga yang terlibat dalam sektor dapat ditingkatkan.

Tabel 49. Determinan Faktor Peluang Rumah tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Indonesia, 2002

Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-square
Wilayah Kota:		
Intersep	4,0527	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	-0,0127	0.0001
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-0,4172	0.0001
Jml anggota RT	-0,3873	0.0001
-2 Log L = 1569,380 (p=0,0001)		
Wilayah desa:		
Intersep	4,2810	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	-0,00533	0.0001
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-0,3501	0.0001
Jml anggota RT	-0,4798	0.0001
-2 Log L = 3077,568 (p=0,0001)		

Di tingkat regional, pada ketiga provinsi contoh yang dianalisis, kecenderungan melekatnya citra miskin pada rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian terlihat di wilayah pedesaan, khususnya Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Untuk wilayah pedesaan Sulawesi Selatan, meski peubah pangsa pendapatan pertanian bertanda positif tetapi secara statistik tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Pengamatan empiris di provinsi tersebut memang menunjukkan bahwa skala usahatani rumah tangga relatif lebih luas dibandingkan di dua provinsi contoh lain. Disamping itu, situasi pasar komoditas yang kondusif membuat harga komoditas relatif kompetitif sehingga secara ekonomi berpeluang memberikan dominasi pada besaran (magnitude) maupun kontribusi struktur pendapatan rumah tangga. Informasi analisis faktor determinan selengkapnya dapat disimak pada Tabel 50, 51, dan 52.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa jumlah anggota rumah tangga yang makin besar akan mempersulit upaya rumah tangga keluar dari perangkap kemiskinan. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah (nasional maupun regional), baik di desa maupun kota. Implikasinya, program-program yang berkaitan dengan pengaturan ukuran keluarga (*family planning*), seperti program keluarga berencana yang pernah sukses di masa lalu, perlu digiatkan kembali secara simultan dengan upaya perbaikan dan pembangunan sektor ekonomi yang dilaksanakan. Pada era otonomi daerah sekarang ini, peran Pemda dalam menginisiasi revitalisasi Program Keluarga Berencana menjadi sangat kritis.

Tabel 50. Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Jawa Timur, 2002

Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-square
Wilayah Kota:		
Intersep	3,7948	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	0,000388	0.9019
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-1,0449	0.0001
Jml anggota RT	-0,3510	0.0001
-2 Log L = 161,392 with 3 DF (p=0,001)		
Wilayah desa:		
Intersep	3,8595	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	-0,00250	0.0878
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-0,8066	0.0001
Jml anggota RT	-0,3687	0.0001
-2 Log L = 277,209 with 3 DF (p=0,0001)		

Tabel 51. Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat, 2002

Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-square
Wilayah Kota:		
Intersep	3,7344	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	0,00717	0.1986
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-1,4643	0.0001
Jml anggota RT	-0,4401	0.0001
-2 Log L = 94,604 with 3 DF (p=0,0001)		
Wilayah desa:		
Intersep	4,1534	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	-0,00359	0.3211
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-0,3907	0.1450
Jml anggota RT	-0,4208	0.0001
-2 Log L = 69,892 with 3 DF (p=0,0001)		

Tabel 52. Determinan Faktor Peluang Rumah Tangga Untuk Keluar dari Kemiskinan di Sulawesi Selatan, 2002

Peubah	Parameter dugaan	Pr > Chi-square
Wilayah Kota:		
Intersep	4,3605	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	0,0255	0.0795
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-2,3073	0.0079
Jml anggota RT	-0,2502	0.0030
-2 Log L = 16,140 with 3 DF (p=0,0011)		
Wilayah desa:		
Intersep	3,9962	0.0001
Pangsa pendapatan pertanian	0,00240	0.3982
Dummy pek. utama KK (1=pertanian)	-0,7801	0.0025
Jml anggota RT	-0,3334	0.0001
-2 Log L = 83,540 with 3 DF (p=0,0001)		

V. DIVERSIFIKASI USAHA PENDAPATAN DAN KETAHANAN PANGAN DI ENAM DESA CONTOH

5.1. Karakteristik Rumah Tangga

Tabel 53 menyajikan keragaan karakteristik rumah tangga di desa contoh. Umur kepala keluarga responden berkisar dari 38 hingga 51 tahun, dengan tingkat pendidikan antara 3 hingga 9 tahun. Usia responden di Sulawesi Selatan sekitar 50 tahun dengan kisaran pendidikan 8-9 tahun, disusul oleh responden di Jawa Timur dengan kisaran usia 48 tahun dan tingkat pendidikan 6-9 tahun dan yang terendah adalah responden di Nusa Tenggara Barat. Usia responden di Nusa Tenggara Barat relatif muda dan tingkat pendidikannya lebih rendah dibandingkan dengan dua provinsi contoh lainnya. Dari keadaan ini dapat diduga bahwa tingkat keberhasilan usaha dan kemampuan hidup responden dari daerah contoh Sulawesi Selatan dan Jawa Timur lebih baik daripada daerah contoh di Nusa Tenggara Barat.

Jumlah anggota keluarga responden tidak terlalu besar, yaitu berkisar antara 4-5 orang dengan rata-rata anggota yang bekerja sebanyak 2-3 orang (Tabel 53). Jika dibandingkan dengan jumlah anggota keluarga dalam usia kerja (15-65 tahun) yang berjumlah sekitar 3-4 orang per keluarga, dapat dikatakan bahwa belum semua angkatan kerja dalam keluarga diberdayakan untuk menambah kontribusi pendapatan keluarga. Hal ini mungkin terjadi akibat rendahnya minat masyarakat terhadap pertanian di desa, terbatasnya lapangan kerja/usaha bagi yang ingin bekerja di luar sektor pertanian, atau hal-hal lainnya seperti modal.

Tabel 53. Karakteristik Rumah Tangga Contoh, di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, 2005

Uraian	Provinsi NTB		Provinsi Sulsel		Provinsi Jatim	
	Desa lahan kering horti-kultura	Desa lahan kering tan. pangan	Desa perkebunan	Desa sawah	Desa peternakan	Desa sawah
Rataan umur KK (Th)	38,4	45,4	50,3	51,5	46,82	49,6
Tingkat pendidikan KK (Th)	3,2	4,2	9,4	7,7	6,45	9,4
Jumlah anggota rumah tangga (JART)	4,9	4,8	4,3	5,5	4,18	4,4
JART usia kerja (≥ 15 -65 Th)	2,5	2,9	4,2	4,2		
Rata-rata yg bekerja (org)	2	2,4	2,2	2,8	2,82	2,6
Pekerjaan utama KK (%):						
Petani	80,0	90,0	90,0	80,0	100,0	100,0
buruh tani	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
dagang	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PNS/karyawan swasta	0,0	10,0	10,0	20,0	0,0	0,0
Jml jenis pekerjaan yg dilakukan rumah tangga	2,7	2,2	1,7	1,8	2,36	2

Sumber: Data Primer

Pada lokasi contoh ini tidak banyak terlihat keragaman usaha. Mata pencaharian pokok responden 80-100% adalah petani, sisanya pedagang atau yang bekerja di luar sektor pertanian. Diversifikasi usaha rumah tangga juga tidak bervariasi banyak, rata-rata 2-3 jenis usaha saja yang dilakukan rumah tangga contoh. Bagi daerah pertanian yang relatif berkembang dan intensif, kurangnya tenaga kerja menyebabkan masyarakat mencurahkan seluruh waktunya untuk usaha pertanian. Sedangkan untuk daerah yang kurang berkembang, usaha pertanian sangat dominan. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh kurangnya akses pasar tenaga kerja nonpertanian dan permodalan.

Keadaan pemilikan dan penguasaan lahan di lokasi contoh dapat dilihat pada Tabel 54. Rata-rata total penguasaan lahan berkisar antara 0,9-2,7 ha dengan pemilikan berkisar antara 0,453-2,268 ha (rata-rata pemilikan lahan di Indonesia adalah 0,822 ha; BPS, SP-93). Rata-rata pemilikan terluas terdapat pada desa yang dominan usaha perkebunannya di luar Jawa yaitu 2,286 ha. Selain lahan kebun umumnya penduduk juga mempunyai lahan sawah. Untuk desa yang dominan usaha peternakan, luas pemilikan lahan bukan merupakan cerminan besarnya skala usaha. Rata-rata pemilikan lahan responden pada desa ini adalah 0,453 ha merupakan rata-rata pemilikan paling kecil di antara seluruh responden di desa-desa contoh lainnya. Luas penguasaan dan pemilikan lahan ini tidak langsung mencerminkan tingkat pendapatan usahatani, apalagi jika dilihat secara lintas agroekosistem dan komoditas. Produktivitas lahan dan usahanya akan sangat berbeda.

Tabel 54. Rataan Pemilikan dan Penguasaan Lahan di Lokasi Contoh Menurut Agroekosistem, 2005

Jenis lahan	Provinsi NTB		Provinsi Sulsel		Provinsi Jatim	
	Desa lahan kering hortikultura	Desa lahan kering tan. pangan	Desa sawah	Desa perkebunan	Desa peternakan	Desa sawah
Sawah (ha)	0,090	0,000	2,070	1,440		0,806
Milik	0,090	0,000	1,690	0,990		0,553
Nonmilik			0,380	0,450		0,252
Ladang/tegal (ha)	0,770	1,080	0,000	0,000	1,060	
Milik	0,720	0,900			0,430	
Nonmilik	0,050	0,180			0,630	
Kebun (ha)	0,050	0,850	0,250	1,150		0,003
Milik	0,050	0,850	0,250	1,150		0,003
Nonmilik						
Pekarangan (ha)	0,050	0,090	0,040	0,030	0,023	0,069
Milik	0,050	0,090	0,040	0,030	0,023	0,069
Nonmilik						
Kolam/tambak (ha)	0,000	0,000	0,000	0,098		0,022
Milik				0,098		0,022
Nonmilik						
Total Lahan (ha)	0,960	2,020	2,360	2,718	1,083	0,899
Milik	0,910	1,840	1,980	2,268	0,453	0,647
Nonmilik	0,050	0,180	0,380	0,450	0,630	0,252

Sumber: Data Primer

Pemilikan aset ternak dapat dilihat pada Tabel 55. Aset ternak besar terbanyak dikuasai oleh desa peternakan di Jawa Timur. Namun jika dilihat keadaan aset ternak besar untuk agroekosistem lainnya, maka desa yang memiliki usaha dominan pada pertanian lahan kering (ladang/tegalan) memiliki aset ternak yang relatif besar, terutama di daerah hortikultura. Keadaan ini dapat dimengerti karena di samping iklim yang cukup memadai untuk ternak besar, limbah hortikultura dapat digunakan sebagai pakan ternak dan sebaliknya kotoran ternak dibutuhkan untuk usaha hortikultura. Untuk desa-desa contoh di luar Jawa, tidak ditemukan pemilikan aset ternak besar. Hal ini mungkin disebabkan penguasaan lahan yang relatif luas dengan pengusahaan pertanian yang intensif dan kurangnya tenaga kerja sehingga petani mengkonsentrasikan usahanya pada pertanian sawah dan kebun. Penguasaan aset unggas hampir merata, kecuali di desa peternakan. Hal ini antara lain disebabkan unggas dapat diusahakan di pekarangan sebagai usaha rumah tangga. Selain untuk memperoleh tambahan pendapatan, ternak unggas dan hasil produksinya berupa telur juga digunakan untuk konsumsi sehari-hari.

Tabel 55. Keragaan Pemilikan Aset Ternak yang Diusahakan Responden Menurut Lokasi, 2005

Jenis ternak	Provinsi NTB		Provinsi Sulsel		Provinsi Jawa Timur	
	Desa lahan kering horti-kultura	Desa lahan kering tan. pangan	Desa perkebunan	Desa sawah	Desa peternakan	Desa sawah
Ternak besar						
a. Milik:						
- Fisik (ekor)	1,67	1,33	-	-	5,36	0,2
- % responden yg mengusahakan	60,00	30,00	-	-	100,00	10,00
- Nilai (Rp.000)	5.233,00	3.500,00	-	-	23.030	60,00
b. Gaduhan (ekor)						
- % responden yg mengusahakan	4,0	-	-	-	-	-
Ternak kecil						
a. Milik:						
- Fisik (ekor)	1,25	1,67	-	-	-	-
- % responden yg mengusahakan	30,00	30,00	-	-	-	-
- Nilai (Rp.000)	-	150,00	-	-	-	-
b. Gaduhan (ekor)						
- % responden yg mengusahakan	-	-	-	-	-	-
Unggas						
a. Milik (nilai Rp.000)	38,00	99,17	225,00	191,67	41,00	333,00
- % responden yg mengusahakan	50,00	60,00	60,00	90,00	9,10	50,00

Sumber: Data Primer

5.2. Struktur Pendapatan Rumah Tangga

Hingga saat ini kontribusi sektor pertanian bagi pendapatan penduduk pedesaan masih besar. Lebih dari 50% pendapatan berasal dari pertanian, yang umumnya berasal dari usaha primer atau produksi (Tabel 56). Kontribusi pendapatan sektor pertanian terbesar terdapat di desa peternakan, yaitu 98% diikuti oleh desa perkebunan di luar Jawa dan desa sawah di Jawa, masing-masing 89 dan 82%. Pada umumnya peternak dan petani perkebunan mengkonsentrasikan usahanya secara intensif pada satu usaha saja. Diversifikasi usaha, baik horizontal maupun vertikal, tidak dilakukan. Dengan mengkonsentrasikan usaha dalam satu bidang, petani biasa memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, yaitu sekitar Rp 5 juta/kapita/tahun.

Tabel 56. Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) Menurut Sektor di Lokasi Penelitian, 2005

Uraian	NTB		Sulsel		Jatim	
	Desa lahan kering horti-kultura	Desa lahan kering tan. Pangan	Desa perkebunan	Desa sawah	Desa peternakan	Desa sawah
Pertanian	65,16	76,22	89,41	59,32	98,24	82,26
a. Usahatani						
Sawah	11,75	5,41	35,17	52,28	0,00	47,54
Tegal/ladang	40,79	28,96	0,00	0,00	14,72	0,00
Kebun	1,34	22,05	27,32	1,19	0,00	0,36
Ternak/kolam	0,00	0,00	26,92	0,00	83,15	20,98
Ternak lainnya	1,47	11,93	0,00	1,06	0,37	11,83
b. Buruh tani	4,36	7,31	0,00	0,00	0,00	0,95
c. Pendapatan aset pertanian	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lahan	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00
- alsintan	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00	0,00
- ternak	3,22	0,57	0,00	0,00	0,00	0,60
Nonpertanian	33,73	23,38	9,69	39,96	1,76	17,74
a. Usaha industri	0,00	8,68	0,00	0,18	0,00	3,58
b. Buruh industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Usaha dagang	22,82	0,99	0,00	0,00	0,00	3,58
d. Pekerja bangunan	0,50	3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Jasa/makelar	0,69	0,00	2,69	19,16	1,76	5,08
f. PNS/TNI/Polisi	0,00	0,00	9,69	20,61	0,00	5,02
g. Karyawan swasta	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00
h. Mencari barang di alam bebas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
i. lainnya	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
Penerimaan transfer	1,10	0,39	0,90	0,72	0,00	0,00
TOTAL - %	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rp 000 per RT	10.078,80	6.359,53	22.285,43	22.124,43	20.437,64	16.739,63
Per kapita	2.056,90	1.324,90	5.182,66	4.022,62	5.287,22	3.804,46

Sumber: Data primer

Menarik untuk diperhatikan adalah keragaman pendapatan di desa sawah di Jawa dan luar Jawa. Keragaman pendapatan rumah tangga petani sawah luar Jawa relatif lebih kecil dibandingkan dengan petani sawah di Jawa. Proporsi pendapatan petani sawah di Jawa lebih besar daripada petani di luar Jawa yaitu sebesar 82% berbanding 59%. Jika diteliti lebih jauh, perbedaan ini ternyata karena petani sawah di Jawa melakukan diversifikasi usaha di sektor pertanian sedangkan petani sawah di luar Jawa melakukan diversifikasi usaha di luar sektor pertanian.

Pendapatan per kapita per tahun hampir sama yaitu Rp 3,8 juta di Jawa dan Rp 4 juta di luar Jawa. Hanya sekitar 5% pendapatan rumah tangga yang berasal dari pengelolaan aset pertanian. Usaha alsintan hanya terdapat di desa sawah di luar Jawa. Dengan penguasaan lahan per rumah tangga relatif luas dan tenaga kerja kurang tersedia pada saat pengolahan tanah, traktor menjadi populer sebagai modal untuk pengolahan tanah. Seorang petani yang memiliki lahan luas dan alsintan (alat mesin pertanian) dianggap efektif untuk usahanya. Untuk membuat alsintan lebih efisien, pemiliknya menyewakan alat itu selesai digunakan di lahan sendiri. Selain alat pengolah tanah, alsintan yang banyak menghasilkan pendapatan adalah alat penggiling padi (*Rice Milling Unit* atau *Huller*). Banyaknya produksi yang dihasilkan dari daerah ini membuka peluang usaha pascapanen padi.

Keragaman pendapatan di desa lahan kering tidak jauh berbeda. Diperkirakan komoditas hortikultura membuat petani menjadi berorientasi pasar. Sifat komoditas yang perlu segera dipasarkan dan mempunyai nilai yang relatif tinggi dibandingkan tanaman pangan, membuat usaha dagang pengumpul sayuran/hortikultura memberikan proporsi pendapatan yang relatif besar (Tabel 56). Proporsi pendapatan dari usaha dagang terbesar terdapat di desa yang dominan mengusahakan tanaman hortikultura (23%). Walaupun nilai komoditas hortikultura relatif lebih tinggi daripada tanaman pangan, tetapi tingkat pendapatan petani tidak lebih baik dari petani sawah. Hal ini mungkin disebabkan oleh rendahnya bagian yang diterima petani dari produksi hortikultura tersebut. Sifat komoditas yang mudah rusak memerlukan penanganan pascapanen yang baik pada saat distribusi atau pemasaran sehingga biaya untuk kegiatan ini relatif tinggi. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh pedagang dan bukan oleh petani, sehingga nilai tambah ini dinikmati oleh pedagang.

Desa lahan kering tanaman pangan merupakan desa contoh yang paling kecil pendapatan per kapita per tahunnya yaitu Rp 1,3 juta, hampir mendekati batas garis kemiskinan pedesaan di Indonesia (Rp 1,2 juta/kapita/tahun) (BPS, 2003). Proporsi pendapatan dari sektor pertanian relatif besar (76%) dengan keragaman yang cukup banyak di sektor usaha pertanian primer di tegalan, kebun, dan ternak. Komoditas yang diusahakan pada umumnya adalah palawija. Kendala kekeringan di musim kemarau menyebabkan pengusahaan komoditas ini kurang intensif dan produksinya kurang baik. Kompensasi di luar sektor pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani masih kurang. Sektor usaha industri

pedesaan hanya mampu memberikan kontribusi 9% terhadap pendapatan. Dapat dikatakan bahwa kerja pedesaan belum bisa diciptakan di desa ini secara luas.

Penerimaan transfer adalah sumber pendapatan yang mempunyai prospek untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan. Pada saat sumber daya pertanian dan aksesibilitas penduduk pedesaan terhadap pasar tenaga kerja terbatas, peluang bekerja di sektor informal di luar negeri merupakan salah satu solusi. Penerimaan transfer yang berkisar antara 0,4–1,1% dari total pendapatan umumnya berasal dari anggota keluarga yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di sektor informal di luar negeri.

Sebagai perbandingan, struktur pendapatan rumah tangga dari hasil SUSENAS dapat dilihat pada Tabel 57, 58, dan 59. Dari hasil analisis data SUSENAS tahun 1996 dan tahun 2002, pangsa pendapatan dari sektor pertanian cenderung menurun sedangkan pendapatan non-pertanian meningkat. Di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pangsa pendapatan dari sektor pertanian menurun dari 29% tahun 1996 menjadi 19% pada tahun 2002, sedangkan pendapatan nonpertanian meningkat dari 22% menjadi 32% (Tabel 57). Tingkat pendapatan per kapita per tahun meningkat dari 629 kg setara beras pada tahun 1996 menjadi 844 kg pada tahun 2002. Di kabupaten Lombok Timur, penurunan pangsa pendapatan sektor pertanian tidak sebanyak di Kabupaten Lombok Barat yaitu dari 28% menjadi 22%. Pendapatan usaha nonpertanian juga mengalami penurunan dari 29% menjadi 22%. Pangsa pendapatan yang naik hampir dua kali lipat adalah dari pendapatan lainnya seperti pensiun dan beasiswa yaitu dari 8% menjadi 15%.

Tabel 57. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh, Nusa Tenggara Barat (Kota + Desa), 1996-2002

Sumber pendapatan	Lombok Barat		Lombok Timur	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,65	28,49	25,21	30,16
2. Pendapatan usaha Pertanian	29,06	19,01	28,21	21,85
- tanaman pangan & nonpangan	20,98	15,41	25,34	19,21
- lainnya (peternakan, dsb)	8,08	3,61	2,88	2,64
3. Pendapatan usaha nonpertanian	21,73	31,87	28,62	22,01
4. Pendapatan bukan upah/gaji	7,65	9,33	9,74	10,96
- perkiraan sewa rumah	6,40	5,71	5,23	6,41
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	1,24	3,62	4,51	4,55
5. Pendapatan lain	10,91	11,30	8,22	15,02
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	619,0	2521,7	611,2	2125,7
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	629	844	632	75

Sumber: BPS 1996 dan 2002 (diolah).

Untuk daerah perkotaan di Lombok Barat, pendapatan usaha pertanian menurun sangat tajam terutama untuk usaha tanaman yaitu dari 28% menjadi 8%. Di lain pihak pendapatan nonpertanian meningkat. Sebaliknya di daerah kota di Lombok Timur pendapatan dari usaha pertanian meningkat sebesar kurang lebih 5% (Tabel Lampiran 24). Di daerah desa Lombok Barat, pendapatan usaha pertanian relatif stabil tetapi di Lombok Timur terjadi penurunan pendapatan usaha pertanian dari 35% menjadi 25%. Tingkat pendapatan di daerah desa lebih kecil dibandingkan dengan daerah kota, baik di Lombok Timur maupun Lombok Barat. (Tabel Lampiran 25). Pada tahun 2002, pendapatan per kapita per tahun setara beras di kota Lombok Barat adalah 976 kg sedangkan di daerah desa 752 kg; di daerah kota Lombok Timur 887 kg dan di daerah desa 643 kg.

Di Kabupaten Pinrang perubahan struktur pendapatan rumah tangga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan di Kabupaten Wajo. Pendapatan usaha pertanian di Pinrang menurun sekitar 10%, sementara di Wajo penurunannya mencapai 43%. Keadaan ini terlihat juga pada usaha nonpertanian. Di Kabupaten Wajo, pendapatan usaha nonpertanian meningkat 43%, sedangkan di Pinrang hanya meningkat sekitar 1% (Tabel 58). Pada tahun 1996 pendapatan per kapita per tahun setara beras di Pinrang 1078 kg, sementara di Wajo 818 kg. Tujuh tahun kemudian ekonomi di Wajo berkembang pesat, terutama di usaha pertanian, sehingga pendapatan per kapita per tahun mencapai 1696 kg sedangkan di Kabupaten Pinrang 1161 kg.

Tabel 58. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) di Kabupaten Contoh, Sulawesi Selatan (Kota + Desa), 1996-2002

Sumber pendapatan	Pinrang		Wajo	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	16,80	18,2	15,89	9,19
2. Pendapatan usaha Pertanian	40,12	29,5	66,98	23,94
- tanaman pangan & nonpangan	30,90	23,8	61,53	23,35
- lainnya (peternakan, dsb)	9,22	5,7	5,45	0,59
3. Pendapatan usaha nonpertanian	23,34	24,9	17,71	60,48
4. Pendapatan bukan upah/gaji	8,36	8,2	9,79	8,15
- perkiraan sewa rumah	5,98	3,9	6,42	5,76
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,38	4,3	3,37	2,39
5. Pendapatan lain	11,38	19,19	-10,38	-1,76
Total	100,00	100,0	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	863	3135	580	4045
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	1078	1161	818	1696

Sumber: BPS. diolah.

Dinamika perubahan struktur pendapatan rumah tangga yang paling tinggi terjadi di daerah kota Kabupaten Wajo pada usaha

nonpertanian. Pangsa usaha nonpertanian meningkat hampir dua kali lipat selama tujuh tahun (Tabel Lampiran 26). Keadaan ini menyebabkan peningkatan yang pesat pada pendapatan per kapita masyarakat kota, yaitu dari 918 kg setara beras pada tahun 1996 menjadi 3017 kg pada tahun 2002. Perkembangan yang pesat ini tidak terlihat di Kabupaten Pinrang. Seperti halnya di daerah kota, daerah desa Pinrang relatif stabil struktur pendapatan rumah tangga dan pendapatannya. Di Wajo perkembangan ekonomi juga terlihat di daerah pedesaan. Struktur pendapatan usaha pertanian menurun dan pendapatan usaha nonpertanian meningkat. Kenaikan pendapatan per kapita per tahun di desa tidak sebesar yang terjadi di kota di Kabupaten Wajo, yaitu dari 784 kg menjadi 1047 kg pada tahun 2002 (Tabel Lampiran 27).

Kondisi yang sama ditemukan di Jawa Timur, yakni perubahan struktur pendapatan rumah tangga di bidang pertanian dan non-pertanian. Di Kabupaten Kediri, struktur pendapatan dari usaha pertanian relatif statis dan hampir tidak ada perubahan. Pada tahun 1996 pangsa pendapatan dari pertanian sebesar 15,8% dan pada tahun 2002 sebesar 16% (Tabel 59). Di Kabupaten Malang terjadi penurunan pangsa pendapatan sektor pertanian, sedangkan peningkatan struktur pendapatan terjadi pada pendapatan lain. Pendapatan per kapita per tahun untuk kedua kabupaten ini meningkat dengan kenaikan 63 kg untuk Kabupaten Kediri dan 263 kg untuk Kabupaten Malang.

Tabel 59. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga (%) di Kabupaten Contoh, Jawa Timur (Kota + Desa), 1996-2002

Sumber pendapatan	Malang		Kediri	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	39,66	40,47	41,47	44,05
2. Pendapatan usaha Pertanian	30,10	15,46	15,75	15,97
- tanaman pangan & nonpangan	24,76	13,82	10,41	11,39
- lainnya (peternakan, dsb)	5,34	1,64	5,35	4,58
3. Pendapatan usaha nonpertanian	22,96	21,42	35,52	22,85
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,38	6,51	13,75	7,65
- perkiraan sewa rumah	6,79	4,89	7,65	4,45
- lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,59	1,62	6,09	3,20
5. Pendapatan lain	-4,10	16,14	-6,49	9,48
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	666	2974	801	2894
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	696	959	840	903

Sumber: BPS, diolah.

Di dua kabupaten contoh di Jawa Timur terlihat dinamika struktur pendapatan yang berbeda, baik di daerah kota maupun di desa. Di Kabupaten Malang, struktur pendapatan rumah tangga pada usaha pertanian terlihat menurun, sedangkan untuk usaha nonpertanian

cenderung tetap. Keadaan yang sebaliknya terjadi di Kabupaten Kediri. Pendapatan usaha pertanian di kabupaten ini cenderung tetap, sedangkan pendapatan nonpertanian menurun. Fenomena ini terjadi baik di daerah kota maupun desa pada kedua kabupaten tersebut (Tabel Lampiran 28 dan 29). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumah tangga pertanian di Kabupaten Kediri tetap konsisten mengusahakan pertaniannya. Sawah dengan sistem pengairan yang baik di daerah ini cukup memberikan kehidupan pada petaninya walaupun tidak terlalu besar.

5.3. Kinerja Pertanian dan Dinamika Pola tanam

Pengusahaan pertanian di pedesaan umumnya masih berorientasi pada usaha pertanian primer. Komoditas yang diusahakan sangat bergantung keadaan sumber daya alam di masing-masing wilayah. Cara pengusahaannya dapat secara monokultur maupun tumpangsari atau sepanjang tahun mengusahakan komoditas yang sama maupun berbeda dengan sistem rotasi. Tanaman perkebunan umumnya merupakan tanaman tahunan. Dengan demikian sepanjang tahun petani mengusahakan komoditas yang sama. Kadang-kadang tanaman perkebunan ditumpangsarikan dengan tanaman buah-buahan, kelapa, atau tanaman tahunan lain. Pada tanaman musiman seperti tanaman pangan dan sayuran, petani biasanya melakukan pola tumpangsari dan rotasi yang merupakan diversifikasi usahatani secara horizontal.

Pola tanam dan jenis komoditas yang diusahakan pada lahan kering lebih beragam dibandingkan dengan lahan sawah. Diversifikasi vertikal, seperti penanganan pascapanen dan pengolahan hasil produksi, belum banyak dilakukan petani di lokasi contoh.

Diversifikasi usahatani dilakukan petani dengan beberapa tujuan antara lain:

1. Mengatasi risiko kegagalan panen.
2. Alasan teknis pengusahaan, seperti pencegahan hama dan penyakit serta pemeliharaan kesuburan tanah.
3. Menyesuaikan dengan ketersediaan air.
4. Menambah pendapatan usahatani.
5. Mengikuti perkembangan permintaan pasar.
6. Pertimbangan harga komoditas di pasar.

Pada lokasi contoh, dengan keragaman agroekosistem, pola tanam dan dinamika sangat berbeda dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Untuk bisa secara lebih jelas melihat perkembangan pertanian di setiap lokasi contoh, dinamikanya akan diuraikan satu persatu lokasi contoh.

Desa lahan kering berbasis tanaman hortikultura, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Jika dilihat dari jenis komoditas yang diusahakan petani selama kurun waktu 10 tahun terakhir, maka pertanian di desa ini dinilai cukup

berkembang (Tabel 60). Sepuluh tahun yang lalu, komoditas yang dominan di ladang atau tegalan hanya jagung yang diusahakan secara monokultur satu tahun sekali oleh sebagian besar responden (82%). Sisanya mengusahakan jagung secara tumpangsari dengan kacang gude dan ubi kayu (17%), dan dua kali jagung dalam setahun (1%). Komoditas tersebut masih diusahakan secara tradisional.

Tabel 60. Keragaan Pola Tanam di Desa Pringgabaya, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (Lahan Kering Berbasis Tanaman Hortikultura) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir

Kondisi setahun terakhir (04/05)		Kondisi 5 tahun terakhir		Kondisi 10 tahun terakhir	
Pola tanam	%	Pola tanam	%	Pola tanam	%
Jenis lahan					
A. Ladang/tegal					
Bw merah-bera	2,32	Bw merah	2,33	Jagung-bera	81,88
Jagung-bw merah	15,58	Jagung-bw merah- bw merah	16,32	Jagung- jagung-bera	0,73
Jagung-bw merah-bw merah	27,09	Jagung-bera	15,54	Jagung/tubi kayu/kc gude- bera	17,39
Jagung-bw merah-tomat	3,87	Jagung-jagung-bw merah	4,66		
Jagung-bera	7,74	Jagung-jagung- bera	15,54		
Jagung-kacang hijau	1,16	Jagung-tembakau	23,47		
Jagung-kacang jogo-bera	5,80	Padi-jagung-bera	22,14		
Padi/jg-bw merah-bera	2,71				
Padi-bw merah-bw merah	4,64				
Padi-bw merah-jagung	5,80				
Padi-cabe rawit	0,70				
Padi-jagung-kc hijau	1,55				
Padi-jagung-tembakau	2,32				
Padi-jagung-tomat	5,88				
Padi-tomat-jagung	5,03				
Tomat-bw merah- tembakau	7,79				
B. Lahan sawah					
Padi-bw merah	44,44	Jagung-tembakau	44,44	Jagung-bera	44,44
Padi-jagung-jagung	55,56	Padi-jagung-bera	55,56	Padi-padi-bera	55,56

Sumber: Data Primer

Lima tahun kemudian, jenis tanaman baru muncul di desa ini yaitu bawang merah, tembakau, dan padi gogo. Sekitar 20% responden mengusahakan bawang merah dengan pola tanam yang berbeda. Bawang merah ditanam dua kali dalam setahun dan dirotasi dengan jagung oleh responden (16%). Sebagian lainnya (5%) menanam jagung dua kali dirotasi dengan bawang merah. Tembakau, yang merupakan tanaman baru di desa tersebut lima tahun yang lalu dirotasikan dengan jagung dan

diusahakan oleh 23% responden, sedangkan 22% responden lain merotasi padi gogo dan jagung. Proporsi responden yang mengusahakan bawang merah, tembakau, dan padi gogo hampir sama tidak ada yang dominan, sementara jagung masih tetap ditanam sebagai komoditas utama ladang.

Pada musim tanam 2004/05, pengusahaan ladang berkembang pesat dengan berbagai ragam pola tanam dan komoditas meski jagung masih tetap sebagai tanaman utama. Karena prospek pasar dan secara teknis memadai, bawang merah berkembang cepat. Komoditas ini diusahakan oleh 62% petani berbagai kombinasi tanaman, baik dengan jagung, padi gogo, maupun tanaman lainnya.

Berbeda dengan bawang merah, minat petani di desa ini terhadap tembakau menurun. Setahun terakhir, komoditas ini hanya diusahakan oleh 10% responden. Padi gogo berkembang seperti halnya bawang merah. Diperkirakan hal tersebut terjadi karena petani ingin berusaha memenuhi kebutuhan konsumsi pangannya akibat kurangnya lahan sawah yang bisa diusahakan di desa ini. Tanaman palawija lainnya seperti kacang hijau dan sayuran seperti cabe rawit, tomat, kacang jogo, belum banyak dikembangkan saat ini.

Cara pengusahaan lahan sawah tidak terlalu beragam. Tanaman pokok yang diusahakan adalah padi dan jagung. Sepuluh tahun yang lalu 56% responden masih mengusahakan tanaman padi dua kali dalam satu tahun. Namun lima tahun kemudian lahan sawah hanya bisa ditanami padi satu kali setahun, karena diperkirakan tembakau mempunyai nilai yang baik dan ditanam di sawah. Dengan demikian masyarakat setempat mulai mengusahakan padi di ladang untuk mencukupi kebutuhan konsumsinya. Saat ini tembakau sudah diganti dengan bawang merah yang tampaknya mempunyai prospek yang baik di daerah ini, baik dari segi produksi maupun permintaan pasar.

Desa Lahan Kering Berbasis Tanaman Pangan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Tidak seperti desa lahan kering berbasis tanaman hortikultura yang banyak mengalami perubahan dalam sistem pengusahaan komoditas, desa lahan kering berbasis tanaman pangan keadaannya relatif statis waktu 10 tahun terakhir. Komoditas yang diusahakan adalah jagung, padi gogo, kedelai, kacang hijau, dan kacang tanah. Tanaman tahunan seperti mangga dan jambu mete juga ditanam oleh sebagian petani di ladangnya. Pola tanam maupun komoditas yang diusahakan relatif sama (Tabel 61).

Sistem pertanaman jagung-bera yang dominan pada 10 tahun yang lalu mengalami perubahan. Petani sudah mulai memanfaatkan lahannya secara optimal dengan menanam kedelai, kacang hijau maupun jagung. Cara penanaman yang dilakukan sangat beragam baik monokultur, tumpangsari, maupun rotasi. Tapi tidak mengalami perubahan yang berarti hingga saat ini. Keadaan sumber daya alam yang terbatas dan sumber daya manusia yang kurang tangguh serta tidak

adanya terobosan teknologi yang signifikan untuk mendorong perubahan pola tanam merupakan faktor yang mempengaruhi keadaan ini. Dengan pola seperti ini, diperkirakan hasil produksi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa diversifikasi usaha di luar sektor pertanian, keadaan ini sangat berisiko. Pada saat gagal panen akibat iklim yang tidak baik atau hama-penyakit atau sebab lainnya, agak sulit bagi petani untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Pendapatan dari kebun, merupakan salah satu sumber yang bisa membantu. Komoditas dominan di kebun adalah kelapa dan jambu mete. Keragaman usaha tanaman perkebunan ini juga tidak berubah dan terlihat sama dari tahun ke tahun. Melihat keadaan pertanian yang relatif statis ini, akses pada usaha dan pasar tenaga kerja luar pertanian sangat diharapkan bisa membantu meningkatkan pendapatan petani.

Tabel 61. Keragaan Pola Tanam di Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (Lahan Kering Berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir

Kondisi setahun terakhir (04/05)		Kondisi 5 tahun terakhir		Kondisi 10 tahun terakhir	
Pola tanam	%	Pola tanam	%	Pola tanam	%
Jenis lahan					
A. Tegalladang					
Jagung-kc tanah	16,13	Jagung-kedelai	16,13	Jagung-bera	24,19
Kc tanah-bera	4,03	Kc tanah-bera	4,03	Kc tanah-bera	4,03
Kedelai/jagung/mete	4,84	Kedelai/jagung/ mete	4,84	Kedelai/jagung/ mete	4,84
Kedelai/jagung-kc. tanah	8,06	Kedelai/jagung-kc tanah	8,06	Kedelai/jagung-kc tanah	8,06
Kedelai/mete/ mangga	2,02	Kedelai/mete/ mangga	2,02	Kedelai/mete/ mangga	2,02
Kedelai-bera	2,02	Kedelai-bera	2,02	Kedelai-bera	2,02
Kedelai-kc hijau	19,35	Kedelai-kc hijau	12,10	Kedelai-kc hijau	12,10
Padi/jagung-bera	16,13	Kedelai-kc tanah	8,06	Kedelai-kc tanah	8,06
Padi/jagung/mete	4,84	Padi/jagung	8,06	Padi/jagung-bera	10,08
Padi/jagung-kc panjang	0,81	Padi/jagung/mete	4,84	Padi/jagung/mete	4,84
Padi/jagung-kedelai	6,05	Padi/jagung-bera	10,08	Padi/jagung-kc panjang	0,81
Padi/jagung- mentimun	2,02	Padi/jagung-kc panjang	0,81	Padi/jagung- kedelai/kc hijau	2,02
Padi-kc hijau-bera	0,81	Padi/jagung- kedelai	6,05	Padi/jagung-kedelai	4,03
Padi-kc tanah-bera	12,90	Padi-kc tanah-bera	12,90	Padi-kc tanah-bera	12,90
B. Lahan kebun					
Kelapa	36,50	Kelapa	36,50	Kelapa	36,50
Kelapa/kedondong/ mete	3,55	Kelapa/kedondong /mete	3,55	Kelapa/kedondong/ mete	3,55
Mete/kelapa	13,03	Mete/kelapa	13,03	Mete/kelapa	13,03
Mete/kedondong	15,64	Mete/kedondong	15,64	Mete/kedondong	15,64
Mete	31,28	Mete	31,28	Mete	31,28

Sumber: Data Primer

Desa Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan Kakao, Pinrang, Sulawesi Selatan

Kakao merupakan komoditas perkebunan yang dominan di Sulawesi Selatan. Harga kakao yang sangat baik memacu petani memperluas areal pertanamannya. Kakao biasa ditanam secara monokultur (45%) atau ditumpangsarikan dengan pisang dan kelapa (39%). Sejak sepuluh tahun yang lalu pola tanam ini tidak berubah (Tabel 62). Selain lahan perkebunan, penduduk di desa ini juga memiliki lahan sawah yang bisa ditanami padi dua kali dalam setahun dengan pola padi-padi-bera.

Diversifikasi usaha pertanian tidak banyak dilakukan petani di desa ini. Secara umum petani mengusahakan tanaman kakao secara intensif sehingga tenaga keluarga tercurah pada perkebunan dan sawah. Hasil sawah bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat sepanjang tahun, sedangkan hasil penjualan kakao bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lainnya di luar pangan.

Tabel 62. Keragaan Pola Tanam di Desa Pincara, Pinrang, Sulawesi Selatan (Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan Kakao) dan Perubahannya Selama Sepuluh Tahun Terakhir

Kondisi setahun terakhir (04/05)		Kondisi 5 tahun terakhir		Kondisi 10 tahun terakhir	
Pola tanam	%	Pola tanam	%	Pola tanam	%
Lahan kebun					
Kakao	45,05	Kakao	45,05	Kakao	45,05
Kakao/kelapa/pisang	39,41	Kakao/kelapa/pisang	39,41	Kakao/kelapa/pisang	39,41
Kakao/kelapa	11,26	Kakao/kelapa	11,26	Kakao/kelapa	11,26
Kelapa	4,28	Kelapa	4,28	Kelapa	4,28
Lahan sawah					
Padi-padi-bera	100,00	padi-padi-bera	100,00	padi-padi-bera	100,00

Sumber: Data Primer

Desa Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan, Wajo, Sulawesi Selatan

Seperti halnya Pinrang, petani di desa ini mengusahakan sawah dan kebun yang kebanyakan ditanami kakao. Namun demikian sebagian besar tenaga dan waktu petani tercurah pada lahan sawah yang sepuluh tahun lalu ditanami padi hanya satu kali dalam setahun. Pada musim kemarau, sawah ditanami palawija lalu diberakan (Tabel 63). Pada perkembangannya selama lima tahun terakhir, padi di sawah bisa ditanam dua kali dalam setahun akibat adanya peningkatan kualitas irigasi dan air bisa tersedia pada awal musim kemarau. Di desa penghasil padi ini usaha alsintan, seperti Huller/RMU berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat untuk prosesi hasil padinya.

Tabel 63. Keragaan Pola Tanam di Desa Dua Limpoe, Wajo, Sulawesi Selatan (Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahannya Sepuluh Tahun Terakhir

Kondisi setahun terakhir (04/05)		Kondisi 5 tahun terakhir		Kondisi 10 tahun terakhir	
Pola tanam	%	Pola tanam	%	Pola tanam	%
Lahan Sawah					
Padi-padi-bera	100,00	padi-padi-bera	100,00	padi-palawija-bera	100,00
Lahan Kebun					
Cengkeh	1,27	Cengkeh	1,27	Cengkeh	1,27
Kakao	58,23	Kakao	25,00	Kakao	25,00
Kakao/kelapa	15,19	Kakao/kelapa	15,19	Kakao/kelapa	15,19
Pisang/sayuran	12,66	Pisang/sayuran	12,66	Pisang/sayuran	12,66
Mete	12,66	Mete	12,66	Mete	12,66
		Semak-semak	12,66	Semak-semak	12,66

Sumber: Data Primer

Lahan kebun petani Wajo ditanami cengkeh, kakao, kelapa, pisang, sayuran, dan mete dengan persentase terbanyak tanaman kakao. Karena prospek kakao yang cukup baik saat ini 58% petani contoh mengusahakannya. Angka ini lebih dari dua kali lipat angka 5-10 tahun yang lalu. Saat ini tidak terdapat lagi semak-semak di lahan petani karena sudah berubah menjadi kebun kakao.

Desa Peternakan Sapi Perah, Malang, Jawa Timur

Daerah penghasil susu ini sejak sepuluh tahun yang lalu sudah mengusahakan lahannya untuk rumput gajah (pakan sapi). Usaha ini dilakukan secara intensif sehingga tenaga kerja keluarga tercurah sepenuhnya pada usaha peternakan sapi perah. Dilihat dari pola tanamnya, sepuluh tahun yang lalu, rumput gajah sudah ditanam di ladang oleh 46% responden (Tabel 64).

Areal hutan masih terdapat di desa ini yang dikelola oleh Perhutani. Lambat-laun areal hutan dikonversi menjadi usaha sayuran sejak 5 tahun terakhir. Selain rumput gajah, tegalan ditanami sayuran dataran tinggi seperti kentang, kubis, sawi, wortel, dan bawang putih. Brokoli baru dikenal petani Pujon 5 tahun yang lalu dan saat ini salada mulai diusahakan. Pola tanam kentang-kubis-jagung mendominasi lahan sayuran dan diterapkan oleh 20% petani contoh. Saat ini, hampir 60% petani mengusahakan rumput gajah di ladang dan sisanya mengusahakan sayuran dengan pola tanam yang sangat beragam. Sayuran ditanam secara monokultur dengan cara rotasi. Jagung ditanam pada akhir musim kemarau pada saat air kurang. Dapat disimpulkan bahwa peternakan sapi makin berkembang di daerah ini sehingga kebutuhan pakan meningkat. Sementara itu lahan sawah ditanami jagung sepanjang tahun dan tidak berubah sejak 10 tahun terakhir. Jagung di sawah ditanam secara

monokultur tiga kali setahun tanpa rotasi dengan tanaman lainnya. Komoditas ini dianggap menguntungkan karena batang dan daunnya bisa digunakan untuk pakan sapi.

Tabel 64. Keragaan Pola Tanam di Desa Pujon, Malang, Jawa Timur (Peternakan Sapi Perah) dan Perubahan Selama Sepuluh Tahun Terakhir

Kondisi setahun terakhir (04/05)		Kondisi 5 tahun terakhir		Kondisi 10 tahun terakhir	
Pola tanam	%	Pola tanam	%	Pola tanam	%
Lahan tegalan					
Rumput Gajah	57,59	Rumput Gajah	46,29	Hutan	36,73
Kentang-sawi-jagung	3,21	Wortel-brokoli-bera	12,24	Rumput Gajah	46,29
Kentang-kubis-jagung	4,02	Kentang-sawi-jagung	4,49	Kentang-kubis-jagung	9,63
Kubis-kentang-jagung	1,85	Kentang-kubis-jagung	19,84	Kubis-kentang-jagung	8,98
Brokoli-brokoli-jagung	1,61	Kubis-kentang-jagung	3,27	Kentang-sawi-jagung	8,16
Kubis-brokoli-bera	1,61	Kubis-brokoli-bera	1,63	Jagung-wortel-jagung	8,16
Jagung-wortel-jagung	8,03	Jagung-sawi-jagung	8,16	Bw putih-kentang-bera	4,08
Kentang-kentang-jagung	8,03	Brokoli-brokoli-jagung	4,08		
Sawi-jagung-jagung	2,01				
Brokoli-letus-jagung	2,01				
Lahan sawah					
Jagung-jagung-jagung	100,00	Jagung-jagung-jagung	100,00	Jagung-jagung-jagung	100,00

Sumber: Data Primer

Desa Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan, Kediri, Jawa Timur

Lahan pertanian di desa ini didominasi oleh lahan sawah yang bisa ditanami padi tiga kali setahun (34%) karena ketersediaan air sepanjang tahun (Tabel 65). Padi ketan merupakan komoditas yang banyak diusahakan dan 47% responden mengusahakan komoditas ini dua kali dalam setahun. Sebanyak 12% responden lainnya mengusahakan petani satu tahun sekali pada musim ketiga setelah padi sawah. Ikan di sawah diusahakan oleh 5% responden. Pola tanam ini tidak banyak berubah selama kurun waktu 10 tahun terakhir, meskipun akhir-akhir ini beberapa komoditas sayuran dataran rendah, seperti cabe, paria dan mentimun, mulai ditanam di lahan sawah.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan pola tanam di lahan tegalan lebih dinamis dibandingkan dengan lahan sawah dan perkebunan. Diversifikasi usaha pertanian secara horizontal lebih banyak dilakukan petani ladang.

Tabel 65. Keragaan Pola Tanam di Desa Pare, Kediri, Jawa Timur (Lahan Sawah berbasis Tanaman Pangan) dan Perubahan Selama Sepuluh Tahun Terakhir

Kondisi setahun terakhir (04/05)		Kondisi 5 tahun terakhir		Kondisi 10 tahun terakhir	
Pola tanam	%	Pola tanam	%	Pola tanam	%
Lahan sawah					
Padi-padi-padi	33,52	Padi-padi-padi	33,52	padi-padi-padi	33,52
Padi ketan-padi ketan-bera	45,61	p ketan-p ketan- bera	46,93	p ketan-p ketan- bera	46,93
Padi-padi-padi ketan	12,28	Padi-padi-p ketan	12,28	padi-padi-p ketan	12,28
Cabe-bw merah- jagung	2,64	jagung-baw merah- jagung	2,64	jagung-baw merah-jagung	2,64
Ikan-ikan-ikan- padi	4,63	ikan-ikan-ikan-padi	4,63	ikan-ikan-ikan- padi	4,63
Paria-mentimun- jagung	1,32				

5.4. Faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Usaha Pertanian

Keragaman usaha diversifikasi pertanian berbeda tiap lokasi contoh. Ada yang tingkat diversifikasinya rendah, seperti desa berbasis usaha peternakan dan perkebunan, dan ada yang tingkat diversifikasinya tinggi, seperti desa lahan kering berbasis tanaman hortikultura. Faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi petani melakukan diversifikasi antara lain:

- Keadaan pasar yang berkaitan dengan harga komoditas dan permintaan pasar.
- Teknologi pertanian seperti ketersediaan bibit/benih, keadaan hama penyakit dan pengendaliannya, dan teknologi budi daya.
- Keadaan sumber daya lahan; seperti luas lahan yang tersedia, produktivitas lahan, keadaan siklus produksinya, dan memiliki lebih dari satu jenis lahan usaha.
- Ketersediaan air seperti kualitas jaringan irigasi dan keadaan debit air.
- Keadaan iklim seperti kesesuaian iklim terhadap suatu jenis tanaman, curah hujan dan hari hujan, dan ketinggian dari permukaan laut.
- Untuk mengurangi risiko kegagalan panen.
- Ketersediaan tenaga kerja.

Dari Tabel 66 terlihat bahwa harga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi responden untuk melakukan diversifikasi, terutama di desa-desa penghasil komoditas hortikultura, perkebunan, dan padi sawah. Di desa penghasil komoditas hortikultura, selain harga komoditas,

ketersediaan bibit, teknik budi daya, dan ketersediaan air merupakan alasan yang dominan bagi petani untuk melakukan diversifikasi. Alasan pengurangan risiko juga tidak kalah pentingnya karena sifat tanaman hortikultura yang sangat rentan terhadap hama penyakit, sifat komoditas yang mudah rusak, serta fluktuasi harga yang tidak menentu. Sering terjadi harga baik pada saat tanam tetapi saat panen harga jatuh padahal biaya usahatani yang dikeluarkan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan komoditas tanaman pangan. Dengan diversifikasi usaha dan menanam lebih dari satu jenis komoditas pada saat yang sama, risiko tersebut bisa dikurangi.

Tabel 66. Alasan Petani Melakukan Diversifikasi Usaha Pertanian (%)

No	Uraian	Provinsi NTB		Provinsi Sulsel		Provinsi Jatim	
		Desa lahan kering horti-kultura	Desa lahan kering tan Pangan	Desa perkebunan	Desa sawah	Desa peternakan	Desa sawah
	Rumah tangga melakukan diversifikasi usaha (%)	100,00	100,00	80,00	70,00	9,09	40,00
1	Keadaan Pasar						
	- Harga	70,00	30,00	87,50	42,86	45,45	40,00
	- Permintaan	40,00	70,00	62,50	28,57	81,81	30,00
2	Masalah teknologi						
	- bibit	60,00	30,00	25,00	14,29	18,18	20,00
	- PHT	10,00	20,00	50,00	14,29	9,09	20,00
	- Budi daya	50,00	50,00	25,00	28,58	36,36	
3	Keadaan lahan						
	- Areal/luas	50,00	40,00	75,00	14,29	45,45	20,00
	- Produktivitas		30,00				
	- Siklus produksi		10,00	12,50		36,36	10,00
	- Memiliki dua jenis lahan			12,50	28,58		
4	Ketersediaan air						
	- Kualitas jaringan	30,00		37,50	14,29		30,00
	- debit air	60,00		25,00	14,29	18,18	20,00
5	Iklim						
	- Curah hujan dan hari hujan	50,00	80,00				
	- Iklim sesuai			12,50	14,29		
6	Pengurangan risiko	60,00	50,00	50,00	14,29	45,45	

Sumber: Data Primer

Pada desa penghasil tanaman pangan di lahan kering, curah hujan merupakan faktor yang paling penting dalam melakukan diversifikasi. Ketersediaan air sangat kurang di daerah tersebut, sehingga komoditas yang ditanam sangat terbatas. Jagung merupakan komoditas yang banyak

ditanam karena relatif sedikit membutuhkan air. Di desa penghasil komoditas perkebunan, keadaan pasar hasil produksi sangat menentukan arah usaha yang harus dilakukan petani. Harga kakao yang relatif baik dan banyaknya permintaan, misalnya, telah memacu petani untuk berusaha secara intensif dan ekstensif. Hal yang sama juga berlaku pada desa peternak sapi perah di Jawa Timur. Faktor yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan tenaga kerja karena diversifikasi memerlukan tenaga kerja yang relatif lebih banyak.

5.5. Ragam Pendapatan dan Dinamika Diversifikasi Usaha

Keragaman pendapatan menunjukkan keragaman sumber usaha suatu rumah tangga. Makin banyak sumber pendapatan suatu rumah tangga makin luas diversifikasi usahanya. Pada penelitian ini keragaman pendapatan dilihat pada dua titik waktu yaitu tahun 1996 dan 2002 agar terlihat perkembangan atau dinamika keragaannya. Secara lebih jelas keragaman pendapatan rumah tangga menurut kelas pendapatan dan pekerjaan utama KK beserta dinamikanya dapat dilihat dari hasil analisa data Susenas tahun 1996 dan 2002.

Di Lombok Barat, secara umum terjadi peningkatan ragam sumber pendapatan dari tahun 1996 ke tahun 2002. Hal ini terlihat dengan meningkatnya indeks keragaman sumber pendapatan. Keragaman sumber pendapatan pertanian untuk kelas pendapatan rendah tampak menurun yaitu 1,08 pada tahun 1996 menjadi 0,94 pada tahun 2002. Sebaliknya, pada kelas pendapatan sedang dan tinggi untuk usaha pertanian, indeks keragaman meningkat (Tabel 67). Ini berarti bahwa kelas pendapatan rendah tidak banyak mempunyai peluang untuk melakukan diversifikasi usaha rumah tangganya dibandingkan dengan kelas pendapatan sedang dan tinggi. Keadaan berbeda terjadi di Kabupaten Lombok Timur karena peningkatan indeks keragaman usaha terjadi pada kelas pendapatan rendah meski kecil. Peningkatan indeks juga terjadi kelas pendapatan sedang dan tinggi. Secara umum bisa dilihat bahwa usaha pertanian bisa memberikan peluang usaha untuk diversifikasi pendapatan rumah tangga.

Keragaman pendapatan rumah tangga di sektor pertanian di daerah perkotaan Lombok Barat dan Lombok Timur tidak banyak mengalami perubahan. Industri berkembang pesat di kota sehingga mampu memberikan peluang kerja dan usaha bagi rumah tangga kota, terutama pada kelas pendapatan rendah (Tabel Lampiran 30). Di daerah pedesaan Lombok Barat pada tahun 2002 sektor industri mulai menggeser sektor pertanian. Indeks keragaman pendapatan pertanian menurun selama kurun 1996-2002, namun indeks pendapatan di bidang industri meningkat hampir dua kali lipat. Bagi kelas pendapatan sedang dan tinggi, sektor pertanian tampaknya masih bisa memberikan peluang untuk diversifikasi pendapatan masyarakat. Indeks pendapatan sektor pertanian untuk kelas pendapatan sedang meningkat dari 0,90 menjadi 1,09 dan dari 0,89 menjadi 1,15 untuk pendapatan tinggi (Tabel Lampiran

31). Keadaan yang serupa terjadi pada daerah pedesaan Lombok Timur. Namun demikian untuk rumah tangga kelas pendapatan rendah, indeks keragaman pendapatan tidak banyak berubah.

Tabel 67. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Lombok Barat	Pertanian	1,08	0,84	0,91	1,08	0,89	1,16
	Industri	0,42	0,82	0,84	0,70	1,08	0,78
	Perdagangan	1,07	0,75	0,97	0,62	0,79	0,67
	Jasa	1,02	0,96	0,74	0,87	0,98	0,67
	Lainnya	0,79	0,56	1,10	0,67	1,18	0,96
	Total	0,99	0,80	0,89	0,85	0,94	0,90
Lombok Timur	Pertanian	1,04	1,11	0,94	1,17	0,864	1,18
	Industri	0,60	0,83	1,05	0,76	0,801	1,12
	Perdagangan	0,64	0,65	0,70	0,88	0,55	0,86
	Jasa	0,70	1,22	0,65	0,88	0,717	0,86
	Lainnya	0,74	0,59	1,05	0,88	1,116	0,93
	Total	0,89	0,99	0,84	1,05	0,753	1,01

Sumber: BPS, diolah.

Dua Kabupaten contoh di Sulawesi Selatan, Pinrang dan Wajo, menunjukkan perbedaan dinamika indeks keragaman pendapatan. Di Kabupaten Pinrang, indeks keragaman pendapatan rumah tangga usaha pertanian sedikit menurun pada kelas pendapatan rendah dan tinggi. Pada kelas pendapatan sedang, indeks keragaman pendapatan sedikit meningkat dan tidak begitu berarti sehingga masih bisa dianggap tetap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pinrang tidak banyak terjadi perubahan keragaman pendapatan pada usaha pertanian. Sebaliknya di Wajo, dinamika indeks keragaman pendapatan terlihat jelas. Pada kurun waktu 1996 sampai 2002 terjadi peningkatan keragaman pendapatan yang cukup berarti untuk ketiga kelas pendapatan di bidang usaha pertanian. Pada kelas pendapatan rendah, keragaman pendapatan meningkat dari 0,44 ke 0,76 sedangkan pada kelas pendapatan sedang dari 0,40 ke 0,90 dan kelas pendapatan tinggi dari 0,22 ke 0,71 (Tabel 68). Keadaan ini terjadi juga pada bidang usaha industri untuk kelas pendapatan rendah dan sedang.

Melihat perkembangan ini dapat dikatakan bahwa di Kabupaten Wajo terdapat kesempatan untuk meragamkan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan rumah tangga terutama untuk kelas pendapatan rendah dan sedang. Hal ini tidak terjadi di Kabupaten Pinrang. Hal ini mungkin disebabkan oleh dominannya tanaman perkebunan yang biasa ditanam monokultur dan sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup

penduduknya. Diversifikasi secara horizontal tidak dilakukan karena membutuhkan banyak tenaga kerja, sedangkan secara vertikal membutuhkan investasi yang tinggi. Akhirnya petani memilih usaha lain yang relatif tidak memerlukan banyak tenaga dan investasi seperti halnya pertanian.

Tabel 68. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pinrang	Pertanian	1,00	0,52	0,96	1,04	1,15	0,96
	Industri	1,26	0,46		0,67	0,90	0,59
	Perdagangan	0,81	0,80	0,96	0,94	0,65	1,06
	Jasa	0,40	1,01	0,68		0,91	1,55
	Lainnya	1,16	0,49		0,79	0,37	0,69
	Total	0,95	0,56	0,89	1,00	0,94	0,97
Wajo	Pertanian	0,44	0,76	0,40	0,90	0,22	0,71
	Industri	0,78	0,97	0,58	0,79	0,92	0,45
	Perdagangan		0,63	0,31	0,24	0,57	0,37
	Jasa	1,02	0,51	0,13	1,09	0,15	
	Lainnya		0,44		0,57	0,60	0,84
	Total	0,47	0,71	0,37	0,65	0,34	0,54

Sumber: BPS, diolah.

Untuk daerah kota di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan indeks meningkat untuk semua kelas pendapatan yaitu dari 0,69 ke 0,79 untuk kelas pendapatan rendah, dan 0,63 ke 1,03 untuk kelas pendapatan sedang, dan dari 0,57 ke 1,12 untuk kelas pendapatan tinggi (Tabel Lampiran 32). Di daerah kota Kabupaten Wajo secara keseluruhan indeks pendapatan menurun untuk semua kelas pendapatan yaitu dari 0,97 ke 0,47 untuk kelas pendapatan rendah, dari 0,67 ke 0,26 untuk kelas pendapatan sedang, dan dari 0,75 ke 0,53 untuk kelas pendapatan tinggi.

Dinamika perubahan indeks pendapatan di daerah desa justru terjadi hal sebaliknya. Secara keseluruhan terjadi penurunan indeks pendapatan untuk semua kelas pendapatan di Pinrang, sedangkan di Wajo terjadi peningkatan indeks pendapatan untuk seluruh kelas pendapatan di daerah desa (Tabel Lampiran 33). Data ini menunjukkan secara jelas bahwa dinamika pengembangan ekonomi di kedua kabupaten tersebut berbeda. Di Pinrang, ekonomi lebih berkembang di daerah perkotaan sedangkan di Wajo, ekonomi berkembang di pedesaan.

Di kedua kabupaten contoh di Jawa Timur, dinamikanya hampir sejalan. Indeks pendapatan meningkat pada hampir semua bidang usaha

terutama pada kelas pendapatan rendah dan sedang. Keadaan ini menunjukkan bahwa peluang usaha terbuka dan dapat diakses oleh semua golongan pendapatan (Tabel 69).

Tabel 69. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Malang	Pertanian	0,74	0,94	0,60	1,12	0,81	1,07
	Industri	0,58	0,78	0,55	0,93	0,73	0,98
	Perdagangan	0,50	0,62	0,53	0,57	0,62	0,94
	Jasa	0,49	0,93	0,44	0,91	0,58	0,85
	Lainnya	0,47	0,77	0,67	0,78	0,62	0,97
	Total	0,64	0,84	0,55	0,92	0,69	0,97
Kediri	Pertanian	0,98	1,12	1,16	1,21	1,14	1,04
	Industri	0,81	0,77	0,68	0,84	0,78	1,00
	Perdagangan	0,66	0,73	0,62	0,86	0,56	0,89
	Jasa	0,82	0,79	0,53	0,75	0,53	0,96
	Lainnya	1,09	0,78	0,65	0,90	1,26	1,01
	Total	0,87	0,94	0,76	1,01	0,68	0,98

Sumber: BPS diolah.

Daerah pedesaan dan perkotaan di Malang dan Kediri mengalami perubahan indeks pendapatan yang sangat beragam antarsektor dan antar kelas pendapatan. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan indeks pendapatan pada semua kelas pendapatan, baik di desa maupun di kota (Tabel Lampiran 34 dan 35). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan ekonomi di Jawa merata untuk seluruh daerah pedesaan dan perkotaan. Namun jika diteliti lebih jauh sektor pertanian di Kabupaten Malang mengalami perubahan indeks pendapatan yang lebih dinamis. Hal ini bisa dimengerti karena Kabupaten Malang menghasilkan produk pertanian yang bernilai tinggi seperti hortikultura dan sapi perah. Hasil produksi komoditas ini memungkinkan untuk memberi peluang usaha bagi sektor lainnya. Berbeda halnya dengan Kabupaten Kediri. Walaupun termasuk katagori lahan pertanian yang produktif, namun komoditas yang dihasilkan adalah pangan yang nilainya dikendalikan dan relatif lebih rendah daripada hortikultura. Begitu pula halnya dengan diversifikasi produk yang tidak banyak, hanya dalam bentuk beras untuk konsumsi pangan pokok.

Di tingkat rumah tangga contoh, diversifikasi usaha dilakukan dengan berbagai alasan. Tabel 70 memperlihatkan bahwa lokasi contoh yang banyak melakukan diversifikasi usaha rumah tangga adalah desa lahan kering berbasis hortikultura (70%) dan desa sawah di luar Jawa (80%). Perbedaan alasan dilakukannya diversifikasi usaha rumah tangga

di dua desa ini adalah keterbatasan pendapatan pertanian di desa lahan kering dan surplus tenaga kerja rumah tangga yang sesuai dengan minat di desa sawah luar Jawa. Desa perkebunan dan desa peternakan merupakan desa yang paling sedikit melakukan diversifikasi. Mereka mengerjakan usahatani secara intensif karena hasilnya dapat menjamin kebutuhan hidup mereka sehingga seluruh tenaga kerja tercurah pada usahatani tersebut.

Tabel 70. Keragaan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dan Alasan Responden, Tahun 2005

Uraian	Provinsi NTB		Provinsi Sulsel		Provinsi Jatim	
	Desa lahan kering hortikultura	Desa lahan kering Pangan	Desa perkebunan	Desa sawah	Desa peternakan	Desa sawah
Rumah tangga melakukan diversifikasi usaha (%)	70,00	30,00	20,00	80,00	27,00	40,00
Alasan melakukan diversifikasi usaha (%)						
a. pendapatan pertanian terbatas	70,00	33,00	100,00	37,50	9,00	30,00
b. surplus tk dan sesuai minat	40,00	66,00	100,00	75,00	18,00	10,00
c. ada kesempatan kerja nonpertanian	20,00	33,33	50,00	25,00	27,00	40,00
d. tingkat pendapatan lebih baik dan kontinu	50,00	33,33	52,00	62,50	9,00	10,00
Alasan tidak melakukan diversifikasi usaha (%)						
a. keterbatasan tenaga kerja	66,00	57,14	62,50	100,00	55,00	20,00
b. keterbatasan kesempatan kerja	33,33	85,71	37,50	100,00	36,00	20,00
c. pendapatan pertanian sudah mencukupi	66,67	85,71	37,50	66,67	36,00	30,00
d. lainnya	33,33		62,50	33,33		20,00

Sumber: Data Primer.

Dengan segala keterbatasannya di bidang pertanian, terutama untuk desa lahan kering, peluang kerja diluar sektor pertanian diharapkan dapat menyerap tenaga kerja pertanian dan memberikan kontribusi pada pendapatan rumah tangga tani. Namun sejauh ini belum terlihat banyak peluang kesempatan kerja di luar usahatani di pedesaan. Keterbatasan sumber daya di desa lahan kering penghasil tanaman pangan menyebabkan sangat kurangnya kesempatan kerja di luar sektor pertanian. Lebih dari 85% responden mengatakan bahwa mereka tidak dapat melakukan diversifikasi usaha rumah tangga karena keterbatasan kesempatan kerja dan modal usaha. Siklus kurangnya pendapatan

menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan kesempatan kerja terbatas dan mengakibatkan pendapatan tetap rendah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat.

5.6. Pola Pengeluaran Pangan

Secara agregat pada pola pengeluaran pangan terjadi kecenderungan yang hampir sama di berbagai lokasi contoh dan untuk berbagai jenis pekerjaan KK. Pangsa konsumsi pangan makin kecil pada tingkat pendapatan yang tinggi. Dinamika selama lima tahun menunjukkan adanya sedikit perubahan pangsa pengeluaran pangan rumah tangga pada setiap kelas dan setiap sektor. Rata-rata kisaran pangsa konsumsi pangan untuk kelas pendapatan rendah dan tinggi masing-masing adalah 60% dan 40% dan setiap lokasi mempunyai karakteristik sendiri. Secara rinci berikut ini diuraikan pengeluaran pola untuk tiap-tiap kabupaten contoh.

Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Secara agregat (kota dan desa) tampak bahwa keragaman pola pengeluaran pangan di Kabupaten Lombok Barat untuk kelas pendapatan rendah dan sedang terlihat hampir sama proporsinya antar jenis pekerjaan KK, dengan rata-rata pangsa pengeluaran pangan berkisar antara 65-75% pada kurun waktu 1996-2002 (Tabel 71).

Tabel 71. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	71,26	73,66	59,61	74,95	54,45	55,49
	Nonpangan	28,74	26,34	40,39	25,05	45,55	44,51
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	69,05	68,28	70,25	73,36	45,49	77,02
	Nonpangan	30,95	31,72	29,75	26,64	54,51	22,98
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	67,33	75,43	63,83	69,36	50,24	61,69
	Nonpangan	32,67	24,57	36,17	30,64	49,76	38,31
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	69,60	65,43	65,80	63,90	54,11	32,55
	Nonpangan	30,40	34,57	34,20	36,10	45,89	67,45
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	75,26	74,91	66,40	67,05	44,44	61,64
	Nonpangan	24,74	25,09	33,60	32,95	55,56	38,36
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Menarik untuk dikaji adalah pola pengeluaran pangan untuk kelas pendapatan tinggi yang sangat beragam untuk tiap jenis pekerjaan kepala keluarga. Di sektor pertanian dan perdagangan konsumsi pangan masih lebih tinggi sekitar 10-20% dari pangsa pengeluaran nonpangan. Keadaan ini tidak mengalami perubahan besar selama 5 tahun terakhir. Sektor industri, jasa, dan lainnya menunjukkan pola pengeluaran pangan yang berbeda. Di sektor industri, pada tahun 1996 pangsa pengeluaran pangan lebih rendah daripada pangsa pengeluaran nonpangan, sedangkan pada tahun 2002 pangsa pengeluaran pangan mencapai 77%.

Pola pengeluaran daerah kota di Kabupaten Lombok Barat tidak jauh berbeda dengan pola pengeluaran secara agregat, terutama untuk kelas pendapatan rendah dan sedang. Pangsa pengeluaran pangan di sektor perdagangan di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya. Ini berarti bahwa penghasil sektor perdagangan untuk kelas pendapatan rendah di kota, sebagian besar (79%) untuk pangan pada tahun 1996 dan menurun menjadi 75% pada tahun 2002 (Tabel Lampiran 36). Keadaan pola pengeluaran pangan di desa tidak berbeda dengan di kota. Pangsa pengeluaran pangan umumnya lebih besar dibandingkan nonpangan untuk kelas pendapatan rendah dan sedang. Di desa Kabupaten Lombok Barat, kisaran pangsa pengeluaran pangan adalah 56-78%.

Pola pengeluaran rumah tangga untuk kelas pendapatan tinggi sangat bervariasi, baik antara desa dan kota maupun antarsektor pekerjaan KK. Pada tahun 2002, sektor pertanian dan sektor jasa di kota memperlihatkan pangsa pengeluaran pangan yang lebih kecil dibandingkan nonpangan. Sementara itu pada sektor lain pangsa pengeluaran pangan lebih besar daripada pengeluaran nonpangan walaupun perbedaannya tidak terlalu jauh. Pangsa pengeluaran pangan pada sektor industri, perdagangan, dan lainnya di desa, tahun 1996, lebih kecil daripada pangsa pengeluaran nonpangan. Sedangkan pada sektor pertanian dan jasa (1996) dan seluruh sektor pada tahun 2002, memperlihatkan bahwa pangsa pengeluaran pangan lebih besar daripada pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel Lampiran 37). Pada kelas pendapatan tinggi dapat disimpulkan bahwa makin tinggi tingkat pendapatan makin kecil pangsa pengeluaran pangan. Pada tahun 2002, ada kecenderungan pengeluaran pangan untuk golongan penghasilan tinggi lebih besar proporsinya daripada nonpangan yang harus lebih teliti untuk diinterpretasikan. Alasannya adalah bahwa pada kelas pendapatan tinggi, pengeluaran pangan tidak semata-mata untuk pangan standar. Mereka sudah mulai mempertimbangkan pengeluaran untuk pangan eksotik maupun pangan bermutu tinggi yang harganya lebih tinggi dari pangan standar.

Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Pola pengeluaran di Lombok Timur hampir sama dengan di Lombok Barat. Pada kelas pendapatan rendah dan sedang pangsa

pengeluaran pangannya lebih tinggi daripada pangsa pengeluaran nonpangan. Sedangkan pada kelas pendapatan tinggi, pola pengeluaran bervariasi. Pada tahun 1996, pangsa pengeluaran pangan relatif sama dengan pangsa pengeluaran nonpangan, bahkan untuk sektor lainnya pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dari pangsa pengeluaran nonpangan. Namun pada tahun 2002, pola pengeluaran kelas pendapatan tinggi ini sama dengan kelas pendapatan rendah dan sedang, pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi daripada pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel 72). Keadaan ini mungkin disebabkan oleh konsumsi produk pangan berkualitas tinggi pada kelas pendapatan tinggi.

Tabel 72. Pangsa Pengeluaran Rumah tangga di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	74,04	71,49	70,20	73,78	54,92	63,12
	Nonpangan	25,96	28,51	29,80	26,22	45,08	36,88
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	64,23	69,25	71,46	68,96	67,31	54,64
	Nonpangan	35,77	30,75	28,54	31,04	32,69	45,36
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	65,16	75,71	69,08	72,96	58,50	53,48
	Nonpangan	34,84	24,29	30,92	27,04	41,50	46,52
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	69,28	77,20	58,24	66,86	55,26	62,78
	Nonpangan	30,72	22,81	41,76	33,14	44,74	37,23
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	76,51	77,30	60,12	70,97	35,02	65,49
	Nonpangan	23,49	22,70	39,88	29,03	64,98	34,51
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tidak terlihat perbedaan yang mencolok antara pangsa pengeluaran pangan di daerah kota dan desa, terutama untuk kelas pendapatan rendah dan sedang. Pangsa pengeluaran pangan tetap lebih tinggi dibandingkan dengan pangsa pengeluaran nonpangan. Pola yang sedikit berbeda adalah pola pengeluaran daerah kota untuk sektor industri pada kelas pendapatan rendah dan sektor lainnya pada kelas pendapatan sedang (Tabel Lampiran 38), di mana pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dibandingkan dengan pangsa pengeluaran nonpangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor industri untuk kelas pendapatan rendah memberikan pendapatan yang lebih baik. Pangsa pengeluaran di daerah desa proporsinya cukup merata untuk kelas pendapatan rendah dan sedang, di mana pangsa pengeluaran untuk pangan lebih besar

dibandingkan dengan nonpangan. Keadaan ini terjadi hampir di semua sektor (Tabel Lampiran 39).

Pola pengeluaran rumah tangga pada kelas pendapatan tinggi sangat bervariasi, baik antarsektor maupun selama kurun waktu 1996-2002. Keadaan ini terjadi baik di desa maupun di kota. Proporsi antara pangsa pengeluaran pangan dan nonpangan tidak berbeda jauh dan cenderung hampir seimbang. Di daerah pedesaan pangsa pengeluaran pangan rata-rata lebih tinggi daripada di daerah kota. Sektor industri pedesaan kelihatannya belum banyak mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Dibandingkan dengan sektor-sektor lain di pedesaan, pangsa pengeluaran pangan untuk sektor industri di pedesaan lebih tinggi.

Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan

Kabupaten Pinrang merupakan daerah penghasil padi dan kakao, namun kakao lebih banyak diusahakan dan memberikan kontribusi pendapatan yang lebih tinggi. Membaiknya harga kakao di pasar dunia akan berimbas pada membaiknya harga kakao di tingkat petani sehingga pendapatan petani meningkat. Meningkatnya pendapatan dan terpenuhinya pangan pokok, akan meningkatkan pola pengeluaran nonpangan rumah tangga yang umumnya digunakan untuk membeli barang-barang sekunder, peningkatan investasi, maupun peningkatan pendidikan dan kesehatan. Pangsa pengeluaran pangan pada kelas pendapatan rendah dan sedang adalah sekitar 60%, sedangkan untuk kelas pendapatan tinggi sekitar 17-50%. Berbeda dengan pola pengeluaran yang lainnya, di mana pangsa pengeluaran pangan lebih kecil daripada nonpangan untuk kelas pendapatan tinggi, pada tahun 2002 terjadi perubahan pola pengeluaran pangan pada sektor jasa dan lainnya. Pola pengeluaran pangan pada jenis pekerjaan di sektor jasa dan lainnya ini lebih besar dari pada nonpangan, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu besar. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya pola pengeluaran nonpangan jauh lebih besar daripada pola pengeluaran pangan, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan pada sektor tersebut sudah sangat baik (Tabel 73). Fenomena ini mungkin disebabkan oleh memburuknya keadaan ekonomi secara makro yang sangat berpengaruh terhadap sektor tersebut.

Pola pengeluaran untuk kelas pendapatan rendah dan sedang di kota dan di desa hampir sama, yaitu dengan pangsa pengeluaran pangan yang umumnya lebih besar daripada pangsa pengeluaran nonpangan. Hal sebaliknya terjadi pada kelas pendapatan tinggi di kota dan di desa. Pangsa pengeluaran pangan pada kelas pendapatan ini, baik di kota maupun di desa, mempunyai pola yang sama yaitu lebih kecil daripada pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel Lampiran 40 dan 41).

Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan

Di daerah penghasil padi ini, pola pengeluaran rumah tangga tidak jauh berbeda dengan daerah perkebunan. Pangsa pengeluaran pangan

lebih tinggi dari pangsa pengeluaran nonpangan. Keadaan ini sama untuk semua sektor dan kelas pendapatan (Tabel 74). Namun demikian ada beberapa pengecualian, seperti pada tahun 1996 untuk sektor jasa pada kelas pendapatan rendah dan sedang dan pada tahun 2002 untuk sektor industri dan lainnya pada kelas pendapatan tinggi. Diperkirakan pada tahun 2002 industri berkembang baik di daerah ini, sedangkan untuk sektor jasa pada kelas rendah dan sedang di tahun 1996 dapat diakibatkan oleh meningkatnya transfer dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri maupun jasa penyewaan alsintan.

Tabel 73. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	60,94	72,00	58,98	65,10	33,57	49,16
	Nonpangan	39,06	28,00	41,02	34,90	66,43	50,84
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	66,03	71,35		75,76	47,72	16,88
	Nonpangan	33,97	28,65		24,24	52,28	83,12
	Total	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	67,87	66,33	65,46	66,49	48,41	24,67
	Nonpangan	32,13	33,67	34,54	33,51	51,59	75,33
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	65,44	65,76	58,50		36,15	55,31
	Nonpangan	34,56	34,24	41,50		63,85	44,69
	Total	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00
Lainnya	Pangan	61,81	66,66		32,63	43,36	54,06
	Nonpangan	38,19	33,34		67,37	56,64	45,94
	Total	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tidak lengkapnya data yang diperoleh untuk daerah kota dan desa di Kabupaten Wajo, menyebabkan gambaran pola pengeluaran juga tidak lengkap. Namun secara umum pola pengeluaran rumah tangganya hampir sama. Pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi daripada pangsa pengeluaran nonpangan untuk semua kelas pendapatan baik pada kelas pendapatan rendah, sedang, maupun tinggi. Di daerah kota pada sektor perdagangan dan lainnya terjadi perubahan pola pengeluaran rumah tangga. Pada tahun 2002 pangsa pengeluaran pangan lebih rendah dari pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel Lampiran 42).

Tabel 74. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	71,59	69,28	70,21	67,18	74,55	63,78
	Nonpangan	28,41	30,72	29,79	32,82	25,45	36,22
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	82,02	63,26	64,39	60,90	71,06	46,94
	Nonpangan	17,98	36,74	35,61	39,11	28,94	53,06
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	.	63,27	68,91	59,95	73,77	51,14
	Nonpangan	.	36,74	31,09	40,05	26,23	48,86
	Total	.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	48,43	68,68	46,33	69,42	53,01	.
	Nonpangan	51,57	31,33	53,67	30,58	46,99	.
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	.
Lainnya	Pangan	.	66,12	.	62,46	73,57	39,20
	Nonpangan	.	33,88	.	37,54	26,43	60,80
	Total	.	100,00	.	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

Di desa, pada tahun 1996, sektor jasa mengalami perkembangan yang baik. Pola pengeluaran rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dibandingkan nonpangan mengindikasikan meningkatnya pendapatan luar negeri. Keadaan ini terjadi baik pada kelas pendapatan rendah, sedang, maupun tinggi. Industri mulai berkembang di pedesaan Wajo dan berpengaruh pada kelas pendapatan sedang di tahun 1996 dan kelas pendapatan tinggi di tahun 2002 (Tabel Lampiran 43). RMU merupakan salah satu jenis industri yang berkembang di pedesaan penghasil padi ini.

Kabupaten Malang, Jawa Timur

Kabupaten ini merupakan daerah pertanian yang menghasilkan komoditas yang relatif mempunyai nilai tinggi seperti ternak sapi perah (susu) dan tanaman hortikultura. Dengan penanganan intensif, usaha pertanian bisa menghasilkan pendapatan yang cukup memadai. Keadaan inipun akan berimbas pada sektor lainnya seperti perdagangan, industri maupun jasa, sehingga keadaan ekonomi relatif merata. Pola pengeluaran rumah tangga relatif homogen untuk setiap sektor pada kelas pendapatan rendah dan sedang, dengan pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi daripada pangsa pengeluaran nonpangan. Demikian juga pada kelas pendapatan tinggi untuk semua sektor. Pola pengeluaran rumah tangga pada kelas pendapatan ini juga homogen dengan pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dari pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel 75).

Tabel 75. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	61,78	65,04	59,29	62,07	31,44	42,21
	Nonpangan	38,22	34,97	40,71	37,93	68,56	57,79
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	51,30	56,21	52,44	60,24	37,74	49,79
	Nonpangan	48,70	43,79	47,56	39,76	62,26	50,21
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	62,36	60,16	52,78	60,81	22,64	47,68
	Nonpangan	37,64	39,84	47,22	39,19	77,36	52,32
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	62,64	68,21	50,77	54,54	40,41	50,96
	Nonpangan	37,36	31,79	49,23	45,46	59,59	49,04
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	63,95	66,38	46,74	61,99	47,11	42,96
	Nonpangan	36,05	33,62	53,26	38,01	52,89	57,04
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah

Pola pengeluaran rumah tangga kota dan desa di Kabupaten Malang sama dengan keadaan pola pengeluaran Kabupaten Malang secara agregat. Pemerataan ekonomi yang baik di kota dan pedesaan diakibatkan antara lain oleh keberhasilan sektor pertanian yang membuka peluang usaha dan kerja bagi berbagai sektor. Pola pengeluaran rumah tangga dengan kelas pendapatan rendah dan sedang di semua sektor hampir sama, di mana pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi dari pangsa pengeluaran nonpangan. Demikian juga untuk kelas pendapatan tinggi, hampir sama disemua sektor dengan pangsa pengeluaran pangan lebih kecil dari pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel Lampiran 44-45).

Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Daerah penghasil padi di Jawa memperhatikan pola pengeluaran rumah tangga yang hampir homogen. Pengusahaan padi dilakukan secara intensif sehingga memberikan hasil yang baik. Hal tersebut akan memberi peluang pada sektor lain untuk berkembang seperti pengusahaan RMU, perdagangan, dan jasa.

Pola pengeluaran rumah tangga terlihat hampir sama untuk kelas pendapatan rendah dan sedang untuk semua sektor yaitu pangsa pengeluaran pangan (50-67%) lebih tinggi dari pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel 76). Pada kelas pendapatan tinggi, pola pengeluaran rumah tangga hampir sama pada semua sektor namun dengan pangsa

pengeluaran pangan lebih rendah (19-44%) dibandingkan dengan pangsa pengeluaran nonpangan.

Pola pengeluaran rumah tangga Kabupaten Kediri di kota dan di desa cukup bervariasi. Pada umumnya pola pengeluaran rumah tangga sama seperti daerah lainnya yaitu pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi dari pangsa pengeluaran nonpangan pada kelas pendapatan rendah dan sedang. Hal sebaliknya terjadi pada kelas pendapatan tinggi yaitu dengan pangsa pengeluaran pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel Lampiran 46). Pada tahun 1996 pada sektor pertanian, perdagangan dan jasa di daerah perkotaan, pola pengeluaran rumah tangga pada kelas pendapatan sedang berbeda dengan daerah lainnya. Pangsa pengeluaran pangan pada kelas pendapatan tersebut lebih rendah dari pangsa pengeluaran nonpangan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pendapatan masyarakat relatif lebih baik pada tahun tersebut. Keadaan ini tidak terlihat lagi lima tahun kemudian. Walaupun hampir seimbang tetapi pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi daripada pangsa pengeluaran nonpangan. Pola pengeluaran rumah tangga kelas pendapatan tinggi di sektor pertanian pada tahun 1996 juga menunjukkan pola yang berbeda dengan sektor lainnya.

Tabel 76. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK (1996-2002)

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	61,73	63,24	59,48	61,58	36,90	40,46
	Nonpangan	38,27	36,76	40,52	38,42	63,10	59,54
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	60,12	61,12	55,18	53,34	19,85	42,10
	Nonpangan	39,88	38,88	44,82	46,66	80,15	57,91
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	55,55	65,87	50,12	57,59	28,95	44,03
	Nonpangan	44,45	34,13	49,88	42,41	71,05	55,97
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	54,54	67,47	41,37	59,81	44,10	51,18
	Nonpangan	45,46	32,53	58,63	40,19	55,90	48,82
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	67,66	67,57	59,91	61,40	83,88	39,43
	Nonpangan	32,34	32,43	40,09	38,60	16,12	60,58
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Di daerah pedesaan Kabupaten Kediri, pola pengeluaran rumah tangga yang berbeda adalah pada kelas pendapatan sedang dan tinggi di sektor jasa. Pada tahun 1996, pangsa pengeluaran pangan pada kelas

pendapatan sedang untuk sektor jasa lebih rendah daripada pangsa pengeluaran nonpangan, sedangkan pada tahun 2002 keadaannya menjadi terbalik. Di kelas pendapatan tinggi, pada sektor jasa dan lainnya, pangsa pengeluaran pangan lebih tinggi daripada pangsa pengeluaran nonpangan (Tabel Lampiran 47). Pola ini berbeda dengan pola di daerah lain bagi kelas pendapatan tinggi, di mana makin tinggi pendapatan makin kecil pangsa pengeluaran pangannya.

Secara keseluruhan pangsa pengeluaran pangan di sektor pertanian umumnya lebih tinggi daripada sektor lainnya. Dengan kata lain tingkat pendapatan sektor pertanian masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain di lokasi contoh. Industri pedesaan belum banyak berkembang, sehingga pendapatannya belum cukup memadai.

5.7. Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Desa-desanya Contoh

Pada daerah-daerah penghasil tanaman pangan, kebutuhan pangan keluarga dipenuhi oleh hasil usahatannya. Untuk melihat kinerja pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga di desa-desanya penelitian, akan diuraikan keadaannya untuk tiap desa contoh dengan berbagai agro ekosistem

Desa Lahan Kering Berbasis Tanaman Hortikultura, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

Walaupun produksi yang dominan adalah sayuran, tetapi petani masih menanam padi, baik di ladang maupun di tegalannya. Padi umumnya digunakan untuk konsumsi pangan rumah tangga, sedangkan komoditas lainnya dijual untuk memperoleh uang tunai. Hanya 60% responden yang menyimpan padi sebagai cadangan pangan di rumah. Sisanya tidak menyimpan cadangan pangan karena tidak menanam padi. Rata-rata (80%) produksi padi tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan rumah tangga sepanjang tahun sehingga sebagian masyarakat berusaha meningkatkan penggunaan tenaga kerja dengan bekerja di luar usahatani. Bagi sebagian responden meminjam pada tetangga atau keluarga adalah upaya terakhir pada saat tidak memperoleh peluang kerja di sektor pertanian.

Akibat tidak mencukupinya produksi padi dan pendapatan tunai dari usaha rumah tangganya, maka 60% dari responden pernah mengalami kekurangan pangan. Gagal panen dapat mengakibatkan kekurangan pangan yang cukup serius karena mereka tidak mempunyai cadangan pangan maupun pendapatan untuk mengatasinya. Upaya mereka mengatasi kekurangan pangan adalah dengan menjual atau menggadaikan harta yang ada, meminjam dan mencari barang di alam bebas. Rupanya akses mereka pada usaha di luar sektor pertanian masih sangat terbatas.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari merupakan hal yang tersulit bagi responden (50%) diikuti dengan biaya pendidikan (30%). Hal tersebut menyebabkan responden terlibat dalam program kemiskinan, terutama pangan (90%), program kesehatan (60%), dan bantuan pendidikan (50%).

Desa Lahan Kering Berbasis Tanaman Pangan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat

Pada desa penghasil tanaman pangan ini hanya 70% responden yang menyimpan cadangan pangan di rumah. Jumlah cadangan pangan yang bisa disimpan juga sangat sedikit, bahkan pada umumnya sudah habis sebelum musim panen tiba. Untuk mencukupi kebutuhan pangan tersebut, umumnya masyarakat mengusahakan dengan cara meminjam, meningkatkan penggunaan tenaga kerja keluarga atau jika ada menjual hasil pertanian lainnya seperti hasil kebun atau pekarangan. Separuh dari responden pernah mengalami kekurangan pangan yang diakibatkan oleh kegagalan panen. Kekurangan pangan tersebut diatasi dengan menjual atau menggadaikan aset yang mereka miliki. Upaya lain adalah dengan mencampur pakan pokok beras dengan ubi kayu. Biasanya ubi kayu dipotong kecil-kecil kemudian dikukus bersama nasi.

Dari kasus tersebut di atas dapat dikatakan bahwa diversifikasi usaha keluarga dan pertanian masih sulit dilakukan di lahan kering. Diversifikasi usaha belum terlihat sebagai upaya mengatasi kekurangan pangan atau bahkan untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi alam yang tandus dapat diartikan sebagai sulitnya melakukan diversifikasi pertanian berbasis lahan. Untuk mengatasi hal tersebut, akses petani terhadap peternakan dan usaha di luar pertanian perlu diperlancar. Untuk penduduk yang bermukim di dekat pantai, biasanya nelayan merupakan pekerjaan sampingan setelah di usahatani tidak ada kegiatan. Kasus ini banyak ditemui di Desa Sekotong Tengah dan Sekotong Barat. Kesulitan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, memerlukan uluran tangan pemerintah melalui program pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Desa Lahan Kering Berbasis Tanaman Perkebunan kakao, Pinrang, Sulawesi Selatan

Di lokasi ini, 80% responden mencukupi kebutuhan konsumsi pangannya dari hasil sawah sendiri. Hampir 90% responden menyimpan hasil produksi pangan di RMU, dengan alasan tidak mempunyai tempat penyimpanan di rumah dan alasan lain agar mudah memproses/menggiling. Tampaknya pangan cukup terpenuhi di desa ini. Hasil perkebunan cukup menjamin pendapatan sehingga bagi yang tidak mempunyai sawah bisa dengan mudah membeli bahan pangan di pasar.

Kesulitan yang utama dirasakan oleh responden adalah biaya pendidikan karena adanya kecenderungan untuk menyekolahkan anak

pada tingkat pendidikan tinggi. Modal usaha juga merupakan salah satu yang dikeluhkan oleh responden. Bisa dikatakan bahwa terdapat kecenderungan masyarakat untuk memperluas usaha, baik secara horizontal maupun vertikal meski mereka belum punya akses ke perbankan. Karena kebutuhan pangan terpenuhi dan pendapatan masyarakat telah bisa menjamin kebutuhan sehari-hari, maka tidak ada responden yang terlibat dalam program kemiskinan. Hanya 10% responden yang terlibat dalam program kesehatan (posyandu Balita) dan pendidikan.

Desa Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan, Wajo, Sulawesi Selatan

Di daerah ini, 70% responden bisa menyimpan hasil produksi yang umumnya disimpan di rumah. Beberapa diantara mereka menyimpan cadangan pangannya di RMU. Lebih dari separuh (60%) hasil produksi dijual dan hanya kira-kira 14% yang disimpan untuk cadangan pangan. Sebagai daerah sawah yang subur, kebutuhan pangan pokok tampaknya tercukupi.

Seperti halnya di Pinrang, responden di wilayah ini juga mempunyai kecenderungan untuk menyekolahkan anak ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu kesulitan yang dirasakan terutama adalah untuk pembiayaan pendidikan. Pada umumnya hasil usaha pertanian penduduk telah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hanya satu responden yang terlibat dalam program kemiskinan berupa penggunaan Kartu Sehat untuk bantuan pembiayaan kesehatan.

Dari dua wilayah di Sulawesi Selatan ini dapat dikatakan bahwa hasil perkebunan dan sawah dapat menjamin kecukupan pangan rumah tangga. Di samping itu, mereka masih bisa menambah aset dengan memperluas lahan usaha. Diversifikasi di luar usahatani relatif kecil, kecuali diversifikasi yang bersifat vertikal, karena tenaga kerja rumah tangga umumnya sudah tercurah semua pada usahatani.

Desa Peternakan Sapi Perah, Malang, Jawa Timur

Daerah ini merupakan daerah penghasil susu dan tidak menghasilkan pangan dan hanya 10% responden yang menanam jagung. Umumnya responden dapat mencukupi kebutuhan pangan dan hanya 10% responden menyatakan kekurangan pangan karena kegagalan usaha ternaknya. Untuk mengatasi kekurangan pangan tersebut mereka meningkatkan penggunaan tenaga dan meminjam pada tetangga dan keluarga.

Daerah penghasil susu ini relatif baik keadaan ekonominya dan hampir semua kebutuhan hidup dapat dipenuhi. Kesulitan yang dirasakan hanyalah dalam membiayai pendidikan/menyekolahkan anak ke tingkat pendidikan tinggi. Modal kerja yang dirasakan sulit sudah pada

taraf modal investasi. Dengan kecukupan ini tidak ada responden yang terlibat dalam program kemiskinan.

Desa Lahan Sawah Berbasis Tanaman Pangan, Kediri, Jawa Timur

Meskipun penduduk desa ini mengusahakan tanaman padi, hanya sebagian kecil petani yang memanen sendiri hasil sawahnya karena umumnya hasil panen dijual dengan sistem tebasan. Oleh sebab itu beras untuk konsumsi harus dibeli di pasar atau warung-warung terdekat.

Secara umum kebutuhan pangan penduduk dapat dipenuhi dan hanya satu responden yang menyatakan kekurangan pangan akibat gagal panen. Usaha untuk memenuhinya dilakukan dengan cara meminjam kepada tetangga atau keluarga.

Di daerah Jawa Timur ini kecenderungan diversifikasi kurang terlihat, umumnya peternak/petani mencurahkan seluruh tenaganya untuk usaha peternakan dan sawah. Pada sawah terlihat ada yang melakukan diversifikasi vertikal dengan usaha RMU. Karena pemenuhan kebutuhan primer cukup baik, responden mulai memikirkan kebutuhan sekunder.

VI. PROSPEK PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI DIVERSIFIKASI USAHA

Hasil penelitian ini menunjukkan bukti secara empiris adanya keterkaitan antara perubahan struktur perekonomian nasional dengan struktur perekonomian tingkat wilayah (provinsi, kabupaten, desa) sampai tingkat rumah tangga. Fenomena yang terjadi adalah pada selang waktu 1980 – 2000 (data I-O dan PDRB) serta 1996 –2002 (data Susenas) dengan adanya kecenderungan semakin meningkatnya diversitas kegiatan ekonomi dan atau sumber pendapatan rumah tangga. Namun demikian terdapat perbedaan perubahan tingkat diversitas kegiatan ekonomi pada tataran makro dan mikro. Di tingkat makro, tingkat diversitas kegiatan ekonomi sektor pertanian relatif lebih rendah di banding sektor nonpertanian, hal sebaliknya terjadi di tingkat mikro.

Pada tataran makro, relatif rendahnya diversitas kegiatan ekonomi di sektor pertanian disebabkan oleh relatif rendahnya keterkaitan ke depan dan ke belakang di banding sektor nonpertanian. Sementara itu fenomena yang terjadi di tingkat mikro (rumah tangga) menunjukkan relatif lebih tingginya diversitas usaha ekonomi rumah tangga pertanian disebabkan oleh terbatasnya pendapatan dari sektor pertanian. Keadaan ini mendorong rumah tangga untuk melakukan diversifikasi sumber pendapatan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dan yang paling dominan adalah subsektor padi diikuti oleh subsektor sayuran dan buah-buahan. Namun demikian kemampuan sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja terlihat semakin menurun (pada tahun 1980 menyerap 54% lalu turun menjadi 42% pada tahun 2000). Selain itu kontribusinya dalam penciptaan nilai tambah bruto juga menurun. Kontribusi sektor ini dalam penciptaan nilai tambah pada tahun 1980, 1990, dan 2000 (berdasarkan harga berlaku) masing-masing sebesar 10, 9, dan 6,5%. Sektor ekonomi yang merupakan industri hilir dari sektor pertanian (agroindustri), kemampuannya relatif rendah (kurang dari 5%) dalam menyerap lapangan kerja.

Pada periode yang sama, secara absolut maupun riil terjadi peningkatan rata-rata pendapatan rumah tangga. Namun demikian rata-rata pendapatan rumah tangga pertanian relatif lebih rendah dibanding sektor lain dengan laju peningkatan yang juga relatif rendah. Secara agregat pun terbukti bahwa kompensasi tenaga kerja di sektor pertanian bukan hanya terkecil, tetapi peningkatannya pun lebih rendah dari sektor lain.

Secara empiris ditunjukkan bahwa tingkat diversitas usaha rumah tangga bervariasi menurut wilayah (desa-kota), kelompok pendapatan, sumber pendapatan utama KK, maupun agroekosistem. Tingkat diversifikasi usaha rumah tangga di desa relatif lebih tinggi daripada di kota

untuk semua kelompok pendapatan. Searah dengan hal ini secara relatif tingkat diversifikasi usaha rumah tangga pertanian lebih tinggi dibanding rumah tangga nonpertanian. Terdapat kecenderungan menurunnya tingkat diversifikasi usaha rumah tangga dengan makin tingginya tingkat pendapatan.

Sementara itu analisis menurut agroekosistem menunjukkan bahwa tingkat diversifikasi usaha rumah tangga di agroekosistem lahan kering dengan basis usaha komoditas perkebunan (kakao) dan peternakan (sapi perah) relatif lebih rendah dibanding rumah tangga di agroekosistem lahan sawah maupun lahan kering dengan basis komoditas hortikultura dan tanaman pangan. Hal ini terkait dengan relatif lebih tingginya rataan pendapatan rumah tangga di agroekosistem lahan kering dengan basis komoditas kakao dan peternakan sapi perah. Sekali lagi temuan tersebut menunjukkan tingginya diversifikasi usaha rumah tangga pertanian (dalam hal ini di agroekosistem lahan sawah dan lahan kering dengan basis komoditas tanaman pangan dan hortikultura) lebih didorong untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga karena terbatasnya pendapatan dari pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum keberadaan sektor nonpertanian (agroindustri) di desa-desa penelitian relatif terbatas. Dalam hal demikian searah dengan temuan di tingkat makro, penyerapan tenaga kerja sektor tersebut di pedesaan relatif rendah. Beberapa kegiatan industri yang ada di daerah penelitian umumnya industri kecil skala rumah tangga seperti kerajinan tenun sutera, pengolahan krupuk kulit, pengolahan tahu, dan pembuatan anyaman bambu. Dengan industri skala rumah tangga, omset usaha relatif kecil dan umumnya hanya menggunakan tenaga kerja keluarga.

Distribusi pendapatan rumah tangga yang diukur dengan menggunakan indeks gini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan rumah tangga di Indonesia. Pada selang waktu 1996-2002, distribusi pendapatan cenderung semakin timpang. Secara agregat nasional tingkat ketimpangan tergolong berat dengan nilai indeks gini sekitar 0,5. Ketimpangan pendapatan yang terjadi secara nasional disebabkan oleh ketimpangan pendapatan yang berat di daerah perkotaan. Namun di tiga provinsi penelitian tingkat ketimpangan yang terjadi masih tergolong ringan menurut kriteria *Oshima* (1976) dengan nilai indeks gini yang hanya sekitar 0,3.

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga yang diproksi dari tingkat konsumsi energi menunjukkan bahwa secara agregat rata-rata konsumsi energi rumah tangga di pertanian relatif lebih tinggi dari sektor lainnya, namun dari sisi kualitas (konsumsi protein) terjadi hal sebaliknya. Pada selang waktu 1996-2002 terjadi peningkatan ketahanan pangan rata-rata rumah tangga di Indonesia pada semua kategori. Akan tetapi masih terdapat kelompok rumah tangga yang tergolong defisit energi. Terdapat kecenderungan bahwa makin tinggi tingkat pendapatan makin tinggi ketahanan pangan rumah tangga. Hal ini wajar mengingat

tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor penentu daya beli rumah tangga untuk akses terhadap pangan.

Keragaan tingkat ketahanan pangan di tiga provinsi penelitian menunjukkan pola serupa dengan fenomena tingkat nasional. Apabila dibandingkan antar lokasi, rata-rata ketahanan pangan rumah tangga di Provinsi Jawa Timur relatif lebih rendah dibanding rata-rata rumah tangga di NTB dan Sulawesi Selatan. Dikaitkan dengan rata-rata tingkat pendapatan dan keragaman sumber pendapatan rumah tangga, terlihat ada kecenderungan makin tinggi tingkat pendapatan (semakin tidak miskin) makin rendah tingkat diversifikasi usaha sebagai sumber pendapatan dan makin tinggi tingkat konsumsi energi atau ketahanan pangan rumah tangga.

Faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga berbeda menurut wilayah. Di wilayah kota, rumah tangga dengan KK bekerja di sektor pertanian dan memiliki pangsa pendapatan pertanian tinggi cenderung melakukan diversifikasi usaha lebih tinggi dibandingkan rumah tangga lain. Sebaliknya di desa, meskipun secara umum rumah tangga pertanian cenderung melakukan diversifikasi, akan tetapi seiring dengan makin tingginya pangsa pendapatan dari pertanian, rumah tangga tersebut cenderung mengurangi atau tidak melakukan diversifikasi usaha. Terkait dengan faktor demografi, semakin tinggi beban tanggungan karena ukuran rumah tangga yang besar juga menjadi faktor pendorong mereka melakukan diversifikasi usaha.

Kasus di kabupaten-kabupaten penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga contoh memiliki lebih dari dua jenis sumber pendapatan dan bervariasi menurut agroekosistem. Alasan mereka melakukan diversifikasi usaha pun bervariasi menurut agroekosistem. Di desa contoh Kabupaten Lombok Timur (lahan kering berbasis tanaman hortikultura) mayoritas responden menyatakan alasan melakukan diversifikasi karena pendapatan di sektor pertanian terbatas. Karena itu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, KK atau anggota rumah tangga berusaha di luar sektor pertanian. Di Kabupaten Wajo (agroekosistem lahan sawah) diversifikasi usaha dilakukan karena adanya surplus tenaga kerja sedangkan bagi anggota rumah tangga usia muda dan tingkat pendidikan relatif lebih baik, karena sesuai minat.

Berdasar uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa diversifikasi usaha memiliki prospek yang cukup strategis sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian operasionalisasi kebijakan pengembangan diversifikasi usaha tidak direkomendasikan dilakukan secara generik dan bersifat pemasalan. Kebijakan pengembangan diversifikasi usaha tersebut perlu mempertimbangkan cakupan wilayah, agroekosistem, dan kelompok sasaran rumah tangga.

Dalam tataran makro, upaya pengembangan diversifikasi perlu diarahkan kepada penerapan kebijakan model pembangunan yang tidak

hanya mengejar pertumbuhan semata, namun lebih mengedepankan adanya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan maka upaya pengembangan investasi yang mendorong penciptaan nilai tambah produk berbasis pertanian dan memperluas lapangan kerja menjadi kebutuhan mendesak. Kebijakan tersebut akan membuka peluang kesempatan rumah tangga di pedesaan melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan dan menurunkan kemiskinan di pedesaan.

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, menempatkan peran pemerintah daerah (Pemda kabupaten) sangat strategis dalam operasionalisasi kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha di pedesaan. Fasilitasi yang dapat diperankan oleh Pemda dalam kaitan penciptaan kesempatan kerja di pedesaan adalah mendorong pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat. Hal ini perlu didukung oleh (1) penyediaan sarana dan prasarana jalan, pelabuhan, pasar, dan sarana transportasi yang diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dan pemasaran produk, (2) kemudahan perizinan dan penghapusan biaya atau pungutan-pungutan yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi, dan (3) pentingnya menerapkan kebijakan yang pro pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara konsisten dan berkelanjutan.

Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga antarwilayah (desa-kota), antarkelompok pendapatan maupun antar agroekosistem menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang bersifat lokal spesifik. Untuk wilayah pedesaan bisa diterapkan pengembangan pola *family farming* yang bersifat lokal spesifik dengan mengembangkan komoditas unggulan daerah setempat yang potensial dan memiliki prospek pasar baik. Sedangkan untuk daerah perkotaan dapat dikembangkan usaha-usaha di sektor informal.

Kebijakan pengembangan diversifikasi usaha bagi kelompok rumah tangga dengan pendapatan rendah dan sedang, diarahkan kepada pemberian fasilitas dan penyediaan serta kemudahan rumah tangga pertanian untuk akses terhadap sumber daya pertanian (sarana produksi, modal, dan teknologi). Sementara itu, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi, diperlukan kebijakan yang mampu mendorong kenyamanan dan keamanan dalam berusaha berupa dukungan untuk terciptanya keamanan lingkungan yang mendukung investor melakukan investasi di pedesaan.

Dari kasus empat agroekosistem yang dianalisis, kebijakan pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga disarankan tidak bersifat generik namun disesuaikan dengan agroekosistem setempat. Untuk rumah tangga pertanian di agroekosistem lahan sawah, keragaan diversifikasi horizontal di sektor pertanian antara desa contoh di Jawa lebih tinggi dari desa contoh di luar Jawa. Rataan luas penguasaan lahan

dan ketersediaan tenaga kerja keluarga merupakan penyebab adanya perbedaan tersebut. Dalam hal demikian kebijakan pengembangan diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga di agroekosistem sawah di luar Jawa perlu menekankan upaya pengembangan usaha diversifikasi vertikal dalam bentuk pengembangan produk olahan berbahan baku pangan (beras). Sedangkan pengembangan diversifikasi di wilayah agroekosistem sawah di Jawa dapat diarahkan ke fasilitas pengembangan diversifikasi horizontal pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi serta pengembangan usaha agroindustri yang mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Pengembangan diversifikasi usaha di agroekosistem lahan kering berbasis tanaman pangan dan hortikultura dapat mengacu pada pengembangan agroekosistem lahan sawah (kasus desa di Jawa). Hal ini didasarkan pada karakteristik diversifikasi usaha rumah tangga di kedua agroekosistem yang serupa. Oleh karena itu fasilitas pengembangan diversifikasi horizontal pada komoditas yang *high value* serta pengembangan usaha nonpertanian (agroindustri) yang mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan merupakan kebijakan yang dapat dipilih.

Untuk wilayah dengan agroekosistem lahan kering berbasis komoditas perkebunan (kakao), rekomendasi kebijakan peningkatan dan stabilitas pendapatan rumah tangga bukan pada diversifikasi usaha rumah tangga tapi pada upaya peningkatan kualitas hasil dan fasilitas keterjaminan pasar produk. Untuk itu kebijakan pengembangan kemitraan antara petani dan industri pengolahan hasil kakao dengan prinsip saling membutuhkan, saling percaya, dan saling menguntungkan merupakan strategi yang perlu ditempuh.

Untuk wilayah dengan agroekosistem lahan kering berbasis komoditas sapi perah, intensitas penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha ternak sapi perah relatif tinggi dan tingkat pendapatan peternak relatif cukup memadai. Oleh karena itu, kebijakan diversifikasi usaha rumah tangga perlu diarahkan pada upaya menciptakan dan memfasilitasi terbukanya kesempatan kerja nonpertanian bagi rumah tangga di wilayah tersebut yang masih memiliki surplus tenaga kerja.

Terkait dengan aspek ketahanan pangan, mengingat masalah defisit energi pada rumah tangga masih cenderung menguat, maka promosi makan dengan menu seimbang sesuai PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang) juga perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Di samping itu, guna lebih menjamin stabilitas dan sustainabilitas ekonomi rumah tangga agar tidak masuk perangkap kemiskinan, maka program yang berkaitan dengan pengaturan ukuran keluarga (keluarga berencana) perlu digiatkan kembali secara simultan dengan upaya perbaikan dan pembangunan sektor ekonomi. Dalam era desentralisasi, peran pemda dalam menginisiasi program tersebut menjadi sangat kritical.

VII. RANGKUMAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

7.1. Rangkuman

1. Sektor pertanian masih merupakan penyedia lapangan kerja terbesar dengan ketersediaan yang paling dominan pada subsektor padi, subsektor tanaman sayuran dan buah-buahan. Namun sejak 1991 kemampuan sektor pertanian dalam penyediaan lapangan kerja semakin menurun. Jika pada tahun 1980 proporsi penyerapan tenaga kerja pada sektor ini sebesar 54%, pada tahun 2002 angka itu turun menjadi 42%. Sejalan dengan itu, kontribusi sektor pertanian dalam penciptaan nilai tambah bruto juga menurun sehingga berdampak pada produktivitas tenaga kerja yang semakin rendah di sektor pertanian.
2. Kontribusi sektor agroindustri, yang merupakan industri hilir dari sektor pertanian, dalam menyerap lapangan kerja relatif rendah (kurang dari 5%). Di luar sektor pertanian, sektor ekonomi yang paling menonjol dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa.
3. Dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya, kompensasi tenaga kerja di sektor pertanian adalah yang terkecil. Oleh karena peningkatannya juga lambat maka secara relatif bagian terbesar dari penduduk miskin Indonesia akan berasal dari rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.
4. Perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi pada sektor pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan sektor non-pertanian karena secara umum kaitan ke depan dan ke belakang sektor pertanian lebih rendah daripada sektor nonpertanian. Secara umum diversifikasi kegiatan ekonomi pada periode 1980-1990 berkembang lebih cepat daripada periode 1990-2000.
5. Di level provinsi, sekitar 70-80 % dari rumah tangga pertanian di Provinsi Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan mengandalkan penghasilan dari usahatani tanaman pangan. Adapun sisanya, memiliki pendapatan utama dari kegiatan ekonomi di sektor non-pertanian. Terkait hal ini, fenomena yang terjadi di tingkat kabupaten tidak banyak berbeda dari tingkat provinsi.
6. Dalam konteks perubahan struktur perekonomian, fenomena yang terjadi di tingkat kabupaten menunjukkan pola perubahan yang lebih beragam. Beberapa temuan yang menarik adalah: (a) pada periode 2000-2001 tidak semua kabupaten mengalami peningkatan PDRB riil. Dari enam kabupaten contoh, lima diantaranya mengalami peningkatan PDRB riil (atas harga konstan 1993) yaitu: Kediri (Jawa Timur), Wajo, Pinrang (Sulawesi Selatan), Lombok Barat, Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat). Sedangkan Kabupaten Malang (Jawa Timur) mengalami penurunan PDRB riil.

7. Analisis terhadap perubahan lingkungan strategis level kabupaten juga menghasilkan kesimpulan bahwa pada saat terjadi kontraksi ekonomi (kasus Kabupaten Malang), sektor pertanian cenderung lebih tahan. Oleh karena itu kontraksi yang terjadi lebih sedikit daripada sektor perekonomian lainnya sehingga secara relatif pangsa sektor pertanian dalam penciptaan PDRB justru meningkat.
8. Dari penelitian ini juga diperoleh kesimpulan bahwa pada level wilayah yang lebih kecil (kabupaten), sektor pertanian juga mampu berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Kasus di Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa peningkatan pangsa sektor pertanian dalam penciptaan PDRB dan peningkatan PDRB riil dapat terjadi secara bersamaan.
9. Berdasarkan analisis data tingkat provinsi dan kabupaten dapat disebutkan bahwa kegiatan ekonomi di wilayah yang sektor non-pertaniannya lebih berkembang, cenderung lebih bervariasi. Namun demikian perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi di sektor pertanian belum berhasil mengangkat taraf kehidupan petani secara nyata. Sekitar separuh dari rumah tangga pertanian, berpendapatan di bawah 5 juta rupiah per tahun. Sekitar 32% berpendapatan antara 5 – 9.9 juta, dan sisanya berpendapatan 10 juta rupiah atau lebih per tahun. Secara umum, distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan relatif lebih merata daripada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara itu pada rumah tangga pertanian di masing-masing kabupaten contoh rata-rata tingkat pendapatan yang terendah adalah di Lombok Timur, sedangkan yang tertinggi di Wajo.
10. Gambaran tentang peranan sektor pertanian dalam ekonomi rumah tangga petani di level provinsi menunjukkan bahwa di Jawa Timur kontribusi pendapatan rumah tangga dari pertanian hanya sekitar 48%. Di Nusa Tenggara Barat, hanya sekitar separuh, sedangkan di Sulawesi Selatan relatif tinggi yaitu sekitar 63%.
11. Data empiris menunjukkan bahwa tingkat diversitas usaha rumah tangga bervariasi menurut wilayah (desa-kota), kelompok pendapatan, sumber pendapatan utama KK, maupun agroekosistem. Tingkat diversitas usaha rumah tangga di desa relatif lebih tinggi daripada di kota untuk semua kelompok pendapatan. Searah dengan hal ini, secara relatif tingkat diversifikasi usaha rumah tangga pertanian lebih tinggi dibanding rumah tangga non-pertanian. Terdapat kecenderungan menurunnya tingkat diversifikasi usaha rumah tangga dengan makin tingginya tingkat pendapatan.
12. Tingkat diversifikasi usaha rumah tangga di agroekosistem lahan kering dengan basis usaha komoditas perkebunan (kakao) dan peternakan (sapi perah) relatif lebih rendah dibanding rumah tangga di agroekosistem lahan sawah maupun lahan kering dengan basis komoditi hortikultura dan tanaman pangan. Hal ini terkait dengan relatif lebih tingginya rataan pendapatan rumah tangga di agro-

- ekosistem lahan kering dengan basis komoditas kakao dan peternakan sapi perah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingginya diversifikasi usaha rumah tangga pertanian (di agroekosistem lahan sawah dan lahan kering dengan basis komoditas tanaman pangan dan hortikultura) lebih didorong untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga karena terbatasnya pendapatan dari pertanian.
13. Secara umum keberadaan sektor non-pertanian (agroindustri) di desa-desa penelitian relatif terbatas. Keterbatasan kepemilikan modal dan sulitnya pemasaran merupakan kendala utama pengembangan sektor tersebut. Searah dengan temuan di tingkat makro, penyerapan tenaga kerja sektor tersebut di pedesaan relatif rendah. Beberapa kegiatan industri yang ada di daerah penelitian umumnya industri kecil skala rumah tangga seperti kerajinan tenun sutera, pengolahan krupuk kulit, dan pengolahan tahu, atau anyaman bambu. Dengan industri seperti ini, omset usaha relatif kecil dan umumnya hanya menggunakan tenaga kerja keluarga.
 14. Kasus penelitian di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa rata-rata rumah tangga contoh memiliki lebih dari dua jenis sumber pendapatan dan bervariasi menurut agroekosistem. Alasan melakukan diversifikasi usaha juga bervariasi menurut agroekosistem. Di desa contoh Kabupaten Lombok Timur (lahan kering basis tanaman hortikultura) mayoritas responden menyatakan mereka melakukan diversifikasi karena pendapatan di sektor pertanian terbatas. Karena itu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, KK atau anggota rumah tangga berusaha di luar sektor pertanian. Di Kabupaten Wajo (agroekosistem lahan sawah) alasan diversifikasi usaha disebabkan oleh adanya surplus tenaga kerja sedangkan bagi anggota rumah tangga usia muda dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih baik diversifikasi usaha karena sesuai minat.
 15. Analisis data SUSENAS menunjukkan, dalam kurun 1996-2002 pendapatan rumah tangga meningkat dengan besaran bervariasi antar wilayah dan provinsi. Peningkatan pendapatan di kota dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan di desa. Dengan nilai nominal dan perubahan pendapatan yang rendah pada rumah tangga di desa maka indikasi kesenjangan antara desa dan kota menjadi semakin kuat.
 16. Secara agregat, dalam struktur pendapatan rumah tangga kontribusi pendapatan dari upah dan gaji meningkat 9,4% pada periode 1996-2002 demikian pula kontribusi pendapatan dari sumber lain meningkat sekitar 3,8%. Di sisi lain, pangsa pendapatan usaha pertanian, nonpertanian dan pendapatan bukan upah dan gaji menurun, masing-masing sebesar 6,5%, 1,3%, dan 5,7% dalam periode yang sama.
 17. Struktur pendapatan rumah tangga masih dicirikan oleh dominannya pendapatan dari upah dan gaji, khususnya pada rumah tangga di kota. Di desa, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari usaha

- pertanian, khususnya yang bersumber dari pengusaha tanaman (pangan dan nonpangan), yang mencapai lebih dari 30%. Pada periode 1996-2002, kontribusi pendapatan usaha pertanian menurun dari 39,1% menjadi 34,2%. Di seluruh wilayah, tingkat pendapatan rumah tangga di mana pekerjaan utama kepala keluarganya adalah petani, lebih rendah dibandingkan rumah tangga yang kepala keluarganya bekerja pada sektor lain. Kontribusi pendapatan dari usaha pertanian cenderung semakin rendah dengan meningkatnya kelas pendapatan rumah tangga.
18. Pada konteks distribusi, ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan cenderung meningkat pada periode 1996-2002. Namun, meskipun secara agregat ketidakmerataan tergolong berat, khususnya di kota, di tingkat regional ketidakmerataan masih tergolong ringan. Perubahan ketidakmerataan distribusi pendapatan selama kurun waktu di atas cenderung tinggi pada rumah tangga industri dan pertanian.
 19. Analisis indeks entropy menunjukkan, rumah tangga di desa memiliki diversitas usaha lebih tinggi dibandingkan rumah tangga kota. Bila dibandingkan antar sektor, baik di kota maupun di desa, tingkat diversitas yang tertinggi adalah pada rumah tangga pertanian. Berbeda dari kondisi tahun 1996, diversitas usaha rumah tangga pada tahun 2002 cenderung turun dengan semakin tingginya kelas pendapatan. Hal ini mengisyaratkan bahwa ketimpangan yang makin meningkat membuat kelompok rumah tangga berpendapatan rendah harus bekerja lebih variatif agar dapat memenuhi kebutuhannya. Mengandalkan usaha kepada satu sumber pendapatan saja sudah tidak layak dilakukan.
 20. Berdasarkan pola pengeluaran pangan terdapat indikasi bahwa jumlah rumah tangga miskin meningkat selama periode 1996-2002. Namun potensi peningkatan rumah tangga miskin yang lebih tinggi terdapat pada kelompok rumah tangga pertanian. Dari perspektif ketahanan pangan, dengan proporsi pengeluaran pangan yang relatif besar, rumah tangga pertanian memiliki kinerja kecukupan energi dan protein yang lebih baik dari sisi *outcome* dibandingkan kelompok rumah tangga lain. Secara umum, pola konsumsi rumah tangga di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kriteria gizi seimbang karena meskipun konsumsi protein rumah tangga cenderung telah melebihi angka kecukupannya, tetapi sebagian mereka masih ada yang mengalami kekurangan energi.
 21. Kinerja ketahanan pangan rumah tangga meningkat seiring dengan peningkatan kelas pendapatan rumah tangga. Hal itu terjadi sebagai refleksi meningkatnya daya akses rumah tangga terhadap pangan. Oleh sebab itu, diversifikasi usaha yang dilakukan oleh mereka yang berpendapatan rendah untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan sesungguhnya merupakan bagian dari strategi *coping* yang dilakukan rumah tangga. Kesimpulan tersebut dipertegas dengan perolehan

- tanda dan tingkat signifikansi peubah *dummy* status utama KK-nya sebagai petani dan peubah pendapatan total rumah tangga dalam analisis fungsi Logistik.
22. Hasil pengolahan fungsi Logistik tersebut juga menunjukkan, peluang diversifikasi usaha dipengaruhi oleh peubah tingkat pendidikan dan umur KK serta ukuran rumah tangga. Meskipun di tingkat nasional peubah-peubah tersebut berpengaruh sama pada wilayah kota dan desa tetapi di tingkat regional tanda dan signifikansi peubah bervariasi.
 23. Terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan, hasil analisis fungsi Logistik mengindikasikan, kemiskinan di Indonesia berasosiasi erat dengan kinerja sektor pertanian. Secara nasional, peluang rumah tangga untuk tidak miskin menjadi sulit dicapai ketika ketergantungan mereka terhadap aktivitas dan pendapatan dari sektor pertanian semakin besar, terlebih di pedesaan. Secara makro, kondisi demikian dapat dimaklumi karena sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dalam struktur perekonomian nasional. Tetapi di sisi lain, kontribusi sektor ini terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung menurun sehingga produktivitas pertanian menjadi sangat rendah dibandingkan sektor lain seperti industri, perdagangan maupun jasa yang terus berkembang.
 24. Di tingkat regional, kecenderungan citra miskin pada rumah tangga yang bergantung pada sektor pertanian terlihat di wilayah pedesaan, khususnya di Jawa Timur. Untuk di wilayah pedesaan Sulawesi Selatan, meski peubah pangsa pendapatan pertanian bertanda positif tetapi secara statistik tidak signifikan sehingga tidak mempengaruhi pengambilan kesimpulan. Pengamatan empiris di provinsi tersebut memang menunjukkan bahwa skala usahatani rumah tangga di Sulawesi Selatan relatif lebih luas dibandingkan di dua provinsi contoh lain. Disamping itu, situasi pasar komoditas yang kondusif membuat harga-harga komoditas relatif kompetitif sehingga secara ekonomi berpeluang memberikan dominasi pada besaran (*magnitude*) maupun kontribusi struktur pendapatan rumah tangga di provinsi tersebut. Jumlah anggota rumah tangga yang makin besar akan mempersulit upaya rumah tangga keluar dari perangkap kemiskinan karena beban tanggungan rumah tangga secara ekonomi makin berat. Hal ini berlaku untuk seluruh wilayah (nasional maupun regional), baik di desa maupun kota.

7.2. Implikasi Kebijakan

25. Peran sektor pertanian masih strategis dalam penciptaan nilai tambah bruto dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu pembangunan nasional, khususnya di pedesaan, seharusnya lebih memprioritaskan penanganan sektor tersebut agar dampak pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dapat lebih nyata. Lebih dari

itu, karena proporsi rumah tangga berpendapatan rendah relatif besar berada pada sektor pertanian, khususnya di pedesaan, maka strategi pembangunan ke depan seharusnya lebih mengakomodasi upaya mengintegrasikan permasalahan pedesaan dan pertanian untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. Dalam kaitan ini, model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan semata, namun lebih mengedepankan adanya perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan merupakan strategi yang perlu ditempuh.

26. Guna mengurangi beban sektor pertanian dalam penyerapan tenaga kerja dan untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rumah tangga di pedesaan maka upaya pengembangan investasi yang mendorong penciptaan nilai tambah produk berbasis pertanian dan memperluas lapangan kerja menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di pedesaan. Kebijakan tersebut akan membuka peluang kesempatan rumah tangga di pedesaan melakukan diversifikasi usaha untuk meningkatkan pendapatan dan akses terhadap pangan dan menurunkan kemiskinan di pedesaan.
27. Dengan telah diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah, peran pemerintah daerah (Pemda kabupaten) sangat strategis dalam operasionalisasi kebijakan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha di pedesaan. Fasilitasi yang dapat diperankan oleh Pemda dalam kaitan penciptaan kesempatan kerja di pedesaan adalah mendorong pengembangan agroindustri di pedesaan berbasis potensi wilayah setempat. Hal ini perlu didukung oleh (1) penyediaan sarana dan prasarana jalan, pelabuhan, pasar, sarana transportasi yang diharapkan dapat menurunkan biaya produksi dan pemasaran produk, (2) kemudahan perizinan dan penghapusan biaya atau pungutan-pungutan yang dapat menekan ekonomi biaya tinggi, dan (3) pentingnya menerapkan kebijakan yang pro pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani secara konsisten dan berkelanjutan.
28. Adanya variasi tingkat dan faktor yang mempengaruhi diversifikasi usaha rumah tangga antar wilayah (desa-kota), antar kelompok pendapatan maupun antar agroekosistem menuntut pentingnya penerapan kebijakan pengembangan perluasan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang bersifat lokal spesifik. Untuk wilayah pedesaan bisa diterapkan pengembangan pola *family farming* yang bersifat lokal spesifik dengan mengembangkan komoditas unggulan daerah setempat yang potensial dan memiliki prospek pasar baik. Sedangkan untuk daerah perkotaan dapat dikembangkan usaha-usaha di sektor informal. Bagi kelompok pendapatan rendah dan sedang, fasilitasi dan penyediaan serta kemudahan rumah tangga pertanian untuk akses terhadap sumber daya pertanian (sarana produksi, modal, dan teknologi) merupakan pilihan kebijakan yang patut dikedepankan. Sementara itu, bagi kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi, kebijakan yang mampu mendorong kenyamanan dan keamanan dalam

- berusaha berupa dukungan untuk terciptanya keamanan lingkungan yang mendukung investor melakukan investasi di pedesaan khususnya merupakan pilihan tepat.
29. Dari kasus empat agroekosistem yang dianalisis, kebijakan pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga disarankan tidak bersifat generik namun disesuaikan dengan agroekosistem setempat. Untuk rumah tangga pertanian di agroekosistem lahan sawah, keragaan diversifikasi horizontal di sektor pertanian antara desa contoh di Jawa lebih tinggi dari desa contoh di Luar Jawa. Rataan luas penguasaan lahan dan ketersediaan tenaga kerja keluarga merupakan penyebab adanya perbedaan tersebut. Dalam hal demikian kebijakan pengembangan diversifikasi sumber pendapatan rumah tangga di agroekosistem sawah di luar Jawa perlu menekankan upaya pengembangan usaha diversifikasi vertikal dalam bentuk pengembangan produk olahan berbahan baku pangan (beras). Sedangkan pengembangan diversifikasi di wilayah agroekosistem sawah di Jawa dapat diarahkan ke fasilitasi pengembangan diversifikasi horizontal pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi serta pengembangan usaha nonpertanian (agroindustri) yang mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan.
 30. Pengembangan diversifikasi usaha di agroekosistem lahan kering berbasis tanaman pangan dan hortikultura dapat mengacu pada pengembangan agroekosistem lahan sawah (kasus desa di Jawa). Hal ini didasarkan pada karakteristik diversifikasi usaha rumah tangga di kedua agroekosistem yang serupa. Oleh karena itu fasilitasi pengembangan diversifikasi horizontal pada komoditas yang bernilai tinggi serta pengembangan usaha non-pertanian (agroindustri) yang mampu menyerap tenaga kerja di pedesaan merupakan kebijakan yang dapat dipilih.
 31. Untuk wilayah dengan agroekosistem lahan kering berbasis komoditas perkebunan (kakao), rekomendasi kebijakan peningkatan dan stabilitas pendapatan rumah tangga bukan pada diversifikasi usaha rumah tangga namun perlu diarahkan pada upaya peningkatan kualitas hasil dan fasilitasi keterjaminan pasar produk. Untuk ini kebijakan pengembangan kemitraan antara petani dan usaha pengolahan hasil kakao dengan prinsip saling membutuhkan, saling percaya dan saling menguntungkan merupakan strategi yang perlu ditempuh.
 32. Untuk wilayah dengan agroekosistem lahan kering berbasis komoditas sapi perah, mengingat relatif tingginya intensitas penggunaan tenaga kerja keluarga dalam usaha ternak sapi perah dan relatif cukup memadainya tingkat pendapatan peternak, maka kebijakan diversifikasi usaha rumah tangga perlu diarahkan pada upaya menciptakan dan memfasilitasi terbukanya kesempatan kerja nonpertanian bagi rumah tangga di wilayah tersebut yang masih memiliki surplus tenaga kerja.

33. Terkait dengan aspek ketahanan pangan, mengingat masalah defisit energi pada rumah tangga masih cenderung menguat, maka promosi makan dengan menu seimbang sesuai PUGS (Pedoman Umum Gizi Seimbang) juga perlu ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan dengan pendekatan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi). Disamping itu, guna lebih menjamin stabilitas dan sustainabilitas ekonomi rumah tangga agar tidak masuk perangkap kemiskinan maka program-program yang berkaitan dengan pengaturan ukuran keluarga (keluarga berencana) perlu digiatkan kembali secara simultan dengan upaya perbaikan dan pembangunan sektor ekonomi. Dalam era desentralisasi, peran pemda dalam menginisiasi program tersebut menjadi sangat kritikal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amang, B. dan M.H. Sawit. 1997. Perdagangan Global dan Implikasinya Pada Ketahanan Pangan Nasional. *Agro-Ekonomika* No. 2 Tahun XXVII : 1-14. Perhepi. Jakarta.
- Anonimous. 2000. Situasi Pangan dan Gizi di Indonesia. Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Pusat. Jakarta.
- Anonimous. 1990. Rekap Kecamatan Miskin di Seluruh Indonesia. Direktorat Bangda. Departemen Dalam Negeri. Jakarta.
- BPS. 2002. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- BPS. 2003. Statistik Indonesia. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Delgado, CL; Siamwalla A. 1999. Rural Income and Farm Income Diversification in Developing Countries. *Proceeding of 23th International Conference of Agricultural Economist*. Brookfield. Vermont. USA.
- Departemen Kesehatan. 1981. Daftar Komposisi Bahan Makanan. Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2004. Kinerja Sektor Pertanian 2000-2003. Jakarta.
- Erwidodo dan P.U. Hadi. 1999. Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Indonesia: Commodity Aspects. The CGPRT Centre. Working Paper No 48.
- Erwidodo, H.P. Saliem, M. Ariani dan E. Ariningsih. 1999. Pengkajian Diversifikasi Konsumsi Pangan Utama di Indonesia. Laporan Hasil Penelitian, Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor
- Erwidodo. 1999. Effects of Trade Liberalization on Agriculture in Indonesia: Institutional and Structural Aspects. The CGPRT Centre. Working Paper No 41.
- Fagi, A.M. dan S. Partohardjono. 2004. Diversifikasi Usahatani Berorientasi Padi dalam Kasryno et al. (Eds) *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- FAO. 1999. Food Insecurity, When People Must Live with Hunger and Fear Starvation, The State of Food Insecurity in The World. Rome.
- Hardono, G.S., H.P.S. Rachman, dan S.H. Suhartini. 2004. Liberalisasi Perdagangan: Sisi Teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan. *FAE* 22 (2) : 75 – 88.
- Hayami. Y; K. Otsuka. 1992. Beyond the Green Revolution: Agricultural Development Strategy into New Century. In *Agricultural Technology: Policy Issues for International Community*. Washington DC. USA. The World Bank.

- Joshi, P.K; Ashok Gulati; Pratap S. Birthal; Laxmi Tewari. 2003. *Agricultural Diversification in South Asia : Patterns, Determinants and Policy Implication*. IFPRI.
- Kamiya, M. 2002. 1990s: A Decade for Agricultural Policy Reform in Japan- Breakaway from the Postwar Policies. Food and Agricultural Policy Research Center. Tokyo dalam Hadi et al., 2003. *Dampak Implementasi Perdagangan Bebas AFTA-2003 Terhadap Pertanian Indonesia*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Kasryno, F., A.M. Fagi dan E. Pasandaran. 2004. *Kebijakan Produksi Padi dan Diversifikasi Pertanian dalam Kasryno et al. (Eds) Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Kmenta. I. 1986. *Basic Econometric*. Michigan State University.
- Maxwell, A. And Ir. Frankenbeyer. 1992. *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurement A Technical Review*. Joint Sponsored by United Nation Childrens Fund and International Fund for Agricultural Development.
- Pakpahan, A. 1990. *Refleksi Diversifikasi dalam Teori Ekonomi dalam Suryana, dkk (penyunting) Diversifikasi Pertanian dalam Prospek Mercepat Laju Pembangunan Nasional*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Pakpahan, A. dan S.H. Suhartini. 1990. *Perkembangan Keaneka Ragaman Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kota di Indonesia*. Forum Statistik No 3. Tahun IX : 9 – 24.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1991. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1992. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1993. *Identifikasi Wilayah Miskin di Indonesia dan Alternatif Upaya Penanggulangannya*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian. 2003. *Prospek Diversifikasi Usahatani di Lahan Sawah (Kasus Empat Desa Kabupaten di Jawa)*. Laporan Hasil Penelitian kerjasama Puslitbang Sosial Ekonomi Pertanian dan Bappenas/USAID/DAI. Bogor.

- Rachmat, M dan B. Hutabarat. 1988. Tingkat Penerapan Diversifikasi Usahatani dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Forum Agro Ekonomi*. No. 2 (6): 23-32.
- Rasahan, C.A. 1988. Perspektif Struktur Pendapatan Masyarakat Pedesaan Dalam Hubungannya dengan Kebijakan Pembangunan Pertanian. dalam *Prosiding PATANAS, Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang*. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Rusastra, I.W, H.P. Saliem, Supriyati, dan Saptana. 2004. Prospek Pengembangan Pola Tanam dan Diversifikasi Tanaman Pangan di Indonesia. *Forum Agro Ekonomi*, No. 1 (22): 27-53.
- Rusastra, I.W. dan Suryadi. 2004. Ekonomi Tenaga Kerja Pertanian dan Implikasinya dalam Peningkatan Produksi dan Kesejahteraan Buruh Tani. *Jurnal Litbang Pertanian* Vol. 23(3). Pusat Perpustakaan dan Informasi Pertanian. Bogor. Hal: 91-99.
- Saliem, H.P., , E.M. Lokollo, M. Ariani, T.B. Purwantini, dan Y. Marisa. 2001. Analisis Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga dan Regional. Laporan Penelitian Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Departemen Pertanian.
- Saliem, H.P., S.H. Hartini, A. Purwoto, dan G.S. Hardono. 2003. Dampak Liberalisasi Perdagangan Terhadap Kinerja Ketahanan Pangan Nasional. Laporan Hasil Penelitian. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian.
- Santoso, Budi dan Hermanto. 1983. Pola Pemilikan Lahan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Berbagai Daerah Dengan Kondisi Pengairan yang Berbeda. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* Vol. 1(2). Puslit Agro Ekonomi. Bogor. Hal. 48-62.
- Sawit, M.H. dan I.W. Rusastra. 2005. Globalisasi dan Ketahanan Pangan: Implikasi Buat Indonesia. (Draft - Bagian Laporan Penelitian "Road Map Memperkuat Kembali Ketahanan Pangan" - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia).
- Sayogyo. 1977. Golongan Miskin dan Partisipasi dalam Pembangunan Desa. *Prisma* No 3. tahun VI. : 10 – 18.
- Sayogyo. 1991. Household Food Security Indonesian Food Journal 2(4) : 21-31.
- Sitepu, R.K. 2002. Dampak Kebijakan Ekonomi dan Liberalisasi Perdagangan terhadap Penawaran dan Permintaan Beras di Indonesia. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soehardjo. 1996. Pengertian dan Kerangka Pikir Ketahanan Pangan Rumah Tangga. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah tangga diselenggarakan oleh Departemen Pertanian

- bekerjasama dengan United Nation Children's Fund. Yogyakarta, 26:30 Mei 1996.
- Strout, A.M. 1975. Some Definitional Problem with Multiple Crop Diversification, *The Philippine Economic Journal*, Vol XIV.
- Sumaryanto. 2004. Usahatani dan Pendapatan Rumah tangga Petani Padi : Studi kasus di Persawahan DAS Brantas dalam Kasryno et al. (Eds) *Ekonomi Padi dan Beras Indonesia*. Badan Litbang Pertanian. Jakarta.
- Susilowati, S.H, Supadi dan C. Saleh. 2002. Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol.22(1). Hal. 85-109. Puslitbang Sosek Pertanian. Bogor.
- Susilowati, S.H, Supadi dan Ch. Saleh. 2002. Diversifikasi Sumber Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat. *Jurnal Agro Ekonomi*, No I (20): 85-109.
- Swastika, D.K.S., N. Ilham, I. Sodikin dan T.B. Purwantini. 2000. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Pengembangan Usaha Sapi Perah. Laporan Penelitian PSE. Bogor.
- Syukur, M , H. P. Saliem dan S Pasaribu. 1988. Pola Distribusi Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan Jawa Barat dalam Prosiding PATANAS, Perubahan Ekonomi Pedesaan Menuju Struktur Ekonomi Berimbang. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Bogor.
- Theil, H. And Finke. 1983. The Consumer's Demand for Diversity *Eur. Econ. Riview* 23.

LAMPIRAN METODE PENELITIAN

Kerangka Pemikiran

Liberalisasi Perdagangan, Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Kemiskinan

Studi tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap pertanian di Indonesia oleh Erwidodo (1999) menunjukkan beberapa temuan antara lain bahwa, sebelum tahun 1985 Indonesia sangat mengutamakan kebijakan proteksi pasar domestik. Kebijakan ini menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan manfaat ekonomi lebih banyak dinikmati oleh sebagian besar penerima proteksi tersebut. Dalam rangka mendorong reformasi menuju perdagangan bebas yang digulirkan sejak awal 1980an pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan berikut (1) penyederhanaan prosedur kepabeanan termasuk dikeluarkannya undang-undang kepabeanan yang baru, (2) menurunkan tarif dan pungutan-pungutan, (3) mengurangi lisensi impor dan hambatan non tarif, (4) deregulasi dari sistem distribusi, (5) deregulasi regim investasi, dan (6) memantapkan batas wilayah dan prosedur ekspor. Salah satu sektor yang mendapat proteksi cukup tinggi adalah sektor makanan dan minuman (*food and beverage*).

Jepang, USA dan Singapore merupakan tiga negara sumber utama impor Indonesia. Disisi lain, total ekspor Indonesia ke ketiga negara tersebut juga dominan. Tahun 1985-1996 ekspor pertanian Indonesia tumbuh dengan laju 10,6%/tahun, pada waktu yang sama laju pertumbuhan impor pertanian tumbuh sebesar 15,0%/tahun. Dengan demikian surplus perdagangan komoditas pertanian Indonesia cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Liberalisasi perdagangan melalui Putaran Uruguay (PU) secara potensial akan memperluas akses pasar untuk Indonesia khususnya ke negara industri. Penurunan tarif pada berbagai pasar ekspor utama akan memperluas akses pasar Indonesia. Hambatan tarif global produk industri ke Indonesia akan diturunkan sekitar 42%, tarif di negara-negara industri akan turun rata-rata 4%. Di Jepang rata-rata tarif turun 4,4% (diluar minyak), Uni Eropa turun sekitar 6,0% dan USA turun sekitar 6,5%.

Kesepakatan PU diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dunia secara signifikan dan terdistribusi secara luas diantara negara maju dan negara berkembang. PU akan berdampak positif terhadap upah riil terutama di negara berkembang. Sejalan dengan hal itu PU diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dalam hal ini Indonesia akan memperoleh manfaat baik dari perdagangan maupun pendapatan. Hasil studi juga menunjukkan indikasi, adanya deregulasi perdagangan dengan partner dagang Indonesia mengakibatkan tidak hanya kehilangan daya saing ekspor tetapi juga kemungkinan penurunan kesejahteraan masyarakat.

Studi Erwidodo dan Hadi (1999) tentang dampak liberalisasi perdagangan terhadap produksi, konsumsi, perdagangan dan pemasaran beberapa komoditas terpilih (beras, kedelai, jagung, ubikayu dan kentang) di Indonesia menunjukkan bahwa di tingkat makro, pada kondisi sebelum krisis ekonomi, liberalisasi perdagangan antar negara melalui penurunan tarif untuk komoditas substitusi impor akan menurunkan harga di tingkat pedagang besar, harga produsen, kuantitas suplai dan surplus produsen. Namun liberalisasi perdagangan tersebut berdampak meningkatkan kuantitas permintaan, impor dan surplus konsumen. Dampak secara keseluruhan akan meningkatkan *net surplus* atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi besarnya perubahan-perubahan tersebut sangat tergantung pada elastisitas transmisi dari tarif pada harga di tingkat pedagang besar, elastisitas transmisi dari harga di pedagang besar pada harga produsen, dan elastisitas harga penawaran dan permintaan. Elastisitas transmisi tarif yang lebih tinggi akan berdampak negatif besar pada surplus produsen tetapi juga berdampak positif besar pada surplus konsumen dan secara total berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di tingkat usahatani studi tersebut menunjukkan, penurunan tarif akan menurunkan harga di tingkat produsen. Melalui efek harga sendiri dan harga silang, penurunan harga produsen akan menurunkan penggunaan input seperti pupuk dan tenaga kerja yang akan menurunkan produktivitas dan penerimaan bersih usahatani. Seperti terefleksikan pada elastisitas transmisi harga, besarnya dampak pada tingkat usahatani akan tergantung pada sistem pemasaran masing-masing komoditas. Makin efisien sistem pemasaran makin besar elastisitas transmisi harga.

Amang dan Sawit (1997) mengingatkan bahwa dampak perdagangan bebas cukup serius buat Indonesia, tidak hanya menyangkut bidang ekonomi tetapi juga bidang non-ekonomi. Perpindahan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, kapital secara cepat dan berlebihan dalam waktu yang relatif singkat dari sektor pertanian dan jasa ke sektor manufaktur, akan menimbulkan masalah baru yang lebih sulit dan mahal untuk mengatasinya. Hampir tidak mungkin dibangun infrastruktur perkotaan yang cukup untuk menampung pesatnya urbanisasi, sehingga akan muncul masalah kekumuhan dan kemiskinan di kota, kepadatan kota, kekurangan tempat tinggal, tidak cukupnya taman, kekurangan air bersih (kualitas dan kuantitasnya), memburuknya lingkungan hidup dan meningkatnya kriminalitas. Di samping itu distribusi pendapatan masyarakat akan semakin timpang. Oleh karena itu model-model peramalan untuk mempelajari pengaruh perdagangan bebas terhadap kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melihat dampak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor, tetapi juga perlu memperhatikan beberapa aspek non-ekonomi seperti diuraikan di atas.

Dari studi dampak kebijakan ekonomi dan liberalisasi perdagangan terhadap penawaran dan permintaan beras di Indonesia 1971-2000, Sitepu (2002) menunjukkan bahwa areal sawah telah mencapai

kondisi *closing cultivation frontier*, yaitu mencapai batas maksimum lahan subur yang layak untuk areal sawah akibat meningkatnya kompetisi penggunaan lahan. Sementara produktivitas padi telah mengalami pelandaian produksi (*levelling off*), sebagai akibat penggunaan pupuk yang tidak berimbang sehingga respon produksi terhadap harganya menjadi inelastis.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sitepu (2002), kebijakan harga dasar gabah akan menyebabkan *net surplus* bertambah, sedangkan kebijakan penghapusan subsidi harga input berdampak pada penurunan produksi dan pendapatan petani. Namun demikian total *net surplus* akan mengalami peningkatan. Pemberlakuan liberalisasi perdagangan (dalam hal ini melalui penghapusan peran Bulog dalam pengadaan dan penyaluran gabah/beras serta penghapusan tarif) tidak efisien dan tidak tepat untuk dilaksanakan karena keuntungan yang diterima oleh konsumen lebih kecil dibandingkan dengan kerugian yang diterima oleh produsen, sehingga total *net surplus* berkurang. Alternatif kebijakan ini merugikan petani kecil yang umumnya miskin dan akan memperburuk distribusi pendapatan.

Indikasi dampak negatif dari liberalisasi terhadap petani (pertanian) juga terjadi di negara maju seperti Jepang. Studi Kamiya (2002) menyebutkan, liberalisasi menyebabkan harga komoditi pertanian di pasar domestik Jepang yang semula sangat tinggi karena diproteksi menjadi terus menurun. Penurunan harga tersebut mengakibatkan pengusaha komoditas pertanian menjadi tidak menguntungkan. Akibat selanjutnya, banyak areal pertanian yang dibiarkan tidak tergarap disamping semakin sedikit petani yang bersedia mengusahakan.

Studi Hardono *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa perbedaan dalam pemilihan sumber daya, penguasaan teknologi produksi, perkembangan ekonomi dan komitmen pemerintah untuk membela kepentingan produsen di dalam negeri sangat menentukan kemampuan Indonesia bersaing dalam pasar global yang makin liberal. Dalam konteks ketahanan pangan, meskipun neraca perdagangan pangan Indonesia masih menunjukkan adanya surplus perdagangan akan tetapi Indonesia dihadapkan pada bayang-bayang suram nasib komoditas pangan strategis (beras) yang semakin bergantung pada pasok pasar global.

Studi Saliem *et al.* (2003) untuk kasus komoditas beras menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan berdampak pada penurunan ketahanan pangan nasional yang diukur dari tingkat kemandirian (ketergantungan pada produksi domestik) beras nasional. Sementara itu Sawit dan Rusastra (2005) mengingatkan bahwa sebaiknya Indonesia tidak melangkah lebih jauh untuk meliberalisasi sektor pangan khususnya dan sektor pertanian umumnya. Hal ini karena semakin dalam liberalisasi pangan dilakukan Indonesia semakin memperlemah ketahanan pangan dan pembangunan pedesaan serta semakin menyulitkan dalam mengatasi kemiskinan yang dominan di pedesaan.

Pengertian Diversifikasi

Berbagai pendapat para ahli tentang definisi diversifikasi telah diulas secara luas oleh Pakpahan (1990). Diantara beberapa definisi yang dibahas oleh Pakpahan tersebut antara lain adalah (1) *'rural diversification is a process of broadening and strengthening the income sources of rural household. The process extends from the introduction of new crop and technologies into traditional farming systems to the development of off-farm jobs in small scale rural industries.....At this level of generality rural diversification can be viewed as a gradual and invietable process'* (World Bank, 1988); (2) diversifikasi berarti perluasan dari suatu produk yang diusahakan selama ini ke produk atau industri baru yang sebelumnya tidak diusahakan. Ini dilakukan untuk meminimumkan resiko, untuk menghindari akibat buruk dari fluktuasi ekonomi, dan atau sebagai sumber pertumbuhan perusahaan; (3) *'diversification is one of the precautions which resource administration or mergers can use in adjusting to an uncertainty situation. The logic is inherent.....Where choise must be made in respect to a future characterized by imperfect knowledge'*.

Dari tiga definisi tentang diversifikasi yang dikutip dari Pakpahan (1990) tersebut menunjukkan adanya definisi yang beragam tergantung konteks permasalahannya. Definisi diversifikasi World Bank lebih mengkaitkan dengan permasalahan pembangunan pedesaan atau transformasi struktur ekonomi pedesaan. Stiegler dan Thomas memberikan definisi diversifikasi secara lebih sempit terkait dengan upaya perusahaan meminimumkan resiko dan menjadikan sebagai sumber pertumbuhan. Sementara itu, definisi diversifikasi menurut Heady lebih menekankan pada masalah organisasi masukan dan luaran dalam konteks perusahaan yang dihadapkan pada masalah resiko dan ketidakpastian.

Dalam pertanian, diversifikasi dikatakan sebagai pergeseran sumber daya dari satu tanaman (ternak) menjadi campuran tanaman atau ternak, untuk mengurangi kegagalan akibat risiko alam dan meningkatkan hasil dari tiap komoditi yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan petani. Definisi diversifikasi ini menekankan pentingnya perubahan sumber daya bernilai rendah menjadi komoditi yang bernilai tinggi, yang sering direfleksikan sebagai peningkatan tingkat spesialisasi ke dalam aktifitas yang bernilai tinggi, umumnya di tingkat usahatani/*farm* (Yoshi *et al.*, 2003).

Menurut Kasryno *et al.* (2004), mengemukakan bahwa dilihat dari segi ekonomi, diversifikasi bertujuan memperkecil resiko karena dinamika harga dan faktor ekonomi lainnya serta karena perubahan iklim/cuaca. Dari segi pemanfaatan sumber daya, diversifikasi berpeluang meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia, peningkatan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta pemanfaatan sumber daya alam dan modal. Dari segi budi daya, diversifikasi dapat memperkecil pengaruh iklim dan dapat memperkecil serangan hama penyakit tanaman melalui pemutusan siklus.

Dari berbagai jenis definisi, secara umum diversifikasi dapat diterangkan sebagai berikut : (1) pergeseran sumber daya dari kegiatan usahatani ke non-usahatani; (2) penggunaan sumber daya dalam skala besar campuran dari berbagai komoditi dan kegiatan yang menunjangnya, dan (3) perubahan sumber daya dari komoditas pertanian bernilai rendah ke komoditas pertanian bernilai tinggi (Hayami dan Otsuka, 1992; Delgado dan Siamwalla, 1999). Sedangkan alasan melakukan diversifikasi adalah untuk (1) memaksimalkan efisiensi penggunaan sumber daya : efisiensi penggunaan lahan; efisiensi penggunaan waktu; simbiosis dalam usaha; intensifikasi penggunaan tenaga kerja; (2) mengurangi risiko produksi, harga dan pendapatan; (3) merespon perubahan permintaan untuk berbagai komoditas pertanian, yang diakibatkan oleh perubahan pendapatan per kapita dan elastisitas pendapatan terhadap permintaan dari berbagai komoditas pertanian; dan (4) mengurangi kerusakan ekosistem/ lingkungan.

Pengertian diversifikasi dalam penelitian ini terkait dengan masalah keragaman sumber pendapatan (usaha) rumah tangga pertanian di pedesaan. Konsep serupa digunakan pula oleh Susilowati *et al.* (2002). Dalam konsep diversifikasi usaha rumah tangga pedesaan tersebut terkait dengan keragaman ekonomi wilayah atau diversifikasi pedesaan seperti yang didefinisikan oleh World Bank (1988). Dalam hal demikian diversifikasi pedesaan merupakan suatu proses semakin beragam dan semakin banyaknya jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai usaha rumah tangga pedesaan untuk memperoleh pendapatan.

Ukuran Diversifikasi

Diversifikasi dapat diukur melalui beberapa metoda tergantung dari tujuan studi. Beberapa diantaranya adalah : (1) *Index of maximum proportion*; (2) *Herfindal Index*; (3) *Simpson Index*; (4) *Ogive Index*; (5) *Entropy Index*; dan (6) *Composite Entropy Index* (Kelley *et al.*, 1995; Pandey and Sharma, 1996; Ramesh Chand, 1996). Masing-masing metoda ini mempunyai kekurangan dan kelebihan, oleh karena itu ketepatan pemilihan dan penggunaan ukuran diversifikasi tergantung pada tujuan analisis.

Derajat diversifikasi umumnya diukur dengan suatu indeks diversifikasi. Needham, 1969 dalam Pakpahan, 1990, dalam konteks perusahaan menyebutkan adanya tiga jenis indeks diversifikasi yaitu (1) diukur dengan nisbah hasil sampingan perusahaan terhadap jumlah output total atau nisbah antara hasil sampingan terhadap pekerja (*employment*) dari perusahaan tersebut; (2) diukur dari jumlah jenis industri; dan (3) diukur menurut hasil kali nisbah produk sampingan terhadap total output dengan jumlah industri atau komoditas yang diusahakan, indeks diversifikasi (3) merupakan gabungan dari indeks diversifikasi (1) dan (2).

Sementara itu Strout (1975) merumuskan lima buah indeks diversifikasi untuk mengukur keragaan diversifikasi dalam konteks usahatani dengan mengukur indeks tumpang sari (*simultaneous cropping*) dan indeks tumpang gilir (*sequential cropping*). Kelima indeks tersebut adalah (1) *Multiple Cropping Index* (MCI), (2) *Diversity Index* (DI), (3) *Harvest Diversity Index* (HDI), (4) *Land Utilization Index* (LUI), dan (5) *Simultaneous Cropping Index* (SCI). Lima buah indeks diversifikasi tersebut antara lain telah digunakan oleh Tim Studi Diversifikasi (Puslitbang Sosek Pertanian, 2003) dalam menganalisis tingkat atau derajat diversifikasi usahatani di lahan sawah di lima kabupaten sentra produksi padi di Jawa.

Indeks Entropy merupakan salah satu ukuran diversifikasi yang telah banyak digunakan untuk mengukur keanekaragaman konsumsi rumah tangga (Pakpahan dan Hastuti, 1990; Erwidodo *et al.*, 1999) maupun keanekaragaman sumber pendapatan rumah tangga (Susilowati *et al.*, 2002). Indeks mana yang akan digunakan dalam analisis tergantung dari tujuan analisis dan ketersediaan data. Berdasar pertimbangan tersebut dalam studi ini derajat diversifikasi usaha rumah tangga akan diukur dengan menggunakan Indeks Entropy.

Pola Diversifikasi

Pola diversifikasi di Asia secara umum dapat diungkapkan sebagai berikut: (1) Sektor pertanian di Asia Selatan secara bertahap terdiversifikasi dalam bentuk komoditi dengan nilai tinggi, seperti buah-buahan, sayuran, ternak dan hasil olahan ikan; (2) Kebanyakan diversifikasi muncul, hanya dengan sedikit dukungan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena isu ketahanan pangan masih sangat kritikal dan kebijakan pemerintah masih terobsesi dengan swasembada sereal; (3) Walaupun masih fokus pada produksi pangan, terjadi perubahan secara perlahan-lahan pada komoditas dengan nilai tinggi (*high value commodity*). Produksi buah-buahan, sayuran, ternak dan produk ikan meningkat; (4) Karena pangsaanya rendah terhadap GDP sektor pertanian, perubahan ini tidak tercatat. Produksi komoditi tersebut adalah dikendalikan oleh permintaan (*demand-driven*), tidak seperti padi atau tanaman pangan lainnya yang bersifat *supply-driven*; (5) Pasar dan jalan merupakan faktor kunci yang menentukan dan mempengaruhi status diversifikasi. Faktor lainnya adalah adopsi teknologi di wilayah tersebut.

Implikasi diversifikasi dapat dianalisis pada kinerja ketahanan pangan, kesempatan kerja dan devisa (*export earnings*). Pada tingkat makro, ketahanan pangan tidak memberikan pengaruh yang berlawanan terhadap diversifikasi. Pengembangan komoditas bernilai tinggi berpotensi dalam memperluas kesempatan kerja dan memberikan kontribusi dalam perdagangan internasional. Untuk mempercepat proses diversifikasi pertanian, pengaturan kembali kelembagaan, yang dapat mengintegrasikan produksi dan pasar dengan tepat.

Di Indonesia Pertanian masih didominasi oleh pertanian keluarga skala kecil, sehingga upaya untuk meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki petani adalah dengan diversifikasi usaha. Luas garapan yang sempit mendorong petani memaksimalkan pendapatan dengan cara meningkatkan intensitas tanam dan pola tanam. Upaya peningkatan produksi padi secara monokultur tidak sinergis dengan peningkatan pendapatan petani, dengan kata lain insentif bagi petani untuk mendukung petani produksi padi tidak memadai (Sumaryanto, 2004). Diversifikasi usaha merupakan alternatif untuk meningkatkan usahatani, Fagi (2004) mengatakan ada lima strategi pertanian rumah tangga yang dapat diupayakan untuk meningkatkan pendapatan/mengurangi kemiskinan, yaitu: (1) Intensifikasi pola produksi; (2) Penganekaragaman produksi dan pengolahan hasil; (3) Perluasan pertanaman atau peningkatan jumlah kepemilikan tanah; (4) Peningkatan pendapatan dari luar pertanian baik yang berbasis pertanian maupun non pertanian; dan (5) Usaha luar sektor pertanian apabila potensi sumber daya tidak prospektif. Namun Simatupang (2004) mengatakan bahwa kebanyakan petani padi enggan melakukan diversifikasi produksi usahatannya, salah satu alasannya adalah jaminan ketahanan pangan rumah tangganya.

Pada dasarnya sejak dulu petani Indonesia sudah menerapkan diversifikasi pertanian, awalnya untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumsi keluarga. Diversifikasi masa depan hendaklah sesuai dengan permintaan pasar dan meningkatkan pendapat/kebijakan pembangunan pertanian yang berbeda dengan kebijakan pembangunan pertanian yang berbeda dengan kebijakan pembangunan pertanian yang memprioritaskan pada intensifikasi komoditas pertanian. Meningkatnya ketersediaan dan jangkauan teknologi maju serta informasi pasar akan mengoptimalkan pola diversifikasi yang diterapkan petani. Diversifikasi pertanian yang dapat merespon perubahan permintaan pasar akan lebih meningkatkan keterkaitan sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya dan keterkaitan antar desa dan kota. Kasryno *et al.* (2004) menyimpulkan bahwa pola usaha pertanian dan diversifikasi dipengaruhi oleh potensi sumber daya, jangkauan petani pada teknologi maju, dinamika permintaan pangan, kebijakan investasi dan kebijakan ekonomi makro dan mikro pemerintah. Diversifikasi pertanian menghendaki desentralisasi manajemen pembangunan, karena intinya adalah optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian.

Jawa Timur merupakan daerah dengan tingkat diversifikasi produksi dan konsumsi pangan yang tinggi. Diversifikasi sistem komoditas tanaman pangan berjalan dalam pola pergiliran tanam dan spesialisasi pada musim tanam. Spesialisasi dan diversifikasi dapat saling mendukung dan pola ini berjalan sesuai dengan permintaan pasar dan perkembangan teknologi. Kebijakan harga yang bias pada komoditas padi, berdampak negatif pada diversifikasi pertanian dalam arti luas. Kebijakan tersebut juga menyebabkan semakin pincangnya disparitas pendapatan antar daerah/wilayah.

Struktur Diversifikasi Sumber Pendapatan/Usaha Rumah Tangga, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan

Meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan pendapatan rumah tangga merupakan sasaran akhir dari pembangunan nasional. Dikaitkan dengan upaya pemantapan ketahanan pangan, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor kunci bagi rumah tangga untuk akses terhadap pangan yang dibutuhkan. Sementara itu, dikaitkan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, tingkat pendapatan merupakan salah satu dimensi dan ukuran yang sering digunakan untuk menetapkan batas garis kemiskinan. Oleh karena itu tingkat pendapatan (rumah tangga) merupakan faktor penting dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Pemahaman mengenai struktur, besaran, distribusi, dan keragaman (diversifikasi) pendapatan masyarakat merupakan kajian yang akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan pembangunan.

Dalam kajian struktur pendapatan, pemilahan sumber pendapatan dan diversifikasi usaha rumah tangga menurut sektor dan sub-sektor bermanfaat untuk memahami potensi dan arah kebijakan pengembangan bagi sektor dan sub-sektor yang perlu mendapat prioritas penanganannya kaitannya dengan peningkatan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja di suatu wilayah. Selain itu, analisis tentang distribusi pendapatan penduduk berguna untuk memahami tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan yang ada di antara berbagai golongan pendapatan.

Kecenderungan bahwa pendapatan rumah tangga di daerah-daerah *non-rice base farming* lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan rumah tangga pada daerah tradisional *rice base farming*, memberi petunjuk bahwa masyarakat petani sebenarnya responsif dan berusaha memanfaatkan bekerjanya mekanisme harga sebagai indikator ekonomi yang mengatur mereka dalam mengalokasikan sumber daya mereka seoptimum mungkin (Rasahan, 1988). Fenomena tersebut mempunyai implikasi penting bagi pemerintah dalam rangka mengevaluasi konsekuensi ekonomis dari upaya-upaya mempertahankan swasembada beras dan penggalakan program diversifikasi pertanian guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Rasahan (1988) menunjukkan bahwa terdapat dua pola utama yang mencirikan keadaan struktur dan distribusi pendapatan masyarakat pedesaan, yaitu *pertama*, ada hubungan searah antara distribusi pendapatan dengan penguasaan lahan pertanian. Pola ini umumnya dikenal pada masyarakat agraris di mana sumber daya lahan (*land base agriculture*) memegang peranan sangat dominan dalam menciptakan arus masuk pendapatan masyarakat pedesaan, hal ini tampak di pedesaan Jawa maupun Luar-Jawa. Dengan kata lain, ketimpangan maupun pemerataan distribusi pendapatan dapat dijelaskan atau terefleksikan pada ketimpangan maupun pemerataan distribusi penguasaan lahan ataupun penggarapan lahan pertanian. *Kedua*, ada hubungan terbalik

antara konsentrasi pendapatan dengan konsentrasi penguasaan atau penggarapan lahan pertanian. Kegiatan atau usaha-usaha non-pertanian atau usaha *non land base agriculture* dilihat sebagai alternatif sumber pendapatan rumah tangga pedesaan. Usaha tersebut dapat memberikan bias negatif maupun positif terhadap distribusi masyarakat pedesaan. Bias negatif apabila kehadiran usaha *non land base agriculture* sebagai sumber kegiatan menghasilkan arus pendapatan yang justru memperburuk distribusi pendapatan (kasus desa-desa Patanas Sulawesi Selatan), dan sebaliknya untuk bias positif (kasus desa-desa Patanas Jawa Barat).

Terkait dengan kajian untuk menganalisis diversifikasi atau keragaman sumber pendapatan dan ketahanan pangan serta kemiskinan tidak terlepas dengan membahas kerawanan pangan dan konsep ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan terjemahan dari *food security* secara luas diartikan sebagai terjaminnya akses pangan bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya agar dapat hidup sehat dan dapat beraktivitas. Kerawanan pangan (*food insecurity*) di tingkat wilayah maupun tingkat rumah tangga/individu merupakan kondisi tidak tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah, rumah tangga/individu. Membahas ketahanan pangan (dan juga kerawanan pangan) pada dasarnya juga membahas hal-hal yang menyebabkan orang tidak tercukupi kebutuhan pangannya. Tidak tercukupinya kebutuhan pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi, dan akses terhadap pangan.

Hasil penelitian Saliem *et al.*, 2001 menunjukkan bahwa ketahanan pangan di tingkat wilayah tidak menjamin tercapainya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini ditunjukkan adanya fakta bahwa walaupun di daerah penelitian (Lampung, D.I Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara) tergolong provinsi dengan status tahan pangan terjamin, namun di masing-masing provinsi masih ditemukan proporsi rumah tangga rawan pangan berkisar 22-30 persen. Selain itu ditemukan pula bahwa tidak terpenuhinya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga bukan disebabkan oleh faktor ketersediaan pangan, namun lebih disebabkan oleh aspek distribusi dan daya beli. Faktor distribusi antara lain dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana jalan, transportasi, biaya angkut serta kelancaran arus lalu lintas termasuk didalamnya biaya yang terkait dengan kelancaran tersebut. Sementara itu faktor daya beli sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan harga-harga komoditas pangan.

Identifikasi (dan pemetaan) wilayah rawan pangan umumnya bertujuan untuk mengetahui situasi pangan wilayah agar dapat dilakukan tindakan intervensi dan penanganan wilayah yang termasuk kategori rawan pangan. Identifikasi wilayah rawan pangan terkait dengan upaya mengidentifikasi dan menentukan atau menghitung jumlah penduduk yang rawan pangan di suatu wilayah. Terkait dengan upaya ini lembaga pangan dan pertanian dunia (*Food and Agriculture Organization*, FAO) secara berkala melakukan studi untuk mengkaji perkembangan wilayah

rawan pangan dan jumlah penduduk rawan pangan di berbagai negara (FAO, 1999). Kegiatan tersebut terkait dengan hasil kesepakatan para pemimpin negara di dunia pada *World Food Summit* 1996 untuk menurunkan separuh (50 %) jumlah penduduk dunia yang kurang gizi (rawan pangan) pada tahun 2015.

Metode mengidentifikasi dan menghitung penduduk rawan pangan (*chronic food insecurity*) yang digunakan oleh FAO (1999) adalah mengestimasi jumlah penduduk di suatu negara (dan dunia) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan (diukur dengan jumlah kalori yang dikonsumsi) sesuai kebutuhan normatif kesehatan agar seseorang dapat hidup sehat dan beraktivitas sehari-hari. Dalam perhitungan empiris, identifikasi tersebut menggunakan dua pendekatan analitik yang berbeda namun saling mengisi (komplemen) yaitu: (1) menghitung jumlah penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dari data ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi penduduk di masing-masing negara, jumlah tersebut dikategorikan sebagai *undernourishment*, dan (2) menghitung jumlah penduduk yang tergolong *undernutrition* yang didasarkan pada data umur, berat badan dan tinggi seseorang terhadap kebutuhan konsumsi pangan. Kedua pendekatan tersebut pada dasarnya menggunakan pendekatan yang sama yaitu memperhitungkan asupan pangan (dan gizi) atau *food intake*.

Dikaitkan dengan masalah kemiskinan di Indonesia, identifikasi dan karakteristik wilayah miskin telah banyak dilakukan dan kajian tersebut mengemuka di awal tahun 1990 an di mana pada saat itu program prioritas nasional diarahkan pada program pengentasan atau penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitan ini, selama tiga tahun berturut-turut Badan Litbang Pertanian mendapat tugas melaksanakan kajian identifikasi wilayah miskin dan upaya penanggulangannya di 27 provinsi di Indonesia serta melakukan evaluasi berbagai program lingkup Departemen Pertanian yang terkait dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Metoda yang digunakan Badan Litbang Pertanian untuk mengidentifikasi wilayah miskin (rawan pangan) adalah dengan menelaah berbagai karakteristik wilayah yang diduga menjadi penyebab suatu wilayah tergolong miskin. Berbagai karakteristik yang diidentifikasi tersebut adalah aspek sumber daya alam, teknologi, sumber daya manusia, dan sarana/prasarana dan kelembagaan yang ada di suatu wilayah (P/SE, 1991/92, P/SE 1992/93, dan P/SE 1993/94). Beberapa temuan penting dari studi yang dilakukan Badan Litbang Pertanian tersebut adalah bahwa karakteristik suatu wilayah tergolong miskin adalah: (1) sumber daya alam: lahan kurang subur, pendayagunaan lahan tidak optimal, dan adanya degradasi lahan, (2) teknologi: adopsi teknologi rendah, ketersediaan sarana produksi terbatas, adanya serangan hama/penyakit, (3) sumber daya manusia: tingkat pendidikan rendah, produktivitas tenaga kerja rendah, tingkat kesehatan masyarakat rendah, lapangan pekerjaan terbatas, dan adanya tradisi atau adat istiadat yang menghambat, dan (4) sarana, prasarana, dan kelembagaan: daerah terisolir, modal terbatas, kelembagaan catur sarana produksi pertanian

tidak berfungsi maksimal, pemilikan/penguasaan lahan sempit, sistem bagi hasil tidak adil, dan tingkat upah yang rendah.

Selain itu identifikasi wilayah miskin dilakukan pula oleh Departemen Dalam Negeri dalam hal ini oleh Ditjen Bangda yang melakukan identifikasi dan mengklasifikasikan desa-desa dan kecamatan miskin di seluruh Indonesia (Anonymous, 1990). Pada dasarnya identifikasi dan klasifikasi yang dilakukan untuk menentukan desa IDT mencakup berbagai aspek mulai dari keamanan, sosial, politik, dan sarana prasarana yang tersedia di desa tersebut.

Departemen Kesehatan bersama dengan Departemen Pertanian dan BKKBN juga telah melakukan kegiatan yang terkait dengan identifikasi wilayah rawan pangan dalam kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) (Anonimus, 2000). Kegiatan SKPG dimaksud untuk mendeteksi secara dini wilayah yang mempunyai risiko rawan pangan dan mengantisipasi tindakan atau intervensi yang perlu dilakukan oleh Pemda dan atau masyarakat setempat. Indikator yang digunakan dalam menentukan wilayah rawan pangan dari kegiatan SKPG ini adalah: (1) sektor pertanian: proporsi areal puso dari tanaman padi, (2) sektor kesehatan: proporsi atau prevalensi KEP (kurang energi protein) dari anak balita, dan (3) BKKBN: proporsi keluarga miskin (prasejahtera dan sejahtera I).

Sementara itu, untuk menentukan tingkat kemiskinan penduduk, Sayogyo (1977) telah mengajukan batasan garis kemiskinan dengan menggunakan ukuran pendapatan setara beras. Dalam hal ini batas tersebut adalah 240 Kg ekuivalen beras/kapita/tahun dan 360 Kg ekuivalen beras/kapita/tahun masing-masing untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan batas garis kemiskinan tersebut maka seseorang termasuk miskin apabila tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tersebut. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2003) setiap tahun telah menetapkan batasan garis kemiskinan dengan menggunakan batasan besarnya pengeluaran untuk kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, pendidikan) yang juga membedakan untuk daerah pedesaan dan perkotaan. Berdasar batasan tersebut dapat dihitung jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin.

Setiap aktivitas ekonomi membutuhkan sumber daya, dimana alokasinya cenderung mengarah pada kegiatan yang lebih produktif. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yang produktivitasnya rendah atau yang semakin tidak efisien berangsur-angsur semakin ditinggalkan sedangkan sektor-sektor ekonomi yang lebih produktif semakin tumbuh, dan jika bersamaan dengan itu terjadi pula perkembangan teknologi maka jenis-jenis aktivitas baru juga muncul. Oleh sebab itu, diversifikasi kegiatan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi alokasi sumber daya.

Motif yang melandasi pelaku ekonomi untuk melakukan diversifikasi pada dasarnya beragam. Sebagian pelaku ekonomi melakukan

diversifikasi dengan motif untuk perluasan pasar dan peningkatan pendapatan. Sebagian lainnya didorong motif untuk menekan risiko. Bahkan ada pula yang melakukan diversifikasi untuk sekedar mempertahankan eksistensinya di pasar. Dalam lingkup wilayah maka diversifikasi merupakan cerminan dari usaha penganeekaragaman industri untuk mencapai tujuan tertentu seperti meningkatnya pendapatan, pertumbuhan, kesempatan kerja, atau kestabilan ekonomi.

Dalam lingkup global, sosok dari kemajuan ekonomi umumnya ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi adalah perkembangan teknologi, akumulasi kapital, perkembangan teknologi, aksesibilitas, perkembangan kelembagaan, dan perkembangan lingkungan strategisnya. Secara empiris, akumulasi kapital dan perkembangan teknologi pada sektor-sektor ekonomi yang mempunyai kaitan ke depan dan ke belakang yang lebih tinggi (industri dan jasa) tumbuh dan berkembang lebih cepat sehingga arah perubahan diversifikasi kegiatan ekonomi juga mempengaruhi sosok perubahan struktur perekonomian wilayah.

Apakah perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi suatu wilayah dapat memperbaiki pendapatan per kapita tergantung dari banyak faktor. Dalam situasi dan kondisi normal, diversifikasi merupakan konsekuensi logis dari kemajuan pengetahuan, teknologi, dan kemajuan sistem kelembagaan ekonomi dan sosial budaya sebagai wujud dari upaya komunitas dalam meningkatkan harkat hidupnya.

Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi merupakan hasil simultan pertumbuhan peningkatan nilai tambah riil dari masing-masing kegiatan ekonomi yang telah ada dan kegiatan ekonomi baru yang merupakan diferensiasi perkembangan ekonomi. Secara empiris proses perubahan terus terjadi, tetapi yang terdata biasanya jauh lebih sederhana dari kejadian yang sebenarnya. Disamping masalah kelambatan (*lag*) hal tersebut juga bersumber dari persoalan yang dihadapi dalam pendefinisian dan masalah agregasi.

Perkembangan diversifikasi ekonomi dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor yang sifatnya eksternal adalah perubahan lingkungan strategis. Dalam konteks ini yang terpenting adalah perubahan makro ekonomi akibat perubahan di bidang perekonomian (terutama perdagangan internasional) maupun politik (hubungan antar negara). Faktor yang sifatnya internal antara lain adalah: (a) akumulasi kapital, (b) kemajuan teknologi, (c) preferensi konsumen, (d) ketersediaan sumber daya, (e) kebijaksanaan pemerintah.

Dalam konteks wilayah, diversifikasi ekonomi memungkinkan meningkatnya ragam kesempatan kerja dan tentu saja sumber pendapatan. Lazimnya, pertumbuhan ekonomi di banyak negara diikuti oleh perkembangan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa yang lebih cepat daripada di sektor primer. Hal ini disebabkan sektor industri

dan jasa biasanya mempunyai derajat keterkaitan antar sektor yang lebih tinggi.

Sejauhmana diversifikasi ekonomi di lingkup wilayah mendorong peningkatan kesejahteraan penduduknya dapat diamati dari perubahan nilai tambah dan pembagiannya menurut faktor produksi (tenaga kerja, modal, tanah). Oleh sebab itu, variabel-variabel pokok yang harus dianalisis untuk memahami perkembangan diversifikasi ekonomi suatu wilayah biasanya mencakup: (1) Perubahan penyerapan tenaga kerja menurut kegiatan/sektor perekonomian, (2) Perubahan proporsi penggunaan masukan antar sektor ekonomi, (3) Perubahan proporsi pemanfaatan keluaran antar sektor ekonomi maupun untuk memenuhi permintaan akhir (konsumsi, ekspor), (4) Perubahan proporsi nilai tambah menurut faktor produksi (tanah, tenaga kerja, modal) di masing-masing sektor ekonomi tersebut, dan (5) Perubahan derajat keterkaitan antar sektor perekonomian.

Di tingkat rumah tangga, diversifikasi usaha pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi resiko kegagalan dari suatu jenis usaha. Pada kondisi penguasaan sumber daya (alam, modal) yang terbatas, maka diversifikasi usaha dilakukan dengan meningkatkan jumlah tenaga (dan atau jam kerja) rumah tangga pada berbagai aktivitas ekonomi yang ada di suatu wilayah dan dapat diakses oleh rumah tangga yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan aspek ketahanan pangan rumah tangga, dalam studi ini ketahanan pangan dibatasi pada aspek konsumsi pangan. Dalam hal ini tingkat konsumsi pangan rumah tangga dapat didekati dan diukur dari tingkat konsumsi energi (Kkal/kapita/hari) dan dibandingkan antar kelompok rumah tangga, antar waktu, antar wilayah. Dengan menelaah keterkaitan antara tingkat ketahanan pangan dengan tingkat diversifikasi usaha rumah tangga diharapkan dapat diperoleh pemahaman terhadap sumber-sumber pendapatan rumah tangga yang dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan.

Dikaitkan dengan aspek kemiskinan, dalam studi ini kemiskinan diukur dari besarnya tingkat pendapatan rumah tangga dengan melihat besaran nilai Rp/kapita/tahun baik secara nominal maupun riil terhadap harga beras atau setara beras. Ukuran setara beras dimaksudkan agar keragaan tingkat pendapatan rumah tangga dapat dibandingkan dengan garis kemiskinan yang dirumuskan oleh Sayogyo (1977). Penelaahan terhadap kaitan antara ragam sumber pendapatan atau tingkat diversifikasi usaha rumah tangga dengan tingkat kemiskinan diharapkan dapat memberi pemahaman terhadap ragam sumber pendapatan yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan rumah tangga.

Disadari bahwa tidak semua rumah tangga di pedesaan memiliki akses yang sama terhadap berbagai kesempatan berusaha yang dapat menjadi sumber pendapatan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi rumah tangga untuk melakukan upaya diversifikasi usaha. Faktor yang mempengaruhi diversifikasi

usaha rumah tangga dapat dibedakan dalam dua kelompok yaitu faktor yang melekat dengan karakteristik inheren rumah tangga, dan faktor lingkungan. Karakteristik inheren yang melekat pada rumah tangga antara lain adalah luas penguasaan lahan, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja maupun secara total, umur dan pendidikan KK. Sedangkan faktor lingkungan yang diduga berpengaruh terhadap tingkat diversifikasi usaha rumah tangga adalah ketersediaan lapangan usaha di berbagai sektor (struktur perekonomian) di tingkat wilayah.

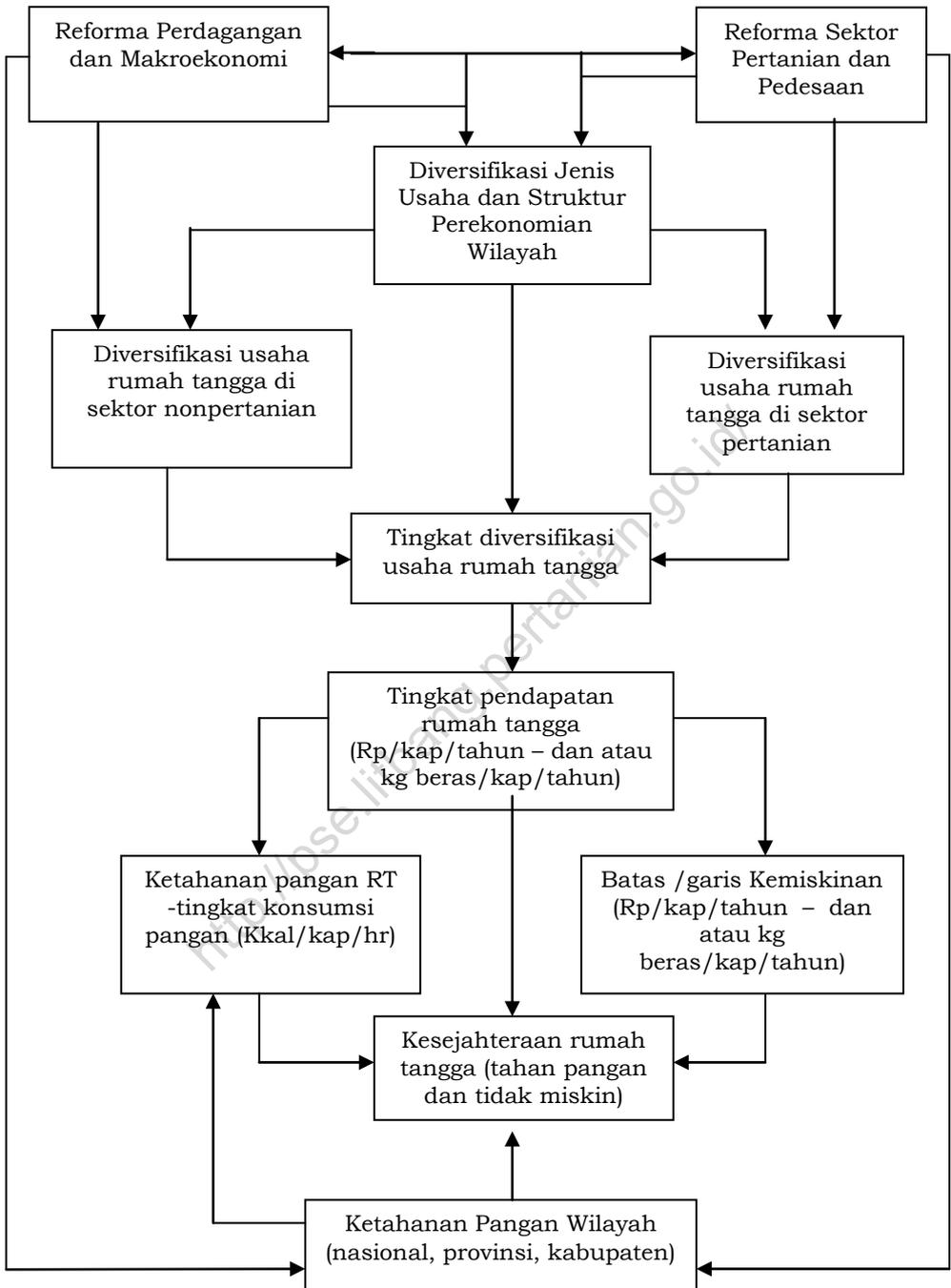
Secara sistematis kerangka pemikiran tentang keterkaitan perubahan lingkungan strategis internasional maupun domestik, perubahan struktur perekonomian wilayah dan diversifikasi usaha rumah tangga dikaitkan dengan ketahanan pangan dan kemiskinan dapat dilihat dalam bentuk diagram yang disajikan pada Gambar Lampiran 1.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian disesuaikan dengan cakupan kajian analisis yaitu tingkat nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan rumah tangga. Analisis tingkat nasional dilakukan dengan menggunakan data Susenas dan data Tabel I - O. Untuk melihat gambaran makro tingkat wilayah (khususnya tingkat provinsi dan kabupaten) akan dikumpulkan data perkembangan PDRB dan struktur ekonomi wilayah dikaitkan dengan pendapatan wilayah serta perubahan jumlah penduduk miskin dalam wilayah yang bersangkutan. Untuk keperluan tersebut dipilih pengumpulan data di wilayah pedesaan Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Penentuan provinsi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan tingkat diversifikasi dan keragaman wilayah (Jawa dan Luar Jawa).

Di setiap provinsi dipilih dua kabupaten dan setiap kabupaten dipilih lima desa. Penentuan salah satu desa di setiap kabupaten berdasar kriteria yang mewakili agroekosistem tertentu, sedangkan empat desa lainnya dalam kabupaten tersebut merupakan desa sekitar desa utama. Untuk melengkapi data rumah tangga yang telah dianalisis secara nasional dengan menggunakan data Susenas, di setiap desa utama terpilih akan dikumpulkan pula data primer tingkat rumah tangga sebanyak 10 KK/desa terpilih.

Selain itu untuk menangkap informasi di tingkat lembaga, di setiap desa utama terpilih akan dikumpulkan pula data di tingkat industri yang ada di desa bersangkutan. Dalam hal ini dipilih 2 responden setiap desa. Jenis industri dapat berupa industri pengolahan hasil pertanian, industri tahu/tempe, industri kerajinan, industri pengolahan bata merah, industri genteng, industri penggergajian kayu, dsb. Secara rinci jumlah lokasi dan responden di masing-masing lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2.



Gambar Lampiran 1. Keterkaitan Perubahan Lingkungan Strategis Internasional dan Domestik, Struktur Perekonomian Wilayah, Diversifikasi Usaha Rumah Tangga, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan

Tabel Lampiran 1. Sebaran Lokasi Penelitian, Agroekosistem (AES), dan Jumlah Responden

No	Provinsi	Kabupaten	Jml.Deses/AES	Jml.RT	Jml. Indtr.
1.	Th 1996: 27 prop, th 2002: 27 prop.	Th 1996: 303 kab, th 2000: 300 kab.	Desa-desa/wilayah cacah Susenas	Th '96: 59 883 RT; th '00: 62 555	-
2.	Jawa Timur	Kab. Malang	1 Desa Peternakan 4 Desa sekitarnya	10 -	2 -
		Kab. Kediri	1 Desa Lahan Sawah 4 Desa sekitarnya	10 -	2 -
3.	NTB	Kab. Lombok Timur	1 Desa Lhan.Ker.Horti 4 Desa sekitarnya	10 -	2 -
		Kab. Lombok Barat	1 Desa Lhn.Ker.Tan.Pgn 4 Desa sekitarnya	10 -	2 -
4.	Sulsel	Kab. Pinrang	1 Desa Perkebunan 4 Desa sekitarnya	10 -	2 -
		Kab. Wajo	1 Desa Lhn. Sawah 4 Desa sekitarnya	10 -	2 -
Jml.	Seluruh Provinsi + 3 prop. terpilih	Kab. Susenas + 6 Kab. terpilih	Semua desa Susenas + 30 Desa terpilih	RT contoh Susenas + 60 RT	12 Industri

Adapun daftar nama desa terpilih di masing-masing kabupaten penelitian menurut tipe agroekosistem dapat disimak pada Tabel Lampiran 2.

Tabel Lampiran 2. Daftar Nama Desa-desa Penelitian Menurut Provinsi, Kabupaten dan Tipe Agroekosistem, Tahun 2005

No	Provinsi	Kabupaten	Nama Desa	Agroekosistem
1.	Jawa Timur	Malang	Pandesari*), Pujon Lor, Pujon Kidul, Ngroto, Wiyurejo	Lahan Kering basis komoditas sapi perah
		Kediri	Krecek*), Blaru, Tunglur Bringin, Cunggu	Lahan Sawah basis komoditas padi
2.	NTB	Lombok Timur	Sekotong Tengah*), Sekotong Barat, Sekotong Timur, Pelangan	Lahan Kering basis komoditas hortikultura
		Lombok Barat	Pringgabaya*), Apitaik Pohgading, Labuhan Lombok, Batuyang	Lahan Kering basis komoditas tanaman pangan
3.	Sulsel	Wajo	Dualimpoe*), Anabanua Mattirowalie, Kalola, Tangkoli	Lahan sawah basis komoditas padi
		Pinrang	Pincara*), Leppangang, Teppo, Toyamang, Mattiro Ade	Lahan kering basis komoditas perkebunan (kakao)

Keterangan: *) Desa contoh utama.

Analisis Data dan Jenis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian untuk masing-masing tujuan penelitian akan diuraikan pada bagian berikut.

Tujuan (1) Analisis dan Review tentang Perubahan Diversifikasi Usaha dan Struktur Perekonomian Wilayah (nasional, Provinsi, kabupaten, desa)

Untuk mengkaji perkembangan diversifikasi usaha dengan unit analisis wilayah dapat dilakukan dengan menganalisis Tabel I-O suatu wilayah dari beberapa titik waktu. Keuntungan (*advantages*) dari pendekatan dengan menggunakan Tabel I-O adalah diperolehnya potret struktur ekonomi wilayah tersebut secara lengkap. Bahkan dengan menggunakan analisis standard I-O beberapa indikator penting seperti multiplier, koefisien keterkaitan, derajat penyebaran dan kepekaan suatu sektor dan sebagainya dapat diperoleh. Kelemahan utamanya terletak pada rinciannya yang terlampau agregat dan sifatnya yang statis serta asumsi-asumsi dari Tabel I-O itu sendiri.

Tabel I-O dengan rincian sampai 66 sektor tersedia untuk level nasional, akan tetapi umumnya tidak tersedia untuk level wilayah provinsi ke bawah. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penggunaan data I-O hanya diterapkan untuk level nasional. Sedangkan untuk level provinsi, dan kabupaten contoh digunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Dalam penelitian ini kajian tentang arah perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi untuk level desa didasarkan pada data perkembangan penyerapan tenaga kerja dan tingkat upah di desa-desa contoh dari beberapa titik waktu. Data dikumpulkan melalui survey dimana respondennya adalah aparat pemerintahan desa dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Selain dikumpulkan melalui teknik wawancara, data-data desa (Potensi Desa, Monografi Desa, dan lain sebagainya) merupakan sumber-sumber data yang penting.

Khusus untuk mengkaji diversifikasi pertanian, dapat didekati melalui dua cara: (a) luas panen, (b) nilai produksi di tingkat petani (*farm gate*). Disadari bahwa data yang tersedia dengan baik untuk mengkaji hal ini terbatas pada '*establish commodity*'. Oleh sebab itu, data-data penunjang dari dinas terkait yang selama ini termasuk kategori '*unpublish*' diupayakan dapat digali.

Selain itu juga dilakukan studi pustaka terhadap berbagai dokumen kebijakan diversifikasi di tingkat wilayah dan rumah tangga. Dokumen dapat berupa Keputusan MPR, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bersama lebih dari satu Menteri, serta peraturan-peraturan yang terkait dengan pelaksanaan berbagai keputusan tersebut. Selain itu dilakukan pula studi pustaka terhadap berbagai studi yang telah dilakukan yang terkait dengan aspek pengembangan diversifikasi

pertanian, usaha rumah tangga dan struktur perekonomian wilayah serta kaitannya dengan ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan (2) Struktur, Distribusi, dan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga

Diversifikasi Kegiatan Ekonomi

Diversifikasi kegiatan mengacu pada jumlah jenis dan peranan masing-masing jenis kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, ukuran yang relevan harus secara simultan merefleksikan jumlah jenis kegiatan yang tercakup maupun peranan masing-masing kegiatan tersebut. Mengikuti alur pikir yang dikembangkan oleh Theil dan Finke (1983), ukuran atau indikator yang digunakan untuk merefleksikan tingkat diversitas dalam penelitian ini adalah Indeks Entropy. Formulasnya adalah sebagai berikut:

$$E = - \sum_{i=1}^n p_i \ln p_i \quad (1)$$

E = Indeks Entropy

p_i = Pangsa tenaga kerja rumah tangga yang melakukan jenis pekerjaan ke - i terhadap total tenaga kerja yang bekerja di seluruh jenis pekerjaan

n = Jumlah jenis pekerjaan.

Indeks diversifikasi pada persamaan (1) dapat diaplikasikan pula untuk mengukur tingkat keaneka ragaman (diversifikasi) jenis pekerjaan atau jenis usaha atau pendapatan di tingkat rumah tangga.

Perubahan Pendapatan

Perubahan pendapatan diukur dengan menggunakan ukuran tingkat pendapatan per kapita. Agar dapat dilakukan perbandingan antar waktu maka perlu dideflasi. Meskipun diakui mengandung keterbatasan, deflator yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga beras. Argumennya adalah: (a) di pedesaan peranan perubahan harga beras terhadap inflasi masih cukup besar, (b) secara empiris sebagian besar penduduk pedesaan berpendapatan rendah sehingga pangsa pengeluaran terbesar adalah untuk pangan terutama beras, (c) ketersediaan data pada level lokasi penelitian.

$$Y_{it} = \frac{\sum_{j=1}^n Y_{ijt}}{JART_t} \cdot \frac{1}{P_{it}} \quad (2)$$

dimana:

Y_{it} = pendapatan rumah tangga ke-i pada waktu-t.

P_{it} = rata-rata harga beras yang dikonsumsi rumah tangga-i pada waktu-t.

Struktur Pendapatan

Dalam struktur pendapatan, informasi terpenting yang dikandungnya adalah bagaimana peranan masing-masing sumber pendapatan tersebut dalam konteks keseluruhan pendapatan. Dengan kata lain, struktur pendapatan mencerminkan komposisi pendapatan menurut sumbernya. Secara garis besar, sumber pendapatan rumah tangga pedesaan ataupun struktur ekonomi wilayah pedesaan terdiri dari tiga subsektor: pertanian, industri, jasa/perdagangan. Ini dapat dirinci lebih lanjut menurut jenis cabang ekonomi yang lebih sempit cakupannya, ataupun dirinci lebih lanjut menurut status: sebagai pengusaha ataukah sebagai buruh. Untuk mengkaji struktur pendapatan rumah tangga, analisis dilakukan dengan metoda diskriptif melalui metoda akunting.

Untuk menganalisis distribusi pendapatan rumah tangga digunakan alat analisis penghitungan indeks Gini (*Gini Index Ratio*) yang dikembangkan oleh Szal dan Robinson (1977). Secara umum penghitungan indeks Gini dirumuskan sebagai berikut:

$$G = 1 + 1/n \cdot 2/n^2 Y (1y_1 + 2y_2 + \dots + ny_n)$$

atau

$$G = (1/n^2) \sum_i \sum_j (y_i - y_j) / Y \tag{3}$$

dimana:

- n = total individu atau grup
- y = pendapatan individu
- Y = pendapatan rata-rata grup
- i = 1, ,n
- j = 1, ,n

Penghitungan indeks Gini dilakukan untuk satu tahun masing-masing untuk (a) pendapatan total rumah tangga, (b) pendapatan dari sektor pertanian, dan (c) pendapatan dari nonpertanian. Besaran masing-masing pendapatan tersebut diukur dalam Rp/kapita/tahun dan dihitung antar kelompok rumah tangga, antar agroekosistem, dan antar waktu analisis. Mengacu pada batasan yang dirumuskan oleh Oshima (1976) dalam Syukur *et al.* (1988) maka besaran indeks Gini tergolong (a) ringan jika $G < 0,4$, (b) sedang jika $0,4 < G < 0,5$, dan (c) berat apabila nilai $G > 0,5$

Analisis ragam sumber pendapatan atau tingkat diversifikasi usaha rumah tangga dilakukan dengan menelaah sebaran rumah tangga

menurut status rumah tangga dan jumlah sumber pendapatan. Dalam hal ini jumlah sumber pendapatan dibedakan menjadi 1; 2; 3; 4; dan ≥ 5 sumber pendapatan. Analisis dibedakan menurut status rumah tangga, antar wilayah, dan antar waktu. Selain itu tingkat diversifikasi usaha rumah tangga juga dilihat dengan menggunakan ukuran indeks, dalam hal ini digunakan Indeks Entropy (Theil and Finke, 1983) seperti telah dirumuskan di atas.

Tujuan (3) Kaitan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga dengan Ketahanan Pangan dan Kemiskinan

Seperti telah dibahas dalam kerangka pemikiran, ketahanan pangan dalam studi ini dibatasi pada aspek konsumsi pangan yang didekati dengan mengukur tingkat konsumsi energi dari seluruh jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Dalam hal ini masing-masing jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga dikonversi dalam bentuk energi dengan menggunakan kandungan energi untuk setiap satuan berat jenis pangan. Konversi jenis pangan ke dalam bentuk energi mengacu pada Daftar Komposisi Bahan Makanan yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan (1981).

Sedangkan tingkat kemiskinan dalam penelitian ini didekati dengan mengukur besaran tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan rumah tangga dihitung dalam besaran nilai Rp/kapita/tahun dan dalam nilai riil terhadap harga beras atau setara beras. Tingkat pendapatan rumah tangga dibedakan masing-masing untuk pendapatan dari pertanian, pendapatan nonpertanian, dan pendapatan total rumah tangga.

Untuk menganalisis kaitan antara diversifikasi usaha rumah tangga dengan ketahanan pangan digunakan alat analisis korelasi sederhana antara derajat diversifikasi usaha rumah tangga dengan konsumsi energi. Demikian halnya untuk kaitan antara diversifikasi usaha rumah tangga dengan kemiskinan dianalisis dengan mengukur hubungan keeratan atau korelasi antara derajat diversifikasi usaha rumah tangga dengan besaran tingkat pendapatan rumah tangga.

Tujuan (4) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Usaha Rumah Tangga

Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rumah tangga melakukan diversifikasi usaha digunakan alat analisis fungsi logit (Kmenta, 1986). Dalam hal ini ragam jenis usaha rumah tangga dibatasi atau diproski dari jenis usaha yang dilakukan oleh kepala keluarga (KK). Secara matematis model fungsi logit adalah:

$$P_{(y=1)} = 1 / (1 + e^{-(\alpha + \beta_j X_j)}) \quad (4)$$

Dimana :

$P_{(y=1)}$ = peluang rumah tangga melakukan diversifikasi usaha

Y = 1 untuk rumah tangga (KK) yang melakukan diversifikasi usaha dan nol untuk lainnya

X_j = peubah yang diduga mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk melakukan diversifikasi usaha

α, β = parameter dugaan

e = epsilon

Dalam bentuk logaritma, persamaan (4) dapat ditulis sebagai:

$$\ln(P / (1-P)) = \alpha + \beta_j X_j \quad (5)$$

Peubah yang diduga mempengaruhi keputusan rumah tangga untuk melakukan diversifikasi usaha dalam penelitian ini adalah luas penguasaan lahan, jumlah anggota rumah tangga yang bekerja maupun secara total, umur dan pendidikan KK, dan ketersediaan lapangan usaha di berbagai sektor di tingkat wilayah.

Tujuan (5) Rumusan Saran Kebijakan Pengembangan Diversifikasi Usaha Rumah Tangga

Rumusan saran untuk kebijakan pengembangan diversifikasi usaha rumah tangga dalam mendukung ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan melakukan pemahaman dan sintesis terhadap temuan-temuan hasil penelitian yang dilakukan dari hasil analisis tujuan penelitian 1 sampai 4.

Data

Untuk menjawab tujuan penelitian seperti telah diuraikan di atas, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder tingkat makro (nasional, provinsi, kabupaten, dan desa) serta data rumah tangga. Sesuai aspek kajian, data yang dibutuhkan meliputi data sumber-sumber pendapatan dan atau lapangan usaha yang ada di suatu wilayah maupun di tingkat rumah tangga serta data konsumsi dan pengeluaran di tingkat rumah tangga. Sesuai dengan cakupan penelitian, data yang dianalisis meliputi aspek struktur pendapatan, dan konsumsi/pengeluaran rumah tangga. Untuk melihat dinamika perubahan struktur ekonomi pedesaan, direncanakan studi ini menggunakan dua titik waktu analisis.

Tiga level unit analisis yang perlu dikaji yaitu: (a) nasional, (b) wilayah (provinsi, kabupaten, dan desa terpilih), dan (c) rumah tangga. Butir (a) dan (b) dapat dikaji dengan cara memperbandingkan struktur ekonomi wilayah (atas harga konstan) dan penyerapan tenaga kerja menurut sektor dari beberapa titik waktu (minimal dua titik waktu). Ini

dapat disimak dari perkembangan PDRB maupun Tabel Input-Output (Tabel I-O). Khusus untuk level desa, mengingat data PDRB maupun I-O tidak tersedia maka perkembangan struktur penduduk menurut lapangan kerja serta perkembangan tingkat upah antar waktu akan merefleksikan ke arah mana perkembangan diversifikasi ekonomi yang terjadi.

Sedangkan untuk level rumah tangga, perubahan besaran tingkat pendapatan menurut sumber kegiatan dalam dua titik waktu juga merupakan refleksi dari perkembangan diversifikasi kegiatan ekonomi rumah tangga. Data Susenas yang dikumpulkan oleh BPS merupakan salah sumber data yang menyediakan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan data Susenas sebagai salah satu basis informasi. Untuk menelaah dinamika perubahan struktur ekonomi dan keragaman sumber pendapatan rumah tangga antar waktu. Data Susenas yang dianalisis adalah data tahun 1996 dan 2002. Selain itu data tingkat rumah tangga di desa utama terpilih juga dianalisis.

Secara rinci jenis data, sumber data dan metoda pengumpulan data penelitian menurut tujuan analisis dapat disimak pada Tabel Lampiran 3.

Tabel Lampiran 3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data Menurut Tujuan Analisis, 2005

No	Tujuan Analisis	Jenis Data	Sumber Data	Metode Pengumpulan
1.	Analisis dan Review Diversifikasi Usaha / Struktur Ekonomi di Tingkat Wilayah (nasional, provinsi, kabupaten, desa)	Data Tabel I – O Data PDRB Struktur perekonomian wilayah	BPS – Pusat BPS Prov, Kab. Dinas terkait Tk Prov, Kab, Desa, informan	Penelusuran Dokumen/ Publikasi, Wawancara dan pencacatan informasi Penelusuran dokumen dan pustaka/hasil kajian tentang diversifikasi usaha dan struktur perekonomian wilayah
2.	Analisis Struktur, Distribusi, dan Diversifikasi Usaha Rumah tangga	Data Susenas (penyerapan TK menurut jenis pekerjaan, struktur, ragam dan tingkat pendapatan menurut sumber pendapatan, karakteristik RT) Stabilitas, kontinuitas pendapatan RT	Data mentah Susenas – BPS Data Primer RT di desa terpilih	Pengolahan data mentah Susenas Survei dan Wawancara
3.	Kaitan Diversifikasi, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan	Data Susenas (Tgkt. Diversifikasi Usaha, Tingkat Konsumsi energi/protein dan Pengeluaran Rumah tangga) Jumlah KK miskin Data Harga (sbg. Deflator)	Data mentah Susenas BKKBN, Dinas terkait	Pengolahan Data mentah Susenas Wawancara dan pencatatan data
4.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diversifikasi Usaha Rumah tangga	Data Susenas (penguasaan aset, karakteristik RT, asesibilitas wilayah, ketersediaan lapangan usaha)	Data mentah Susenas Data struktur perekonomian wilayah di desa penelitian	Pengolahan data mentah Susenas dan pengumpulan data primer di lokasi penelitian
5.	Saran Kebijakan Diversifikasi dalam mendukung Ketahanan Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan	Hasil analisis pada tujuan penelitian 1 s/d 4 Referensi terkait	Hasil Penelitian Diversifikasi di Tingkat Wilayah dan Rumah tangga	Sintesis terhadap hasil analisis

Tabel Lampiran 4. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota Propinsi Contoh, 1996-2002

Sumber pendapatan	Jatim		NTB		Sulsel	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	50,65	49,19	42,49	30,94	41,90	44,60
2. Pendapatan usaha pertanian	5,73	6,44	9,27	10,65	6,48	5,81
a. Tanaman Pangan & non Pangan	4,26	4,34	7,42	8,64	4,39	5,04
b. Lainnya (peternakan, dsb)	1,46	2,11	1,85	2,01	2,09	0,77
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	25,90	25,15	24,53	34,42	27,57	31,77
4. Pendapatan bukan upah/gaji	14,91	7,84	12,59	9,71	16,04	8,93
a. Perkiraan sewa rumah	9,43	6,66	7,87	6,97	9,25	6,48
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,48	1,17	4,72	2,74	6,79	2,45
5. Pendapatan lain	2,77	11,38	11,12	14,29	7,40	8,89
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	1047	3723	961	2934	1119	4379
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	1034	1106	983	988	1388	1439

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 5. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa Propinsi Contoh, 1996-2002

Sumber pendapatan	Jatim		NTB		Sulsel	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,35	32,17	22,0	30,72	25,7	19,18
2. Pendapatan usaha pertanian	36,03	29,32	41,9	28,17	40,9	46,18
a. Tanaman Pangan & non Pangan	28,76	23,21	35,0	23,02	32,3	40,04
b. Lainnya (peternakan, dsb)	7,27	6,12	6,9	5,15	8,6	6,14
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	22,65	19,74	20,0	17,44	17,2	15,36
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,83	8,21	9,4	10,20	13,1	9,48
a. Perkiraan sewa rumah	5,78	4,38	6,2	5,11	6,2	5,50
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	6,05	3,83	3,2	5,09	6,8	3,97
5. Pendapatan lain	-0,95	10,56	6,69	13,48	3,14	9,81
Total (%)	100,00	100,00	100,0	100,00	100,0	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	644	2301	593	2121	691	4372
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	698	753	647	760	929	924

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 15. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	49,17	47,96	55,65	70,11	54,97	51,38
2. Pendapatan usaha pertanian	8,33	5,47	4,26	2,15	2,57	1,48
a. Tanaman Pangan & non Pangan	5,84	3,95	2,54	1,45	1,15	0,87
b. Lainnya (peternakan, dsb)	2,49	1,52	1,72	0,70	1,42	0,61
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	33,62	28,12	30,73	19,03	27,49	32,69
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,77	8,85	13,14	5,73	18,06	14,54
a. Perkiraan sewa rumah	8,44	7,51	10,34	5,34	15,21	13,72
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,32	1,34	2,80	0,39	2,85	0,82
5. Pendapatan lain	-0,14	9,61	-3,97	2,98	-2,64	-0,10
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	817	3505	1356	7301	2866	8878
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	841	1021	1374	2229	2706	2521

Tabel Lampiran 16. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	23,99	28,42	26,66	31,57	33,67	33,51
2. Pendapatan usaha pertanian	48,32	34,92	43,02	36,30	31,18	30,32
a. Tanaman Pangan & non Pangan	39,46	28,75	34,45	29,48	23,80	24,11
b. Lainnya (peternakan, dsb)	8,85	6,17	8,57	6,82	7,39	6,22
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	16,55	18,34	20,15	19,03	25,87	23,60
4. Pendapatan bukan upah/gaji	9,67	9,91	10,04	7,93	10,40	6,42
a. Perkiraan sewa rumah	5,96	5,63	6,50	4,91	7,11	3,89
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,71	4,28	3,54	3,02	3,29	2,53
5. Pendapatan lain	1,79	8,42	-0,03	5,17	-1,21	6,16
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	494	2211	746	2457	1340	3509
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	538	745	805	841	1419	1218

Tabel Lampiran 17. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2000

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	47,38	39,27	57,43	52,84	57,68	52,37
2. Pendapatan usaha pertanian	10,92	10,08	7,41	6,57	2,97	3,92
a. Tanaman Pangan & non Pangan	7,87	6,44	5,51	4,59	2,41	2,70
b. Lainnya (peternakan, dsb)	3,05	3,64	1,90	1,98	0,56	1,22
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	34,56	23,07	30,40	26,15	23,65	25,62
4. Pendapatan bukan upah/gaji	9,08	7,67	10,03	7,63	13,33	8,14
a. Perkiraan sewa rumah	6,91	5,69	7,90	6,88	10,87	7,10
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,17	1,97	2,13	0,75	2,47	1,04
5. Pendapatan lain	-1,94	19,92	-5,43	6,82	2,38	9,96
Total (%)	100,00	100,00	99,85	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	530	2383	956	3338	2188	7171
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	559	662	966	1006	2074	2192

Tabel Lampiran 18. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2000

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	28,59	27,34	29,58	33,57	35,02	34,32
2. Pendapatan usaha pertanian	41,15	35,96	40,02	32,84	32,11	21,41
a. Tanaman Pangan & non Pangan	32,63	28,41	32,33	26,16	25,28	16,83
b. Lainnya (peternakan, dsb)	8,51	7,55	7,69	6,69	6,83	4,58
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	18,34	13,09	21,41	19,98	29,19	24,23
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,06	12,41	10,69	8,52	9,31	4,96
a. Perkiraan sewa rumah	5,44	6,02	5,88	4,64	5,62	2,98
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,61	6,39	4,81	3,89	3,69	1,98
5. Pendapatan lain	0,77	11,21	-1,79	5,09	-5,62	15,08
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	378	1556	618	2001	1225	4389
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	410	505	676	659	1314	1440

Tabel Lampiran 19. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	33,48	31,93	43,35	30,89	57,28	30,40
2. Pendapatan usaha pertanian	18,07	11,01	10,38	10,63	5,09	10,44
a. Tanaman Pangan & non Pangan	14,43	9,84	8,33	9,28	3,96	7,41
b. Lainnya (peternakan, dsb)	3,65	1,18	2,05	1,36	1,12	3,03
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	28,95	20,09	32,55	37,39	20,97	40,29
4. Pendapatan bukan upah/gaji	9,66	11,78	10,84	10,81	13,58	7,58
a. Perkiraan sewa rumah	6,96	7,67	7,83	7,98	9,09	5,72
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,70	4,11	3,01	2,83	4,49	1,86
5. Pendapatan lain	9,84	25,20	2,88	10,28	3,09	11,29
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	469	1766	921	2541	2025	6048
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	488	622	959	851	2043	1992

Tabel Lampiran 20. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	19,73	27,72	18,07	28,25	29,25	35,83
2. Pendapatan usaha pertanian	42,63	29,94	46,12	36,37	40,06	18,24
a. Tanaman Pangan & non Pangan	33,18	25,52	39,01	29,98	34,33	13,74
b. Lainnya (peternakan, dsb)	9,45	4,42	7,11	6,39	5,73	4,50
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	19,82	10,24	21,63	15,16	20,66	25,95
4. Pendapatan bukan upah/gaji	8,18	12,94	9,11	10,78	8,92	7,24
a. Perkiraan sewa rumah	6,08	6,80	6,26	5,38	5,89	3,38
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,11	6,14	2,85	5,40	3,03	3,86
5. Pendapatan lain	9,64	19,17	5,07	9,44	1,11	12,73
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	351	1578	575	1887	1117	3671
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	383	578	627	686	1217	1269

Tabel Lampiran 21. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,20	35,77	55,18	50,21	57,36	46,03
2. Pendapatan usaha pertanian	17,57	8,98	4,36	8,79	3,25	1,01
a. Tanaman Pangan & non Pangan	11,83	7,66	3,15	7,77	1,90	0,84
b. Lainnya (peternakan, dsb)	5,74	1,33	1,21	1,02	1,34	0,16
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	41,65	22,16	33,87	30,46	27,22	39,71
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,09	7,39	12,42	7,39	15,24	10,49
a. Perkiraan sewa rumah	7,27	5,93	8,63	7,00	10,79	6,41
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	2,82	1,46	3,79	1,38	4,45	4,08
5. Pendapatan lain	0,50	25,70	-6,31	2,16	-3,07	2,77
Total (%)	100,00	100,00	99,51	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	575	2745	1049	3332	2360	7687
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	748	971	1302	1244	2910	2755

Tabel Lampiran 22. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	12,05	6,08	17,01	17,32	45,92	30,97
2. Pendapatan usaha pertanian	64,80	59,53	45,73	54,53	29,84	27,90
a. Tanaman Pangan & non Pangan	53,42	53,02	36,56	47,79	21,58	22,62
b. Lainnya (peternakan, dsb)	11,38	6,51	9,17	6,74	8,26	5,28
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	10,64	9,52	20,16	14,83	20,95	20,33
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,61	14,02	12,30	14,02	10,50	6,36
a. Perkiraan sewa rumah	6,01	7,79	6,37	5,93	6,14	3,34
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,60	6,23	5,93	3,19	4,35	3,01
5. Pendapatan lain	0,90	10,84	4,80	4,21	-7,20	14,45
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	371	1566	647	1993	1371	4106
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	500	655	874	819	1831	1672

Tabel Lampiran 23. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah Tangga Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Propinsi	Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
			1996	2002	1996	2002	1996	2002
Jatim	Kota	Pertanian	0,85	1,02	0,84	1,07	0,90	1,07
		Industri	0,34	0,49	0,54	0,77	0,61	0,97
		Perdagangan	0,46	0,52	0,55	0,72	0,62	0,87
		Jasa	0,58	0,65	0,50	0,67	0,61	0,89
		Lainnya	0,68	0,62	0,54	0,75	0,69	0,96
		Total	0,58	0,67	0,55	0,78	0,63	0,93
	Desa	Pertanian	1,00	1,03	1,02	1,13	0,92	1,13
		Industri	0,93	0,50	0,77	0,80	0,77	0,92
		Perdagangan	0,76	0,73	0,82	0,80	0,79	0,89
		Jasa	0,70	0,80	0,69	0,75	0,48	0,76
		Lainnya	0,81	0,71	0,86	0,72	0,86	0,93
		Total	0,94	0,92	0,92	0,99	0,77	0,99
NTB	Kota	Pertanian	0,99	1,08	1,05	1,22	1,13	0,97
		Industri	0,79	0,75	0,51	0,74	0,94	1,01
		Perdagangan	0,69	0,67	0,66	0,77	0,54	0,92
		Jasa	0,70	0,54	0,67	0,81	0,71	0,83
		Lainnya	0,96	0,70	0,89	0,76	0,90	1,08
		Total	0,80	0,86	0,75	0,88	0,71	0,95
	Desa	Pertanian	0,98	1,03	0,97	1,16	1,00	1,20
		Industri	0,86	0,82	0,96	0,72	0,90	1,06
		Perdagangan	0,92	0,81	0,86	0,72	0,82	0,66
		Jasa	0,91	1,02	0,75	1,02	0,74	0,67
		Lainnya	0,79	0,53	0,98	0,70	1,18	0,79
		Total	0,95	0,96	0,93	1,06	0,90	0,97
Sulsel	Kota	Pertanian	0,91	1,01	1,04	0,94	0,71	1,02
		Industri	0,61	0,42	0,62	0,84	0,79	0,96
		Perdagangan	0,43	0,58	0,50	0,54	0,66	0,63
		Jasa	0,46	0,49	0,50	0,61	0,62	0,94
		Lainnya	0,58	0,42	0,37	0,60	0,72	0,99
		Total	0,58	0,56	0,54	0,68	0,65	0,84
	Desa	Pertanian	0,82	0,85	0,98	0,92	1,09	0,93
		Industri	0,84	0,84	1,05	0,88	1,14	1,03
		Perdagangan	0,92	0,67	0,75	0,88	0,66	0,80
		Jasa	0,85	0,79	0,41	0,81	0,66	0,84
		Lainnya	0,96	0,63	0,75	0,69	0,53	0,81
		Total	0,83	0,83	0,87	0,89	0,84	0,89

Tabel Lampiran 24. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002

Sumber pendapatan	Lombok Barat		Lombok Timur	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	45,09	27,62	24,22	25,73
2. Pendapatan usaha Pertanian	28,03	8,48	13,37	19,02
a. Tanaman Pangan & non Pangan	18,09	7,04	13,12	15,44
b. Lainnya (peternakan, dsb)	9,94	1,44	0,25	3,58
3. Pendapatan usaha non Pertanian	15,37	40,68	40,43	27,73
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,45	8,68	11,24	11,58
a. Perkiraan sewa rumah	6,38	6,84	4,10	6,74
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,07	1,83	7,13	4,84
5. Pendapatan lain	1,06	14,54	10,76	15,95
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	735	2882	747	2510
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	735	976	753	887

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 25. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Nusa Tenggara Barat, 1996-2002

Sumber pendapatan	Lombok Barat		Lombok Timur	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	26,95	29,25	25,64	34,99
2. Pendapatan usaha Pertanian	29,33	28,33	34,71	24,94
a. Tanaman Pangan & non Pangan	21,72	22,81	30,68	23,32
b. Lainnya (peternakan, dsb)	7,61	5,52	4,03	1,62
3. Pendapatan usaha non Pertanian	23,36	24,07	23,46	15,78
4. Pendapatan bukan upah/gaji	6,93	9,92	9,08	10,29
a. Perkiraan sewa rumah	6,41	4,72	5,72	6,05
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	0,52	5,20	3,36	4,24
5. Pendapatan lain	13,43	8,43	7,11	14,01
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	594,9	2270,4	566,2	1821,9
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	607	752	592	643

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 26. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pinrang		Wajo	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	25,92	16,55	16,96	6,46
2. Pendapatan usaha Pertanian	26,57	10,50	33,80	13,27
a. Tanaman Pangan & non Pangan	18,41	10,50	26,03	13,27
b. Lainnya (peternakan, dsb)	8,16	0,00	7,77	0,00
3. Pendapatan usaha non Pertanian	47,16	41,63	40,31	80,62
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,25	6,35	8,41	5,30
a. Perkiraan sewa rumah	8,01	4,05	4,53	4,19
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,24	2,30	3,88	1,11
5. Pendapatan lain	-10,90	24,98	0,53	-5,65
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	986,6	3624,5	655,4	7164,2
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	1213	1284	918	3017

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 27. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pinrang		Wajo	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	11,93	19,32	15,46	13,02
2. Pendapatan usaha Pertanian	47,36	41,38	80,32	38,91
a. Tanaman Pangan & non Pangan	37,57	32,14	75,81	37,50
b. Lainnya (peternakan, dsb)	9,78	9,24	4,51	1,41
3. Pendapatan usaha non Pertanian	10,62	14,37	8,63	32,20
4. Pendapatan bukan upah/gaji	6,81	9,38	10,35	12,16
a. Perkiraan sewa rumah	4,90	3,82	7,18	7,96
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	1,92	5,55	3,17	4,20
5. Pendapatan lain	23,28	15,56	-14,76	3,71
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	808	2890	555	2510
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	1019	1100	784	1047

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 28. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2002

Sumber pendapatan	Malang		Kediri	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	51,11	45,05	52,12	52,09
2. Pendapatan usaha Pertanian	16,55	10,38	5,90	10,25
a. Tanaman Pangan & non Pangan	13,90	9,16	2,93	7,45
b. Lainnya (peternakan, dsb)	2,66	1,23	2,97	2,80
3. Pendapatan usaha non Pertanian	27,22	24,39	34,17	27,48
4. Pendapatan bukan upah/gaji	13,67	6,26	13,70	6,14
a. Perkiraan sewa rumah	8,89	5,02	9,58	4,01
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,78	1,24	4,12	2,13
5. Pendapatan lain	-8,55	13,92	-5,89	4,05
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	790	3313	1041	3245
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	812	1055	1053	1044

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 29. Perubahan Struktur Pendapatan Rumah Tangga Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2002

Sumber pendapatan	Malang		Kediri	
	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	33,76	36,10	34,98	37,01
2. Pendapatan usaha Pertanian	37,08	20,31	21,76	20,99
a. Tanaman Pangan & non Pangan	30,35	18,28	14,97	14,84
b. Lainnya (peternakan, dsb)	6,72	2,04	6,79	6,15
3. Pendapatan usaha non Pertanian	20,77	18,58	36,34	18,79
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,20	6,76	13,78	8,97
a. Perkiraan sewa rumah	5,71	4,77	6,48	4,83
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,50	1,99	7,30	4,14
5. Pendapatan lain	-1,80	18,26	-6,86	14,24
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	616	2708	703	2644
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	649	883	752	803

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 30. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah-tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Lombok	Pertanian	0,99	0,99	0,94	1,04	1,06	1,18
Barat	Industri	0,60	0,99	.	0,72	.	0,19
	Perdagangan	1,67	0,65	1,31	0,70	0,20	0,75
	Jasa	1,01	0,95	0,30	0,82	0,94	0,72
	Lainnya	1,12	0,61	1,30	0,67	.	1,02
	TOTAL	1,02	0,83	0,92	0,75	0,75	0,85
Lombok	Pertanian	0,85	1,13	0,83	1,31	0,67	1,17
Timur	Industri	-0,22	0,89	0,86	0,77	0,87	1,11
	Perdagangan	0,77	0,83	0,55	0,98	0,73	1,07
	Jasa	0,55	0,95	0,55	0,83	0,63	1,02
	Lainnya	0,99	0,69	0,65	1,15	.	1,03
	TOTAL	0,71	1,03	0,61	1,13	0,69	1,08

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 31. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah-tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Nusa Tenggara Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Lombok	Pertanian	1,11	0,81	0,90	1,09	0,89	1,15
Barat	Industri	0,39	0,64	0,84	0,68	1,08	0,89
	Perdagangan	1,03	1,03	0,95	0,43	1,05	0,54
	Jasa	1,02	0,98	0,80	1,00	0,99	0,52
	Lainnya	0,73	0,47	1,02	0,67	1,18	0,93
	TOTAL	0,99	0,78	0,89	0,92	0,98	0,93
Lombok	Pertanian	1,07	1,09	0,94	1,09	0,89	1,18
Timur	Industri	0,82	0,76	1,13	0,74	0,73	1,14
	Perdagangan	0,43	0,54	0,87	0,66	0,43	0,64
	jasa	0,81	1,35	0,71	1,03	0,74	0,65
	Lainnya	0,69	0,51	1,19	0,51	1,12	0,86
	TOTAL	0,95	0,97	0,92	0,98	0,77	0,96

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 32. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah-tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pinrang	Pertanian	0,68	0,94	.	1,13	.	1,47
	Industri	.	0,58	.	0,43	.	.
	Perdagangan	0,81	0,89	0,76	0,95	0,65	1,03
	jasa	0,40	1,01	0,54	.	0,67	1,86
	Lainnya	.	0,64	.	.	0,37	0,71
	TOTAL	0,69	0,79	0,63	1,03	0,57	1,12
Wajo	Pertanian	1,03	0,51	0,79	.	.	.
	Industri	0,78	.	0,48	0,79	0,92	.
	Perdagangan	.	0,49	0,34	0,13	0,73	0,38
	jasa	.	.	1,15	1,09	0,77	.
	Lainnya	.	0,43	.	0,06	0,60	1,40
	TOTAL	0,97	0,47	0,67	0,26	0,75	0,53

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 33. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah-tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Sulawesi Selatan Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pinrang	Pertanian	1,03	0,48	0,96	1,01	1,15	0,90
	Industri	1,26	0,29	.	0,91	0,90	0,59
	Perdagangan	.	0,43	1,23	0,89	.	1,15
	jasa	.	.	1,08	.	1,15	1,24
	Lainnya	1,16	0,19	.	0,79	.	0,67
	TOTAL	1,05	0,45	1,01	0,99	1,13	0,88
Wajo	Pertanian	0,29	0,87	0,31	0,90	0,22	0,71
	Industri	.	0,97	0,79	.	.	0,45
	Perdagangan	.	0,70	0,29	0,48	0,24	0,37
	jasa	1,02	0,51	-0,12	.	-0,48	.
	Lainnya	.	0,48	.	1,08	.	0,66
	TOTAL	0,31	0,83	0,27	0,84	0,18	0,55

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 34. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah-tangga di Daerah Kota di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Malang	Pertanian	0,90	0,83	0,31	1,05	0,31	1,37
	Industri	0,42	0,62	0,69	0,98	0,54	0,99
	Perdagangan	0,47	0,61	0,47	0,57	0,09	0,96
	jasa	0,47	0,97	0,36	0,91	0,41	0,93
	Lainnya	0,57	0,71	0,31	0,82	0,09	0,78
	TOTAL	0,61	0,73	0,42	0,89	0,34	0,98
Kediri	Pertanian	1,01	1,11	1,08	1,12	1,24	0,90
	Industri	0,79	0,62	0,98	0,83	0,66	0,83
	Perdagangan	0,65	0,55	0,36	0,90	0,80	0,79
	jasa	0,75	0,96	0,53	0,87	0,57	1,15
	Lainnya	0,99	0,76	0,61	0,94	.	0,96
	TOTAL	0,76	0,80	0,51	0,91	0,69	0,91

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 35. Perubahan Indeks Keragaman Pendapatan Rumah-tangga di Daerah Desa di Kabupaten Contoh di Jawa Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama, 1996-2002

Wilayah	Sumber pendapatan	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Malang	Pertanian	0,71	0,98	0,65	1,14	0,84	0,96
	Industri	0,72	0,91	0,28	0,87	1,01	0,95
	Perdagangan	0,53	0,64	0,57	0,57	0,84	0,89
	Jasa	0,51	0,82	0,49	0,92	0,74	0,71
	Lainnya	0,36	0,94	0,89	0,72	0,80	1,05
	TOTAL	0,66	0,93	0,60	0,95	0,82	0,97
Kediri	Pertanian	0,97	1,13	1,16	1,23	1,12	1,09
	Industri	0,82	0,94	0,66	0,84	0,82	1,22
	Perdagangan	0,66	0,90	0,80	0,79	0,46	0,94
	jasa	1,05	0,67	0,52	0,65	0,50	0,88
	Lainnya	1,11	0,87	0,67	0,84	1,26	1,09
	TOTAL	0,92	1,03	0,85	1,08	0,67	1,03

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 36. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	70,28	69,04	69,87	70,61	82,78	25,56
	Non pangan	29,72	30,96	30,13	29,39	17,22	74,44
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	64,93	65,47	.	71,74	.	73,73
	Non pangan	35,07	34,53	.	28,26	.	26,27
	Total	100,00	100,00	.	100,00	.	100,00
Perdagangan	Pangan	78,59	74,55	71,59	67,76	61,25	61,12
	Non pangan	21,41	25,45	28,41	32,24	38,75	38,88
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	71,08	63,74	57,63	61,98	48,20	28,96
	Non pangan	28,92	36,26	42,37	38,02	51,80	71,05
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	73,38	73,38	63,88	65,01	.	61,98
	Non pangan	26,62	26,62	36,12	34,99	.	38,02
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	.	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 37. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Lombok Barat Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	71,59	74,76	55,87	75,71	53,53	72,40
	Non pangan	28,41	25,24	44,13	24,29	46,47	27,61
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	69,61	72,01	70,25	74,55	45,49	77,43
	Non pangan	30,39	28,00	29,75	25,45	54,51	22,57
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	66,55	77,47	63,42	73,50	47,07	62,86
	Non pangan	33,45	22,53	36,58	26,50	52,93	37,15
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	69,48	76,06	66,93	69,18	58,34	54,83
	Non pangan	30,52	23,95	33,07	30,82	41,66	45,17
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	75,63	77,84	67,09	70,97	44,44	61,34
	Non pangan	24,38	22,16	32,91	29,03	55,56	38,66
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 38. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	68,36	68,80	65,76	69,43	60,01	46,92
	Non pangan	31,64	31,20	34,24	30,57	39,99	53,09
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	42,49	64,67	76,29	66,01	63,38	52,54
	Non pangan	57,51	35,33	23,71	33,99	36,62	47,46
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	63,01	68,25	64,98	71,79	51,46	51,50
	Non pangan	36,99	31,75	35,02	28,21	48,54	48,50
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	63,11	86,11	50,40	68,43	55,36	59,82
	Non pangan	36,89	13,90	49,60	31,57	44,64	40,18
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	65,75	78,55	49,33	66,79	.	61,47
	Non pangan	34,25	21,45	50,67	33,21	.	38,53
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	.	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 39. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Lombok Timur Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	75,33	73,53	70,56	75,87	54,07	75,92
	Non pangan	24,67	26,47	29,44	24,13	45,93	24,08
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	75,34	74,97	68,28	73,03	73,56	73,43
	Non pangan	24,66	25,03	31,72	26,97	26,44	26,57
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	69,22	79,34	75,99	76,04	65,07	56,75
	Non pangan	30,78	20,66	24,01	23,96	34,93	43,25
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	73,81	73,64	66,39	61,66	55,23	67,55
	Non pangan	26,19	26,36	33,61	38,34	44,77	32,45
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	79,24	76,00	64,79	76,87	35,02	68,77
	Non pangan	20,76	24,00	35,21	23,13	64,98	31,23
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 40. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	54,64	77,50	.	70,56	.	65,29
	Non pangan	45,36	22,50	.	29,44	.	34,71
	Total	100,00	100,00	.	100,00	.	100,00
Industri	Pangan	.	72,82	.	80,35	.	.
	Non pangan	.	27,18	.	19,65	.	.
	Total	.	100,00	.	100,00	.	.
Perdagangan	Pangan	67,87	68,47	63,82	66,62	48,41	19,96
	Non pangan	32,13	31,53	36,18	33,38	51,59	80,04
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	65,44	65,76	55,97	.	36,24	38,77
	Non pangan	34,56	34,24	44,03	.	63,76	61,23
	Total	100,00	100,00	100,00	.	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	.	64,40	.	.	43,36	58,85
	Non pangan	.	35,60	.	.	56,64	41,15
	Total	.	100,00	.	.	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 41. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Pinrang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	61,73	71,34	58,98	63,19	33,57	47,55
	Non pangan	38,27	28,66	41,02	36,81	66,43	52,45
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	66,03	65,25	.	71,68	47,72	16,88
	Non pangan	33,97	34,75	.	28,32	52,28	83,12
	Total	100,00	100,00	.	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	.	54,02	68,75	66,04	.	54,33
	Non pangan	.	45,98	31,25	33,96	.	45,67
	Total	.	100,00	100,00	100,00	.	100,00
Jasa	Pangan	.	.	72,68	.	36,06	71,04
	Non pangan	.	.	27,32	.	63,94	28,96
	Total	.	.	100,00	.	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	61,81	72,15	.	32,63	.	50,23
	Non pangan	38,19	27,85	.	67,37	.	49,77
	Total	100,00	100,00	.	100,00	.	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 42. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	77,04	70,45	76,55	.	.	.
	Non pangan	22,96	29,55	23,45	.	.	.
	Total	100,00	100,00	100,00	.	.	.
Industri	Pangan	82,02	.	73,89	60,90	71,06	.
	Non pangan	17,98	.	26,11	39,11	28,94	.
	Total	100,00	.	100,00	100,00	100,00	.
Perdagangan	Pangan	.	64,14	70,10	59,68	70,53	46,90
	Non pangan	.	35,86	29,90	40,32	29,47	53,10
	Total	.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	.	.	85,70	69,42	61,29	.
	Non pangan	.	.	14,30	30,58	38,71	.
	Total	.	.	100,00	100,00	100,00	.
Lainnya	Pangan	.	66,33	.	63,37	73,57	25,87
	Non pangan	.	33,67	.	36,63	26,43	74,13
	Total	.	100,00	.	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 43. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Wajo Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	69,66	68,65	68,26	67,18	74,55	63,78
	Non pangan	30,34	31,35	31,74	32,82	25,45	36,22
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	.	63,26	48,25	.	.	46,94
	Non pangan	.	36,74	51,75	.	.	53,06
	Total	.	100,00	100,00	.	.	100,00
Perdagangan	Pangan	.	62,23	67,29	61,11	82,74	58,30
	Non pangan	.	37,77	32,71	38,89	17,26	41,71
	Total	.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	48,43	68,68	38,32	.	45,53	.
	Non pangan	51,57	31,33	61,68	.	54,47	.
	Total	100,00	100,00	100,00	.	100,00	.
Lainnya	Pangan	.	64,87	.	60,87	.	64,99
	Non pangan	.	35,13	.	39,13	.	35,01
	Total	.	100,00	.	100,00	.	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 44. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	60,97	63,75	53,79	56,16	31,79	29,24
	Non pangan	39,03	36,25	46,21	43,84	68,21	70,76
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	56,78	51,48	50,53	58,30	33,10	58,66
	Non pangan	43,22	48,52	49,47	41,71	66,90	41,34
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	57,94	55,61	44,73	57,55	33,85	51,87
	Non pangan	42,06	44,39	55,27	42,45	66,15	48,13
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	61,20	67,99	43,80	50,76	39,63	50,71
	Non pangan	38,80	32,01	56,20	49,25	60,37	49,29
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	61,41	65,20	53,17	60,52	44,65	53,61
	Non pangan	38,59	34,80	46,83	39,48	55,35	46,39
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 45. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Malang Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	61,96	65,63	60,43	64,09	31,42	47,80
	Non pangan	38,04	34,37	39,57	35,91	68,58	52,20
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	47,20	60,94	57,62	62,90	47,93	38,16
	Non pangan	52,80	39,06	42,38	37,10	52,07	61,84
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	67,49	67,10	59,06	64,28	19,35	41,18
	Non pangan	32,51	32,90	40,94	35,72	80,65	58,83
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	64,26	68,72	57,66	69,37	41,30	51,39
	Non pangan	35,74	31,28	42,34	30,63	58,70	48,61
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	66,99	70,46	42,98	65,34	47,88	39,42
	Non pangan	33,01	29,54	57,02	34,66	52,12	60,58
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 46. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Kota di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	64,74	64,53	39,59	65,53	59,15	33,37
	Non pangan	35,26	35,47	60,41	34,48	40,85	66,63
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	58,38	60,06	54,50	51,71	45,01	38,89
	Non pangan	41,62	39,94	45,50	48,29	54,99	61,11
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	53,49	64,53	49,07	53,07	22,51	45,53
	Non pangan	46,51	35,48	50,93	46,93	77,49	54,47
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	52,29	64,78	40,92	53,49	36,30	39,37
	Non pangan	47,71	35,22	59,08	46,51	63,70	60,63
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	73,53	65,81	53,70	59,57	.	37,34
	Non pangan	26,47	34,19	46,30	40,43	.	62,66
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	.	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 47. Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga di Daerah Desa di Kabupaten Kediri Menurut Kelas Pendapatan dan Pekerjaan Utama KK, 1996-2002

Pekerjaan utama KK	Jenis pengeluaran	Rendah		Sedang		Tinggi	
		1996	2002	1996	2002	1996	2002
Pertanian	Pangan	61,33	62,86	60,98	61,00	32,60	42,48
	Non pangan	38,67	37,14	39,02	39,00	67,40	57,52
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Industri	Pangan	61,23	62,65	55,24	58,65	16,36	47,79
	Non pangan	38,77	37,35	44,76	41,35	83,64	52,21
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Perdagangan	Pangan	57,95	67,22	51,04	66,23	33,78	43,27
	Non pangan	42,05	32,78	48,96	33,77	66,22	56,73
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jasa	Pangan	68,05	68,92	42,14	66,26	53,29	58,57
	Non pangan	31,95	31,08	57,86	33,74	46,71	41,43
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lainnya	Pangan	66,18	77,02	63,73	64,49	83,88	46,70
	Non pangan	33,83	22,99	36,27	35,51	16,12	53,30
	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel Lampiran 6. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Contoh, 2002

Sumber pendapatan	Jatim		NTB		Sulsel		Indonesia	
	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota	Desa
1. Upah/gaji	49,14	32,10	30,88	30,70	44,53	19,16	59,47	30,96
2. Pendapatan usaha pertanian	6,40	28,80	10,60	27,24	5,79	46,01	2,68	32,95
a. Tanaman pangan	3,44	18,52	6,98	20,74	2,84	21,32	1,39	16,52
b. Tanaman non pangan	0,89	4,64	1,65	2,26	2,20	18,70	0,46	11,19
c. Peternakan	0,70	3,96	1,06	3,14	0,31	3,08	0,31	2,73
d. Perikanan	1,36	1,69	0,91	1,10	0,44	2,92	0,52	2,51
3. Pendapatan non pertanian	25,17	20,15	34,39	18,34	31,74	15,50	25,09	21,18
a. Kehutanan & perburuan	0,04	0,45	0,03	0,91	0,02	0,15	0,03	1,18
b. Industri Kerajinan	2,76	2,69	4,26	2,64	0,96	2,09	2,13	2,80
c. Perdagangan	14,42	11,27	20,94	8,79	22,11	7,85	14,31	10,28
c. Pengangkutan	2,69	1,86	3,83	2,47	3,80	3,33	2,57	2,79
d. Jasa	4,52	2,82	4,18	2,52	3,82	1,56	4,46	2,52
e. Lainnya	0,75	1,06	1,16	1,00	1,03	0,52	1,59	1,61
4. Pendptn Kepemilikan dr bkn usaha	7,92	8,42	9,87	10,26	9,06	9,53	9,15	8,37
5. Penambahan brng modal	0,76	2,03	1,48	1,04	0,30	0,23	0,50	0,82
6. Pendapatan lain	10,61	8,50	12,78	12,43	8,58	9,58	3,10	5,73
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah.

Tabel lampiran 7. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,34	42,47	65,51	52,83	28,59	36,92	65,76	82,07	67,97	59,42
2. Pendapatan usaha pertanian	44,13	20,60	1,47	1,88	2,58	1,71	1,83	0,72	1,84	2,16
a. Tanaman Pangan & non Pangan	26,07	13,97	1,12	1,39	1,34	1,17	1,24	0,47	1,35	1,41
b. Lainnya (peternakan, dsb)	18,06	6,63	0,35	0,50	1,24	0,54	0,59	0,25	0,49	0,74
3. Pendapatan usaha bukan pertanian	10,14	17,86	20,32	19,99	61,70	51,70	18,71	11,26	21,72	29,32
4. Pendapatan bukan upah/gaji	12,75	9,25	13,10	11,89	15,12	10,80	14,93	5,90	13,50	8,81
a. Perkiraan sewa rumah	9,02	6,71	11,03	10,98	12,92	10,02	11,85	5,62	11,11	8,18
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,72	2,55	2,07	0,92	2,21	0,78	3,08	0,27	2,39	0,63
5. Pendapatan lain	2,52	9,83	0,63	13,40	-6,35	-1,13	-1,47	0,06	-4,26	0,30
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	860	3499	1400	5692	1473	5141	1560	11649	1355	4534
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	895	1147	1368	1481	1441	1512	1559	3606	1310	1402

Tabel lampiran 8. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Indonesia, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	14,08	26,23	43,90	33,76	14,18	19,72	63,88	53,52	57,58	50,42
2. Pendapatan usaha pertanian	63,70	45,88	12,64	20,38	15,32	17,03	10,13	16,50	11,81	16,72
a. Tanaman Pangan & non Pangan	51,02	37,31	9,32	16,29	11,93	13,83	7,57	13,39	9,38	13,58
b. Lainnya (peternakan, dsb)	12,68	8,57	3,32	4,10	3,39	3,20	2,56	3,12	2,43	3,14
3. Pendapatan usaha non pertanian	8,20	13,29	32,09	20,20	66,06	52,04	23,31	19,27	21,36	25,15
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,40	8,60	10,47	8,87	9,84	7,50	9,49	6,97	8,98	6,66
a. Perkiraan sewa rumah	6,42	4,97	7,21	5,22	7,18	4,78	6,34	4,51	6,57	4,33
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,98	3,63	3,26	3,65	2,67	2,71	3,15	2,46	2,41	2,33
5. Pendapatan lain	3,52	6,00	0,64	16,79	-4,68	3,72	-6,90	3,74	0,09	1,05
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	660	2326	828	3085	921	2936	1048	3262	788	2876
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	713	808	869	1012	983	992	1133	1084	836	976

Tabel lampiran 9. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Jawa Timur, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	30,24	29,24	68,50	47,66	29,91	29,88	69,27	70,76	61,41	70,75
2. Pendapatan usaha pertanian	49,86	33,92	1,74	1,59	2,72	3,13	2,30	1,96	2,72	1,93
a. Tanaman Pangan & non Pangan	36,96	24,51	1,51	0,93	2,05	1,63	1,73	0,83	1,87	1,22
b. Lainnya (peternakan, dsb)	12,91	9,40	0,24	0,67	0,67	1,50	0,57	1,13	0,85	0,71
3. Pendapatan usaha non pertanian	11,80	19,18	21,58	10,20	56,94	57,24	19,94	20,87	15,96	20,91
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,51	7,44	10,13	8,14	12,42	7,92	10,87	9,03	11,08	6,66
a. Perkiraan sewa rumah	6,97	4,48	8,97	7,07	10,68	7,00	8,17	8,14	8,93	6,07
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,54	2,96	1,16	1,07	1,74	0,92	2,70	0,89	2,15	0,59
5. Pendapatan lain	-3,42	10,23	-1,95	32,42	-2,21	1,83	-2,38	-2,62	8,83	-0,25
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	700	2928	1078	4102	1074	3589	1089	4314	896	3657
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	748	991	1054	1100	1044	1085	1084	1288	913	1121

Tabel lampiran 10. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Jawa Timur, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	21,77	25,30	47,35	36,08	9,60	13,20	66,59	62,84	57,20	59,05
2. Pendapatan usaha pertanian	58,19	49,15	11,36	6,69	15,22	9,19	11,76	9,29	9,32	6,56
a. Tanaman Pangan & non Pangan	46,79	38,69	7,57	5,41	11,58	8,10	9,25	7,88	7,81	4,82
b. Lainnya (peternakan, dsb)	11,40	10,46	3,79	1,28	3,64	1,09	2,51	1,41	1,51	1,74
3. Pendapatan usaha non pertanian	8,55	7,70	32,60	20,66	69,75	64,20	25,23	22,93	23,64	20,49
4. Pendapatan bukan upah/gaji	11,07	9,64	8,65	8,73	9,26	6,43	9,79	6,62	8,89	4,51
a. Perkiraan sewa rumah	5,83	4,77	5,62	4,82	5,84	3,91	5,22	3,72	5,22	3,13
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,24	4,88	3,03	3,91	3,42	2,52	4,57	2,90	3,68	1,38
5. Pendapatan lain	0,30	8,21	0,05	27,83	-3,83	6,97	-13,37	-1,68	0,94	9,40
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	565	1954	723	2512	753	2912	829	3240	635	3104
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	616	648	762	796	819	942	892	1048	689	1017

Tabel lampiran 11. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di NTB, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	17,08	23,55	9,85	14,87	16,14	14,50	68,12	56,12	54,69	50,89
2. Pendapatan usaha pertanian	51,56	40,09	1,01	1,48	3,99	2,99	4,24	2,95	4,75	2,73
a. Tanaman Pangan & non Pangan	42,88	34,10	0,73	0,93	3,31	1,91	2,99	1,56	3,08	2,10
b. Lainnya (peternakan, dsb)	8,68	5,99	0,28	0,55	0,68	1,08	1,25	1,39	1,67	0,63
3. Pendapatan usaha non pertanian	7,91	9,55	54,47	43,64	66,25	65,95	13,78	15,80	20,60	35,77
4. Pendapatan bukan upah/gaji	10,67	13,91	8,72	8,89	9,74	8,15	13,13	9,63	10,30	7,60
a. Perkiraan sewa rumah	6,24	7,54	5,36	7,29	7,68	6,47	9,03	7,54	7,77	5,99
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	4,44	6,36	3,37	1,60	2,06	1,68	4,10	2,09	2,54	1,61
5. Pendapatan lain	12,78	12,91	25,95	31,12	3,89	8,42	0,73	15,50	9,65	3,01
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	641	2191	1033	3345	846	3121	1141	3823	715	2841
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	665	778	1090	1080	878	1051	1166	1257	728	962

Tabel Lampiran 12. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di NTB, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	9,89	27,20	21,09	21,15	13,43	10,29	55,50	71,49	46,47	53,63
2. Pendapatan usaha pertanian	66,14	42,32	8,41	5,43	16,34	6,93	12,24	5,20	13,39	8,16
a. Tanaman Pangan & non Pangan	55,83	34,27	5,39	4,86	11,51	5,40	9,97	5,08	10,99	7,58
b. Lainnya (peternakan, dsb)	10,31	8,05	3,01	0,57	4,84	1,54	2,28	0,12	2,40	0,58
3. Pendapatan usaha non pertanian	8,85	6,14	51,68	18,98	59,13	70,00	23,75	12,21	23,26	29,49
4. Pendapatan bukan upah/gaji	9,28	11,79	7,64	10,10	9,20	5,95	7,98	6,91	7,72	7,55
a. Perkiraan sewa rumah	6,14	5,49	6,25	6,35	7,06	4,01	5,29	4,51	6,44	3,50
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	3,13	6,30	1,39	3,75	2,14	1,94	2,69	2,40	1,28	4,05
5. Pendapatan lain	5,85	12,55	11,19	44,34	1,89	6,83	0,53	4,19	9,16	1,17
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	555	1877	528	2237	607	2492	755	3135	519	3020
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	613	686	556	788	659	859	810	1086	551	1046

Tabel Lampiran 13. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Kota di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	18,33	8,05	52,49	23,49	15,51	32,24	70,11	87,83	61,42	70,06
2. Pendapatan usaha pertanian	52,83	62,04	4,48	0,51	2,79	0,74	3,04	1,19	5,94	2,01
a. Tanaman Pangan & non Pangan	33,46	55,20	2,45	0,45	2,05	0,62	2,22	0,93	4,65	1,35
b. Lainnya (peternakan, dsb)	19,37	6,84	2,03	0,07	0,74	0,12	0,82	0,26	1,29	0,66
3. Pendapatan usaha non pertanian	11,15	14,25	35,88	11,54	69,28	61,22	18,59	11,54	33,59	25,69
4. Pendapatan bukan upah/gaji	13,44	9,87	12,88	8,64	13,39	10,07	12,37	8,87	16,36	7,16
a. Perkiraan sewa rumah	8,31	6,76	8,87	7,23	11,41	5,71	8,03	7,67	10,82	6,05
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	5,13	3,12	4,02	1,42	1,98	4,36	4,35	1,20	5,54	1,11
5. Pendapatan lain	4,25	5,78	-5,73	55,82	-1,67	-4,26	-4,11	-9,44	-17,31	-4,92
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	684	2415	994	3952	989	4871	1242	4417	863	3572
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	907	996	1227	1379	1253	1772	1542	1555	1025	1290

Tabel Lampiran 14. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Menurut Sumber Matapencaharian Utama KK di Daerah Desa di Sulawesi Selatan, 1996-2002

Sumber pendapatan	Pertanian		Industri		Perdagangan		Jasa		Lainnya	
	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002	1996	2002
1. Upah/gaji	5,87	7,35	32,11	17,47	8,30	9,36	80,91	64,67	66,27	62,58
2. Pendapatan usaha Pertanian	65,97	66,97	13,50	13,87	16,80	10,71	11,16	7,44	13,97	11,40
a. Tanaman Pangan & non Pangan	52,11	58,03	11,09	12,77	13,84	9,07	7,86	6,25	11,47	9,77
b. Lainnya (peternakan, dsb)	13,87	8,94	2,41	1,10	2,97	1,63	3,30	1,18	2,50	1,63
3. Pendapatan usaha non Pertanian	8,61	7,76	29,55	19,83	69,19	58,48	16,03	4,95	25,18	23,14
4. Pendapatan bukan upah/gaji	12,29	10,31	11,35	13,08	10,61	8,34	9,70	5,64	10,96	5,52
a. Perkiraan sewa rumah	5,84	6,12	6,17	6,39	6,54	4,85	6,12	3,11	9,38	3,46
b. Lainnya (pensiunan, bea siswa)	6,46	4,19	5,18	6,69	4,07	3,49	3,58	2,52	1,58	2,05
5. Pendapatan lain	7,26	7,61	13,50	35,75	-4,90	13,12	-17,80	17,31	-16,38	-2,63
Total (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rataan pendapatan (Rp000/kap/th)	566	1932	642	2676	755	3084	1100	3769	865	3182
Pendapatan setara beras (kg/kap/th)	763	796	859	1083	1034	1269	1478	1562	1105	1312

<http://pse.litbang.pertanian.go.id/>